

Buku ini menjadi penting untuk dibaca mahasiswa dan dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan bagi para pihak dalam pembangunan kehutanan, khususnya untuk pengembangan Hutan Rakyat karena hasil temuan penelitian ini menggambarkan kunci keberhasilan program hutan rakyat yang dilaksanakan di Desa Malilingin (masyarakat peladang) dan Desa Pualam Sari (masyarakat transmigran). Penelitian ini menghasilkan proposisi adaptasi budaya masyarakat terhadap program hutan rakyat, yaitu: 1) Latar belakang budaya masyarakat merupakan salah satu faktor penting bagi terjadinya proses adaptasi budaya; 2) Adaptasi budaya masyarakat terhadap program hutan rakyat dipengaruhi oleh adanya *early adopter*; kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, dan nilai-nilai lokal yang dipatuhi; 3) Kemampuan aktor dalam mengolah *Mind* dan *Q* (qalbu) untuk menjadi sebuah tindakan bermakna yang dielaborasi oleh *Self* dan *Society*, telah mampu menerima dan menjalankan program hutan rakyat hingga mencapai keberhasilan dan berkesinambungan.



Mahrus Aryadi dilahirkan dan menempuh pendidikan dasar hingga menengah atas di Banjarmasin. Pendidikan sarjana ditempuh di Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat. Pendidikan magister ditempuh di Faculty of Forestry Science Department of Rural Development Universitas George August Goettingen, Jerman. Sedangkan program Doktorat diselesaikan di Universitas Brawijaya Malang, dengan minat Sosiologi Perdesaan.

Sebelum menjadi staf pengajar di Fakultas Kehutanan UNLAM, pernah menjabat sebagai manajer pada HPH PT. Ariabima Sari Pangkalan Bun Kalimantan Tengah. Selain sebagai staf pengajar, juga berkiprah sebagai konsultan dan tenaga ahli pada SCKPFP (South and Central Kalimantan Production Forest Project), JIFPRO (Japan International Forestry Promotion and Cooperation Centre), Bappenas, dan Transparency International Indonesia (TI-I). Sering pula menulis opini pada Harian Banjarmasin Post. Saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Kehutanan Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat dan board member untuk INAFE (Indonesian Network for Agroforestry Education).

ISBN 978-979-796-222-7



9 789797 962227



Kritik dan saran mengenai buku ini via email: ummpress@gmail.com

Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc.

HUTAN RAKYAT

Fenomenologi Adaptasi
Budaya Masyarakat

Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc.

HUTAN RAKYAT

Fenomenologi Adaptasi
Budaya Masyarakat

KATA PENGANTAR

H. Zulkifli Hasan SE. MM

MENTERI KEHUTANAN RI

Prof. Dr. Ir. H. Sanggar Kanto, M.S.

Guru Besar Sosiologi Pedesaan Universitas Brawijaya Malang



Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc.

HUTAN RAKYAT

Fenomenologi Adaptasi
Budaya Masyarakat

KATA PENGANTAR

H. Zulkifli Hasan SE, MM
MENTERI KEHUTANAN RI

PENGANTAR

Prof. Dr. Ir. H. Sanggar Kanto, M.S.
Guru Besar Sosiologi Pedesaan Universitas Brastaya Malang



HUTAN RAKYAT: Fenomenologi Adaptasi Budaya Masyarakat

xiv, 226 hlm, Tab., ilus., 15.5 cm

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Hak Cipta © Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M. Sc., 2012
Hak Terbit pada UMM Press

UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144
Telpon (0341) 464318 Psw. 140, Fax (0341) 460435
(0341) 7059981
E-mail: ummpress@gmail.com
<http://ummpress.umm.ac.id>

Cetakan Pertama, Januari 2012

ISBN : 978-979-796-222-7

Lay-out : Ahmad Andi, Roni A, M. AUFAR
Cover Designer : Ridlo Setyono
Editor : Joko Triwanto

Hak Cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit. Pengutipan harap menyebutkan sumbernya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72: Undang-undang No. 19 Tahun 2002, tentang Hak Cipta:

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PRAKATA

Puja dan puji sebagai rasa syukur kehadirat Allah SWT penulis ungkapkan atas selesainya penulisan buku ini yang disusun berdasarkan hasil penelitian disertasi. Penulis meyakini bahwa hanya karena rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-NYA, serta syafaat dari Baginda Rasulullah buku ini dapat penulis selesaikan. Buku dengan judul "Hutan Rakyat: Fenomenologi Adaptasi Budaya Masyarakat" ini dibuat sebagai bagian dari pelaksanaan Tri dharma Perguruan Tinggi, yakni pengembangan ilmu pengetahuan Sosiologi khususnya untuk mata kuliah Sosiologi Kehutanan, dan bagian dari materi untuk mata kuliah Hutan Kemasyarakatan.

Buku ini menjadi penting untuk dibaca mahasiswa dan dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan bagi para-pihak dalam pembangunan kehutanan, khususnya untuk pengembangan Hutan Rakyat karena hasil temuan penelitian ini menggambarkan kunci keberhasilan program hutan rakyat yang dilaksanakan di Desa Malilingin (masyarakat peladang) dan Desa Pualam Sari (masyarakat transmigran). Penelitian ini menghasilkan proposisi adaptasi budaya masyarakat terhadap program hutan rakyat, yaitu: 1) Latar belakang budaya masyarakat merupakan salah satu faktor penting bagi terjadinya proses adaptasi budaya; 2) Adaptasi budaya masyarakat terhadap program hutan rakyat dipengaruhi oleh adanya *early adopter*, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, dan nilai-nilai lokal yang dipatuhi; 3) Kemampuan aktor dalam mengolah *Mind* dan *Q* (qalbu) untuk menjadi sebuah tindakan bermakna yang dijelmakan oleh *Self* dan *Society*, telah mampu menerima dan menjalankan program hutan rakyat hingga mencapai keberhasilan dan berkesinambungan.

Buku ini terdiri dari atas 11 bab, dimulai dengan bab pendahuluan sebagai pengantar buku, dilanjutkan dengan pemaparan kebijakan hutan rakyat, tinjauan adaptasi budaya dan perubahan sosial, kerangka konseptual dan metode fenomenologi. Hasil penelitian dalam bentuk buku ini dilanjutkan dengan hasil temuan yang menggambarkan karakteristik masyarakat peladang dan transmigran, Malilingin potret desa pinggir hutan, Pualam Sari potret desa transmigran, adaptasi budaya masyarakat pedesaan hutan terhadap program hutan rakyat, peran dan mekanisme lembaga pendukung program hutan rakyat. Buku ini ditutup dengan bab yang merupakan hasil analisis, yaitu penafsiran dan refleksi teoritis, dan implikasi teoritis dan praktis.

Banyak pihak yang telah memberi dukungan, sumbangan pikiran dan dana dalam penyusunan buku ini, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: Prof. Dr. Ir. Sanggar Kanto, M.S.;

Prof. Dr. Ir. Kliwon Hidayat, M.S. dan Prof. Dr. Ir. Sugiyanto, M.S. selaku Promotor dan Ko Promotor; Prof. Dr. Ir. Eliezer Ginting, M.S. (Alm) atas semua bimbingannya. Prof. Dr. Ir. Keppi Sukesni, M.S, Prof. Dr. I.N. Nurjaya, SH, MH, Prof. Dr. M.Irfan Islamy, MPA, Prof. Dr. H. Wahyu, M.S selaku Tim Dosen Penguji.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada: Prof. Dr. Ir. H. M. Ruslan, M.S. (Rektor Universitas Lambung Mangkurat), Ir. Sunardi, M.S. (Dekan Fakultas Kehutanan UNLAM). Semua informan kunci, subjek, informan pendukung dan informan ahli serta jajaran aparat pemerintahan Kecamatan dan Desa yang telah memberi ijin untuk melaksanakan penelitian di Desa Malilingin dan Desa Pualam Sari, atas informasi dan fasilitas yang diperlukan selama proses penelitian dilakukan.

Sahabatku, Prof. Dr. L. Karyadi, Prof. Dr. Syarif Imam Hidayat, Dr. In'am Sulaiman (Alm), Dr. Istiadah, Dr. Edi Susilo, I Wayan Suyadnya, S.Sos, M.Sos, dan Laila Azkia, S.Sos, atas diskusi dan dukungan literaturnya. Mahasiswa dan Alumni S2 PS Ilmu Kehutanan UNLAM serta Mr. Shin Myung Seob (PT. SK Networks Inni Joa Plantation) atas kontribusi dananya.

Teristimewa terima kasih juga disampaikan kepada Ibunda tercinta Hj. Mastikah, istri terkasih Ir. Hj. Fatimah Ahmad, M.Si., dan anak-anakku tersayang, Nugrah, Ismi, Kahfi, Syahida, dan belahan jiwaku yang setia menemani M. Ramadhani Arafat (Adib), serta adik/ adik ipar dan ponakan-ponakanku yang selalu memberi do'a dan semangat kepada penulis.

Khususnya kepada Yang Mulia Ayahanda Guru Mursyid *As-syech Al Haaj Amiruddin Kadirun Yahya bin M. Khoir Hasjim Al Kholidy An Naqsyabandi*, atas segala tuntunan dan pencerahan qalbu.

Kepada yang saya banggakan Bapak Zulkifli Hasan (Menteri Kehutanan RI), dan Prof. Dr. Ir. H. Sanggar Kanto, M.S. (Guru Besar Sosiologi Pedesaan UB Malang), yang telah berkenan memberi kata pengantar terhadap terbitnya buku ini dihaturkan terima kasih yang mendalam.

Semoga buku ini dapat memberikan kebaikan kepada kita semua dalam membangun hutan dan kehutanan di Indonesia tercinta menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari. Amin.

Medio Januari 2012

Penulis



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR MENTERI KEHUTANAN RI

Sebagaimana kita ketahui, membangun Hutan Rakyat (HR) atau hutan milik/ hutan hak tentulah tidak mudah karena sebagian besar rakyat menggunakan lahan untuk tujuan pemenuhan kebutuhan hidup terutama pangan atau budidaya tanaman hortikultura yang memang sudah ada pasarnya baik di pedesaan/kelurahan, kecamatan, ibukota kabupaten/ perkotaan.

Karena itu berbagai pemikiran, gagasan, data, dan informasi, serta pengalaman para pihak mengenai tumbuh kembangnya hutan rakyat, melalui terbitnya buku "Hutan Rakyat: Fenomenologi Adaptasi Budaya Masyarakat" yang ditulis oleh Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc., merupakan sumbangan pemikiran dan pengalaman yang sangat berharga untuk disebarluaskan bagi seluruh masyarakat industri. Buku yang disusun berdasarkan hasil Disertasi pada saat mengambil Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, merupakan kajian ilmiah yang telah teruji.

Buku ini berisi tentang perjalanan kebijakan program hutan rakyat, dari era orde lama, orde baru hingga era reformasi yang dikupas secara seksama. Mengupas kisah keberhasilan dari program hutan rakyat yang dilaksanakan di dua desa yang berbeda karakteristiknya, yaitu di Desa Malilingin (Peladang, masyarakat lokal) dan di Desa Pualam Sari (Transmigran, masyarakat pendatang), di Provinsi Kalimantan Selatan. Keberhasilan adaptasi budaya masyarakat terhadap program hutan rakyat yang digali melalui pendekatan fenomenologi menjadi sangat menarik ditengah keringnya kajian dengan pendekatan sosiologis dalam bidang kehutanan.

Bagian penutup dari buku ini merefleksikan dan mempertemukan antara kajian teoritis dengan implikasi praktis, sehingga memungkinkan bagi pegiat kehutanan dan pembangunan masyarakat desa serta pengambil kebijakan di daerah maupun di pusat mengadopsi

sebagai landasan berpikir dan bertindak untuk memperbesar tingkat keberhasilan program hutan rakyat di seluruh nusantara. Dengan demikian kedepan, kegiatan hutan rakyat menjadi sebuah "gerakan" yaitu Gerakan Hutan Rakyat yang membumi karena mensejahterakan, sehingga menjadi pilihan kebijakan strategis yang sangat brilian menuju masyarakat sejahtera dan hutan yang lestari. Dengan gerakan Hutan Rakyat, Insya Allah pemanfaatan kayu dari hutan alam terus menurun dan kita dapat mewariskan hutan-hutan alam yang masih baik kepada anak cucu kita, sekaligus sebagai tempat flora dan fauna berkembangbiak, selain untuk keindahan alam dan sumber-sumber genetik kayu tropis langka.

Selamat atas terbitnya buku "Hutan Rakyat: Fenomenologi Adaptasi Budaya Masyarakat". Semoga bermanfaat dan menambah khasanah kepustakaan di tanah air.

MENTERI KEHUTANAN RI



ZULKIFLI HASAN

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. Ir. H. Sanggar Kanto, M.S.

Buku yang disusun berbasis disertasi saudara Dr. Mahrus Aryadi ini merupakan salah satu tulisan yang menarik, baik dari pendekatan yang digunakan (fenomenologi) maupun dari refleksi teoritis yang ditemukannya. Terlebih lagi dibidang kehutanan yang seringkali dalam pengembangan masyarakat lebih menitik beratkan pada aspek teknis kehutanan, dan kurang mempertimbangkan aspek sosial budaya, sehingga banyak program yang ditawarkan kepada masyarakat tidak berhasil sesuai tujuan.

Pendekatan fenomenologi merupakan salah satu pendekatan dari paradigma definisi sosial dalam sosiologi yang menekankan kepada kebebasan aktor dalam berpikir dan bertindak tanpa memperlakukan norma dan aturan yang berlaku dalam kelompoknya. Pendekatan ini ternyata dapat menggali lebih dalam mengapa, kenapa dan bagaimana seseorang mau dan bertindak dalam suatu aktifitas, dalam hal ini terlibat aktif dalam program hutan rakyat. Penelitian fenomenologi memungkinkan peneliti untuk menganalisis kejadian sehari-hari yang dilakukan subjek, karena realitas sehari-hari itulah yang menjadi gambaran peneliti mengenai realitas subjek.

Kelebihan pendekatan fenomenologi lebih jelas terlihat manakala peneliti mampu membandingkan paradigma fakta sosial dengan definisi sosial. Dengan pisau analisis teori tindakan Weber (definisi sosial), terhadap makna tindakan masyarakat di Desa Malilingin (desa peladang) bahwa ternyata pendidikan itu menurut mereka sebenarnya hanya untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, jika pekerjaan sudah tersedia dan mencukupi di desa mereka, untuk apa menempuh pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Sehingga secara eksplisit didapatkan kesimpulan bahwa kecukupan dana tidak mempengaruhi masyarakat Desa Malilingin untuk menyekolahkan anak-anak mereka kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang berbanding terbalik dengan norma umum yang menyatakan tingkat pendidikan sangat dipengaruhi oleh kelas sosial.

Refleksi teoritis yang menarik yang dapat kita angkat dari buku ini yaitu telah memperkuat dan menambahkan pokok pikiran Mead dalam tulisannya tentang *Mind, Self and Society*. Hasil penelitian ini dapat dibuktikan keberadaan dari *Mind* (akal budi) yang menginterpretasikan program hutan rakyat dari pelaksana program,

Self (diri - tervisual dalam tubuh) yang mengikuti dengan aktif kegiatan yang dilaksanakan dalam program hutan rakyat, dan *Society* (masyarakat), yang tervisualisasikan dalam kelompok tani hutan rakyat. Hal ini telah terjadi pada tokoh masyarakat, anggota kelompok tani dan anggota masyarakat desa. Selain itu, ternyata terbukti keberadaan Q (qalbu) telah berperan dalam mempengaruhi tahapan tindakan, khususnya tahapan dorongan hati (*impuls*), sehingga unsur Q (qalbu) perlu ditambahkan untuk menyempurnakan pemikiran Mead tentang *Mind, Self and Society* dihubungkan dengan tahapan tindakan. Menurut pendapat saya, unsur Q (qalbu) yang ditawarkan oleh penulis untuk melengkapi pokok pikiran Mead di atas merupakan suatu temuan yang sangat fenomenal dan sesuatu yang baru, oleh sebab itu temuan ini perlu dipaparkan dalam khasanah temuan ilmiah yang lebih luas lagi agar bisa dikaji lebih mendalam.

Hasil disertasi yang dipaparkan dalam buku ini juga mampu menguraikan lebih dalam tentang teori tindakan Weber. Saya sependapat dengan uraian penulis tentang aktor sempurna yang menyatakan bahwa konsep tentang "aktor sempurna" berdasarkan pendekatan tindakan Weber. Jika aktor bertindak berdasarkan tindakan tradisional, tindakan afektif, dan atau tindakan berorientasi nilai, maka aktor tersebut berada dibawah pengaruh budaya. Namun jika aktor bertindak berdasarkan tindakan berorientasi tujuan (tindakan instrumental), maka aktor tersebut menjadi dirinya sendiri. Aktor menjadi diri sendiri yang sempurna jika memadukan tindakan berorientasi nilai dengan tindakan berorientasi tujuan.

Sebagai promotor utama ketika penulis menempuh program doktor di Universitas Brawijaya, saya sangat berharap buku berbasis disertasi ini dapat dimanfaatkan secara lebih luas, bukan saja untuk pengembangan pengetahuan Sosiologi, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi pegiat pembinaan masyarakat sekitar hutan untuk melaksanakan program-program pembangunan masyarakat menjadi berhasil dan berkesinambungan. Saya ucapkan selamat kepada penulis atas diterbitkannya buku ini. Terima kasih.

Prof. Dr. Ir. H. SANGGAR KANTO, M.S.

Guru Besar Sosiologi Pedesaan Universitas Brawijaya Malang

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	v
KATA PENGANTAR MENTERI KEHUTANAN RI	vii
KATA PENGANTAR Prof. Dr. Ir. H. Sanggar Kanto, M.S.	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 KEBIJAKAN HUTAN RAKYAT	13
A. Pembangunan Sektor Kehutanan dan Implikasinya	13
B. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat	18
C. Program Hutan Rakyat	20
D. Rekam Jejak Kebijakan Program Hutan Rakyat	23
E. Kebijakan Hutan Rakyat Kedepan	30
BAB 3 TINJAUAN ADAPTASI BUDAYA DAN PERUBAHAN SOSIAL	35
A. Hubungan Manusia dan Lingkungan	35
B. Konsep Adaptasi Budaya terhadap Lingkungan	37
C. Teori Tindakan Rasional Max Weber.....	43
D. Teori Interaksionisme Simbolik	45
E. Perubahan Sosial	52
BAB 4 KERANGKA KONSEPTUAL DAN METODE FENOMENOLOGI	57
A. Alur Pikir Penelitian	57
B. Pendekatan Fenomenologi dan Tahapan Penelitian	62
C. Pemilihan Lokasi	65
D. Penentuan Subjek Penelitian	66
E. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	68

F. Keabsahan Data	72
G. Teknik Analisis Data	74
H. Batasan Konsep	75
BAB 5 KARAKTERISTIK MASYARAKAT PELADANG DAN TRANSMIGRAN	79
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	79
B. Karakteristik Masyarakat Peladang	85
C. Karakteristik Masyarakat Transmigran	90
BAB 6 MALILINGIN POTRET DESA PINGGIRAN HUTAN	95
A. Asal Terbentuknya Desa Malilingin	95
B. Letak Geografis	97
C. Gambaran Kehidupan Masyarakat	100
D. Mata Pencaharian	102
E. Sosial Kemasyarakatan Desa Peladang	104
F. Perladangan Bepindah Menjadi Hutan Rakyat.....	108
G. Hutan Rakyat Berbuah Penghargaan	112
BAB 7 PUALAM SARI POTRET DESA TRANSMIGRAN	117
A. Proses Terbentuknya Ray-12 di Desa Pualam Sari	117
B. Letak Geografis dan Demografis	119
C. Gambaran Kehidupan Masyarakat Transmigran Spontan	121
D. Mata Pencaharian	122
E. Sosial Kemasyarakatan Transmigran Spontan	124
F. Lahan Kosong Menjadi Hutan Rakyat	126
G. Hutan Rakyat Sumber Penghidupan	128
BAB 8 ADAPTASI BUDAYA MASYARAKAT PEDESAAN HUTAN TERHADAP PROGRAM HUTAN RAKYAT	131
A. Interpretasi terhadap Program Hutan Rakyat	131
B. Adaptasi Budaya dalam Konteks Perubahan Sosial	144
C. Hambatan Struktural dalam Proses Adaptasi Budaya	156

BAB 9 PERAN DAN MEKANISME LEMBAGA PENDUKUNG PROGRAM HUTAN RAKYAT	159
A. Peran dan Mekanisme Hubungan Kerja Lembaga Pendukung	159
B. Lembaga yang Terkait Program Hutan Rakyat di Desa Malilingin	161
C. Lembaga yang Terkait Program Hutan Rakyat di Desa Pualam Sari	166
BAB 10 PENAFSIRAN DAN REFLEKSI TEORITIS	171
A. Penafsiran Adaptasi Budaya Masyarakat	171
B. Refleksi Teoritis	195
BAB 11 IMPLIKASI TEORITIS DAN PRAKTIS	201
A. Implikasi Teoritis	201
B. Implikasi Praktis	203
C. Kesimpulan	205
D. Rekomendasi	206
DAFTAR PUSTAKA	209
GLOSARY	219
INDEKS	223

BAB 1

PENDAHULUAN

Keberadaan sumberdaya hutan di Indonesia meliputi kawasan seluas sekitar 120 juta hektar, hampir 70% dari luas wilayah daratannya, menempati urutan kedua terbesar di dunia setelah Brasilia. Dari luasan tersebut, 82% berada di tiga pulau besar, yaitu Kalimantan, Sumatera dan Papua, dimana kondisi ini menggambarkan peran penting pulau-pulau tersebut bagi pembangunan ekonomi dan upaya memakmurkan bangsa Indonesia. Menurut Salim (2003), hutan di Indonesia merupakan sumberdaya yang sangat bernilai, tidak hanya untuk lingkungan hidup, tetapi juga, dari sudut pandang negara berkembang, untuk pembangunan ekonomi dan politik.

Kebijakan pengelolaan sumber daya hutan alam yang dimulai tahun 1967 yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Pokok Kehutanan Nomor 5 tahun 1967, telah melahirkan "keajaiban ekonomi" Indonesia pada rentang tahun 1980 an hingga pertengahan tahun 1990 an. Menurut Nandika (2005), pada periode tersebut devisa dan pendapatan negara meningkat tajam, infrastruktur berkembang, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah terpencil bermunculan, penyerapan tenaga kerja luar biasa, pendapatan perkapita masyarakat meningkat berkali lipat. Pada tahun 1993, nilai ekspor hasil hutan Indonesia mencapai 26,9% dari seluruh nilai ekspor non-minyak, sedangkan periode tahun 1994 - 1997 industri hasil hutan telah menghasilkan sembilan miliar dolar AS pertahun atau rata-rata 7% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Di samping dampak positif yang telah diperoleh, eksploitasi hutan besar-besaran yang dimulai sejak tahun 1970-an juga telah menimbulkan dampak negatif berupa degradasi hutan dan lahan beserta fungsi yang menyertainya (*deforestasi*) yang mencapai kisaran 1,2 - 3,8 juta hektar pertahun (Sardjono, 2004). Luas kerusakan hutan yang terjadi di luar kawasan hutan (hutan hak, termasuk hutan rakyat) seluas 9.629.204 Ha (53%) dan di dalam kawasan (hutan lindung, konservasi dan produksi) seluas 8.431.969 Ha (47%)

(Departemen Kehutanan, 2002). Berdasarkan data terakhir, kerusakan hutan di Indonesia kini mencapai 59 juta ha dari areal hutan seluas 120 juta ha (Sumadiya, 2005). Menurut Sarwoko (2006), di Indonesia sejak awal tahun 2006 hingga awal bulan Pebruari telah terjadi 182 kali banjir sedang dan besar yang telah merusak sarana jalan sepanjang 730 km. Khusus di Kalimantan Selatan, selama musim hujan 2007 banjir telah menggenangi 19 kabupaten, 38 Kecamatan dan 231 desa (Asfihani, 2007). Lebih lanjut menurut Awang dkk (2001), pengelolaan hutan dengan praktek konvensional di Indonesia hanya menghasilkan dua hal negatif sekaligus, yaitu deforestasi dan dehumanisasi masyarakat lokal.

Menurut Barber (1989) yang dikutip oleh Nurjaya (2005), degradasi hutan tropis paling tidak menimbulkan tiga dampak negatif, yakni: a) degradasi sumberdaya alam hayati (flora dan fauna) dan perubahan pola iklim dan curah hujan secara regional maupun global; b) degradasi sumberdaya hutan secara ekonomis mengurangi sumber pendapatan nasional dan devisa negara, kesempatan kerja, dan basis modal untuk pembangunan industri kehutanan; c) deforestasi dapat menimbulkan erosi tanah dan merusak tata air (hidro-orologi) yang dapat mengancam pembangunan pertanian daerah pedesaan, mengusir komunitas-komunitas dan tradisi masyarakat lokal. Hal senada dikemukakan oleh Soemarwoto (2003), dampak kerusakan dan penyusutan luas hutan bukan hanya mengenai bidang kehutanan semata, tetapi boleh dikatakan semua sektor kehidupan kita terkena dampaknya. Kesehatan, pertanian, perikanan, pemukiman, banjir dan kekurangan air serta perekonomian kita semua tidak akan luput. Dampak tersebut tidak hanya bersifat lokal, melainkan nasional bahkan global. Commitees (2005) mengungkapkan bahwa pembangunan yang mengatas-namakan kemakmuran seringkali eksploitatif terhadap lingkungan dan sering mengabaikan prinsip-prinsip keseimbangan, dan apabila tidak ditangani secara serius akan berdampak pada ancaman secara global.

Nurjaya (2005) menguraikan bahwa hutan di Indonesia menjadi salah satu modal yang diandalkan untuk membiayai pembangunan, tetapi konsekuensi yang ditimbulkan dari degradasi sumberdaya hutan yang terus meluas dari tahun ke tahun adalah biaya ekologi (*ecological cost*) dan biaya sosial-budaya (*social and cultural cost*) yang harus dibayar mahal untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Konsep *trickle down effect* atau pertumbuhan untuk pemerataan dalam pengelolaan hutan ternyata tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hubeis, 2004). Riyanto (2004) menjelaskan bahwa masyarakat sekitar hutan hanya mendapatkan manfaat minimal dalam kegiatan pengelolaan eksploitasi sumberdaya alam hayati

hutan di daerahnya, jika dibiarkan maka masyarakat akan rentan terhadap pengaruh dari luar dan mudah terprovokasi. Hal senada juga diutarakan oleh Kaban (2006), terbatasnya akses masyarakat lokal terhadap pemasaran hasil (termasuk kayu) dan tidak seimbangnya distribusi hasil dari sektor kehutanan telah menimbulkan dampak negatif terhadap pemanfaatan lahan, sosial ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Proses degradasi sumberdaya hutan dan lahan telah terbukti dapat menimbulkan dampak yang cukup luas, yang mencakup aspek biofisik lingkungan, ekonomi, sosial budaya dan sosial politik. Orientasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di Indonesia yang selama ini didominasi oleh pemikiran komodifikasi "kayu-kayuan" atau *timber management oriented yang pure economic oriented* telah mengalami kegagalan dan bahkan semakin memicu terjadinya kerusakan sumberdaya alam dan telah meninggalkan kepentingan dan peran serta masyarakat pedesaan sekitar hutan (Awang, 2004). Menurut Hubeis (2004), kegiatan pengelolaan hutan yang lebih diorientasikan pada pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan termarginalisasinya masyarakat yang hidup di sekitar hutan. Konsekuensi yang paling buruk adalah proses menyusutnya kebudayaan (*cultural lost*) yang terjadi dimana-mana, sehingga banyak orang menjadi kehilangan makna dan pegangan hidup di dunia modern ini (Nurjaya, 2005).

Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya hutan pada dasarnya bukan semata-mata merupakan persoalan teknis kehutanan (tanah, air, pepohonan, produksi kayu dan hasil hutan non-kayu), tetapi lebih menjadi persoalan "sosial" yang berpangkal dari pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Oleh karena itu pengelolaan hutan harus melibatkan partisipasi masyarakat pedesaan dengan memberi kesempatan untuk turut memanfaatkan dan mengelola hutan menurut pemahaman, pengetahuan, teknologi, pengalaman dan tradisi yang dimilikinya (Nurjaya, 2005; Masserschmidt, 1992; Burch, et al.). Demikian pula pendapat Rosa dkk (2003) yang mengatakan bahwa bila sistem pengetahuan tradisional dan praktik pengelolaan sumberdaya alam yang dimiliki penduduk lokal yang menghasilkan jasa ekosistem tertentu seperti sumber bahan makanan dan obat-obatan tidak dijaga dan dilestarikan (-- tidak diberi kesempatan) maka akan hilang begitu saja. Permasalahan-permasalahan yang diuraikan di atas merupakan hasil dari kebijakan pemerintah sebelum reformasi yang di dalam pengaturan dan pengurusan hutan dilakukan dengan kewenangan tunggal Pemerintah Pusat melalui Departemen Kehutanan.

Sejalan dengan bergulirnya era reformasi dan otonomi daerah serta dinamika kebutuhan pembangunan (terutama mengatasi dampak kerusakan hutan dan lahan), Pemerintah Indonesia melalui Departemen Kehutanan telah melakukan reorientasi kebijakan dan pelaksanaan lapangan, yaitu dari "timber management" yang *economic benefit oriented* menuju pengelolaan hutan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan lingkungan (*socioecological oriented*). Terbitnya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui dengan UU No. 32/2004; UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diperbaharui dengan UU No. 33/2004; dan Undang-undang No. 41/1999 tentang Kehutanan, merupakan kebijakan pemerintah sebagai instrumen pendukung bagi pengalihan sebagian kewenangan administrasi, politik dan finansial dari Pusat ke daerah. Kesemuanya diharapkan menjadi titik tolak bagi upaya mewujudkan paradigma baru (reorientasi) pembangunan sektor kehutanan.

Kebijakan tersebut di atas pula sebagai implementasi dari tuntutan global bagi pengelolaan hutan secara lestari dan mensejahterakan masyarakat (Sardjono, 2004). Hal ini sejalan dengan pendapat Tjokrowinoto (2004), dibanyak negara berkembang secara garis besar terjadi kecendrungan pergeseran pembangunan dari ekonomi semata-mata menuju pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. Dalam konteks pembangunan ekonomi-cum-pembangunan sosial ini nilai-nilai kemanusiaan menjadi lebih manifest, karenanya pembangunan sumberdaya manusia menjadi bagian integral dari sosok pembangunan tersebut. Setidaknya ada tiga kategori pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat (Conyers, 1982 yang dikutip oleh Tjokrowinoto, 2004), yaitu: a) sebagai pemberian pelayanan sosial; b) sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan; c) sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengambil keputusan dan mengaktualisasikan diri mereka.

Pemerintah Indonesia melalui Departemen Kehutanan dalam menyikapi realita dan dinamika masyarakat serta perubahan alam yang semakin tidak bersahabat, telah menetapkan berbagai kebijakan untuk mengatasi dan mengantisipasi serta mempersiapkan pembangunan kehutanan yang lebih baik kedepan dengan membuat Rencana Strategis Departemen Kehutanan tahun 2005-2009 (Departemen Kehutanan, 2006a), yang antara lain misinya adalah: a) mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi fungsi konservasi, lindung, produksi kayu dan non kayu, jasa lingkungan untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari; b) meningkatkan daya dukung DAS dan mendorong peran serta masyarakat; c) menjamin distribusi

manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Selanjutnya berdasarkan misi tersebut disusun pula 5 (lima) kebijakan prioritas dengan menekankan pada revitalisasi sektor kehutanan, khususnya industri kehutanan, rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Salah satu kegiatan dalam revitalisasi sektor kehutanan tersebut adalah dengan memfasilitasi pembangunan hutan rakyat seluas 2 juta hektar. Untuk kelanjutan kebijakan prioritas tersebut di atas, maka Kementerian Kehutanan untuk tahun 2010-2014, juga membuat kebijakan prioritas yaitu: pemantapan kawasan, rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS, pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan, konservasi dan keanekaragaman hayati, revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan, pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan, dan penguatan kelembagan kehutanan.

Kalimantan Selatan sebagai bagian dari daerah penghasil kayu alam dan industri kayu juga tidak terlepas dari permasalahan pengelolaan hutan yang tidak sesuai harapan. Secara geografi, Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai luas wilayah 3.705.161.578 Ha, hingga saat ini masih mempunyai luas wilayah berhutan sekitar 1.659.003 Ha. Sedangkan jika kita bandingkan dengan lahan kritis, maka keberadaan areal berhutan hanya sekitar sepertiganya. Luas lahan yang kritis adalah 3.147.646,5 Ha dengan rincian potensial kritis 1.051.423 Ha, agak kritis 1.540.112 Ha, kritis 500.078 Ha dan sangat kritis 55.905 Ha (BP DAS Riam Kanan, 2004). Menurut penyebarannya, seluruh lahan kritis di atas terdapat pada beberapa kawasan, yaitu di kawasan hutan lindung seluas seluas 578.847 Ha, kawasan lindung di luar kawasan hutan seluas 73.955 Ha dan yang terdapat di kawasan budidaya pertanian seluas 2.596.376 Ha. Berbagai usaha rehabilitasi sudah pernah dilaksanakan seperti di sekitar waduk Riam Kanan dengan program Reboisasi dan Penghijauan sejak tahun 1990 hingga 1995, namun belum ada yang berhasil dan malah lahan kritis semakin meluas (Budi dkk, 2005).

Sebagaimana pemerintah Indonesia, memaknai data di atas dan menyadari fenomena alam yang terjadi seperti banjir dan kekeringan, maka pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan juga membuat kebijakan yang terencana untuk pemulihan dan peningkatan kemampuan fungsi dan produktifitas hutan dan lahan yang ada di daerahnya. Dalam rangka menyikapi kondisi di atas dan dinamika yang berkembang dalam pembangunan sektor kehutanan di Kalimantan Selatan tersebut, serta melaksanakan amanah UU No. 41/1990 tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa: rehabilitasi hutan

dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga (psl 41); rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan (**Hutan Rakyat**), pemeliharaan, dst (psl 41); dan rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik, penyelenggaraan diutamakan pelaksanaannya melalui *pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat* (psl 42) — pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan mencoba melaksanakan kegiatan penghijauan dalam bentuk usaha tani konservasi, *penanaman tanaman pangan dan tahunan dalam bentuk hutan rakyat*, pembuatan bangunan konservasi tanah, peningkatan sumberdaya manusia dan peran serta masyarakat.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan sebenarnya telah memulai program Hutan Rakyat sejak tahun 1980 an, yaitu dimulai pada tahun 1986 dengan nama program demplot Usaha Pertanian Menetap (UPM) di bawah program Penghijauan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan. Luas areal demplot adalah 20 Ha dengan jenis tanaman karet, rambutan dan tanaman semusim (padi dan kacang). Langkah lebih terarah, terencana dan lebih luas dimulai tahun 2000 an melalui dana APBD. Sejak tahun 2001 telah melaksanakan Proyek Peningkatan Produksi Kehutanan yang kemudian dilanjutkan pada tahun 2002 sampai sekarang melalui Proyek Pengembangan Hutan Rakyat seluas 1.320 Ha, dengan jenis tanaman Sengon, Jati, Mahoni Sungkai dan Kemiri (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, 2004).

Melalui pengembangan program hutan rakyat (*farm forestry*) yang berkelanjutan dari tahun ketahun serta pengelolaannya diarahkan sebagai usaha kelompok tani secara mandiri, diharapkan akan mempercepat upaya rehabilitasi lahan, perbaikan lingkungan, pemenuhan kebutuhan kayu sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan sekitar hutan. Ada beberapa kondisi sosial yang dibutuhkan agar pengelolaan sumberdaya hutan dapat dilakukan sebuah kelompok masyarakat dengan efektif, antara lain adalah: a) *Batas wilayah kelola*, adanya kesepakatan bersama tentang batas wilayah kelola rakyat, hak-hak yang diakui, mekanisme pembagian hasil hutan; b) *Mekanisme pengambilan keputusan*, masyarakat setempat memiliki hak bicara, hak menentukan nasibnya sendiri, dan hak mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan kelompok; c) *Insentif*, masyarakat setempat memperoleh manfaat nyata dari kegiatan pengelolaan hutan baik manfaat ekonomi, budaya dan spritual; d) *Ukuran kelompok*, sebaiknya kecil supaya komunikasi dan bertatap muka secara teratur dimungkinkan (Munggoro, 2001).

Menurut Departemen Kehutanan (2002), tujuan kegiatan pembangunan tanaman hutan rakyat adalah terwujudnya tanaman hutan rakyat sebagai upaya rehabilitasi, untuk meningkatkan produktifitas lahan dengan berbagai hasil tanaman hutan rakyat berupa kayu-kayuan dan non kayu, memberikan peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan melalui percepatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah. Lebih penting lagi, dengan pengembangan hutan rakyat memungkinkan keluarga dan masyarakat memutuskan apa yang menjadi prioritas bagi mereka sendiri, dan menanam jenis dan jumlah pohon yang mereka pilih sendiri di dalam lokasi yang mereka rasakan lebih relevan dengan kebutuhan mereka (Awang, 2004). Lebih dalam Awang (2005a) menyatakan bahwa salah satu model penggunaan lahan di pedesaan oleh masyarakat adalah melalui pengembangan sistem tanaman campuran antara tanaman pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan yang dikenal dengan model sistem hutan rakyat. Sistem ini telah terbukti memberikan peran penting dalam mencukupi kebutuhan hidup keluarga tani, mampu menstabilkan ekosistem desa, konservasi lingkungan, dan memberikan devisa kepada pemerintah daerah dan nasional. Apabila kita dalam, maka kegiatan hutan rakyat merupakan langkah kompromi antara masyarakat dengan pemerintah untuk mendapatkan keuntungan bersama.

Kegiatan pengembangan hutan rakyat tentunya tidak terlepas dari wacana sosiologis (*sociological discourse*), yang menurut Sardjono (2004) merupakan faktor kunci bagi keberhasilan pengelolaan hutan di Indonesia secara lestari, dan ini merupakan landasan terlemah dari para rimbawan dan profesional kehutanan. Wacana sosiologis yang dapat merefleksikan masyarakat pedesaan sekitar hutan terhadap kegiatan pengembangan hutan rakyat adalah dengan menggali dan menganalisa adaptasi budaya masyarakat terhadap kegiatan hutan rakyat tersebut dan memahami makna kehidupan keseharian yang ada pada masyarakatnya. Kajian tentang adaptasi umumnya diartikan sebagai proses yang menghubungkan sistem kebudayaan dengan lingkungan.

Suwardono (2003) menyatakan bahwa keberadaan hutan rakyat tidaklah semata-mata akibat interaksi antara komponen botani, mikro organisme, mineral tanah, air dan udara, melainkan karena adanya peran manusia di dalamnya. Unsur manusia dengan berbagai ragam budayanya diwujudkan dengan bentuk dan model pengelolaan hutan rakyat yang berbeda-beda antara masing-masing kelompok masyarakat. Terlibatnya faktor sosial dalam hutan rakyat karena pengelolaannya berkait erat dengan budaya dan kultur suatu daerah dimana aturan-

aturan adat dan kearifan tradisional sangat kental dalam sistem pengelolaan dan pola tanam hutan rakyat. Sedangkan menurut Tjondronegoro (1984), setiap pendekatan memerlukan *pengertian terhadap pola-pola interaksi sosial* yang ada dan berlangsung secara nyata antara kelompok-kelompok masyarakat yang mendukung berbagai lembaga dan organisasi sosial.

Dikaitkan dengan pengelolaan sumberdaya hutan, pola pengembangan program hutan rakyat haruslah disesuaikan dengan kondisi dan situasi sosial budaya setempat. Apabila kita hubungkan dengan pendapat Kaufman (1953) yang dikutip oleh Sardjono (2004) bahwa beberapa topik relevan sebagai kontribusi sosiologi terhadap kehutanan antara lain adalah proses dari pembuatan kebijakan (*policy making*) dan kontrol sosial (*social control*) pada saat kebijakan dilaksanakan. Diimplementasikannya kebijakan baru yaitu program hutan rakyat merupakan salah satu bentuk kebijakan yang diduga dapat mempengaruhi dinamika masyarakat yang terlibat langsung maupun tidak. Menurut Dwijowijoto (2004), kebijakan yang berpihak pada rakyat adalah bagaimana agar rakyat mempunyai kemampuan untuk dapat membangun dirinya sendiri sesuai dengan keinginan dan kemampuannya.

Kebijakan pengembangan program Hutan Rakyat sebagai suatu inovasi dapat diterima masyarakat apabila masyarakat memiliki pemahaman dan pengetahuan terhadap objek yang diinovasikan. Pemahaman dan pengetahuan masyarakat pedesaan sekitar hutan tentang objek inovasi merupakan dasar terbentuknya persepsi mereka terhadap objek inovasi atau setiap usaha pengembangan dalam lingkungannya. Marfai (2005) mengemukakan bahwa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat lokal selama dalam kegiatan konservasi lingkungan terjadi tidak saja sebagai akibat ketidak-sesuaian antara teknologi yang dikembangkan dengan kebiasaan masyarakat dan pengetahuan tentang teknologi yang diinovasikan belum dikuasai, melainkan pula karena peran yang diberikan kepada masyarakat tersebut sangat tidak leluasa atau sangat terbatas.

Dari beragam uraian di atas, dicoba mengerucutkan pada pendapat bahwa hutan di Indonesia telah mengalami degradasi yang hebat, sementara berbagai program penghutanan kembali (reboisasi dan penghijauan) tidak berhasil sebagaimana harapan. Program hutan rakyat yang dilaksanakan di luar kawasan hutan yang dianggap berbasis masyarakat (-- oleh Pemerintah--) juga tidak berkembang sesuai tujuan. Hal ini disebabkan pendekatan partisipatif yang dilaksanakan hanya dalam batas normatif, bukan dalam praktiknya (Nurrochmat, 2005). Berdasarkan hasil kajian Awang (2004), sejak tahun 2000, hutan rakyat di Indonesia mulai ditanami dengan jenis

jenis unggul, seperti jati emas, jati superior dan lain-lain. Khusus untuk luar Jawa banyak dana alokasi khusus (DAK) yang berasal dari hasil hutan (dana reboisasi/DR) yang diberikan kepada pemerintah kabupaten dimanfaatkan untuk membeli bibit jati emas untuk dibagikan kepada masyarakat. Ternyata cara ini tidak efektif dan mengalami kegagalan, karena merupakan cara yang mubazir dan tidak tepat sasaran serta masyarakat tidak merasa memiliki kepentingan?

Dari berbagai kegagalan tersebut, ternyata di Kalimantan Selatan, ada dua buah desa yang telah berhasil mengembangkan program hutan rakyat, yaitu Desa Malilingin Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan (Supiani, 2006). Berdasarkan hasil observasi awal (Pebruari 2007 dan Mei 2007), ternyata hasil tanaman karet hutan rakyat di kedua desa tersebut telah berkembang dengan baik dan mereka juga telah mampu mengembangkan luasan hutan rakyat secara swadaya.

Fenomena keberhasilan kedua desa tersebut dalam pembangunan kehutanan, khususnya kegiatan penghijauan telah menarik perhatian kami untuk menggali dan memahami ada apa, kenapa dan mengapa mereka bisa berhasil? Bagaimana mereka beradaptasi? Apakah aspek sosial budaya masyarakat dikedua desa memang sejalan dengan program hutan rakyat? Makna dan faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut kami dekati dengan anggapan bahwa adaptasi budaya tidak terlepas dari strategi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap suatu inovasi baru (program hutan rakyat) yang didasari oleh adanya tindakan rasional (teoritis sosiologi klasik oleh Max Weber) oleh petani peserta program hutan rakyat. Menurut Weber dalam Mulyana (2004) bahwa tindakan manusia pada dasarnya bermakna, melibatkan penafsiran, berpikir dan kesengajaan. Lebih lanjut dijelaskan, masyarakat merupakan suatu entitas aktif yang terdiri dari orang-orang berpikir dan melakukan tindakan-tindakan sosial yang bermakna. Perilaku mereka yang tampak hanyalah sebagian saja dari keseluruhan perilaku mereka. Konsekuensi logisnya adalah pendekatan ilmu alam (perspektif ilmiah) tidak sesuai untuk menelaah perilaku individu yang bermakna sosial, karena hanya mempertimbangkan gejala-gejala yang tampak, tetapi mengabaikan kekuatan-kekuatan tersembunyi yang menggerakkan manusia seperti emosi, gagasan, maksud, motif, perasaan, tekad dan sebagainya.

Berdasarkan pemahaman saat ini, agar penelitian sesuai dengan permasalahan (ontologi) yang terjadi dalam pembangunan kehutanan yang sering menafikan keberadaan perilaku masyarakat pedesaan

hutan, maka perspektif yang kiranya sesuai digunakan sebagai pisau analisis utama adalah perspektif definisi sosial dengan landasan teori interaksionisme simbolik (Mead) yang menekankan bahwa individu bersifat aktif, reflektif dan kreatif, menafsirkan, menampilkan perilaku rumit dan sulit diramalkan. Paham ini menolak gagasan bahwa individu adalah organisme pasif yang perilakunya ditentukan oleh kekuatan atau struktur yang ada di luar dirinya. Oleh karena individu terus berubah, maka masyarakat pun berubah melalui interaksi. Jadi interaksi yang dianggap variabel penting yang menentukan perilaku manusia, bukan struktur masyarakat. Struktur itu sendiri tercipta dan berubah karena interaksi manusia, yakni ketika individu-individu berpikir dan bertindak secara stabil terhadap seperangkat objek yang sama. Teori tindakan rasional juga melingkupi analisis tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (metode fenomenologi) dengan dasar pemikiran sebagai berikut:

- 1) Agar dapat memahami adaptasi budaya masyarakat pedesaan sekitar hutan terhadap program hutan rakyat dalam sikap yang wajar dan berlangsung secara alamiah
- 2) Fenomena adaptasi budaya ditelaah sebagai suatu proses, sehingga dapat ditemukan hubungan antar gejala sosial, dan bagaimana para petani sebagai suatu kelompok saling berinteraksi dalam latar alamiah yang menjadi subjek penelitian ini.
- 3) Pemahaman terhadap makna adaptasi budaya masyarakat terhadap program hutan rakyat tidak saja diperoleh dari apa yang dikemukakan oleh aktor atau dilakukan anggota kelompok tani hutan tetapi juga pada makna dalam interpretasi mereka terhadap fenomena tersebut.

Sejalan dengan rencana pendekatan yang digunakan, maka penelitian ini lebih menekankan proses dari pada produk, dengan mengemukakan pertanyaan bagaimana terjadinya suatu fenomena sosial dalam kehidupan masyarakat pedesaan sekitar hutan terhadap kegiatan program hutan rakyat. Hal ini sejalan dengan salah satu asumsi yang dikemukakan oleh Merriam (1988) yang dikutip Creswell (1994) bahwa peneliti kualitatif perhatian utamanya pada proses dari pada keluaran atau hasil. Juga disampaikan oleh Merriam bahwa dalam penelitian kualitatif yang ditekankan adalah pemaknaan semisal bagaimana seseorang memahami kehidupannya, pengalamannya dan kehidupan dunianya.

Penelitian ini berusaha untuk membangun suatu teori dan atau proposisi yang dapat menjelaskan fenomena adaptasi budaya masyarakat pedesaan hutan terhadap program hutan rakyat dalam

latar alamiah. Dengan perkataan lain menurut Schlegel (1977) yang dikutip Ginting (1994), pengembangan teori dan atau proposisi yang akan dilakukan didasarkan atas temuan data lapang atau *grounded in the data*.

Rumusan tujuan yang dituangkan mengacu dari permasalahan yang telah dikemukakan yakni untuk memahami dan mendeskripsikan interpretasi dan faktor-faktor yang melatarbelakangi dalam proses adaptasi budaya masyarakat pedesaan hutan sebagai pelaku dalam realitas sosial tersebut. Selanjutnya tujuan ini dijabarkan agar dapat lebih memudahkan dalam menggali data lapang yakni untuk memahami dan mendeskripsikan:

- 1) Interpretasi dan faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat pedesaan hutan dalam mengikuti program hutan rakyat sebagai salah satu usaha dalam kehidupan mereka
- 2) Proses adaptasi budaya masyarakat pedesaan hutan terhadap program hutan rakyat
- 3) Hambatan-hambatan struktural yang terjadi selama proses adaptasi budaya dalam mencapai tujuan kegiatan dan konsekuensi yang dialami oleh masyarakat pedesaan hutan
- 4) Peran dan mekanisme hubungan kerja lembaga atau institusi pendukung kegiatan pengembangan hutan rakyat.

Penelitian ini berusaha untuk melakukan eksplorasi dan pemeriksaan dalam memahami dan menjelaskan adaptasi budaya. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang sosiologi dalam konteks adaptasi budaya. Juga diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

Data dan fakta yang ditemukan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembuat kebijaksanaan dalam menyusun perencanaan pembangunan sektor kehutanan, khususnya dalam pengembangan program hutan rakyat di daerah lainnya. Pemahaman yang mendalam mengenai konsep sosiologi dalam pembangunan sektor kehutanan, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan dan pelibatan masyarakat pedesaan hutan dalam membangun hutan untuk kegiatan rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan merupakan hal yang masih baru dan patut untuk dikembangkan dan disosialisasikan, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan beserta fungsinya dapat benar-benar tercapai.

Deskripsi pengungkapan makna atas dasar interpretasi masyarakat pedesaan hutan yang terlibat dalam program hutan rakyat dapat digunakan sebagai umpan balik bagi pegiat lapang (LSM dan

penyuluh kehutanan) dan pihak terkait lainnya dalam menyusun rencana yang lebih baik di masa mendatang. Dengan demikian diharapkan hasil temuan ini dapat pula digunakan sebagai salah satu referensi bagi para praktisi di bidang kehutanan dan bidang terkait lainnya, seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perkebunan dan Pertambangan.

Secara umum, penelitian ini juga sejalan dan mendukung kebijakan pemerintah Indonesia melalui Departemen Kehutanan yang menyelenggarakan kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) yang dimulai sejak tahun 2002 hingga 2007, yang dalam salah satu item kegiatannya adalah pembuatan hutan rakyat dan pengkayaan hutan rakyat di lahan-lahan milik rakyat di luar kawasan hutan negara yang memiliki potensi untuk pengembangan hutan rakyat. Kegiatan ini untuk membuka peluang kesempatan kerja/berusaha dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan serta membangun kesadaran nasional secara terus menerus untuk menjadikan budaya menanam sebagai gerakan moral, sehingga menjadi salah satu budaya nasional.

BAB 2

KEBIJAKAN HUTAN RAKYAT

A. Pembangunan Sektor Kehutanan dan Implikasinya

Hutan merupakan bagian penting dari negara kita Indonesia. Menurut angka resmi luas kawasan hutan kita adalah sekitar 120 juta hektar yang tersebar pada 13.667 pulau. Berbagai fungsi ekologi, ekonomi dan sosial budaya dari hutan merupakan bagian amat vital bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang sekitar 80% tinggalnya di pedesaan. Beberapa fungsi-fungsi tersebut dapat diuraikan antara lain adalah: (1) hutan merupakan habitat atau tempat hidup jenis jenis flora dan fauna. Keanekaragaman hayati dari flora dan fauna mempunyai arti ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat pedesaan sekitar hutan; (2) hutan sebagai resor (penimbunan) zat karbon dan pengaturan kadar CO_2 dalam udara. Hutan melakukan fotosintesis mengubah gas CO_2 dari udara menjadi karbohidrat. Karbohidrat hasil fotosintesis merupakan sumber energi bagi makhluk hidup, termasuk manusia. Hutan mengatur kadar CO_2 dalam udara, dimana CO_2 dalam udara mempunyai peranan pengaturan suhu permukaan bumi atau pemanasan global; (3) hutan berfungsi hidro-orologi, yaitu pengaturan air dan perlindungan tanah terhadap erosi; (4) hutan sebagai ujung tombak pemulihan ekonomi bagi pemerintah dan sebagai modal pembangunan yang mudah untuk dimanfaatkan; (5) hutan sebagai tempat menyalurkan fungsi sosial dan budaya masyarakat, terutama masyarakat pedesaan hutan yang kehidupannya sangat bergantung dan hutan dan hasil hutan (Salim, 2003).

Pembangunan sektor kehutanan Indonesia secara komersial bermula pada akhir dekade 60-an dengan dimulainya kegiatan penebangan kayu secara besar-besaran untuk memperoleh pendapatan nasional yang sangat dibutuhkan. Menurut Resosudarmo (2003), sektor kehutanan telah memberikan sumbangan yang penting pada perekonomian nasional yang ditunjukkan oleh nilai ekspor produk

kayu dan produk terkait lainnya. Pada tahun 1997, produk-produk kehutanan (termasuk pulp dan kertas) menyumbang 17% pada total nilai ekspor non-migas Indonesia. Peran sektor ini dalam perekonomian nasional kemudian menjadi kian nyata saat berlangsungnya krisis ekonomi, seperti yang ditunjukkan oleh nilai ekspor produk kehutanan yang mampu bertahan pada US\$ 6 milyar atau 16% dari nilai ekspor produk non-migas Indonesia pada tahun 1999 (Bank Indonesia, 2000 yang dikutip oleh Resosudarmo, 2003). Pada tahun 2004, secara nasional kontribusi sektor kehutanan meningkat sebesar 4,17% (Departemen Kehutanan, 2006a).

Sektor kehutanan juga penting dalam konteks pembangunan daerah di Indonesia. Sebagai sebuah industri berbasis sumberdaya dan padat tenaga kerja, industri kehutanan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di luar pulau Jawa meskipun memiliki sumberdaya alam yang berlimpah namun memiliki infrastruktur dan tenaga terampil yang terbatas. Kehadiran HPH dan HPHTI di luar Jawa telah membantu dalam penyediaan jalan darat yang cukup memadai dan membuka isolasi pedesaan terpencil.

Kekayaan sumberdaya alam, terutama minyak bumi dan hutan yang dimiliki negara Indonesia dipahami oleh pemerintah sebagai modal penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Khusus untuk sumberdaya hutan, pemanfaatannya tidak memerlukan biaya yang besar dan teknologi yang tinggi sebagaimana untuk pemanfaatan minyak bumi dan gas, sehingga hutan terutama hasil kayunya merupakan material yang mudah untuk diambil dan dieksploitasi sebanyak-banyaknya. Atas nama pembangunan yang diabdikan pada pengejaran target pertumbuhan ekonomi (*economic growth target*), demi peningkatan pendapatan dan devisa negara, maka pemanfaatan sumberdaya alam dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, demokratis, dan keberlanjutan fungsi sumberdaya alam. Apriyantono (2006), mengatakan, terjadinya gempa dan tsunami di Aceh, gempa di Ambon, Sulawesi dan lainnya di Indonesia, banjir dan longsor di pulau Jawa merupakan suatu kenyataan yang terjadi sebagai akibat tidak tepatnya pengelolaan lahan dan tidak memperhatikan keseimbangan antara kegiatan produksi (pemanfaatan) dan konservasi.

Menurut Nurjaya (2006), implikasi yang timbul akibat dari praktik-praktik pemanfaatan sumberdaya alam yang mengedepankan pencapaian pertumbuhan ekonomi semata adalah terjadinya proses penurunan (degradasi) kuantitas dan kualitas sumberdaya alam tersebut, antara lain: a) laju kerusakan hutan mencapai 1,8 juta hektar per tahun (data lain menyebutkan 2,4 juta Ha/thn), dan menyebabkan sejumlah spesies (flora dan fauna) hutan tropis terancam

punah akibat eksploitasi sumberdaya hutan yang tak terkendali; b) sekitar 64% dari total hutan mangrove seluas 3 juta hektar mengalami kerusakan serius akibat penebangan liar untuk kayu bakar (kayu arang) dan dikonversi menjadi areal pertambakan. Di sisi lain, implikasi kebijakan di atas juga terjadi terhadap sosial dan budaya yang cukup memprihatinkan. Banyak konflik mengenai hak penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam antara masyarakat adat/lokal dengan pemerintah atau pemegang konsesi hutan dan pertambangan yang terjadi di berbagai kawasan Indonesia. Lebih tegas Apriyantono (2006) menyatakan kesalahan dalam pengelolaan pembangunan sektor kehutanan akan menyebabkan ketidak-seimbangan, ketidak-sesuaian, ketidak-harmonisan, degradasi, dan ketidak-amanan dalam kehidupan masyarakat.

Setidaknya ada empat permasalahan dasar dalam pengurusan hutan di Indonesia, yaitu: a) merebaknya budaya dan praktek KKN; b) terdapat perbedaan yang sangat besar dalam hal cara pandang (persepsi), pemahaman serta kepentingan terhadap hutan, manfaat hutan dan fungsi hutan diantara pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam pengelolaan hutan yakni unsur pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat pada tingkat lokal maupun nasional; c) ketidak-konsistenan dan ketidak-lengkapan peraturan perundangan dalam bidang kehutanan; dan d) penyelenggaraan pembangunan kehutanan belum sepenuhnya melibatkan pihak-pihak yang berhubungan dan berkepentingan terhadap hutan dan manfaatnya, terutama masyarakat dan pelaku usaha (Suhendang, 2004).

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan Sardjono (2004), pembangunan sektor kehutanan yang secara umum menitik-beratkan pada kepentingan untuk meningkatkan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan bagi kesejahteraan masyarakat telah 'gagal total', terutama untuk wilayah luar pulau Jawa seperti Kalimantan dan Sumatera. Indikasi ini terlihat jelas pada tidak meningkatnya kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat pedesaan sekitar hutan. Hal ini tidak saja mengingat bahwa merekalah yang dalam kenyataannya memiliki akses yang paling dekat, dan ketergantungan serta hubungan yang paling signifikan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat hutan tersebut. Mestinya mereka memiliki peran kunci sebagai kontrol sosial terhadap setiap pemanfaatan hasil hutan yang berlebihan (*over exploitation*), namun ternyata hal itu tidak terwujud karena tidak adanya insentif yang memadai. Dalam kasus-kasus tertentu, masyarakat pedesaan sekitar hutan bisa berbalik mengakselerasi terjadinya kehancuran sumberdaya alam, akibat hilangnya rasa tanggung jawab dan kepedulian.

Kebijakan pemerintah memberi hak pemanfaatan hasil hutan kepada pihak swasta di luar Jawa sejak tahun 1967 lebih banyak gagalnya dibandingkan berhasilnya, dan yang terasa dan terlihat jelas adalah deforestasi sebagai hasil kebijakan tersebut (Awang, 2005b). Hal senada diutarakan oleh Iskandar (2001), akibat dari kehadiran HPH yang memanen hutan alam *an sich* tanpa ada tuntutan untuk mengelolanya dengan baik dan profesional adalah rusaknya mutu dan kuantitas air sungai (kering dimusim kemarau, banjir, beracun dan keruh dimusim hujan). Kehadiran HPH dan HTI di Kalimantan berimplikasi yang drastis bagi orang-orang Dayak, yakni terusirnya dari tanah-tanah mereka dan lingkungan hidup mereka pun menjadi rusak (Maunati, 2004).

Kajian Zerner (1992) yang dikutip oleh Wrangham (2003) mengatakan bahwa penilaian pemerintah Indonesia terhadap perladangan berpindah atau perladangan gilir balik "tetap mengikuti penilaian pemerintah kolonial yang negatif terhadap cara bertani tersebut; bahwa perladangan berpindah dan pelakunya tidak berkelanjutan dari segi lingkungan, merusak dan bersifat menghamburkan sumberdaya". Lebih lanjut pemerintah mengasumsikan bahwa masyarakat yang menetap di hutan secara tradisional hidup terasing, dan kegiatan mereka diatur oleh hukum adat yang tidak berubah. Akibatnya berbagai kebijakan pemerintah (Departemen Kehutanan) cenderung memandang masyarakat sekitar hutan sebagai ancaman, bukan mitra kerja. Hal serupa juga telah dikemukakan oleh Colfer dkk (1997), pendapat umum memandang bahwa peladang berpindah tidak ubahnya seperti pengembara yang senantiasa berpindah-pindah, merusak hutan dan yang tertinggal hanya padang rumput, menggunakan lahan secara tidak efektif dan lainnya. Ideologi yang cenderung negatif terhadap masyarakat pedesaan sekitar hutan menghasilkan seperangkat kebijakan yang berusaha menjauhkan kelompok masyarakat ini dari hutan atau bertujuan mengubah praktek-praktek adat mereka dalam mengelola hutan menjadi cara hidup yang sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan (Lindayati, 2003).

Politik pembangunan khususnya di sektor kehutanan telah banyak merugikan hak-hak adat dan pengelolaan secara lokal baik di bidang ekonomi, maupun sosial dan budaya yang mengakibatkan cepatnya sistem dan pola kehidupan masyarakat adat hancur. Hak-hak masyarakat adat dikorbankan untuk pembangunan yang sebagian besar dinikmati oleh kaum elit. Desakan dan intimidasi telah membingungkan sebagian besar masyarakat yang tinggal di pedesaan hutan (Uluk dkk, 2001). Padahal menurut Raden dan Abdon (2003), masyarakat adat sangat berperan dalam pengelolaan hutan, seperti

motivasi yang kuat dan mendapatkan insentif yang paling bernilai untuk melindungi hutan dibandingkan pihak-pihak lain karena menyangkut keberlanjutan kehidupan mereka; memiliki pengetahuan asli bagaimana memelihara dan memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada di dalam habitat mereka; dan mereka memiliki kelembagaan adat yang mengatur interaksi harmonis antara mereka dengan ekosistem hutannya.

Sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk sektor kehutanan yang berorientasi ekonomi dengan memandang hutan hanya dari sisi penghasil "kayu" semata, hasilnya adalah deforestasi dan degradasi hutan dan lahan yang tinggi yang berakibat pada terganggunya aspek sosial, ekonomi dan politik dan budaya, baik tingkat lokal, nasional maupun global. Secara gamblang Nurjaya (2006) menjelaskan bahwa implikasi dari kebijakan pembangunan sektor kehutanan yang berbasis ekonomi tersebut adalah: a) segi ekonomi, menghilangkan sumber-sumber ekonomi bagi kehidupan masyarakat adat/lokal; b) segi sosial dan budaya, secara nyata telah merusak sistem pengetahuan, teknologi, institusi, tradisi, dan religi masyarakat; c) segi ekologi, menimbulkan kerusakan dan degradasi kualitas maupun kuantitas sumberdaya alam; d) segi politik dan hukum, telah mengabaikan fakta fluralisme hukum dalam penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang secara nyata hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Awang (2004) menguraikan bahwa instrumen kebijakan ke arah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan. Krisis ekonomi di pedesaan membuat masyarakat harus mencari sumber kehidupan dalam waktu cepat seperti mengerjakan penebangan kayu secara ilegal dan menduduki lahan hutan untuk membangun kebun rakyat. Kejadian ini tentunya mempercepat deforestasi dan degradasi hutan.

Dari sekian banyak uraian di atas, menurut hemat penulis dalam pembangunan sektor kehutanan, peran dan fungsi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan (penegakan hukum) yang kurang tepatlah yang telah mengakibatkan berbagai bencana alam di Indonesia hingga saat ini. Sesungguhnya, permasalahan pembangunan sektor kehutanan bersumber dari anutan paradigma pengelolaan sumberdaya alam yang bercorak sentralistik, berpusat pada negara, mengedepankan pendekatan sektoral, dan mengabaikan perlindungan hak-hak asasi manusia (Nurjaya, 2006). Sependapat dengan pernyataan di atas, Kartodihardjo (1999) menyatakan kebijakan pelestarian hutan perlu dipecahkan dengan dukungan politik secara tegas agar kebijakan dapat dijalankan.

Paradigma yang tidak mengutamakan kepentingan konservasi dan perlindungan serta keberlanjutan fungsi sumberdaya alam, juga tidak secara utuh memberi ruang bagi partisipasi masyarakat serta mengabaikan hak-hak masyarakat adat/lokal atas penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam. Perubahan kebijakan yang berbasis kepada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dan lahan dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsinya (*socio-ecological oriented*) merupakan salah satu alternatif yang harus dikembangkan dalam pembangunan sektor kehutanan kedepan. Hal yang penting untuk kita perhatikan dan kaji seksama agar hal di atas dapat tercapai adalah adanya perubahan-perubahan kebijakan yang pro-masyarakat dan lingkungan. Menurut Nurjaya (2006), implementasi model manajemen kehutanan yang berbasis masyarakat (*community-based forest resources management*) menuntut perubahan-perubahan, tidak hanya pada tatanan peraturan perundang-undangan, struktur kelembagaan, administrasi dan prosedur, tetapi juga perubahan metode, strategi, teknik-teknik partisipatif, termasuk perubahan sikap dan perilaku aktor-aktor (*stakeholders*) yang terlibat dalam manajemen kehutanan.

B. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

Konsep dan pelaksanaan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) di Indonesia, terutama di Jawa dipengaruhi oleh situasi dinamika sosial ekonomi politik dan budaya. PHBM adalah satu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama Perum Perhutani dan masyarakat desa atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional (Awang, 2004).

Bentuk PHBM untuk luar Jawa dikenal dengan nama Sosial Forestri (sebagai terjemahan dari *Social Forestry*), yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-11/2004 tentang Pemberdayaan Masyarakat setempat di dalam dan/ atau sekitar hutan dalam rangka Sosial Forestri. Sosial Forestri merupakan suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan pada kawasan hutan negara/ dan atau hutan hak, yang memberi kesempatan kepada masyarakat setempat sebagai pelaku dan/ atau mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan kelestarian hutan. Hal penting dari terbitnya peraturan di atas adalah pengakuan Departemen Kehutanan tentang perlunya mewujudkan hutan lestari melalui sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat (Awang, 2004).

Berdasarkan premis kemasyarakatan (*societal premises*) yang penting bagi strategi pelestarian hutan atau pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan, seperti dikemukakan oleh Sardjono (2004), yaitu masyarakat perlu mengelompokkan dirinya dalam suatu komunitas yang memiliki nilai-nilai bersama atau saling komplementer dalam merealisasikan tujuan-tujuan masing-masing anggota komunitas. Menurut Awang (2004), pemerintah harus memposisikan hutan rakyat, hutan adat dan hutan negara (publik) sebagai satu kesatuan ekosistem, termasuk unsur manusia, pranata sosial, kelembagaan, hak dan kewajiban setiap pelaku, dan kesetaraan dan pengakuan hukum, ekonomi dan politik harus dibangun bersama-sama, dengan tetap mengacu kepada kepentingan individu dan kepentingan publik. Lebih lanjut mengutip pernyataan Kaban (2006) pada seminar Internasional dan Workshop Agroforestry, tanggal 7 Pebruari 2006, sebagai berikut:

"Community involvement in the forest management is very important as an effort to combat deforestation and to guarantee the continuity of management and production and also to improve people welfare not only for the community but also for the region. Forest development carried out by the community means generating income for the community. Thus, it needs institution support which established and stand alone by improvement of knowledge for farmers and all stakeholders".

Kegiatan hutan rakyat, terutama di luar Jawa sebagai bagian dari program sosial forestri yang pengelolaannya berbasis masyarakat, merupakan kegiatan pemerintah (Departemen Kehutanan) untuk merespon keadaan sosial politik dan budaya yang sudah berubah. Terbitnya peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.04/Menhut-v/2004 (Departemen Kehutanan, 2004a) tentang Penyusunan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui DAK-DR, terutama untuk kegiatan penghijauan (Hutan Rakyat) untuk luar kawasan hutan dan kegiatan reboisasi untuk dalam kawasan hutan merupakan dorongan yang signifikan dalam mengatasi permasalahan lahan kritis dan kemiskinan masyarakat pedesaan sekitar hutan. Arnold (1992) yang dikutip oleh Awang (2006) mengatakan bahwa karena masyarakat lokal tinggal dekat hutan, pengguna pertama hasil hutan dan menciptakan tata aturan yang secara nyata mempengaruhi kondisi hutan, maka melibatkan masyarakat secara aktif dalam skema pengelolaan hutan sekarang ini penting sekali diperhatikan oleh banyak peneliti dan pembuat kebijakan.

Beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman pelaksanaan pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang telah berkembang di beberapa daerah di Indonesia, antara lain adalah: (1) hampir seluruh kasus yang dikaji sistem penguasaan sumberdaya lahan dan hasilnya ada pada individu atau keluarga. Masyarakat lebih memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk berusaha memenuhi kebutuhankebutuhan pangan, sandang, papan, pendapatan dan kebutuhan hidup lainnya; (2) ada kecendrungan sistem penguasaan lahan yang individual relatif lebih berorientasi komersial, sedangkan yang komunal lebih berorientasi subsisten; (3) pola struktur dan komposisi hutan lebih banyak berbentuk *agroforest* atau beragam lapisan tajuk dan jenis produk. Masyarakat pedesaan lebih cenderung memilih aman (*safety first*), baik dari dimensi waktu maupun besaran resiko. Mereka dapat memperoleh produk untuk konsumsi sendiri, untuk kepentingan sosial, untuk pendapatan tunai, untuk tabungan atau pendapatan jangka panjang; (4) sistem pengelolaan hutan oleh masyarakat bukan hanya mewujudkan orientasi keuntungan individu pengelola, melainkan juga memperhatikan masyarakatnya (Suharjito dkk, 2000).

Menurut Awang (2003), pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang dikembangkan di Indonesia, hendaknya bertumpu pada filosofi antara lain sebagai berikut:

- 1) Menjamin dan membangun keadilan sosial dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin pedesaan.
- 2) Sebagai instrumen untuk mewujudkan model desentralisasi dan devolusi pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia untuk mencapai kemandirian daerah dalam menyelesaikan banyak hal tentang hutan, lahan dan lain-lain.
- 3) Dapat dijadikan pintu masuk "pembuka" untuk memulai dialog kebijakan yang interaktif, terbuka, adil dan demokratis tentang pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia.

C. Program Hutan Rakyat

Sejak adanya reformasi dan kebijakan desentralisasi, terdapat perdebatan yang hangat mengenai siapa yang seharusnya mempunyai hak atas kawasan hutan dan siapa yang mendapat hak untuk mengelola hutan. Salah satu konsep yang ditawarkan oleh pemerintah untuk mengakomodir peran serta masyarakat dalam mengelola hutan adalah program hutan rakyat. Kebijakan ini diperlukan oleh masyarakat pedesaan sekitar hutan untuk mendapatkan kepastian hak atas tanah, hutan dan kekayaan di dalamnya agar dapat dikelola secara mandiri berdasarkan aturan adat yang didukung oleh pemerintah setempat.

Dalam UU Nomor 41 tahun 1999 (Departemen Kehutanan, 1999) dijelaskan bahwa hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat. Lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.04/Menhut-V/2004: 111-2 bahwa Hutan Rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimum 0,25 Ha, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50%. Menurut Dwiprabowo dan Hendro (2005), hutan rakyat yang dikembangkan di atas tanah milik memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai komplemen terhadap hutan produksi.

Kegiatan hutan rakyat (*farm forestry*) merupakan salah satu bentuk dari *social forestry* (sebagian pakar menterjemahkan menjadi perhutanan sosial, Nurrochmat, 2005), selain kehutanan masyarakat (*community forestry*). Perhutanan sosial menawarkan satu pendekatan yang dikaitkan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan dan pemerintah. Istilah hutan rakyat atau usaha tani kehutanan telah muncul sebagai satu alternatif model untuk menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh semakin luasnya jumlah pohon yang hilang dari hutan-hutan yang ada di muka bumi dan berkurangnya penutupan bumi oleh hutan di negara-negara sedang berkembang. Dengan membantu masyarakat pedesaan agar menanam pohon dilahan sendiri, biaya penghutanan kembali dapat dikurangi (Awang, 2004).

Menurut Awang dkk (2001), konsep hutan rakyat bukanlah sebaran atau hamparan lahan yang seluruhnya ditumbuhi pohon-pohonan, namun merupakan hamparan lahan yang di dalamnya tumbuh berbagai macam tumbuhan tanaman keras, tanaman pangan, tanaman hijauan makanan temak, tanaman kayu bakar, tanaman non kayu dan buah-buahan. Hutan rakyat merupakan bank data dan bank kehidupan keluarga bagi masyarakat pedesaan sekitar hutan, sekaligus gambaran ekosistem sempurna dari bentang alam (*landscape*).

Ada beberapa bentuk hutan rakyat, antara lain: a) hutan tanaman murni, yaitu hutan yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan, yang seluruhnya ditanami satu jenis kayu-kayuan, dengan menerapkan silvikultur intensif; b) hutan tanaman campuran, yaitu hutan yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan, yang seluruhnya ditanami berbagai jenis kayu-kayuan, dengan menerapkan silvikultur intensif; dan c) agroforestri yaitu manajemen pemanfaatan hutan secara optimal dan lestari, dengan cara mengkombinasi kegiatan kehutanan dan pertanian pada unit pengelolaan lahan yang sama, dengan memperhatikan kondisi lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sehingga masyarakat dapat berperan serta (Departemen Kehutanan, 2002).

Pola yang dapat dikembangkan pada kegiatan hutan rakyat adalah: 1) pola swadaya, yaitu hutan rakyat yang dibangun oleh kelompok atau perorangan dengan kemampuan modal dan tenaga dari kelompok atau perorangan itu sendiri; 2) pola subsidi, yaitu hutan rakyat yang dibangun melalui subsidi atau bantuan sebagian atau keseluruhan biaya pembangunannya; 3) pola kemitraan, yaitu hutan rakyat yang dibangun atas kerjasama masyarakat dan perusahaan swasta/koperasi dengan insentif permodalan bunga ringan. Menurut Aryadi (2000), bentuk usaha kegiatan hutan rakyat dapat berbentuk unit usaha dalam model kegiatan hutan rakyat seperti Koperasi Usaha Perhutanan Rakyat atau Mitra usaha yaitu merupakan usaha bersama antara masyarakat (kelompok tani hutan rakyat) dengan pihak swasta yang ada hubungan keterkaitan usaha. Dengan adanya keterkaitan usaha tersebut diharapkan akan menjadi jaminan akses pasar terhadap hasil hutan rakyat yang berkesinambungan.

Berdasarkan perkembangannya, maka kegiatan hutan rakyat dapat dianalisa melalui pendekatan *SWOT analysis*, dan diketahui bahwa kekuatan (S) yang dimiliki antara lain adalah dukungan pemerintah (kebijakan dan modal), adanya pasar, ketersediaan tenaga kerja pedesaan, budaya masyarakat dalam berkebun; kelemahan (W), yaitu permodalan yang lemah dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relatif rendah, kelembagaan; peluang (O) yaitu kondisi industri perkayuan yang kekurangan bahan baku, konsumsi kayu rumah tangga yang terus meningkat dan era globalisasi perlu produk kayu yang berasal dari ramah lingkungan dan jelas asal-usul; dan hambatan (T) yaitu persaingan kualitas kayu dan adanya produk substitusi (Aryadi, 2000). Menurut Awang (2003), untuk mensikapi kebijakan, maka perlu memperhitungkan berbagai ragam dampak positif dan negatif, kendala dan tantangannya. Berdasarkan bukti empiris, ternyata hutan rakyat di Jawa, khususnya di Kabupaten Gunung Kidul telah ditemukan bahwa tataniaga kayu jati rakyat belum efisien dan masih minimnya perhatian terhadap masalah pengelolaan dan pengembangan produknya (Awang, 2005a).

Lebih jauh Awang (2003), mengatakan bahwa satu pandangan yang sudah waktunya untuk diubah adalah masih adanya anggapan bahwa lahan kritis hanya akan dapat dihijaukan jika didukung oleh dana yang besar. Ada banyak bukti hutan rakyat terbentuk tanpa melalui program pemerintah, namun juga tidak dipungkiri adanya program penghijauan semakin memacu munculnya hutan rakyat di desa-desa. Hal ini dikuatkan oleh Tjondronegoro (1984), campur tangan pemerintah dalam usaha pembangunan sangatlah diharapkan melalui pendekatan yang diasosiasikan dengan usaha memperbaiki nasib rakyat. Setiap pendekatan memerlukan pengertian terhadap

pola-pola interaksi sosial yang ada dan berlangsung secara nyata antara kelompok-kelompok masyarakat yang mendukung berbagai lembaga dan organisasi sosial.

D. Rekam Jejak Kebijakan Program Hutan Rakyat

Rekam jejak kebijakan program hutan rakyat oleh Pemerintah Indonesia dapat dibagi dalam 3 (tiga) fase, yaitu saat kemerdekaan hingga berakhirnya Orde Lama, saat Orde Baru, dan saat Reformasi. Ketiga fase ini dibedakan karena perbedaan paradigma dan kondisi politik kenegaraan yang berbeda pula.

Era Orde Lama

Berdasarkan penelaahan literatur berhubungan dengan sejarah kebijakan tentang program hutan rakyat di Indonesia, maka setidaknya program tersebut pernah dicanangkan pada tahun 1945, melalui Gerakan Penghijauan, sebagai salah satu bagian program Rencana Kemakmuran Indonesia (RKI) (Djajapertjunda, 2003). Alasan dilaksanakannya Gerakan Penghijauan tersebut adalah untuk pemenuhan kebutuhan kayu yang semakin meningkat, khususnya di Jawa. Gerakan Penghijauan dilakukan dengan menanam tanah-tanah kosong dengan tanaman buah-buahan, tanaman kayu dan lain-lain.

Pada tahun 1956, Departemen Pertanian dan Jawatan Kehutanan mulai meningkatkan usaha penghutanan dan penghijauan tanah-tanah kritis dengan menyelenggarakan Gerakan *Karang Kitri*, yaitu menanam pekarangan dan lahan-lahan milik masyarakat berupa tanah-tanah kosong dengan jenis tanaman yang bermanfaat. Gerakan penghijauan dan *Karang Kitri* ternyata telah membuahkan hasil yang cukup mantap, antara lain sebagian besar tanah di Pulau Madura, Gunung Kidul dan lainnya yang semula merupakan tanah tandus dan gersang menjadi kawasan yang hijau. Menurut versi Karjono (2007) dalam diskusi menyatakan bahwa hutan rakyat di Indonesia berdasarkan jalannya kebijakan dimulai pada tahun 1952, yaitu dengan dimulainya upaya rehabilitasi lahan dan konservasi tanah yang dikenal dengan istilah Penghijauan, dengan program rencana kesejahteraan istimewa pada kegiatan Penghijauan Tanah Kering (PTK).

Pada tahun 1961 kegiatan tersebut ditingkatkan sebagai gerakan massal dengan ditunjang penyuluhan dan penerangan yang ditandai dengan Acara Puncak Penghijauan selama sepekan yaitu dari tanggal 17 sampai dengan 23 Desember 1961 yang dilaksanakan di Puncak Mas Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan sebutan Pekan Penghijauan Nasional (PPN), berupa penanaman pohon Pinus (*Pinus merkusii*). Tujuan kegiatan ini adalah untuk penyelamatan tanah dan

air karena adanya penebangan yang berlebihan. Kegiatan ini telah memotivasi masyarakat melaksanakan penanaman pohon di atas lahan milik sendiri (Djajapertjunda, 2003).

Departemen Kehutanan dalam Kabinet Dwikora pada tahun 1964 telah mengambil inisiatif untuk meningkatkan pengembangan Hutan Rakyat yang menyebutkan bahwa Departemen Kehutanan: a) sebaiknya memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat mengenai tata cara pembangunan Hutan Rakyat yang benar; b) membantu sistem pemasaran; dan c) memberikan bantuan subsidi dana bagi pengembangan Hutan Rakyat.

Periode Orde Lama ini, kegiatan hutan rakyat lebih banyak dilaksanakan di Pulau Jawa. Beberapa alasan yang mendasari antara lain (Djajapertjunda, 2003):

- 1) Jumlah dan kualitas hutan negara di Jawa yang tidak memadai
- 2) Produksi kayu dari hutan negara tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Jawa
- 3) Tersedianya tanah milik rakyat yang belum produktif
- 4) Meningkatnya industri perkayuan di Pulau Jawa
- 5) Hutan konservasi yang jumlahnya terus menurun, sehingga keseimbangan tata air dikhawatirkan akan terganggu
- 6) Peran ekonomi dan sosial hutan milik makin dirasakan oleh masyarakat
- 7) Sebagai penyangga kehidupan yang dapat mengatur tata air, mencegah banjir, mengurangi erosi dan meningkatkan kenyamanan lingkungan.

Perjalanan program penghijauan dalam bentuk program hutan rakyat pada era orde lama ini lebih menitikkan pada pemanfaatan lahan kosong yang ada di Pulau Jawa yang didorong oleh faktor kebutuhan kayu yang semakin meningkat. Pertumbuhan penduduk yang tinggi memerlukan peluang usaha yang banyak pula, sehingga program hutan rakyat dapat mengakomodir tenaga kerja yang berlimpah tersebut. Menurut Djajapertjunda (2003), hutan milik (hutan rakyat) akan dapat meningkatkan peranannya dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pasokan kayu, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan PAD dan lain-lain.

Era Orde Baru

Sejalan dengan perkembangan waktu yang menuntut penanganan yang lebih intensif, maka pada tahun 1976/1977 telah dimulai program Bantuan Penghijauan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres).

Program penghijauan dilaksanakan di luar kawasan hutan negara, salah satunya adalah program hutan rakyat. Tujuan dari program hutan rakyat ini adalah untuk mempercepat penanaman di lahan kosong milik masyarakat, memberikan peluang kerja, dan memenuhi kebutuhan kayu di pasar lokal.

Mulai tahun 1990, pemerintah juga telah membuat program pengendalian tanah kritis, salah satunya melalui Program Penghijauan Nasional. Pada tahun 1995, untuk lebih mengintensifkan kegiatan di atas, maka dibentuklah Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah (PKT) yang juga ditunjang oleh Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (BRLKT) sebagai perencana kegiatan.

Sasaran pembangunan Hutan Rakyat meliputi:

- 1) Tanah-tanah milik rakyat yang menurut kemampuan tanahnya, tidak sesuai untuk pertanian tanaman semusim, tetapi baik untuk usaha tani hutan;
- 2) Tanah-tanah milik rakyat yang karena pertimbangan ekonomis lebih menguntungkan dijadikan hutan daripada usaha tani lainnya;
- 3) Tanah-tanah milik rakyat yang berada di hulu sungai dalam keadaan ditelantarkan;
- 4) Tanah-tanah milik rakyat dengan kemiringan di atas 50% yang karena keadaannya, maka perlu dihutankan;
- 5) Tanah-tanah milik rakyat lainnya yang menurut pertimbangan khusus sebagai sumber mata air;
- 6) Tanah desa, tanah marga atau adat yang terlantar atau kritis.

Pada era orde baru, pemerintahan Indonesia masih belum sepenuhnya mendorong pengembangan program hutan rakyat untuk peningkatan pendapatan masyarakat. Program hutan rakyat pada era ini lebih menitik beratkan pada pemulihan tanah di lahan kritis, sehingga jenis tanaman yang ditawarkan lebih kepada jenis tanaman berkayu seperti sengon, akasia dan lamtoro. Pemilihan jenis yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat tentu akan mempengaruhi motivasi dan partisipasi dalam kegiatan tersebut.

Menurut Djajapertjunda (2003), untuk dapat mengembangkan tanaman kayu rakyat (hutan rakyat) diperlukan beberapa syarat sebagai landasannya, antara lain meliputi aspek-aspek:

- 1) Ketersediaan lahan;
- 2) Kemauan masyarakat petani untuk menanam kayu;
- 3) Aspek teknis yang dapat menjamin keberhasilan yang lebih baik;
- 4) Aspek ekonomi;
- 5) Aspek industri pengolahan;

- 6) Pemasaran; dan
- 7) Aspek sosial.

Era Reformasi

Memasuki era reformasi, pemerintahan Indonesia mendorong pelaksanaan otonomi daerah agar percepatan pembangunan di daerah-daerah dapat direalisasikan. Salah satu produk hukum yang dibuat adalah UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang dalam BAB III telah menyebutkan bahwa sektor kehutanan dapat diserahkan ke tingkat daerah atau kabupaten/kota. Dalam UU 22/99 tersebut, ternyata pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memanfaatkan (hasil) hutan dan menggunakan kawasan, dan ini dapat diartikan bahwa semua kegiatan penataan hutan, pemanfaatan, rehabilitasi dan perlindungan hutan mestinya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Hal ini tentu dapat pula dimanfaatkan untuk pengembangan program hutan rakyat di kabupaten/kota agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Sejalan dengan UU No. 22/99, untuk menghargai "aspirasi" masyarakat, Hidayat yang dikutip oleh Iskandar (2001) menyarankan sebaiknya pemerintah daerah dapat melakukan:

- 1) Pencatatan peraturan dan hukum adat yang masih dihormati dan dilaksanakan oleh masyarakat
- 2) Penguatan kemampuan sumberdaya manusia maupun lembaganya untuk meningkatkan kemampuan lembaga adat mengelola sumberdaya alam sesuai dengan tuntutan global. Penguatan ini juga memperkuat kemampuan masyarakat dalam bernegosiasi dengan pemilik modal
- 3) Pemetaan partisipatif, sebagai realisasi dari proses pemberdayaan masyarakat dan proses pengakuan hak adat serta hak mengelola hutan berdasar pola masyarakat
- 4) Pengelolaan hutan dan lahan partisipatif yang diakui oleh pemerintah dengan menggunakan peta tersebut sebagai acuan.

Saran di atas seharusnya bisa dilakukan dalam pengembangan program hutan rakyat di daerah-daerah. Namun sayangnya, hingga saat ini belum ada produk perundang-undangan meski setingkat Peraturan Bupati (Perbup) ataupun Peraturan Walikota (Perwali) yang mendorong pengembangan hutan rakyat bisa berhasil secara massal. Mengutip pendapat salah satu informan pendukung (Bapak Herman Cahyono) yang mengatakan:

"Di Kabupaten Tapin, meski menyadari manfaat yang besar dari hutan rakyat bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan, namun belum pernah ada Peraturan Bupati (Perbup) yang mengaturnya. Kami berharap hasil disertasi yang Bapak susun dapat mendorong terbitnya Perbup tentang hutan rakyat. Perbup hutan rakyat hendaknya memuat penetapan lokasi, pengalokasian sumber dan jumlah dana yang jelas, penghargaan bagi masyarakat yang aktif, dan pemasaran hasil".

Realita ini semakin terlihat dengan belum tersedianya peraturan perundangan bidang pengembangan hutan rakyat, sebagaimana dikemukakan oleh Winarno (2006). Dalam pernyataannya juga disebutkan bahwa Indonesia belum ada jaminan pasar kayu dari hutan rakyat, sehingga memang harus di atur dari sekarang jika ingin program hutan rakyat mendapat dukungan dari masyarakat secara swadaya.

Khusus di bidang kehutanan, pemerintah juga telah membuat UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam salah satu pasalnya, yaitu pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a) hutan negara; b) hutan hak. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut **hutan rakyat**.

Salah satu implementasi kebijakan dari UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang berkaitan dengan hutan hak adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak (Departemen Kehutanan, 2005b). Dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah, yang lazim disebut hutan rakyat yang di atasnya didominasi oleh pepohonan dalam suatu ekosistem yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. Selanjutnya diuraikan bahwa hutan hak mempunyai tiga fungsi yaitu:

a) fungsi konservasi; b) fungsi lindung; c) fungsi produksi (pasal 2 ayat 2). Kemudian pada pasal 20 ayat 1 disebutkan bahwa pemegang hak, berhak untuk: a) mendapatkan pelayanan; b) menikmati kualitas lingkungan; c) memanfaatkan hutan sesuai dengan fungsinya; d) memperoleh insentif; e) menentukan bentuk pemanfaatan hutan.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.421/Menhut-II/2006, tentang Fokus-fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan pada tanggal 15 Agustus 2006 (Departemen Kehutanan, 2006b), berdasarkan

lampiran Keputusan Menteri Kehutanan, maka *Pengembangan Hutan Rakyat* berada pada fokus kegiatan nomor 13 dengan penanggungjawab Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan, di bawah Direktorat Jenderal RLPS (Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial). Dalam pelaksanaan di lapangan, sejak diluncurkannya Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL/Gerhan), periode tahun 2002-2007, maka kegiatan hutan rakyat menjadi bagian kegiatan Gerhan yang melekat pada Program Departemen Kehutanan dengan dana APBN. Sejak saat itu, program hutan rakyat kembali bersifat "sentralistik", karena diatur dari pusat.

Kebijakan terakhir berkaitan dengan hutan hak (khususnya hutan rakyat) yang dapat dihipunkan yaitu PP No 6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Departemen Kehutanan, 2007), dari pasal 100 hingga pasal 103 mengatur pengelolaan hutan hak sebagai berikut:

Pasal 100

1. Hutan hak dapat ditetapkan sebagai hutan yang berfungsi :
a. konservasi; b. lindung; atau c. produksi.
2. Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya.
3. Pemanfaatan hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi pemegang hak dengan tidak mengurangi fungsinya.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 101: Pemerintah menetapkan hutan hak yang berfungsi konservasi dan lindung dengan memberikan kompensasi.

Pasal 102:

1. Hutan hak yang berfungsi konservasi dan/atau lindung dapat diubah statusnya menjadi kawasan hutan
2. Dalam hal hutan hak ditetapkan menjadi kawasan hutan lindung atau kawasan hutan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memberikan ganti rugi kepada pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103: Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya wajib mengembangkan hutan hak melalui fasilitasi, penguatan kelembagaan, dan sistem usaha.

Dari uraian pasal-pasal di atas, maka dalam pasal 103 sudah jelas bahwa, pemerintah (pusat), pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya wajib untuk mengembangkan

hutan hak (baca hutan rakyat) melalui fasilitasi, penguatan kelembagaan dan sistem usaha. Namun realita di lapangan, hingga saat ini fasilitasi dan penguatan kelembagaan sangatlah terbatas, apalagi untuk fasilitasi sistem usaha. Kenyataan ini dapat menurunkan minat dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan hutan rakyat.

Menurut Djajapertjunda (2003), beberapa upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program hutan rakyat, antara lain:

- 1) Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pengadaan kayu dan kebutuhan lingkungan yang sehat dan benar
- 2) Mengusahakan agar nilai jual kayu cukup wajar, adil, transparan dan wajar
- 3) Kemudahan untuk mendapatkan bibit yang diperlukan mudah diperoleh dengan harga wajar
- 4) Kemudahan dalam pengurusan dokumen angkutan dan distribusi kayu dari tanah milik
- 5) Pengurangan beban-beban biaya pungutan terhadap kayu yang berasal dari tanaman rakyat
- 6) Peningkatan industri perkayuan yang dapat menampung kayu dari tanaman rakyat dari berbagai jenis tanaman
- 7) Peningkatan dorongan pemerintah dalam membangun hutan milik, antara lain dengan menyediakan bantuan bibit berkualitas dengan harga wajar, bimbingan teknis dan pemasaran.

Pendapat di atas, ada benarnya jika dibandingkan dengan pengembangan program hutan rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut informan ahli (Bapak Supiani), beberapa kondisi yang harus diperhatikan agar partisipasi masyarakat bisa meningkat, diuraikannya sebagai berikut:

"Hasil pengamatan kami di lapangan, beberapa kegagalan dari program hutan rakyat di Kalimantan Selatan antara lain karena bibit yang disediakan tidak sesuai aspirasi masyarakat, tidak tersedia dana pemeliharaan, dan kurangnya dukungan tenaga teknis. Melihat keberhasilan di Desa Malilingin dan Desa Pualam Sari dalam melaksanakan program hutan rakyat, ada faktor pendorong yang dominan, antara lain adalah adanya early adopter (seperti Bapak H. Jam-jam di Malilingin dan Bapak Wijayat di Pualam Sari), ketersediaan bibit yang sesuai aspirasi (karet), adanya tenaga teknis yang membantu di lapangan dan administrasi kelompok tani".

Ditambahkan Bapak Supiani,

"Dari sisi pemerintah daerah, kami di daerah kadang mengalami kesulitan dalam penyediaan bibit sesuai aspirasi masyarakat, sebab sering bibit sudah ditentukan oleh pemerintah pusat".

Penyusunan perencanaan yang masih *top-down* dalam bidang kehutanan sangatlah bertentangan dengan era reformasi yang menuntut desentralisasi, khususnya yang berhubungan dengan masyarakat pedesaan sekitar hutan yang melaksanakan program hutan rakyat. Menurut Iskandar (2001), mengingat bahwa di masa lampau semua peraturan dan perundang-undangan bersifat *input driven* dan telah gagal, maka sebaiknya di masa desentralisasi dan otonomi daerah semua peraturan dan perundang-undangan bersifat *outcome based*, sebagai manifestasi dari proses demokrasi dalam manajemen sumber daya hutan.

Menurut data dari Departemen Kehutanan, hingga tahun 2004 luasan hutan rakyat di Indonesia terdapat seluas 1.568.415,63 Ha dengan perkiraan potensi 39.416.557,49 m³. Dari luasan hutan rakyat tersebut, terdiri dari 996.722,27 Ha hutan rakyat swadaya, 131.090,53 Ha hutan rakyat subsidi, 41.785,91 Ha hutan rakyat melalui KUHR, 18.917,92 Ha hutan rakyat DAK DR 40%, dan 409.899 Ha hutan rakyat kegiatan GNRHL (Departemen Kehutanan, 2004b).

E. Kebijakan Hutan Rakyat Kedepan

Dari materi kebijakan yang telah di uraikan di atas, maka dapat kita pahami bahwa hutan rakyat dikembangkan pada alas atau lahan yang dibebani hak yang berada di luar kawasan hutan negara. Pada kenyataannya, ada banyak pengelolaan hutan oleh rakyat yang berada di dalam kawasan hutan Negara, yakni hutan adat yang dikelola masyarakat secara turun-temurun, seperti *Hak Ulayat* di Sumatera Barat, *Tanah Patuanan* di Maluku, *Tanah Marga* di Sumatera Utara. Realita ini menghadapkan pemerintah untuk dapat menyikapi secara bijak agar pengertian hutan rakyat ataupun batasan hutan rakyat dapat diperbaiki untuk mengakomodir kondisi hutan adat yang berada di dalam kawasan hutan negara. Hingga saat ini pemerintah hanya mengakomodir sebagai hak tanam dan hak pakai (garap).

Sebagaimana kita sadari, bahwa keberadaan hutan rakyat kedepannya akan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan kayu untuk masyarakat, karena kayu dari hutan alam akan sangat mahal harganya dan ketersediaannya terbatas. Hutan rakyat juga berfungsi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui getah

dan kayunya, pohon dan tanaman hutan rakyat dapat melindungi tanah dan mengatur tata air. Hal ini juga sudah diramal jauh-jauh hari oleh von Monroy ahli kehutanan dari FAO, pada tahun 1952, yang menghimbau agar Indonesia mulai membina hutan karena potensi yang besar untuk turut dalam memenuhi kebutuhan kayu dan hasil industri kayu di dunia. Mengutip artikel yang dirilis oleh Wikipedia (2009), bahwa pengelolaan hutan rakyat secara komersial telah dimulai semenjak beberapa ratus tahun yang silam, terutama dari wilayah-wilayah di luar Jawa. Hutan-hutan --atau tepatnya, kebun-kebun rakyat dalam rupa hutan-- ini menghasilkan aneka komoditas perdagangan dengan nilai yang beraneka ragam. Terutama hasil-hasil hutan non-kayu (HHNK). Bermacam-macam jenis getah dan resin, buah-buahan, kulit kayu dan lain-lain. Bahkan kemungkinan aneka rempah-rempah yang menarik kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara, sebagian besarnya dihasilkan oleh hutan-hutan rakyat ini

Pembangunan hutan dapat dilaksanakan di lahan-lahan milik rakyat sekaligus merupakan usaha penanggulangan lahan kritis dan peningkatan pendapatan. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Eric Lundquist (Guru Besar berkebangsaan Swedia, pada Bagian Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Indonesia Cabang Bogor (sekarang IPB) pada tahun 1957, yang menyatakan bahwa kemungkinan penanaman pohon kayu oleh masyarakat di Indonesia sangat besar, sehingga perlu penelitian pengembangan hutan rakyat (Djajapertjunda, 2003).

Menurut Djajapertjunda (2003:64), berdasarkan pengalaman yang sudah berlalu, pengembangan hutan rakyat dilaksanakan melalui pendekatan keproyekan. Sifat dari keproyekan antara lain adalah:

- 1) Dilaksanakan dalam waktu yang pendek
- 2) Biaya yang dikeluarkan mahal
- 3) Para pelaksana cenderung mengurus keuangannya dari pada keberhasilannya.

Dari uraian kebijakan di atas, maka ke depannya perlu didorong program hutan rakyat tidak lagi sebagai sebuah proyek, namun menjadi sebuah **gerakan** yang didasari kesadaran masyarakat sendiri. Sebagai sebuah gerakan, maka tentu semua pihak harus terlibat aktif secara sinergis sesuai dengan peran dan fungsinya, termasuk mekanisme hubungan kerjanya. Untuk mendukung gerakan hutan rakyat, maka dipandang perlu untuk membuat regulasi pemanfaatan lahan hutan oleh masyarakat, salah satunya melalui program *landreform* untuk kemaslahatan rakyat. Meminjam komentar seorang subjek (Bapak Gunadi) sebagai berikut:

"Kalau BLT dikota diartikan sebagai Bantuan Langsung Tunai, maka kami di desa BLT harus diartikan sebagai Bagi-bagi Lahan Tidur. Dari pada banyak lahan yang disebut hutan Negara tapi tidak ada tanamannya alias gundul, lebih baik dimanfaatkan oleh masyarakat untuk ditanam tanaman yang bermanfaat".(S1.B)

Hal di atas sejalan dengan pendapat Jauhari (2007), pelestarian hutan rakyat secara masal dan serentak di berbagai wilayah di Indonesia menjadi lebih mudah jika program *reformasi agraria* yang direncanakan oleh pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono, yang akan membagikan tanah seluas lebih dari 17 juta hektar kepada rakyat miskin, dapat terlaksana. Distribusi lahan itu harus benar-benar sampai ke tangan masyarakat miskin. Masyarakat yang mendapat bagian distribusi (sebanyak dua hektar tanah perkeluarga) itu tidak kemudian menjualnya kepada investor. Selain itu, masyarakat juga harus disadarkan tentang pentingnya hutan bagi ekologi, demikian pula keuntungan finansial jika mereka dapat mengelola dan melestarikan hasil hutan melalui program hutan rakyat.

Sebagaimana kita pahami, bahwa kebijakan pemerintah haruslah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Mengutip pendapat Islamy (2009), kebijaksanaan negara itu harus mengabdikan pada kepentingan masyarakat. Lebih lanjut diuraikan bahwa kebijaksanaan negara itu merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Dengan demikian, kebijakan hutan rakyat pada masa mendatang harus lebih memperhatikan kepentingan masyarakat banyak.

Mengikuti perkembangan terkini, hutan rakyat yang secara ekosistemnya tidak berbeda jauh dengan hutan alam, selayaknya juga dipertimbangkan dan dibuatkan regulasinya sebagai bagian dari usaha untuk mereduksi emisi dalam rangka pengurangan pemanasan global (*global warming*). Secara teknik, hutan-hutan rakyat ini pada umumnya berbentuk wanatani; yakni campuran antara pohon-pohonan dengan jenis-jenis tanaman bukan pohon. Baik berupa wanatani sederhana, ataupun wanatani kompleks (*agroforest*) yang sangat mirip strukturnya dengan hutan alam (Dewi, 2009).

Indonesia dengan luasan hutan alam 90 juta hektar dan hutan rakyat 1,2 juta hektar memiliki potensi yang besar yang belum termanfaatkan sepenuhnya untuk menyelamatkan lingkungan dari perubahan iklim (Departemen Kehutanan, 2008). Menurut Teddy Rusolono yang dikutip Dewi (2009), bahwa hutan berbasis masyarakat dan tipe pengelolaan hutan skala kecil lainnya dapat memasuki pasar

karbon sukarela, tidak perlu mengikuti pasar karbon antar negara dimana kebijakan dari pemerintahpun belum siap. Masuknya hutan berbasis masyarakat ke dalam perdagangan karbon perlu didukung karena berkesempatan untuk memperoleh nilai tambah dari hutan rakyat selain hasil hutan kayu dan non-kayu.

Berdasarkan hasil penelitian, maka sebenarnya program hutan rakyat di Indonesia ini dapat berhasil jika pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan pelaksananya (khususnya Departemen Kehutanan) mau belajar dari kegagalan yang telah lalu. Pemerintah harus berani merubah paradigma dari penguasa lahan menjadi penyedia lahan, dari "pemerintah" menjadi "mitra" bagi masyarakatnya, dan dari penerima keuntungan menjadi pembagi keuntungan. Khusus untuk pengembangan program hutan rakyat, pemerintah harus berani memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut mengelola kawasan hutan negara, tidak hanya swasta saja. Sejalan dengan nafas *Good Governance* (Tata Pemerintahan yang Baik), maka pemerintah harus melaksanakan tiga pilarnya, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Kegiatan kehutanan harus diketahui (transparan) dari perencanaan hingga penikmatan hasilnya, harus melibatkan masyarakat seluas-luasnya (partisipasi), dan dapat dikalkulasi dan dipertanggung-gugatkan dana (akuntabilitas) yang telah dikeluarkan untuk kegiatan tersebut.

Program hutan rakyat jika ingin membumi, maka setidaknya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memasukkan unsur sosial-budaya masyarakat sasaran dalam penyusunan rencana pengembangan hutan rakyat
- 2) Membenahi kebijakan-kebijakan yang tidak pro-rakyat, misalnya hutan rakyat tidak hanya dilaksanakan di lahan milik, tetapi bisa juga di kawasan hutan negara (ada hak kelola untuk rakyat), hak-hak adat atau ulayat harus dihormati dan diakomodir dalam mengelola hutan, terutama yang berada di dalam kawasan.
- 3) Penentuan jenis tanaman disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan masyarakat sasaran, tidak di sama-ratakan di seluruh Indonesia
- 4) Sistem pembiayaan yang tidak bersifat keproyekan, tetapi bersifat multi tahun (*multi-years*), sehingga tidak hanya dana untuk menanam, tetapi juga ada dana pemeliharaan sekurangnya untuk 2 (dua) tahun setelah ditanam.
- 5) Program hutan rakyat sudah saatnya menjadi Gerakan Hutan Rakyat (GHR), dan setiap tahun dilaksanakan puncak kegiatan yang dilaksanakan di provinsi yang berbeda, sebagaimana PPN zaman orde baru. Puncak Gerakan Hutan Rakyat (PGHR) harus

menjadi pemicu bagi seluruh komponen masyarakat untuk menanam pohon di sekitar tempat tinggalnya, di sekitar desanya hingga tidak ada lagi lahan kosong.

- 6) Bagi perusahaan yang bernuansa "perusak alam", seperti perusahaan tambang batubara, tambang minyak dan lainnya, maka sebagian dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang ada dialokasikan untuk kegiatan Gerakan Hutan Rakyat di daerah sekitarnya
- 7) Bagi masyarakat dan kelompok masyarakat yang berhasil melaksanakan Gerakan Hutan Rakyat (GHR) perlu diberikan insentif, bukan hanya undangan mengikuti hari kemerdekaan dan sehelai kertas tanda penghargaan, tetapi perlu diberikan insentif yang riil dan bermanfaat, seperti bantuan bibit berkualitas dan sarana pendukungnya.
- 8) Segera membuat kebijakan, minimal setingkat Perbup/Perwali untuk pengembangan GHR di masing-masing kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
- 9) Membuat kebijakan tentang sistem pemasaran hasil hutan dari hutan rakyat, dan pusat informasi pemasaran hasil hutan rakyat di tingkat kabupaten/ kota.
- 10) Pemerintah dan swasta harus mampu menyediakan bibit yang unggul, murah dan mudah didapatkan untuk pengembangan GHR.

BAB 3

TINJAUAN ADAPTASI BUDAYA DAN PERUBAHAN SOSIAL

A. Hubungan Manusia dan Lingkungan

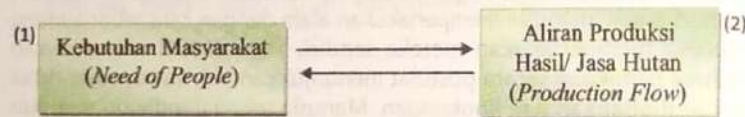
Menurut Bennet (1976) yang dikutip oleh Kartasubrata (2003), bahwa hubungan manusia dengan alam pada dasarnya adalah bersifat kebudayaan, dalam arti nilai-nilai manusia mengenai pencakupan kebutuhan, atau bersifat sosial, mencakup pengaturan-pengaturan kelembagaan khusus yang melibatkan pengaruh fisik lingkungan baik besar maupun kecil. Dari sudut pandang ini, ekologi manusia sangat akrab hubungannya dengan ekologi kebudayaan (atau ekologi sosial), yang berarti bahwa studi mengenai pokok-pokok masalah ekologi pada akhirnya menjadi penjelajahan ke dalam masalah-masalah kemanusiaan: manusia memperlakukan alam dengan cara sebagaimana mereka memperlakukan mereka sendiri. Hidir (2004) menekankan bahwa pemikiran secara postulat menunjukkan bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan. Manusia sebagai individu maupun kelompok adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan lingkungannya.

Dalam pemikiran ekosistem, sangat jelas bahwa hutan dan fungsi hutan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh manusia dalam memanipulasi penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan untuk kepentingan kehidupan dan lingkungan. Jutaan masyarakat pedesaan kehidupannya tergantung kepada produksi dan jasa hasil hutan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun. Dilain pihak, jutaan manusia lainnya baik regional, nasional maupun internasional yang berada di luar orbit pedesaan juga sangat memerlukan produksi dan jasa dari sumberdaya alam hutan untuk rekreasi, penelitian, sumber ekonomi, penjaga lingkungan dan penjaga kelestarian plasma nftah untuk kebutuhan manusia, tumbuhan dan hewan, dan lainnya (Awang, 2003).

Berkaitan dengan ekosistem, Tucker yang dikutip oleh Hidir (2004) menjelaskan bahwa ekosistem adalah suatu ruang lingkungan

dimana semua interaksi dan hubungan timbal-balik berlaku di antara segala makhluk hidup dan lingkungan fisik. Di dalam suatu ekosistem ada bagian lingkungan fisik (tidak hidup) seperti air, tanah, udara, sinar matahari, dan ada lingkungan hidup (*biome*) yang terdiri dari makhluk-makhluk hidup dan seluruh interaksinya. Jadi jelaslah, bahwa ekosistem berkenaan dengan fungsi struktur dan fungsi interrelasi kehidupan organisme dengan lingkungan fisik, termasuk di dalamnya manusia sebagai makhluk biologis yang beradaptasi dalam berevolusi. Atau dengan kata lain, interaksi manusia dengan lingkungan adalah pemahaman yang integral dari konsep ekosistem.

Menurut Apriyantono (2006), tidak ada seorangpun yang menolak bahwa hubungan antara hutan dalam kehidupan manusia sangatlah penting. Sangatlah diharapkan terjadinya sinergi dan saling melengkapi antara alam dan manusia secara harmonis. Awang dkk (2002) menambahkan, manusia dan alam menjadi bagian yang tidak terpisahkan, manusia memanfaatkan alam sekaligus menjaganya. Alam yang potensinya terjaga dan terpelihara akan memberikan manfaat bagi hidup dan kehidupan masyarakatnya. Lebih jauh diuraikan hubungan saling ketergantungan dan membutuhkan antara hutan dan masyarakat yang digambarkan oleh Awang (2004) sebagaimana dapat kita lihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Hubungan Manusia dan Hutan

Keterangan: (1) = Nomor urut proses
= Hubungan saling membutuhkan

Lebih lanjut Hawley (1950) menjelaskan:

"Organism and environment are therefore two indefinitely variable factors. The relation between the two is a fundamental dependence of one on the other, of organism on environment. It is this relationship which constitutes our primary concern".

Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa hubungan makhluk hidup dengan lingkungan alam sangatlah erat dan saling ketergantungan satu sama lain. Dengan kata lain, sekiranya ada salah

satu yang tidak berjalan sesuai fungsinya, maka akan mempengaruhi komponen lainnya dan akan berlanjut hingga terjadi penyesuaian kembali atas perubahan yang telah terjadi tersebut. Sehingga dapat kita pahami bahwa manusia dan lingkungan hidup begitu penting untuk dipelajari karena masing-masingnya bersifat kontinum saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lainnya.

Horkheimer yang dikutip oleh Awang (2005a), mencoba menjelaskan bagaimana hubungan antara manusia dengan alam pada abad modern ini. Dijaman kejayaan akal budi manusia yang ditandai dengan akal budi instrumental ini ternyata manusia memandang alam hanya untuk ditindas. Alam tak jadi dirasionalkan karena ulah manusia modern tadi, akibatnya alampun memberontak dan manusia kini ganti ditindas. Lebih jauh dijelaskan, dulu manusia masih bisa menghargai alam, kini tanpa ampun alam harus ditaklukkan. Orang modern banyak tidak konsisten, karena ketidak-konsistenan itu maka mengeksploitasi alam yang berlebihan menjadi sah dan halal (Awang, 2005a; Sindhunata, 1982). Ini juga pernah diutarakan oleh Rousseau yang dikutip oleh Priyono (2001): "Hutan adalah pakaian bumi, dan manusia cenderung merobek-robeknya". Dalam konteks Indonesia, khususnya kerusakan hutan yang semakin meluas (diperkirakan laju kerusakan 1,5 juta hektar/tahun, Nandika, 2005), maka pendapat di atas banyak kebenarannya.

B. Konsep Adaptasi Budaya terhadap Lingkungan

Adaptasi manusia telah banyak menarik perhatian para ilmuwan untuk diteliti, seperti penelitian yang dilaksanakan oleh Hawley (1950), Bennett (1976), Moran (1982), Geertz (1985), Soemarwoto (1997), dengan menelaah involusi sosial budaya sebagai bentuk adaptasi manusia (Gunawan, 2001; Susilo, 2004; Suyadnya, 2005), serta Koentjaraningrat (1987), mengandung pemahaman bahwa manusia oleh Tuhan sebagai penciptanya dianugerahi empat daya, yaitu: a) daya tubuh yang menjadikan manusia memiliki kekuatan fisik (organ tubuh dan panca indera); b) daya hidup yang menjadikan manusia memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan serta mempertahankan hidupnya dalam menghadapi tantangan; c) daya akal yang menyebabkan manusia memungkinkan memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi; d) daya kalbu yang memungkinkan manusia memiliki moral, merasakan keindahan dan lainnya.

Konsep adaptasi pada awalnya dipahami sebagai kajian dalam ekologi, khususnya ekologi manusia dengan kaitan utamanya adalah mengkaji bagaimana hubungan manusia dengan lingkungannya terutama lingkungan fisiknya. Berdasarkan pemikiran Rambo (1981),

konsep adaptasi berawal dari pendekatan ekologi humanistik yang menggambarkan tentang hubungan antara sistem sosial dengan ekosistem yang dilihat sebagai suatu kesatuan yang integral. Para Ekolog mendefinisikan adaptasi sebagai penyesuaian psikologi dari organisme terhadap suatu keadaan yang terjadi di sekitarnya dan kemampuan sistem untuk memodifikasi terhadap perubahan yang terjadi (Steiner, 2002). Lebih lanjut menurut Steiner (2002), hal yang berkaitan dengan adaptasi dalam ekologi manusia antara lain adalah:

Adaptation is displayed by "the adequacy of an organism to cope with the conditions of its natural environment and to utilize its resources so as to maintain its ecological position. It is achieved through an adjustment of its requirements and tolerance to the elements of the habitats".

Pemaknaan yang bisa diambil dari penjelasan di atas, bahwa adaptasi merupakan sesuatu yang yang dilakukan melalui kemampuan organisme (manusia) untuk mengatasi keadaan yang ada pada lingkungannya dan memanfaatkan sumberdaya tersebut sekaligus memeliharanya. Kemampuan untuk mengatasi tersebut dapat dicapai melalui pengaturan dari persyaratan-persyaratan dan toleransi terhadap elemen-elemen yang terdapat di lingkungan hidupnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang paling pandai beradaptasi. Melalui adaptasi manusia dapat bertahan hidup dari berbagai perubahan yang terjadi. Ditambahkan oleh Bennett (1976) yang dikutip oleh Sukadana (1983), bahwa unsur-unsur kebudayaan dan efeknya pada unsur-unsur lingkungan hidup merupakan hasil perilaku manusia yang dikendalikan oleh keputusan dan pilihan tertentu. Keputusan dan pilihan itu merupakan ekspresi adaptasi terhadap lingkungan hidup dan proses-proses perubahannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa adaptasi sebagai suatu perilaku yang secara sadar dan aktif dapat memilih dan memutuskan apa yang ingin dilaksanakan sebagai usaha penyesuaian.

Dari sudut perspektif kebudayaan, bentuk adaptasi manusia terhadap alam sebenarnya masuk dalam kajian ekologi budaya. Perhatian ekologi budaya ini ditujukan kepada adaptasi pada dua tataran, yaitu sehubungan dengan cara suatu budaya beradaptasi terhadap lingkungannya, dan kepada institusi-institusi dalam suatu budaya beradaptasi (Kaplan dan Manners, 1999 yang dikutip oleh Awang dan Nurhadi, 2005). Menurut Soemarwoto (1997), adaptasi budaya atau adaptasi kultural merupakan salah satu proses adaptasi yang dialami oleh masyarakat. Adapun adaptasi sendiri berarti penyesuaian diri dengan lingkungan yang berubah disekitarnya.

Adaptasi menurut Hawley (1950) merupakan suatu pemaknaan yang digunakan untuk menjelaskan bentuk perjuangan atau

perlawanan untuk mempertahankan diri secara spesifik, kreatif dari berbagai aspek. Lebih lanjut dijelaskannya bahwa: "*Adaptation is the securing and conserving of control over the environment*", maknanya bahwa adaptasi merupakan keterjaminan dan keterpeliharaan terhadap lingkungan yang dikontrol. Adapun menurut Sukadana (1983), konsep adaptasi berpangkal pada suatu keadaan lingkungan hidup yang merupakan problem untuk organisme dan penyesuaian atau adaptasi organisme itu merupakan penyelesaian dari problem tersebut.

Berdasarkan pendapat Haviland (1981), mengemukakan tentang adaptasi, yaitu:

"adaptation is the possession of anatomical, physiological, and/or behavioral characteristic that foster the survival of organism in the special environment conditions in which they are generally found".

Makna yang bisa jelaskan bahwa pada prinsipnya adaptasi merupakan proses penyesuaian diri manusia (sebagai bagian dari sistem sosial) untuk merespon terhadap perubahan-perubahan di sekelilingnya termasuk lingkungan fisik dan sosial budayanya. Asumsi penjelasan di atas berkembang karena adanya pemikiran bahwa manusia dan lingkungannya bukan merupakan suatu hal yang bersifat stagnan atau statis. Proses adaptasi sangatlah dinamis karena lingkungan dan populasi manusia berubah terus.

Adaptasi pada dasarnya merupakan suatu kerangka teoritis untuk memahami mekanisme yang diciptakan manusia untuk menyesuaikan diri mengatasi atau menyesuaikan lingkungan dengan kehidupan dan keinginan-keinginannya. Untuk itu maka dapat kita katakan bahwa adaptasi merupakan suatu proses di mana organisme atau kelompok organisme, termasuk kelompok-kelompok sosial seperti keluarga, kerabat, suku bangsa, negara atau pada pokoknya masyarakat dan ekosistemnya, mempertahankan keseimbangan (*homeostasis*) untuk menghadapi lingkungannya (Rapaport yang dikutip oleh Nurjaya, 1998).

Menurut Sztompka (2004), adaptasi merupakan salah satu dari hasil akhir proses sosial, yaitu dengan penyesuaian diri yang memungkinkan terpeliharanya struktur sosial yang stabil meskipun terjadi perubahan lingkungan. Adaptasi yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungannya menunjukkan adanya interaksi antara manusia dan lingkungannya. Dalam pendekatan ekologi manusia (*human ecology*) menekankan/menunjukkan adanya hubungan saling terkait (*interplay*) antara lingkungan fisik dan sistem sosial/budaya.

Rambo (1981) telah mengembangkan suatu model tentang sistem ekologi manusia yang menjelaskan bahwa adaptasi yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungannya menunjukkan adanya interaksi antara manusia dan lingkungannya, terutama lingkungan fisik dan sosial budaya. Keterkaitan terjadi antara sistem sosial (masyarakat/budaya) dan sistem ekologi yang mencakup perpindahan energi, materi dan informasi, dari satu sistem ke sistem lain dan di antara komponen dari masing-masing sistem. Dalam hubungan yang saling terkait ini, maka perubahan pada suatu komponen akan menyebabkan perubahan pada komponen lainnya. Hal ini berarti pula bahwa dalam interaksinya dengan lingkungan manusia menggunakan kebudayaan. Kebudayaan dalam perspektif ilmu sosial memiliki banyak pemahaman, seperti dalam kajian sosiologi dan antropologi. Secara keseluruhan terdapat beberapa perspektif dalam melihat kebudayaan, misalnya kebudayaan dilihat sebagai sistem yang saling berkaitan secara fungsional, sebagai sistem simbol, sebagai sistem kognitif atau sebagai sistem adaptif.

Dalam adaptasi sosial dikenal konsep strategi adaptasi (*adaptive strategy*) sebagai sintesa dari tingkah laku adaptif dan tindakan strategis. Strategi adaptif mengacu pada setiap tingkah laku untuk memenuhi kepuasan atau mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa strategi adaptif menyangkut aspek negatif yang menuju keberhasilan usaha manusia melalui tindakan-tindakan spesifik yang memang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Namun sebenarnya usaha untuk mengatasi lingkungan hidupnya tidak selalu bersifat adaptif, ada juga usaha-usaha yang bersifat tidak adaptif (*maladaptive*).

Menurut Gunawan (2001) berkaitan dengan kebudayaan, penyesuaian atau adaptasi akan dilakukan oleh masyarakat (manusia) jika kebudayaan masyarakat telah berubah. Penyesuaian budaya (*cultural adjustment*) dilakukan untuk merespon dengan cepat kepada perubahan-perubahan di lingkungannya. Penyesuaian dalam bidang kebudayaan termasuk di dalamnya lingkungan sosial politik (kebijakan baru seperti program hutan rakyat-), yang merupakan suatu hal yang penting. Hal ini mengilustrasikan bagaimana manusia harus saling berhubungan antar sesamanya untuk tetap *survive* dalam perubahan. Aspek perubahan meliputi distribusi lahan-lahan pertanian, pola migrasi dan pola hubungan antara individu (keluarga) dengan tetangga atau masyarakat lainnya (Haviland, 1981).

Hidir (2004) menyimpulkan bahwa sebenarnya konsep adaptasi meliputi dua hal yaitu: a) adaptasi merupakan konsep yang diambil dari studi biologi untuk menjelaskan proses genetika dan pola perilaku suatu organisme dengan lingkungannya. Konsep ini dikenal

dengan adaptasi genetik; b) adaptasi sebagai konsep biologi kemudian dikembangkan dalam disiplin ilmu sosial yang berhubungan dengan perubahan budaya, seperti geografi, sejarah, sosiologi, antropologi dan psikologi. Konsep adaptasi ditransfer menjadi konsep untuk menjelaskan gejala psikologis dan kebudayaan dalam proses-proses yang bersifat evolusi. Konsep ini biasanya disebut adaptasi somatis. Lebih lanjut dijelaskannya bahwa terdapat tiga jenis adaptasi, yaitu:

- 1) Adaptasi fisiologis, berdasarkan kemampuan tubuh (fisik atau fisiologinya) untuk menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan;
- 2) Adaptasi morfologi, berdasarkan atas bentuk tubuh terhadap lingkungan; dan
- 3) Adaptasi kultural, berdasarkan kelakuan baik secara individual maupun kelompok. Adaptasi kelakuan berproses dalam suatu sistem lingkungan dan pada akhirnya melahirkan adaptasi kultural. Adaptasi kultural menyangkut penyesuaian dengan pranata sosial, adat istiadat dan berbagai aktivitas manusia dari waktu ke waktu dan menyatu dengan manusianya.

Berdasarkan pemahaman Soekanto (1983) yang dikutip oleh Hidir (2004), mengatakan bahwa adaptasi mencakup:

- 1) Adaptasi komunal; yaitu proses penyesuaian dengan lingkungan yang terjadi sebagai akibat tidak langsung dari pengorganisasian penduduk;
- 2) Adaptasi eksternal, yaitu proses penyesuaian dari struktur sosial terhadap lingkungan sosial;
- 3) Adaptasi genetik, yaitu penyesuaian individu terhadap lingkungan;
- 4) Adaptasi individual, yaitu penyesuaian individu terhadap lingkungan sebagai akibat langsung dari usaha individu yang secara tidak langsung merupakan akibat kegiatan penduduk yang terorganisir;
- 5) *Adjustment*, yaitu proses dalam hal:
 - a) Merubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan,
 - b) Perubahan dalam satu sistem sebagai tanggapan terjadinya perubahan lain dalam sistem yang sama,
 - c) Penyesuaian individu terhadap lingkungan sosial,
 - d) Penyesuaian individu untuk menyalurkan ketegangan, dan
 - e) Penyesuaian individu terhadap norma-norma.

Berdasarkan paparan-paparan di atas, sangatlah mustahil untuk memahami adaptasi tanpa mengacu pada suatu lingkungan tertentu. Pada dasarnya adaptasi dapat diartikan sebagai proses yang menghubungkan sistem budaya dengan lingkungannya (Kaplan dkk,

1999). Lingkungan dalam hal ini dapat membuahkan dampak-dampak yang berbeda ragamnya terhadap berbagai taraf perkembangan sosio-kultural dan sosio-ekonomis suatu masyarakat. Istilah "lingkungan" kadangkala sering dimaknai dengan sempit oleh masyarakat, yang berarti sebatas tempat hidup manusia meliputi biotik (tumbuhan dan hewan) dan abiotik (tanah, air, udara dan lainnya), namun sebenarnya lebih luas dari itu, yakni meliputi juga sumberdaya alam manusia.

Dikaitkan dengan hutan, maka menurut Nurjaya (2006), hutan sebagai lingkungan harus dipersepsikan sebagai kesatuan ekologi (ekosistem) yang tidak hanya terdiri dari tanah (*forest land*), hasil hutan kayu dan non kayu (*forest product*), tetapi juga terdapat komunitas-komunitas (manusia) di dan sekitar kawasan hutan. Jadi, dimensi manusia sebagai bagian dari ekosistem hutan harus dimasukkan, diperhitungkan dan diakomodasi dalam sistem manajemen pengusahaan sumberdaya hutan (lingkungan). Menurut Westoby; Masserschmidt, 1992 yang dikutip Nurjaya (2006): "*Forestry is not about trees, it is about people. And it is about trees only insofar as trees can serve the need of the people*". Pendapat Westoby tersebut dapat kita maknai bahwa keberadaan hutan bukan hanya sebatas pepohonan saja, tetapi juga berkaitan dengan manusia, dan keberadaan pepohonan hanya akan bermakna jika pepohonan tersebut dapat memberikan manfaat kepada manusia.

Dalam kajian ini, adaptasi budaya masyarakat pedesaan hutan terhadap program hutan rakyat merujuk pada pendapat Steiner (2002), mengungkapkan bahwa adaptasi merupakan sesuatu yang dilakukan melalui kemampuan organisme (manusia) untuk mengatasi keadaan yang ada pada lingkungannya dan memanfaatkan sumberdaya tersebut sekaligus memeliharanya. Hal ini didukung pendapat Rambo (1981) bahwa adaptasi yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungannya menunjukkan adanya interaksi antara manusia dan lingkungannya, terutama lingkungan fisik dan sosial budaya. Menurut Weber; Thomson dan Jeremy (1971) yang dikutip oleh Mulyana (2004) individu bersifat aktif reflektif dan kreatif dan terus berubah sehingga masyarakat pun berubah melalui interaksi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa interaksi yang dianggap variabel penting yang menentukan perilaku manusia, bukan struktur masyarakat.

Berangkat dari pendapat Weber tersebut, maka kajian adaptasi budaya ini akan digali dari interaksi masyarakat peserta program hutan rakyat terhadap kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan program itu sendiri dan dengan pihak luar yang terlibat (instansi teknis) yang dilihat sebagai sistem simbol. Untuk itu, perspektif yang

dipergunakan adalah tindakan rasional (Weber) dan juga dengan perspektif interaksionisme simbolik (Mead). Menurut teoretisi interaksionisme simbolik bahwa kehidupan sosial pada dasarnya adalah "interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol.

Menurut Jones (1985) yang dikutip oleh Mulyana (2004), interaksionisme simbolik berpandangan bahwa perilaku manusia pada dasarnya adalah produk dari interpretasi mereka atas dunia di sekeliling mereka, perilaku dipilih sebagai hal yang layak dilakukan berdasarkan cara individu mendefinisikan situasi yang ada. Atau sebagaimana pendapat Blumer, tindakan manusia adalah bertujuan, untuk mewujudkan apa yang ada dalam pikirannya, ia merencanakan sebelum bertindak dan merevesinya ketika ia memasuki situasi yang berubah atau sebelumnya tidak terlihat (Mulyana, 2004). Proses interaksi manusia itu bukan suatu proses dimana adanya stimulus secara otomatis dan langsung menimbulkan tanggapan atau respon, tetapi antara stimulus yang diterima dan respon yang terjadi sesudahnya terdapat proses interpretasi antar aktor (Blumer; Basrowi dan Soenyono, 2004b). Kasus pada masyarakat Desa Malilingin dan Desa Pualam Sari dalam melaksanakan program hutan rakyat diharapkan dapat dilihat dari adaptasi budaya dengan pisau analisis perspektif ini, karena diduga selama program hutan rakyat berlangsung hingga sekarang telah terjadi tindakan rasional aktor yang tergambarkan melalui interaksi dan interpretasi mereka terhadap kegiatan tersebut.

C. Teori Tindakan Rasional Max Weber

Weber; Thomson dan Jeremy (1971) yang dikutip oleh Mulyana (2004) mendefinisikan tindakan sosial sebagai semua perilaku manusia ketika dan sejauh individu memberikan suatu makna subjektif terhadap perilaku tersebut. Tindakan sosial baginya adalah tindakan yang disengaja, disengaja bagi orang lain dan bagi sang aktor sendiri, yang pikiran-pikirannya aktif saling menafsirkan perilaku orang lainnya, berkomunikasi satu sama lain, dan mengendalikan perilaku dirinya masing-masing sesuai dengan maksud komunikasinya. Karena itu bagi Weber, masyarakat adalah suatu entitas aktif yang terdiri dari orang-orang berpikir dan melakukan tindakan-tindakan sosial yang bermakna.

Atas dasar rasionalitas tindakan sosial, Weber; Ritzer (2003); Basrowi dan Soenyono (2004b); Bachtiar (2006) membedakannya kedalam empat tipe. Semakin rasional tindakan sosial itu semakin mudah dipahami. Keempat tipe tersebut adalah:

- 1) *Zwerkrational* (tindakan rasionalitas instrumental). Tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Sebuah tindakan yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi. Dalam tindakan ini aktor tidak hanya sekedar menilai cara yang baik untuk mencapai tujuannya tapi juga menentukan nilai dari tujuan itu sendiri. Tujuan dalam tindakan instrumental tidak absolut. Ia dapat pula menjadi cara dari tujuan lain berikutnya. Bila aktor berkelakuan dengan cara yang paling rasional maka mudah memahami tindakannya itu. Atau menurut Ritzer-Goodman (2003), disebut sebagai tindakan rasionalitas formal, meliputi proses berpikir aktor dalam membuat pilihan mengenai alat dan tujuan.
- 2) *Werktrational action* (tindakan rasionalitas tujuan). Tindakan yang melihat alat-alat hanya sekedar pertimbangan dan perhitungan yang sadar sebab tujuan yang terkait dengan nilai-nilai sudah ditentukan. Dalam tindakan tipe ini aktor tidak dapat menilai apakah cara-cara yang dipilihnya itu merupakan yang paling tepat ataukah lebih tepat untuk mencapai tujuan yang lain. Dalam tindakan ini memang antara tujuan dan cara-cara mencapainya cenderung menjadi sukar untuk dibedakan. Namun tindakan ini rasional, karena pilihan terhadap cara-cara kiranya sudah menentukan tujuan yang diinginkan. Tindakan tipe kedua ini masih rasional meski tidak serasional yang pertama. Karena itu dapat dipertanggungjawabkan untuk dipahami.
- 3) *Affectual action* (tindakan dibuat-buat). Tindakan yang dilakukan dan didominasi oleh perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Tindakan ini sukar dipahami, kurang atau tidak rasional.
- 4) *Traditional action* (tindakan atas dasar kebiasaan). Tindakan yang dilakukan berdasarkan kebiasaan tanpa perencanaan, tanpa refleksi yang sadar.

Kedua tipe tindakan yang terakhir sering hanya merupakan tanggapan secara otomatis terhadap rangsangan dari luar, tidak termasuk kedalam jenis tindakan yang penuh arti yang menjadi sasaran penelitian sosiologi. Namun, pada waktu tertentu kedua tipe tindakan tersebut dapat berubah menjadi tindakan penuh arti sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk dipahami.

Konsep kedua dari Weber adalah tentang antar hubungan sosial (*social relationship*). Didefinisikannya sebagai tindakan yang beberapa orang aktor yang berbeda-beda, sejauh tindakan itu mengandung makna dan dihubungkan serta diarahkan kepada tindakan orang lain. Tidak semua kehidupan kolektif memenuhi syarat sebagai antar

hubungan sosial. Jika tidak ada saling penyesuaian (*mutual orientation*) antara orang yang satu dengan orang yang lain maka di situ tidak ada antar hubungan sosial, meskipun ada sekumpulan orang yang diketemukan bersamaan (Ritzer, 2003).

Bertolak dari konsep dasar tentang tindakan sosial dan antar hubungan sosial itu, Weber mengemukakan lima ciri pokok yang menjadi sasaran penelitian sosiologi, yaitu (Ritzer, 2003):

- 1) Tindakan manusia, yang menurut si aktor mengandung makna yang subyektif, meliputi berbagai tindakan nyata.
- 2) Tindakan nyata dan yang bersifat membatin sepenuhnya dan bersifat subyektif.
- 3) Tindakan meliputi pengaruh positif dari suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang serta tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam.
- 4) Tindakan diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu.
- 5) Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu.

Jadi menurut Weber, masyarakat adalah suatu entitas aktif yang terdiri dari orang-orang berpikir dan melakukan tindakan-tindakan sosial yang bermakna. Pemikiran Weber ini dianggap sebagai payung teori interaksionisme simbolik (Mulyana, 2004).

Orientasi teori tindakan rasional di atas, jika dikaitkan dengan penelitian adaptasi budaya masyarakat terhadap suatu kebijakan baru (program hutan rakyat), maka keberhasilan program di atas terhadap dua desa penelitian akan dapat digali dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan, dan selanjutnya akan dilakukan oleh masyarakat desa tersebut terhadap program hutan rakyat, dan makna tindakan-tindakan yang terselubung (*covert*) dalam bentuk pikiran (*ide*) yang melatarbelakangi tindakannya. Faktor sosial budaya apa saja yang membatasi aktor dalam memilih tindakannya dalam mendukung program hutan rakyat dan bagaimana budaya mereka dapat beradaptasi sehingga program tersebut berhasil, juga merupakan hal yang akan dianalisis melalui teori tindakan rasional Weber tersebut.

D. Teori Interaksionisme Simbolik

Menurut Natanson (1963) yang dikutip oleh Mulyana (2004), perspektif interaksionisme simbolik sebenarnya berada di bawah payung perspektif yang lebih besar yang sering disebut perspektif fenomenologis atau perspektif interpretif. Istilah fenomenologis sebagai suatu istilah generik untuk merujuk kepada semua pandangan

ilmu sosial yang menganggap kesadaran manusia dan makna subjektifnya sebagai fokus untuk memahami tindakan sosial. Pandangan fenomenologis atas realitas sosial menganggap dunia intersubjektif sebagai terbentuk dalam aktivitas kesadaran yang salah satunya hasilnya adalah ilmu alam. Dua pendekatan utama dalam tradisi fenomenologis adalah interaksionisme simbolik dan etnometodologi.

Huber (1973) yang dikutip oleh Raho (2002) mengatakan bahwa arsitek utama dari interaksionisme simbolik adalah George Herbert Mead. Buku bacaan utama yang berasal dari kumpulan bahan kuliah yang diberikannya di Universitas Chicago yang mendiskusikan antara lain tentang *Mind, Self and Society*. Pemikiran-pemikiran Mead banyak dipengaruhi oleh William James dan John Dewey (aliran pragmatisme) dan John B. Watson (aliran behaviorisme). Mead juga sangat dipengaruhi oleh teori evolusi Darwin, bahwasanya organisme secara berkelanjutan terlibat dalam usaha penyesuaian diri dengan lingkungannya sehingga organisme itu mengalami perubahan yang terus menerus, sehingga dia melihat pikiran manusia sebagai sesuatu yang muncul dalam proses evolusi alamiah. Pemunculannya itu memungkinkan manusia untuk menyesuaikan diri secara lebih efektif dengan alam (Basrowi dan Soenyono, 2004b).

Berdasarkan kajian Raho (2002), pemikiran Mead bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berpikir membedakan interaksionisme simbolik dari akarnya behaviorisme. Menurut Mead, aktivitas tersembunyi (*covert activity*) manusialah yang membedakannya dengan hewan, atau tindakan sosial (*social act*) harus mempertimbangkan aspek tersembunyi perilaku manusia (Meltzer, 1978 yang dikutip oleh Mulyana, 2004). Esensi interaksionisme simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna.

Prinsip Dasar Interaksionisme Simbolik

Ritzer (1996); Raho (2002); Mulyana (2004), meringkas teori interaksionisme simbolik kedalam prinsip-prinsip, sebagai berikut:

- 1) Manusia, tidak seperti hewan lebih rendah, diberkahi dengan kemampuan untuk berpikir.
- 2) Kemampuan berpikir itu dibentuk atau berkembang melalui interaksi sosial, khususnya melalui proses sosialisasi.
- 3) Dalam interaksi sosial orang belajar makna dan simbol yang memungkinkan mereka menerapkan kemampuan khas mereka sebagai manusia, yakni berpikir.

- 4) Makna dan simbol memungkinkan manusia melanjutkan tindakan (*action*) dan interaksi yang khas manusia.
- 5) Manusia mampu memodifikasi atau mengubah makna dan simbol yang mereka gunakan dalam tindakan dan interaksi berdasarkan interpretasi mereka atas situasi. Dengan kata lain, manusia bisa melakukan pilihan-pilihan.
- 6) Manusia mampu membuat modifikasi atau perubahan karena mereka mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan diri sendiri atau self yang memungkinkan mereka bisa melihat keuntungan dan kerugian dari suatu tindakan dan kemudian memilih satu diantaranya.
- 7) Pola-pola aksi dan interaksi yang jalin menjalin ini membentuk kelompok-kelompok dan masyarakat-masyarakat.

Dari ke-tujuh item prinsip-prinsip interaksionisme simbolik di atas, maka adaptasi budaya masyarakat terhadap program hutan rakyat akan dilihat lebih mendalam berkaitan dengan item 2 (dua), 3 (tiga), 5 (lima) dan 7 (tujuh) yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kemampuan berpikir

Menurut perspektif interaksionisme simbolik, manusia harus memiliki otak supaya ia bisa mengembangkan akal budinya tetapi otak tidak otomatis menciptakan akal budi, sebab binatang juga mempunyai otak namun tidak bisa berpikir. Interaksionisme simbolik tidak melihat akal budi sebagai benda (*a thing*) atau struktur fisik melainkan suatu proses yang berkesinambungan. Proses ini adalah bagian dari proses yang lebih luas aksi dan reaksi. Akal budi berhubungan erat dengan konsep-konsep lain dalam interaksionisme simbolik termasuk sosialisasi, makna, simbol, interaksi dan masyarakat.

- 2) Berpikir dan interaksi

Kemampuan manusia untuk berpikir sudah dibentuk dalam sosialisasi pada masa anak-anak dan berkembang selama sosialisasi pada masa dewasa. Bagi teori lainnya, sosialisasi dilihat sebagai proses dimana individu mempelajari hal-hal supaya mereka bisa bertahan hidup di dalam masyarakat. Namun bagi interaksionisme simbolik, sosialisasi adalah proses yang bersifat dinamis, dalam proses ini, manusia tidak cuma menerima informasi melainkan juga menginterpretasi dan menyesuaikan informasi itu sesuai dengan kebutuhannya (Raho, 2002).

Interaksi adalah suatu proses dimana kemampuan untuk berpikir dikembangkan dan diungkapkan. Segala macam interaksi menyaring kemampuan manusia untuk berpikir, hasil pikiran akan mempengaruhi seseorang dalam bertingkah laku (tindakan).

Dalam kebanyakan tingkah laku, seorang aktor harus memperhitungkan orang lain dan memutuskan bagaimana harus bertingkah laku supaya cocok dengan orang lain. Pentingnya proses berpikir bagi interaksionisme simbolik sebagaimana digambarkan Blumer, yang membedakan tiga macam objek, yaitu fisik, sosial dan abstrak. Setiap objek mempunyai arti berbeda-beda untuk setiap aktor. Individu-individu mempelajari makna-makna dari objek-objek tersebut selama proses sosialisasi. Menurut Schutz yang sejalan dengan pemikiran Mead (1964) yang dikutip oleh Mulyana (2004), dalam interaksi tatap-muka makna rangsangan yang dicari dan ditafsirkan oleh sang aktor secara khas merujuk kepada motif aktor lainnya. Motif terbagi dua yaitu "motif untuk" (*in-order-to motives*) dan "motif karena" (*because motives*). Selama proses interaksi, terdapat pertukaran motif antara para aktor yang terlibat.

Pendapat lain yang menjelaskan tentang interaksi dapat pula kita kutip dari penjelasan Kinch yang dikutip oleh Abraham (1982), dalam interaksi setidaknya ada 4 (empat) variabel yang saling mempengaruhi, yaitu *actual response of others toward him; his perception of the response of other toward him; the individual's self-concept; his behaviour*.

Maka dapat dipahami bahwa pengalaman menerima respon dari orang lain akan berpengaruh terhadap persepsi yang ada, dari persepsi yang telah dibuat akan menghasilkan konsep baru, dimana konsep baru ini akan mempengaruhi kelakuannya, dan proses ini akan berulang dan saling berkaitan satu sama lainnya.

3) Membuat pilihan-pilihan

Menurut Thomas (1928) yang dikutip oleh Berry (1981), menyatakan bahwa caranya seorang individu mendefinisikan situasi menjadi dasar dari cara-cara ia bertindak dalam situasi tertentu. Berbagai macam tindakan akan dapat dijelaskan jika kita mampu memahami cara-cara orang yang bersangkutan mendefinisikan situasi. Kebanyakan definisi situasi yang kita buat didasarkan pada definisi situasi yang sudah diberikan oleh masyarakat, seperti oleh institusi keluarga dan masyarakat. Namun sebenarnya, manusia juga mampu memberikan definisi situasi yang berbeda yang memungkinkan mereka bisa memilih dan memodifikasi arti dan simbol yang ada. Manusia mampu melakukan pilihan-pilihan yang bebas dan unik, atau mampu mengembangkan suatu kehidupan yang mempunyai keunikan dan gayanya sendiri.

4) Kelompok-kelompok dan Masyarakat

Menurut Blumer (1976) yang dikutip oleh Raho (2002), masyarakat

tidak terbuat dari struktur-struktur yang bersifat makro, esensi dari masyarakat harus ditemukan di dalam aktor-aktor dan tindakannya. Masyarakat manusia harus dilihat sebagai terdiri dari orang-orang yang sedang bertindak dan kehidupan masyarakat harus dilihat sebagai terdiri dari tindakan-tindakan mereka. Kehidupan kelompok adalah keseluruhan tindakan yang sedang berlangsung. Struktur-struktur makro memang menetapkan kondisi-kondisi dan batasan-batasan terhadap tingkah laku manusia tetapi ia tidak menentukan tingkah laku itu. Struktur makro menjadi penting sejauh aktor memberikan arti kepadanya.

Beberapa pokok pikiran Mead dalam tulisannya *Mind, Self and Society* dapat dipaparkan sebagai berikut: tentang *Mind* (akal budi) antara lain adalah:

- a) Akal budi bukan sebagai satu benda, melainkan sebagai satu proses sosial;
- b) Akal budi manusia secara kualitatif berbeda dengan binatang, karena kebanyakan tindakan manusia melibatkan suatu proses mental, yakni antara aksi dan reaksi terdapat suatu proses yang melibatkan pikiran;
- c) Untuk mempertahankan keberlangsungan suatu kehidupan sosial, maka para aktor harus menghayati simbol-simbol dengan arti yang sama;
- d) Simbol-simbol verbal (bahasa) adalah penting;
- e) Konsep tentang arti (*meaning*) aslinya tidak berasal dari akal budi melainkan dari situasi sosial. Lebih lanjut dijelaskan bahwa simbol-simbol itu memiliki makna atau isyarat yang berarti bagi penggunanya atau komunikator dan orang lain sebagai komunikan. Simbol itu terdapat dalam bentuk: a) kata, yang mewakili objek ide, nilai-nilai, fisik dan perasaan; b) perlakuan, yang meliputi apa yang dilakukan, diberitahukan, dipikirkan, yang dilihat ataupun yang diniatkan; c) objek, yang memiliki kualitas simbol; dan d) bahasa, yang kaya akan simbol (Garna, 1996).

Menurut Mead, *self* (diri) bukanlah suatu objek melainkan suatu proses sadar yang mempunyai beberapa kemampuan antara lain seperti:

- 1) Kemampuan untuk memberikan jawaban atau tanggapan kepada diri sendiri sebagaimana orang lain juga memberikan jawaban atau tanggapan;
- 2) Kemampuan untuk memberikan jawaban sebagaimana 'generalized other' atau aturan, norma-norma, hukum memberikan jawaban kepadanya;

- 3) Kemampuan untuk mengambil bagian dalam percakapannya sendiri dengan orang lain;
- 4) Kemampuan untuk menyadari apa yang sedang dikatakannya dan kemampuan untuk menggunakan kesadaran itu untuk menentukan apa yang harus dilakukan pada tahap berikutnya (Raho, 2002).

Untuk *society* (masyarakat), pada tingkat paling umum, Mead menggunakan istilah masyarakat (*society*) yang berarti proses sosial tanpa henti yang mendahului pikiran dan diri. Masyarakat penting perannya dalam membentuk pikiran dan diri (Ritzer-Douglas, 2003). Garna (1996) menguraikan bahwa semua kelompok masyarakat, organisasi, komunitas dan masyarakat terbentuk oleh para individu yang melakukan interaksi. Karena itu suatu masyarakat ialah para individu yang sedang melakukan interaksi dalam mengambil peranan, komunikasi dan melakukan interpretasi yang bersama-sama menyesuaikan tindakannya, mengarahkan dan kontrol diri.

Dalam menganalisis tindakan, Mead (1939); Schmitt dan Schmitt (1996); Ritzer-Douglas (2003) mengidentifikasi empat basis dan tahap tindakan yang saling berhubungan yang mencerminkan satu kesatuan organik. *Tahap pertama*, dorongan hati/impuls (*impulse*) meliputi stimulasi/rangsangan spontan yang berhubungan dengan alat indera dan reaksi aktor terhadap rangsangan itu; *tahap kedua*, persepsi (*perception*), aktor menyelidiki dan bereaksi terhadap rangsangan yang berhubungan dengan impuls melalui pendengaran, rasa dan sebagainya; *tahap ketiga* manipulasi (*manipulation*), yakni memanipulasi objek atau mengambil tindakan berkenaan dengan objek itu; *tahap empat* konsumsi (*consumption*) atau pelaksanaan, yaitu mengambil tindakan yang memuaskan dorongan hati yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian teoritis di atas, setidaknya untuk saat ini, peneliti melihat bahwa keberhasilan program hutan rakyat di Desa Malilingin dan Desa Pualam Sari tidak terlepas dari adaptasi budaya melalui interaksi dan interpretasi mereka terhadap program tersebut. Bentuk adaptasi budaya yang mengapa dan bagaimana terjadinya akan ditelusuri melalui interaksi masyarakat dalam bentuk tindakan-tindakan yang mendukung kegiatan fisik lapangan (perencanaan, penanaman dan pengawasan, hasil) dan administrasi (kelompok tani), sehingga interpretasi mereka terealisasikan melalui tindakan-tindakan mendukung tersebut. Berdasarkan pemahaman kami, dapat dikatakan bahwa masyarakat peserta program hutan rakyat di kedua desa lokasi penelitian mempunyai kemampuan berpikir mengenai program hutan rakyat yang dilaksanakan di desa mereka, kemudian melalui interaksi

(komunikasi dan sosialisasi) mereka membuat pilihan-pilihan, pilihan tersebut antara lain adalah ikut berpartisipasi dalam program hutan rakyat. Pilihan berpartisipasi tidak lepas dari pengaruh interpretasi masyarakat (aktor), baik yang dipengaruhi oleh diri (*self*) maupun dari luar (*generalized other*).

Kritik dan Pujian atas Teori Interaksionisme Simbolik

Beberapa kelemahan atau kritik yang dikemukakan oleh sebagian pakar terhadap teori interaksionisme simbolik yang dibangun oleh Mead yang dirangkum oleh Mulyana (2004), antara lain adalah:

- 1) Teori interaksionisme simbolik adalah teori yang terlalu agung (*grand*), konsep-konsepnya longgar, samar dan membingungkan, sehingga tidak dapat memberikan basis bagi teori dan penelitian
- 2) Konsep *generalized other* terlalu umum dan tidak merinci orang lain secara spesifik (Kelsen, 1981). Belakangan dimodifikasi menjadi 'kelompok rujukan' atau '*reference group*' (Shibutani, 1961).
- 3) Terlalu menekankan aspek mikro masyarakat, interaksi tatap muka dari pada sifat struktural masyarakat.
- 4) Mengabaikan faktor-faktor seperti kebutuhan, motif, maksud dan aspirasi (Meltzer, 1975).

Beberapa kelebihan atau pujian atas teori interaksionisme simbolik antara lain (rangkuman Mulyana, 2004)

- a) Gagasan-gagasan interaksionisme simbolik banyak digunakan sebagai basis dari berbagai kajian etnografik.
- b) Kekuatan utama terhadap makna yang bersifat empiris, menjawab pertanyaan dengan melihatnya langsung, menelaah dunia nyata, dan mengevaluasi bukti yang terkumpul. Memusatkan perhatian pada dunia dan pengalaman hidup yang nyata dan memperlakukan teori sebagai sesuatu yang harus disesuaikan dengan dunia empiris (Blumer, 1969)
- c) Telah mengilhami berbagai teori seperti teori peran (*role theory*), teori kelompok rujukan (*reference-group theory*), teori diri (*self-theory*)
- d) Mead telah meningkatkan penerimaan atas pandangan bahwa perilaku manusia dengan mendefinisikan situasi yang memungkinkan manusia bertindak, yakni pandangan bahwa perilaku khas manusia adalah perilaku berdasarkan apa yang disimbolisasikan oleh situasi (Meltzer, 1978).

E. Perubahan Sosial

Perubahan sosial menjadi perbincangan oleh beberapa ahli, banyak yang berpendapat bahwa perubahan sosial lekat dengan perubahan budaya. Perubahan-perubahan budaya menekankan pada perubahan sistem nilai, sedangkan perubahan sosial pada sistem kelembagaan yang mengatur tingkah laku anggota masyarakat (Basrowi dan Soeyono, 2004a)

Gillin dan Gillin (Basrowi dan Soeyono, 2004a) menyebutkan bahwa perubahan-perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, yang disebabkan baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena difusi atau penemuan-penemuan. Sedangkan Mav Iver menekankan bahwa perubahan sosial adalah perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (*social relationship*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial.

Pada dasarnya ciri-ciri perubahan sosial (Basrowi dan Soeyono, 2004a) adalah :

- 1) Tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya, karena setiap masyarakat mengalami perubahan yang terjadi secara lambat atau secara cepat.
- 2) Secara tipologis, perubahan-perubahan sosial dikategorikan Smelser sebagai berikut :
 - a) *Social proces: the circulation of various rewards, facilities, and personel in an existing structure.*
 - b) *Segmentation: the proliferation of structural units that do not differ qualitatively from existing units.*
 - c) *Structural change: the emerge of qualitatively new complexes of roles and organization.*
 - d) *Changes in group structure: the shifts in the composition of groups, the level of consciousness of groups, and the relations among the group in society.*

Menurut Sudharto dalam Karim (1985), ada tiga penyebab terjadinya perubahan sosial, yaitu: a) faktor biologis, terutama faktor demografis seperti penambahan penduduk dan migrasi; b) faktor kebudayaan, yang beranggapan bahwa terdapat hubungan erat antara sistem budaya yang meliputi sistem nilai, kepercayaan, norma, aturan, kebiasaan dengan pola hubungan antar manusia dalam masyarakat; c) faktor teknologi, yang berkaitan dengan adanya berbagai penemuan dan inovasi baru yang akan senantiasa melibatkan berbagai akibat sosial yang sebagian dapat dikategorikan sebagai perubahan sosial.

Berdasarkan bentuknya, maka perubahan sosial dapat berbentuk perubahan lambat dan perubahan cepat, perubahan yang pengaruhnya kecil dan pengaruhnya besar, dan perubahan yang dikehendaki (*intended change*) dan yang tidak dikehendaki (*unintended change*).

Secara umum ada dua bentuk perubahan sosial yaitu perubahan evolusi dan perubahan revolusi. Perubahan evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dalam proses yang lambat, dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa ada kemauan tertentu dari masyarakat yang bersangkutan (Syarbaini, 2009). Perubahan ini berlangsung mengikuti kondisi perkembangan masyarakat, sejalan dengan usaha-usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perubahan sosial terjadi karena dorongan masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan perkembangan masyarakat pada waktu tertentu.

Sorokin yang dikutip oleh Syarbaini (2009) berpendapat bahwa masyarakat berkembang melalui tahap-tahap yang masing-masing didasarkan pada suatu sistem kebenaran. Ia membedakan dalam tiga tahap yaitu, tahap pertama dasarnya adalah kepercayaan, tahap kedua dasarnya adalah panca indera manusia dan tahap ketiga dasarnya adalah kebenaran. Inilah yang di sebut dengan *unilinear theory of evolution*, yaitu satu dari tiga golongan teori perubahan evolusi oleh Alex Inkeles.

Dua golongan lainnya yaitu *universal theory of evolution* yaitu pandangan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahap tertentu yang tetap, melainkan berubah dari hasil perkembangan kelompok homogen kepada kelompok heterogen. Dan *multilined theories of evolution* yaitu pandangan bahwa perubahan terjadi karena pengaruh dari berbagai aspek, seperti pengaruh sistem mata pencaharian, sistem berburu ke bertani, dan lain-lain.

Sedangkan perubahan revolusi adalah perubahan yang berlangsung secara cepat dan tidak ada kehendak atau perencanaan sebelumnya. Unsur pokok dari revolusi adalah adanya perubahan cepat dan perubahan itu mencakup sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Perubahan revolusi sering diawali dengan ketegangan atau konflik sosial yang sulit dihindari, bahkan tidak terkendali sehingga menjadi suatu tindakan revolusi.

Steward yang dikutip oleh Poerwanto (2000) membuat gagasan evolusi garis lurus banyak (*multilinier*), dimana ia melihat perubahan budaya dari sudut pandang adaptasi. Steward mengemukakan tiga macam pendekatan yaitu :

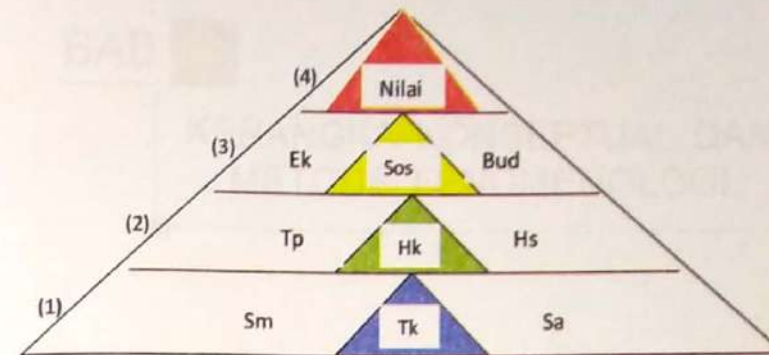
1. Pendekatan teoritis evolusi kuno dan teori yang menganggap perkembangan evolusi sebagai garis lurus.

2. Pendekatan teoritis "relativitas kebudayaan" yang melihat perkembangan kebudayaan pada dasarnya berbeda-beda dan yang mencoba mendefinisikan ciri-ciri kebudayaan yang membedakan masyarakat satu dengan masyarakat lain.
3. Pendekatan evolusi multilinear. Evolusi multilinear adalah sebuah penegasan bahwa ada keteraturan persilangan kebudayaan yang berarti, tetapi keteraturan itu harus menyinggung seluruh masyarakat manusia. Asumsinya adalah kebudayaan berkembang secara berbeda-beda. Dalam pendekatan ini proses adaptasi berperan untuk menghasilkan keteraturan persilangan kebudayaan.

Steward juga telah memperkenalkan teori ekologi budaya pada permulaan tahun 1930-an. Inti dari teori ini adalah bahwa lingkungan dan budaya tidak bisa dilihat terpisah, tetapi merupakan hasil perpaduan dari proses dialektika. Oleh karena itu lingkungan dan budaya tidak berdiri sendiri tapi tumbuh bersama dan saling mempengaruhi.

Berdasarkan jenjang atau tingkat-tingkat perubahan, Sudharto dalam Karim (1985), dengan pendekatan sistem menggambarkan jenjang perubahan sebagaimana pada Gambar 2. Pada Gambar 2 yang berbentuk segi tiga, dimulai dari pendekatan secara mikro yakni terjadinya interaksi antara sumber manusia (Sm) dengan sumber alam (Sa) dan teknologi (Tk) pada tingkat pertama menimbulkan perubahan pada sub sistem tingkat pendapatan (Tp), hubungan kerja (Hk) dan hubungan sosial (Hs) pada tingkat yang kedua. Sedangkan pada tingkatan yang ketiga interaksi berulang ini mempengaruhi sub sistem ekonomi (Ek), sub sistem sosial (Sos) serta sub sistem budaya (Bud). Pada titik kulminasi dari perubahan ini akan tercipta nilai baru yang di anut oleh suatu masyarakat.

Sampai pada tingkat yang bagaimana perubahan sosial yang terjadi, tergantung seberapa jauh daya mampu interaksi pada tingkat yang pertama. Dapat terjadi perubahan hanya sampai pada tingkat yang pertama yaitu naiknya pendapatan, berubahnya hubungan sosial dan hubungan kerja. Namun pada saat yang lain dapat juga terjadi perubahan itu sampai mampu menciptakan nilai-nilai baru.



Gambar 2. Jenjang Perubahan Sosial

Keterangan: (1) = Nomor urut jenjang

Jenjang 1 terdiri:

- Tk = Teknologi;
- Sm = Sumberdaya manusia;
- Sa = Sumberdaya alam;

Jenjang 2 terdiri:

- HK = Hubungan kerja;
- Tp = Tingkat pendapatan;
- Hs = Hubungan sosial;

Jenjang 3 terdiri:

- Sos = Sosial;
- Ek = Ekonomi;
- Bud = Budaya

Jenjang 4 berupa nilai-nilai yang berubah

BAB 4

KERANGKA KONSEPTUAL DAN
METODE FENOMENOLOGI

A. Alur Pikir Penelitian

Penelitian dengan mengambil *setting* alamiah pada Desa Malilingin Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Desa transmigran Pualam Sari Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka melaksanakan program hutan rakyat ini pada dasarnya berangkat dari pengalaman lapangan peneliti selama ini yang melihat ada masalah dalam pembangunan sektor kehutanan khususnya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, yaitu: mengapa kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan selalu gagal? Dilihat dari sisi aspek teknis kehutanan (sistem silvikultur/ budidaya hutan) sebenarnya sudah sangat memadai dengan adanya pengembangan kultur jaringan pada berbagai jenis tanaman kehutanan dan pengembangan pola tanam (*Agroforestry*). Muncul pertanyaan: Jika aspek teknis kehutanan sudah dianggap memadai namun kenyataan di lapangan masih gagal, maka dapat diduga ada aspek lainnya yang berpengaruh.

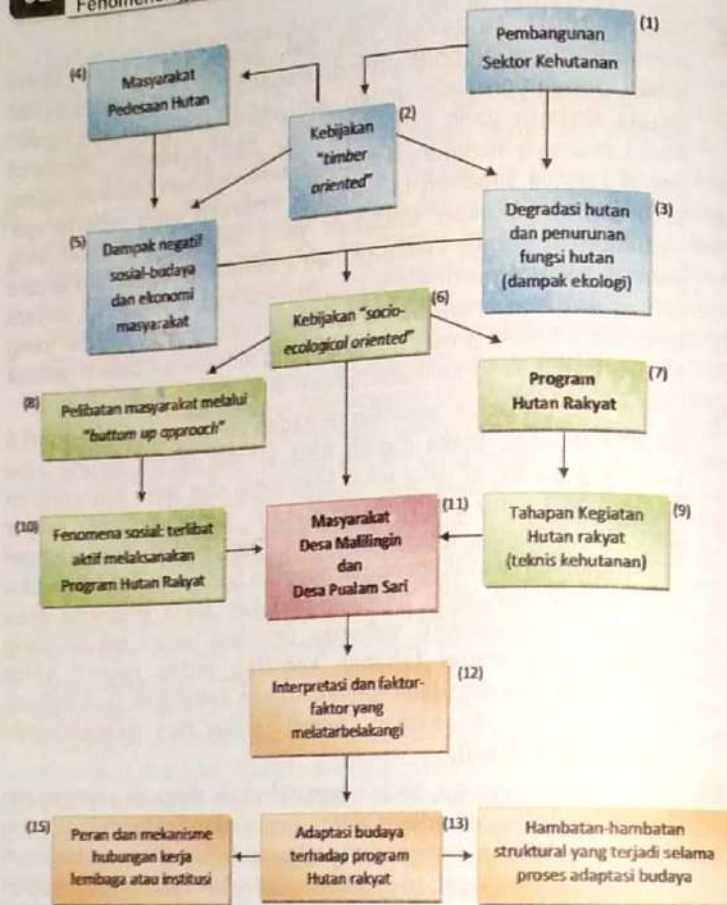
Hasil-hasil kajian yang dapat kami kutip berkaitan alasan kegagalan di atas antara lain: Suhendang (2004) mengatakan masyarakat tidak terlibat penuh; Suhardono (2003) hutan rakyat bukan hanya fisik tapi melibatkan peran manusia, terlibatnya faktor sosial dalam hutan rakyat diperlukan; Sardjono (2004) pengembangan hutan rakyat tidak terlepas dari wacana sosiologis (*sociological discourse*) yang merupakan *landasan terlemah* dari para rimbawan dan profesional kehutanan, kegagalan pembangunan kehutanan masa lalu adalah terlepasnya aspek *sosio-budaya* dan *sosio-ekonomi* dari politik kehutanan (kebijakan yang diambil). Awang (2004) rimbawan tidak serius memahami sumberdaya alam dari perspektif non-teknis. Dari uraian di atas, diyakini bahwa aspek sosial budaya, khususnya adaptasi budaya dapat mempengaruhi kegiatan program pembangunan kehutanan, khususnya program hutan rakyat, selanjutnya diangkat sebagai tema utama penelitian.

- Adapun alur pikir penelitian lebih detail adalah sebagai berikut:
- 1) Masyarakat Indonesia sebagian besar hidup dan tinggal di pedesaan dan umumnya berdekatan dengan hutan. Sejak dulu hutan telah memberikan penghidupan bagi masyarakat pedesaan, khususnya sebagai penyedia bahan makanan, kebutuhan kayu bakar, bangunan tempat tinggal, obat-obatan dan lainnya. Di sisi lain, pembangunan sektor kehutanan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1971 telah memberikan dampak positif dalam pembangunan nasional yaitu terjadinya pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di era tahun 80-an. Namun keberhasilan tersebut ternyata tidak dapat dirasakan oleh masyarakat pedesaan yang hidup di dalam dan di sekitar hutan. Menurut Hubeis (2004) dan Riyanto (2004), pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mereka hanya mendapatkan manfaat yang minimal.
 - 2) Kegagalan kebijakan pengelolaan hutan dan kehutanan "**timber oriented**" yang diterapkan pemerintah (melalui pemberian konsesi hutan/ Hak Pengusahaan Hutan) telah menimbulkan kemiskinan masyarakat pedesaan sekitar hutan dan masalah sosial lainnya. Hubeis (2004) dan Nurjaya, (2005) kegiatan pengelolaan hutan yang lebih diorientasikan pada pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan termarginalisasinya masyarakat yang hidup di sekitar hutan. Konsekuensi yang paling buruk adalah proses menyusutnya kebudayaan (*cultural lost*) yang terjadi dimanamana, sehingga banyak orang menjadi kehilangan makna dan pegangan hidup di dunia modern ini. Awang (2004) menguraikan bahwa instrumen kebijakan ke arah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan. Krisis ekonomi di pedesaan membuat masyarakat harus mencari sumber kehidupan dalam waktu cepat seperti mengerjakan penebangan kayu secara ilegal dan menduduki lahan hutan untuk membangun kebun rakyat. Kejadian ini tentunya mempercepat deforestasi dan degradasi hutan.
 - 3) Kebijakan di atas juga telah menimbulkan degradasi pada hutan dan lahan yang mengakibatkan menurunnya fungsi hutan dalam mendukung kehidupan masyarakat. Soemarwoto (2003) mengemukakan, dampak kerusakan dan penyusutan luas hutan bukan hanya mengenai bidang kehutanan semata, tetapi boleh dikatakan semua sektor kehidupan kita terkena dampaknya. Kesehatan, pertanian, perikanan, pemukiman, banjir dan kekurangan air serta perekonomian kita semua tidak akan luput. Dampak tersebut tidak hanya bersifat lokal, melainkan nasional bahkan global.

- 4) Sejalan dengan bergulirnya era reformasi yang dimulai tahun 1998 yang telah merubah segenap aspek kehidupan masyarakat Indonesia, maka arah kebijakan sektor kehutanan-pun tidak lepas dari perubahan yang mendasar. Kebijakan baru tersebut dikenal dengan "**socio-ecological oriented**" dalam setiap sisi kebijakan pembangunan kehutanan di Indonesia lebih diprioritaskan. Kebijakan ini menekankan pada pelibatan masyarakat dan peningkatan partisipasi disetiap tahapan kegiatan pembangunan kehutanan atau disebut "*bottom up approach*". Menurut Nurjaya (2006), pengelolaan sumberdaya hutan oleh masyarakat lokal membuktikan bahwa masyarakat asli memiliki kapasitas budaya, sistem pengetahuan dan teknologi, religi, tradisi serta modal sosial (*social capital*) seperti etika dan kearifan lingkungan, norma-norma dan institusi hukum untuk mengelola sumberdaya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Permasalahan yang timbul berkaitan dengan hal di atas adalah masyarakat bersifat dinamis dengan ciri dan kefatalistikannya terhadap kebudayaan yang telah mereka lakukan dan sulit untuk berubah. Lagi pula kemampuan individu atau masyarakat untuk beradaptasi sendiri berbeda-beda sesuai dengan persepsi, daya dan nilai-nilai budaya setempat yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga akan berimplikasi terhadap eksistensi masyarakat tersebut, apakah kebudayaan masyarakat tersebut akan berkembang, bertahan atau malah punah.
- 5) Konsep kebijakan "**socio-ecological oriented**" secara riil diaktualisasikan oleh pemerintah Indonesia melalui Departemen Kehutanan, salah satunya adalah dilaksanakannya program Hutan Rakyat sebagai bagian dari kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan diluar kawasan hutan negara. Hutan rakyat atau usaha tani kehutanan telah muncul sebagai satu alternatif model untuk menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh semakin luasnya jumlah pohon yang hilang dari hutan-hutan yang ada di muka bumi dan berkurangnya penutupan bumi oleh hutan di negara-negara sedang berkembang. Dengan membantu masyarakat pedesaan agar menanam pohon dilahan sendiri, biaya penghutanan kembali dapat dikurangi (Awang, 2004). Menurut Awang (2005b), hutan rakyat sebagai sebuah *synekology* tidaklah berdiri sendiri sebagai ekosistem yang lepas dari pengaruh aktivitas manusia (masyarakat) yang bermukim disekitarnya. Sedangkan Marfai (2005) mengatakan bahwa adalah penting untuk dilaksanakan analisis terapan antropologi sosial yang dapat dikembangkan dalam kegiatan hutan rakyat (- wanatani -), antara lain: tentang *pola pikir, pola sikap dan pola tindak* dalam

- kaitannya dengan lingkungan secara umum, tingkat kepemilikan lingkungan, karakteristik kelembagaan, hubungan sosial individu, dan berbagai hal lain yang terkait dengan penentuan kebijakan arah program hutan rakyat, menemukan gagasan-gagasan belajar di lapangan, dan kesahihan pengetahuan teknis asli setempat.
- 6) Titik pokok permasalahan yang timbul adalah: Bagaimana masyarakat pedesaan hutan tersebut dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungannya, khususnya terhadap pelaksanaan kebijakan program hutan rakyat? Steiner (2002) mengungkapkan bahwa adaptasi merupakan sesuatu yang dilakukan melalui kemampuan organisme (manusia) untuk mengatasi keadaan yang ada pada lingkungannya dan memanfaatkan sumberdaya tersebut sekaligus memeliharanya. Kemampuan untuk mengatasi tersebut dapat dicapai melalui pengaturan dari persyaratan-persyaratan dan toleransi terhadap elemen-elemen yang terdapat di lingkungan hidupnya. Lebih lanjut Steiner menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang paling pandai beradaptasi. Melalui adaptasi manusia dapat bertahan hidup dari berbagai perubahan yang terjadi. Menurut Yi-Fu Tuan yang dikutip oleh Steiner (2002), manusia ternyata bukan hanya pandai beradaptasi, namun lebih dari itu juga mampu mengikuti perubahan dengan baik dan melakukan kreasi terhadap perubahan tersebut termasuk terhadap lingkungannya. Masyarakat harus selalu menjaga hubungan adaptasi dengan lingkungannya agar ia tetap dapat mempertahankan kehidupannya, sehingga dalam lingkup ekosistem hutan rakyat terdapat proses adaptasi yang mengacu pada proses interaksi antara perubahan yang ditimbulkan oleh suatu organisme (termasuk manusia) pada suatu lingkungan (fisik dan sosial) dan atau juga perubahan yang ditimbulkan oleh lingkungan (khususnya sosial dalam hal ini kebijakan program hutan rakyat) terhadap organisme tersebut. Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan pokok di atas, maka dipilih metode penelitian kualitatif pendekatan fenomenologi dengan pisau analisis utama interaksionisme simbolik, agar dapat memahami perilaku individu atau masyarakat desa dari kerangka berpikir maupun bertindak terhadap program hutan rakyat.
 - 7) Landasan teoritis yang digunakan adalah teori tindakan rasional yang dikembangkan oleh Weber, khususnya *rasionalitas formal* atau *rasionalitas instrumental*. Rasionalitas formal meliputi proses berpikir aktor dalam membuat pilihan mengenai alat dan tujuan. Pilihan dapat merujuk pada kebiasaan, peraturan dan hukum yang diterapkan secara universal (Ritzer - Douglas, 2003).

- 8) Selain teori tindakan rasional, juga digunakan teori *interaksionisme simbolik* yang dikembangkan oleh George Heber Mead, dengan proposisi umum yaitu individu menentukan sendiri segala sesuatu yang bermakna bagi dirinya sendiri. Menurut Mead, manusia mempunyai sejumlah kemungkinan tindakan dalam pemikirannya sebelum ia memulai tindakan yang sebenarnya. Sebelum melakukan tindakan yang sebenarnya, seseorang mencobakan segala kemungkinan alternatif tindakan itu secara mental melalui pertimbangan pemikirannya. Karena itu, dalam proses tindakan manusia itu terdapat suatu proses mental yang tertutup sebelum proses tindakan yang sebenarnya dalam bentuk tingkah laku yang kelihatan (Basrowi dan Soenyono, 2004b).
- 9) Untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan pada point 6 (enam) di atas, maka dipilih desa sampel secara *Typical case sampling*, yaitu: a) desa lokal Malilingin dan desa transmigran Pualam Sari yang telah melaksanakan program hutan rakyat dan berkembang hingga saat ini. Dari kedua desa sampel dimungkinkan untuk menggali adaptasi budaya melalui interaksi dan interpretasi serta tindakan-tindakan aktor (individu atau kelompok masyarakat) terhadap program hutan rakyat yang dilaksanakan sesuai tahapan kegiatan hutan rakyat, yaitu penguatan kelembagaan (pembentukan kelompok tani hutan), perencanaan, penanaman, pemeliharaan dan pemanfaatan (pemungutan hasil).
- 10) Dalam penelitian ini, secara tentatif akan dijawab pertanyaan penelitian sebagai berikut: a) Interpretasi dan faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat pedesaan hutan dalam mengikuti program hutan rakyat; b) Bagaimana adaptasi budaya masyarakat terhadap tahapan pelaksanaan kebijakan program hutan rakyat; c) Hambatan-hambatan struktural yang terjadi selama proses adaptasi budaya dalam mencapai tujuan kegiatan dan konsekuensi yang dialami oleh masyarakat pedesaan hutan; d) Peran dan mekanisme hubungan kerja lembaga atau institusi pendukung kegiatan program hutan rakyat. Alur pikir penelitian yang telah diuraikan di atas digambarkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Alur Pikir Penelitian

Keterangan: (1) = Nomor urut proses
 → = Menunjukkan pengaruh

B. Pendekatan Fenomenologi dan Tahapan Penelitian

Pendekatan penelitian yang telah digunakan untuk mencapai tujuan penelitian adalah kualitatif dengan sifat penelitian Fenomenologi. Menurut Moleong (2007), pendekatan kualitatif menggunakan perspektif emic yaitu suatu perspektif dimana peneliti menganggap bahwa perilaku manusia terpola dalam sistem pola itu sendiri, peneliti meninjau dari segi subjek, situasi, dan latar yang dihadapinya.

Menurut Husserl (Raho, 2007), fenomenologi adalah suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok seseorang. Fenomenologi merupakan cara untuk memahami struktur realitas yang berkaitan langsung dengan pengalaman manusia. Penelitian fenomenologi memungkinkan peneliti untuk menganalisis kejadian sehari-hari yang dilakukan subjek, karena realitas sehari-hari itulah yang menjadi gambaran peneliti mengenai realitas subjek. Inti dari penelitian fenomenologi adalah membiarkan realitas menampakkan diri dan tampil di hadapan peneliti apa adanya. Fenomenologi merupakan pandangan berpikir yang menekankan pada fokus kepada pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan interpretasi-interpretasi dunia. Dalam hal ini, para fenomenologis ingin memahami bagaimana dunia muncul kepada orang lain. (Moleong, 2007). Menurut Berger yang dikutip oleh Basrowi dan Soenyono (2004a), tugas fenomenologi adalah menganalisis kenyataan-kenyataan sosial. Analisis terhadap realitas sosial akan memasukkan konsep interpretasi pada praktek kehidupan sehari-hari. Jadi prinsip fenomenologi yang bisa digunakan oleh peneliti kontemporer, yaitu: (1) peneliti menempatkan subyek terteliti sebagai subyek yang kritis dan problematik; (2) individu bertindak secara praktis atas dasar pilihan rasional; (3) menempatkan pemahaman seseorang tidak hanya berasal dari pengaruh dalam dirinya, tetapi juga merupakan produk dari kesadaran terhadap orang lain. Dengan kata lain, tindakan manusia sebagai proses internalisasi dan eksternalisasi.

Prosedur utama fenomenologi dikenal dengan istilah *apoche*, yaitu saat seorang peneliti mengenali dan secara sementara menyingkirkan semua pandangan pribadi (mereduksi). Agar data yang didapat di lapang benar-benar menggambarkan realitas yang dilakukan subjek, maka dalam penelitian fenomenologi peneliti harus melakukan reduksi. Reduksi adalah tahap dimana peneliti harus meletakkan dugaan-dugaan sementara tentang subjek dan tentang apa yang akan terjadi di lapang sebelum peneliti melihat fakta di lapang. Jadi seorang peneliti fenomenologi tidak boleh membuat dugaan sementara, karena yang ditakutkan dari adanya dugaan sementara adalah saat dugaan itu mempengaruhi apa yang peneliti lihat di lapang. Dalam pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan, karena peneliti juga seorang manusia yang mempunyai pikiran dan dugaan, persyaratan untuk tidak mempunyai dugaan sementara sulit untuk dilaksanakan, namun setidaknya peneliti telah berusaha untuk meniadakan dugaan-dugaan sementara yang timbul pada saat penelitian dilakukan.

Dalam proses penelitian lapangan, dengan menggunakan metode fenomenologi telah mengharuskan peneliti untuk mampu dalam

berpikir secara fenomenologis. Berpikir secara fenomenologis artinya peneliti telah melihat obyek penelitian apa adanya dan membiarkan obyek penelitian menampilkan seluruh dirinya. Dari sanalah peneliti mampu melihat suatu fenomena secara menyeluruh. Dengan berpikir secara fenomenologis, peneliti telah menunda segala bentuk penilaian, dan memberikan kesempatan pada objek penelitian yaitu fenomena yang peneliti angkat, yaitu anggota masyarakat desa yang beradaptasi terhadap program hutan rakyat untuk memperlihatkan dirinya apa adanya tanpa ada campur tangan dari peneliti.

Tahapan-tahapan yang telah ditempuh dalam penelitian ini adalah:

- 1) Peneliti melakukan observasi awal, meliputi diskusi mendalam dengan informan ahli untuk mendapatkan lokasi penelitian dan informan kunci, mempelajari dokumen kebijakan dan pelaksanaan program hutan rakyat di Indonesia dan di Provinsi Kalimantan Selatan, serta di Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2) Peneliti melaksanakan kunjungan silaturahmi ke informan kunci (Bapak H. Gazali Rahman di Desa Malilingin dan Bapak Wijayat di Desa Pualam Sari) dan tokoh masyarakat dalam rangka menjelaskan rencana dan tujuan penelitian, serta waktu penelitiannya. Dikatakan sebagai kunjungan silaturahmi karena peneliti sudah kenal dengan beberapa tokoh masyarakat desa lokasi penelitian. Dalam kegiatan ini, peneliti juga mengumpulkan nama-nama anggota masyarakat yang dapat dipilih sebagai subjek penelitian.
- 3) Peneliti melakukan penelitian lapangan, melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci dan para subjek, melakukan observasi partisipatif dalam rangka melihat langsung hasil-hasil kegiatan di lapangan dari informan kunci dan para subjek yang berkaitan dengan program hutan rakyat. Peneliti juga melakukan FGD dengan informan kunci dan para-subjek dan anggota masyarakat lainnya, khususnya untuk memperoleh data hambatan struktural, dan peran dan mekanisme lembaga pendukung program hutan rakyat yang ada di desa lokasi penelitian, dan hal lainnya yang dianggap penting oleh peneliti. Untuk mengetahui secara mendalam keseharian dan latar belakang informan kunci dan para subjek, maka dilakukan pengambilan data dengan metode *life history*. Dalam upaya pengumpulan data di atas, dan dalam kerangka fenomenologis, maka peneliti tinggal di desa di salah satu rumah informan kunci/ subjek, berbaur dalam kehidupan sehari-hari anggota masyarakat desa, serta mengikuti acara-acara kemasyarakatan dan keagamaan yang dilaksanakan.

Pada tahapan ini, peneliti mempergunakan pemikiran Husserl (Basrowi dan Soenyono, 2004a), dengan melakukan langkah-langkah metodis, yang disebut "reduksi". Melalui reduksi, peneliti menunda upaya menyimpulkan sesuatu dari setiap prasangka terhadap realitas. Reduksi yang telah dilakukan, adalah reduksi fenomenologi atau pemurnian fenomena, yakni semua pengalaman dalam bentuk kesadaran harus disaring atau dikurung sementara. Selama pengamatan berlangsung, peneliti mencari tahu "ada apa dibalik fenomena yang tampak", menelusuri "apa yang dialami subyek pada alam kesadaran". Reduksi *Eidetic*, tahapan reduksi yang kedua, bertujuan memperoleh intisari dari hakikat yang telah ada. Langkah yang dilakukan peneliti adalah, mengabstraksikan tentang peristiwa sosial yang hidup, menggambarkan seolah-olah proses pelaksanaan program hutan rakyat itu sedang berlangsung. Kemudian melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap data yang bersifat tetap atau tidak menunjukkan perubahan dalam berbagai variasi situasi dan kondisi. Reduksi ketiga adalah reduksi *transcendental*, yaitu berusaha memilah hakikat yang masih bersifat empiris menjadi hakikat yang murni.

- 4) Peneliti melakukan pengolahan dan analisis data.

C. Pemilihan Lokasi

Berdasarkan data awal yang telah dikumpulkan, yaitu melalui observasi pendahuluan terhadap rencana lokasi penelitian dan hasil diskusi dengan pihak terkait, yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan sub Dinas Bina Hutan, yaitu dengan bapak Ir. H. Supiani dan Kepala Bagian Program BP DAS Barito, Ir. Dody Prawira, MP., maka untuk mencapai tujuan penelitian, Desa Malilingin dan Desa Pualam Sari dapat dianggap sebagai lokasi yang paling tepat untuk dipilih sebagai lokasi penelitian (Peta lokasi pada Gambar 4, 5 dan 6).

Desa Malilingin dan Desa Pualam Sari yang dipilih secara *Typical case sampling* (Peters and Wester, 1990) dengan pertimbangan :

- a) Desa Malilingin sebagai desa yang penduduknya berasal dari Banjar Hulu diperkirakan dapat menggambarkan adaptasi budaya lokal terhadap program hutan rakyat yang telah dikembangkan sejak tahun 1983/1984; dan Desa Pualam Sari merupakan daerah transmigran sejak tahun 1981 sebagai *masyarakat pendatang* yang juga telah melaksanakan program hutan rakyat sejak tahun 2001/2002; Kedua desa ini dinilai oleh pelaksana proyek telah berhasil melaksanakan program hutan rakyat dan berkesinambungan hingga kini;

- b) Merupakan lokasi yang telah melaksanakan hutan rakyat subsidi dan mengembangkan hutan rakyat swadaya sehingga dapat digali adaptasi budaya sesuai tujuan penelitian. Juga telah mendapat dukungan dari Pihak Pelaksana Proyek (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Kehutanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Dinas Kehutanan Kabupaten Tapin) dan peneliti sudah ada koordinasi dan diskusi dengan Pemerintah Daerahnya (Bupati Hulu Sungai Selatan Bapak DR. M. Syafii, MSI dan Wakil Bupati Tapin Bapak Drs. Ahmad Fauzi, MAP).
- c) Peneliti sudah mengenal sebagian tokoh masyarakat di kedua desa tersebut sehingga memudahkan untuk memahami tindakan aktor dalam menyelami perilaku subyektifnya. Di samping itu juga telah memudahkan dalam proses *gaining entry* dan untuk menempatkan diri dalam posisi aktor (*getting along*).

D. Penentuan Subjek Penelitian

Metode penentuan subjek dalam penelitian ini adalah *purposive*, dimana yang menjadi subjek dalam penelitian ini diambil berdasarkan tujuan-tujuan dan pertimbangan tertentu. Sebelum penentuan subjek penelitian, peneliti pertama-tama menentukan informan kunci (*key-informant*). Penentuan informan kunci ini oleh peneliti tidak bermaksud untuk menarik generalisasi atas hasil yang diperoleh tetapi untuk menelusurinya secara mendalam. Sehubungan dengan program hutan rakyat dilaksanakan secara berkelompok, yaitu Kelompok Tani Hutan.

(KTH) yang berjumlah antara 25 sampai 50 orang dan dari jumlah tersebut telah banyak anggota kelompok dan tokoh masyarakat kedua desa sampel yang dikenal oleh peneliti.

Mengutip pemikiran Mead (1934); Mulyana (2004), fokus utama interaksionisme simbolik adalah kelompok sosial dan individu, kita memulai dengan suatu keseluruhan sosial yang ada merupakan sebuah aktivitas kelompok yang rumit, yang kedalamnya kita menganalisis (sebagai elemen-elemen) perilaku masing-masing individu yang terpisah-pisah yang membentuk kelompok tersebut. Kita mencoba menjelaskan perilaku kelompok sosial berdasarkan perilaku individu-individu yang terpisah-pisah yang termasuk dalam kelompok tersebut. Dikaitkan dengan penelitian, maka fokus penggalan sumber data adalah informan kunci dan subjek yang dianggap telah banyak mengetahui dan atau terlibat aktif dalam program hutan rakyat.

Informan kunci dalam penelitian ini untuk Desa Malilingin adalah H. Gazali Rahman selaku Kepala Desa dan pernah menjadi Ketua

Kelompok Tani. Subjek dalam penelitian ini yang berasal dari Desa Malilingin adalah :

- 1) Bapak H. Kastani (Mantan Kepala Desa Malilingin, dan mantan anggota KT HR)
- 2) Bapak H. Jam-jam (Tokoh masyarakat dan mantan ketua kelompok tani hutan rakyat Wana Sejahtera)
- 3) Bapak H. Hamsani (Tokoh masyarakat dan mantan Ketua KTH HR Rakat Mufakat)
- 4) Bapak Zainal Abidin (Anggota KTH HR)
- 5) Bapak Abdul Hamid (ketua kelompok tani hutan rakyat Suka Membangun)
- 6) Ibu Zakiah (Bidan desa, istri anggota KTH HR)

Sebagai informan pendukung dalam penelitian ini untuk Desa Malilingin adalah :

- 1) Bapak Sugito, S. Hut (Penyuluh Kehutanan Lapang/ PKL dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan), dan
- 2) Ibu Hj. Fathimatuzzahra, S.Hut, MP, (Kabid Pemanfaatan Hutan, Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan).

Informan kunci dalam penelitian ini untuk Desa Pualam Sari adalah Bapak Wijayat (Tokoh masyarakat dan Ketua Kelompok Tani). Adapun nama subjek untuk Desa Pualam Sari Ray-12 adalah :

- 1) Bapak Gunadi (anggota Kelompok Tani Hutan Jati Jajar)
- 2) Bapak Hambali (Ketua GAPOKTAN dan anggota kelompok tani hutan Jati Jajar)
- 3) Bapak Bambang (Anggota KTH Jati Jajar dan pedagang pengumpul karet)
- 4) Bapak Mujiano (anggota KTH Jati Jajar)
- 5) Ibu Sri Widayati (aktivis PKK, istri anggota KTH Jati Jajar)

Sebagai informan pendukung di Desa Pualam Sari adalah :

- 1) Bapak Ikhsan, SP (Penyuluh Kehutanan Lapang/ PKL, dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin),
- 2) Bapak H. Herman Cahyono, S.Hut (Kepala Bidang Pemolaan, Rehabilitasi Hutan dan Konservasi Tanah, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin), dan
- 3) Bapak H. Yanuar Hadi (Kepala Desa Pualam Sari).

Selain informan kunci, subjek penelitian dan informan pendukung, penelitian ini juga mengambil data yang dirasa perlu kepada para ahli program hutan rakyat, agar dapat lebih memahami informasi dan data yang diperoleh. Selanjutnya para ahli program hutan rakyat yang berkaitan dengan hal tersebut dinamakan informan ahli, yaitu:

- 1) Ir. Karjono, MP (Kepala Bagian Hutan Rakyat, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Departemen Kehutanan Republik Indonesia)
- 2) Ir. H. Supiani, MP (Kepala sub Dinas Bina Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan)
- 3) Ir. Dody Prawira, MP (Kepala Bagian Program, Kantor Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai/BP DAS Barito)

E. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan penelitian, maka peneliti telah mengumpulkan data melalui beberapa sumber data, baik primer maupun sekunder. Sumber data primer berasal dari subjek dan informan kunci dan karena dipandang perlu, maka ditambah dari sumber pihak terkait sebagai informan pendukung dan informan ahli, misalnya dari aparat pemerintah kecamatan, kabupaten dan provinsi serta pusat.

Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen atau pun catatan dan sumber pustaka yang berkaitan atau relevan, seperti dari pemerintahan (desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat) dan perpustakaan.

Teknik pengumpulan data mengacu pada pendapat Creswell (1994) yaitu: wawancara mendalam, observasi partisipasi, FGD, dan ditambah *Life History Method*, serta pendalaman dokumen dan catatan dan gambar-gambar (*visual images*). Secara detail dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Wawancara mendalam (*depth-interview*): wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan wawancara tak-terstruktur, yaitu bahan wawancara tidak ketat, menyesuaikan dengan situasi dan dialog yang ada antara informan kunci/subjek dengan peneliti. Wawancara tak-terstruktur yang digunakan ada dua jenis yaitu (a) wawancara yang berfokus (*focused interview*), (b) wawancara bebas (*free interview*). Peneliti telah memakai kedua jenis wawancara tak-terstruktur ini, karena dengan menggunakan dua hal tersebut peneliti dapat lebih mudah dalam melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada informan kunci dan para subjek. Wawancara mendalam

ini telah menghasilkan rekaman dialog informan kunci dan para subjek dengan peneliti untuk kemudian ditulis hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian dan dilakukan analisis data. Dengan menggunakan pedoman wawancara yang fleksibel telah dapat mengetahui jalan pemikiran aktor (informan kunci dan para subjek) dan alasan yang mendasarinya untuk terlibat dalam program hutan rakyat, unsur yang berperan dan hambatan-hambatan struktural khususnya terhadap adaptasi budaya. Pada wawancara mendalam, peneliti telah berupaya mengambil peran pihak yang diteliti secara intim untuk dapat menyelami ke dalam dunia pikiran dan sosial mereka. Sebagaimana Weber yang dikutip oleh Ritzer (2003), peneliti sosiologi harus mencoba menginterpretasikan tindakan aktor dengan memahami motif tindakan dari si aktor, maka untuk itu peneliti harus sungguh-sungguh, mencoba mengenangkan dan menyelami pengalaman si aktor, berusaha menempatkan diri dan memahami dalam posisi si aktor. Metode wawancara mendalam ini telah dipergunakan untuk mendapatkan data berkaitan dengan interpretasi informan kunci dan subjek terhadap program hutan rakyat dan proses adaptasi yang terjadi.

- 2) Observasi Partisipasi (*Participant as Observer*): menurut Ritzer (2007), metode observasi digunakan untuk dapat memahami realitas *intrasubjektive* dan *intersubjektive* dari tindakan sosial dan interaksi sosial. Metode observasi amat penting, terutama jika penelitian dilakukan terhadap masyarakat yang masih belum terbiasa untuk mengutarakan perasaannya, gagasan maupun pengetahuannya. Dengan cara observasi partisipasi, peneliti telah dapat memahami dan menyelami pola pikir dan pola kehidupan masyarakat yang diteliti. Observasi ini telah menghasilkan catatan lapangan berupa: (a) Catatan Lapangan (*Field notes*) Deskriptif, yaitu diskripsi peneliti tentang situasi di sekitar informan kunci dan subjek, baik itu aktivitas yang sedang dilakukannya, lingkungan di sekelilingnya dan juga dialog yang dilakukan informan kunci dan subjek secara alamiah; (b) Foto yaitu gambaran situasi dan aktivitas informan kunci dan subjek dan anggota masyarakat terkait lainnya. Metode ini dapat merekam dimensi makroskopik dan mikroskopik yang dimulai dari kehidupan aktor sebagai suatu keseluruhan sampai pada tindakan sosial yang dilakukannya. Dalam teknik observasi ini peneliti telah dapat memperbandingkan hasil wawancara mendalam dengan kenyataan lapangan yang berkaitan dengan program hutan rakyat. Partisipasi dilakukan dengan menempatkan diri dalam posisi aktor sehingga dapat mempelajari, memahami dan menyelami makna dari tindakan aktor untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam

program hutan rakyat, karena pelaku dapat dipahami ketika dia membuat pilihan atau putusan untuk kemudian memilih tindakan. Metode observasi partisipasi ini dipergunakan peneliti dalam memperbandingkan data yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan kenyataan yang ada di lapangan, seperti keadaan tanaman, aktivitas keseharian, dan interaksi sosial yang terjadi selama penelitian berlangsung.

- 3) *Focus Group Discussion* (FGD), yaitu diskusi bersama antar subjek penelitian. Peneliti mengajak mendialogkan suatu wacana berkenaan dengan program hutan rakyat dan peneliti akan mencatat respon mereka masing-masing dalam menanggapi apa yang peneliti ungkapkan maupun apa yang diungkapkan subjek lainnya. Metode ini sangat sesuai dipergunakan ketika peneliti menggali hambatan struktural yang terjadi, dan peran dan mekanisme dari lembaga yang ada dalam mendukung keberhasilan program hutan rakyat. Pun juga telah digunakan sebagai alternatif metode ketika peneliti kesulitan dalam mewawancara subjek perempuan.
- 4) *Life History Method*, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan menggali lebih dalam dan mengumpulkan data pengalaman hidup informan (Koentjaraningrat, 1993). *Life history method* yang dipakai dalam penelitian ini bersifat sederhana karena hanya sebagai alat pengambilan data pendukung yaitu untuk mengambil data berupa gambaran umum informan kunci dan subjek penelitian, meliputi asal-usul, latar belakang pendidikan, kehidupan keluarga dan lainnya.
- 5) Pengumpulan data dari dokumen dan catatan serta gambar-gambar sebagaimana dalam Tabel 1.

Tabel 1. Dokumen dan Sumber Data

No.	Dokumen/Catatan/ Gambar Tentang	Sumber Utama
1.	Sejarah dan Profil desa	Kantor desa
2.	Kelompok dan organisasi sosial desa	Kantor kecamatan
3.	Sejarah proyek program hutan rakyat	Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Selatan dan Dinas Kehutanan Tapin
4.	Perkembangan kelompok tani hutan dan macam kegiatan program hutan rakyat	KTH
4.	Gambar kegiatan kelompok tani	KTH dan kantor Dinas Kehutanan
5.	Gambar lahan awal hingga sekarang	KTH dan Dinas Kehutanan
6.	Keadaan perkembangan tanaman hutan rakyat di Kalsel dan Indonesia	Dinas Kehutanan Kab. dan Prov. serta Departemen Kehutanan Jakarta
7.	Peran dan Mekanisme hubungan lembaga (para-pihak) untuk program HR	Kelompok Tani, Dishut Kabupaten, Provinsi serta Departemen Kehutanan Jkt.

Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan di lokasi penelitian adalah berasal dari segala kata dan tindakan dari pelaku yang diteliti serta dokumen atau catatan serta gambar (*photo*) yang relevan. Untuk melengkapi teknik di atas, pengumpulan data juga dilakukan melalui pengamatan pada situasi pasar, politik, ekologi dan pada aspek nilai-nilai, norma-norma sebagai konsekuensi dari adaptasi budaya ataupun respon dari masyarakat.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dalam 3 (tiga) kali pertemuan dengan informan kunci dan para subjek, yaitu pada bulan Juni 2008, bulan Desember 2008, dan bulan Juli 2009. Sebelum pengumpulan data, peneliti melaksanakan pendekatan dan diskusi kepada informan ahli dan informan kunci pada bulan November 2007, sebagai bagian dari *gaining entry*. Selama pengumpulan data di lapangan, peneliti tinggal di salah satu rumah subjek (di Desa Malilingin) dan di rumah informan kunci (di Desa Pualam Sari) selama beberapa hari agar dapat menempatkan diri dalam posisi aktor (*getting along*).

Dalam usaha pengumpulan data primer dengan subjek, untuk lokasi penelitian Desa Malilingin, peneliti tidak bisa menggunakan alat perekam (*recording*), karena subjek merasa malu dan tidak leluasa untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan peneliti. Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti memanfaatkan catatan lapangan semaksimal mungkin. Sedangkan untuk Desa Pualam Sari Ray-12,

peneliti dapat menggunakan alat perekam, karena subjek tidak keberatan dan malah senang, karena merasa "dijadikan" orang penting.

Pada beberapa keadaan, peneliti melengkapi data dengan melaksanakan pembicaraan dan diskusi jarak jauh melalui fasilitas telpon ke informan kunci, beberapa subjek, dan informan pendukung, serta informan ahli. Hal ini dilakukan untuk lebih menyakinkan peneliti terhadap keakuratan data yang sedang diolah dan mendengar persetujuan dari subjek atas penuturan dan pernyataan yang telah mereka sampaikan pada saat wawancara mendalam dilakukan.

F. Keabsahan Data

Mengutip pendapat Hammersley yang dikutip oleh Silverman (1993), untuk data yang bersifat kualitatif, disarankan untuk memeriksa data secara teoritis melalui *subtitle form of realism* yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu :

- 1) Validitas yang diidentifikasi dengan keyakinan terhadap pengetahuan kita;
- 2) Reliabilitas yang diasumsikan sebagai hal yang bebas untuk diteliti;
- 3) Realitas dipandang dan selalu dilihat dari sudut tertentu. Oleh karena itu menjadi sebuah tanggung-jawab kita untuk memberikan sebuah kebenaran yang mampu untuk direproduksi.

Sejalan dengan pendapat di atas, penelitian kualitatif mempunyai kriteria tersendiri sehingga keabsahan data dapat dipenuhi melalui kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konformabilitas, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bryman (2004) :

"Each aspect of trustworthiness has parallel with the previous quantitative research criteria: a) Credibility, which parallels internal validity, i.e. how believable are the findings?; b) Transferability, which parallels external validity, i.e. do the findings apply to other contexts?; c) Dependability, which parallels reliability, i.e. are the findings likely to apply at other times?; d) Conformability, which parallels objectivity, i.e. has the investigator allowed his or her values to intrude to high degree?"

Pada pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan, untuk memperoleh keabsahan data, peneliti mengacu pada pendapat Moleong (2007) yang memiliki kesamaan dengan pendapat Bryman di atas, yakni harus memenuhi empat kriteria utama sebagai berikut :

1) Derajat kepercayaan (*Credibility*)

Untuk memperoleh derajat kepercayaan data temuan penelitian maka peneliti telah mengusahakan melalui beberapa teknik, yaitu: (1) perpanjangan kegiatan lapangan; (2) Tekun atau mengamati secara seksama dengan cara mengulangi kegiatan pengamatan terhadap kegiatan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan program hutan rakyat setiap hari sesuai fokus masalah penelitian; (3) penerapan teknik Triangulasi, yaitu melalui "cross check" tentang data dan informasi yang diperoleh dari informan kunci dan atau subjek hingga informasi jenuh atau habis dan menghasilkan kesamaan data dan informasi; (4) *member check*, yaitu setelah temuan lapangan ditulis dalam bentuk draft, maka hasilnya disampaikan kepada informan kunci dan subjek, yaitu mereka yang terlibat dalam permasalahan yang telah dikaji oleh peneliti, guna menanyakan apakah hasil yang diperoleh peneliti sudah benar atau masih perlu ada perubahan sesuai dengan yang diketahui oleh mereka; (5) memperbanyak referensi, yakni melalui penelusuran pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitian.

2) Keteralihan (*Transferability*)

Untuk memenuhi kriteria ini, peneliti berusaha menyajikan laporan hasil penelitian untuk memperkaya wacana ilmiah melalui suatu deskripsi secara terperinci atau uraian yang cermat. Keteralihan sebagai persoalan empirik bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut, peneliti mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama. Dengan demikian, peneliti bertanggung-jawab untuk menyediakan data deskripsi secukupnya. Keteralihan hasil penelitian biasanya berkaitan dengan pertanyaan sejauh mana hasil penelitian ini dapat diterapkan dan digunakan dalam situasi aslinya.

3) Kebergantungan (*Dependability*)

Dalam hal ini peneliti meneliti dan menguji kembali atau mereplikasi hasil penelitian melalui suatu proses pemeriksaan yang cermat dan teliti terhadap seluruh komponen dalam laporan hasil penelitian untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan sehingga laporan hasil penelitian ini dapat mencapai hasil yang lebih sempurna.

4) Kepastian (*Comformability*)

Kriteria kepastian berasal dari konsep "objektivitas" yang dalam penelitian kualitatif bahwa sesuatu itu obyektif atau tidak tergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap suatu pandangan, pendapat dan penemuan seseorang. Untuk

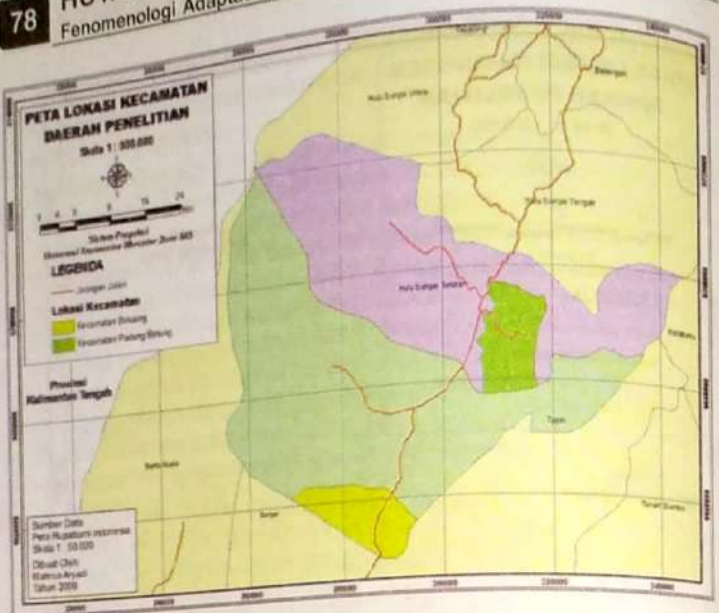
menyangkut penyesuaian dengan pranata sosial, adat istiadat dan berbagai aktivitas manusia dari waktu ke waktu dan menyatu dengan manusianya.

Berkaitan dengan tujuan penelitian, maka pengertian adaptasi budaya adalah proses bagaimana suatu individu atau kelompok masyarakat (aktor) berinteraksi dan berinterpretasi, dan kemudian melakukan tindakan terhadap tahapan kegiatan program hutan rakyat yang dilaksanakan oleh pemerintah (subsidi) hingga berkembang menjadi hutan rakyat swadaya. Atau dengan adanya program hutan rakyat menyebabkan masyarakat melakukan sebuah proses adaptasi dalam hal ini adaptasi budaya agar mampu dan selaras bertahan terhadap perubahan tersebut. Perubahan sosial (budaya dan ekonomi) menjadi faktor utama dan hal yang paling mendasar mengapa terjadi sebuah proses adaptasi budaya.

- 2) Hutan Rakyat: hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimum 0,25 Ha, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50% (Lampiran I Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.04/Menhut-V/2004:III-2).
- 3) Program Hutan Rakyat: suatu proyek pembinaan hutan di luar kawasan hutan yang dianggap sesuai dengan kondisi dan situasi sosial budaya daerah setempat, dengan sasaran lokasi lahan milik rakyat, tanah adat atau lahan di luar kawasan hutan yang memiliki potensi untuk pengembangan hutan rakyat (Lampiran I Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.04/Menhut-V/2004:III-2).
- 4) Masyarakat (society): menurut Koentjaraningrat (1990), masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.
- 5) Masyarakat Pedesaan Hutan (*rural community*): sebagai suatu kesatuan hidup manusia, yang menempati suatu wilayah yang nyata (desa yang terletak di dalam dan sekitar hutan), mempunyai ikatan lokasi dan kesadaran wilayah, dan yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat, serta yang terikat oleh suatu rasa identitas komunitas (Koentjaraningrat, 1990).
- 6) Kelompok Tani Hutan Rakyat/KTHR: adalah kelompok tani yang terbentuk dan terlibat secara aktif untuk melaksanakan kegiatan program hutan rakyat yang dilaksanakan di desa mereka.



Gambar 4. Peta Lokasi Kabupaten Daerah Penelitian



Gambar 5. Peta Lokasi Kecamatan Daerah Penelitian



Gambar 6. Peta Lokasi Desa Penelitian

BAB 5

KARAKTERISTIK MASYARAKAT PELADANG DAN TRANSMIGRAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Propinsi Kalimantan Selatan dengan ibukotanya Banjarmasin terletak di sebelah selatan pulau Kalimantan dengan batas-batas: sebelah Barat dengan Propinsi Kalimantan Tengah, sebelah Timur dengan Selat Makasar, sebelah Selatan dengan Laut Jawa dan di sebelah Utara dengan Propinsi Kalimantan Timur. Secara geografis Propinsi Kalimantan Selatan terletak di antara 114 19" 33" BT - 116 33' 28 BT dan 1 21' 49" LS 1 10" 14" LS, dengan luas wilayah 37.377,53 km² atau hanya 6,98 persen dari luas pulau Kalimantan. Jumlah penduduknya berdasarkan sensus 2006 sebanyak 3.345.784 orang, sebanyak 1.685.431 laki-laki, dan 1.660.353 perempuan.

Kalimantan Selatan secara geografi terletak di sebelah selatan pulau Kalimantan dengan luas wilayah 37.530,52 km² atau 3.753.052 ha. Sampai dengan tahun 2004 membawahi kabupaten/kota sebanyak 11 kabupaten/kota dan pada tahun 2005 menjadi 13 kabupaten/kota sebagai akibat dari adanya pemekaran wilayah kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Kotabaru dengan Kabupaten Tanah Bumbu. Luas wilayah propinsi tersebut sudah termasuk wilayah laut propinsi dibandingkan Propinsi Kalimantan Selatan. Luas wilayah masing-masing Kabupaten Tanah Laut 9,94 %; Tanah Bumbu 13,50%; Kotabaru 25,11%; Banjar 12,45%; Tapin 5,80%; Tabalong 9,59%; Balangan 5,00%; Batola 6,33%; Banjarbaru 0,97% dan Banjarmasin 0,19%.

Kemiringan tanah dengan 4 kelas klasifikasi menunjukkan bahwa sebesar 43,05% wilayah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai kemiringan tanah 0-2 %. Rincian luas menurut kemiringan adalah sebagai berikut :

- 1) 0 - 2% : 1.615.630 Ha (43,05%)
- 2) > 2 - 15% : 1.192.545 Ha (31,87%)
- 3) > 15 - 40% : 713.682 Ha (19,02%)
- 4) > 40% : 231.195 Ha (6,16%)

Adapun luas wilayah Kalimantan Selatan menurut kelas ketinggian yang dibagi menjadi 6 kelas ketinggian menunjukkan wilayah Kalimantan Selatan sebagian besar berada pada kelas ketinggian 25-100 m di atas permukaan laut yakni 31,29%. Bentuk geologi wilayah Kalimantan Selatan sebagian besar berupa Aluvium Muda dan Formasi Berai.

Tanah di wilayah Propinsi Kalimantan Selatan sebagian besar berupa hutan dengan rincian Hutan Lebat (780.319 Ha), Hutan belukar (377.774 Ha), dan hutan rawa (90.060 Ha), Hutan Sejenis (352.840 Ha) Tanah berupa semak/alang-alang seluas 870.314 Ha, berupa rumput (50.119 Ha), dan untuk lain lain (83.014 Ha). Sedangkan penggunaan untuk sawah 413.107 Ha, perkebunan 437.037 Ha dan untuk perkampungan 57,903 Ha serta untuk Tegalan (48.612 Ha).

Menurut data dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2007, berdasarkan luas wilayahnya Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai luas wilayah 3.753.052 Ha, dengan luas areal hutan 1.659.003 Ha (44,20% dari luas keseluruhan). Luas areal hutan tersebut dibagi kedalam kawasan lindung 751.252 Ha, kawasan hutan produksi terbatas 212,177 Ha, kawasan hutan produksi tetap 627.672 Ha dan kawasan hutan produksi konversi 67.902 Ha.

Berdasarkan sebaran lahan kritis, menurut BP DAS Barito (2007), dari luas wilayah 3.753.052 Ha, seluas 555.983,07 Ha (14,81%) lahan yang kritis, dengan rincian seluas 500.078,02 Ha termasuk kritis dan 55.905,05 Ha sangat kritis. Dari sisi kawasannya, luas lahan kritis tersebut terdapat di dalam kawasan hutan seluas 187.384,59 Ha (33,70%) dan di luar kawasan hutan seluas 368.598,40 Ha (66,30%). Khusus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), luas lahan kritisnya adalah 44.438 Ha (24%) dan Kabupaten Tapin lahan kritisnya seluas 65.059,61 Ha (29,92%) dari luas wilayahnya masing-masing.

Di Provinsi Kalimantan Selatan, luas hutan rakyatnya adalah 94.271,50 Ha dengan perkiraan potensi kayunya 2.014.611,00 m³, terdiri dari jenis tanaman karet, kemiri, kapuk, galam, Jambu mete, sengon, kayu manis, cempedak, akasia dan nangka (Departemen Kehutanan, 2004). Pengembangan Hutan Rakyat dilaksanakan dengan dana APBD Provinsi, APBN (Gerhan-RHL) dan Dana Pemerintah Lainnya. Hasil pelaksanaan pengembangan Hutan Rakyat di Kalimantan Selatan dengan dana APBD Provinsi Tahun 2000 - 2007 disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Rekapitulasi Pengembangan Hutan Rakyat dengan dana APBD Di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2000 - 2007.

Kabupaten	2000	01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tabalong	135	25	25	30	25	-	-	-
Balangan	-	-	-	-	-	-	-	-
HSU	-	25	25	-	-	-	-	-
HST	-	25	25	30	-	-	50	-
HSS	120	50	25	30	50	-	50	-
Tapin	189	100	25	30	25	-	-	-
Banjar	363	50	25	60	125	50	50	75
Banjarbaru	20	25	25	-	25	-	-	-
Barito Kuala	25	150	25	30	75	-	-	-
Tanah Laut	89	25	25	30	-	50	100	25
Tanah Bumbu	-	-	-	-	-	-	-	-
Kotabaru	-	25	25	30	25	-	50	-
JUMLAH	941	500	250	270	350	100	300	100

(Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, 2007)

Dari tabel di atas, untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) telah dilaksanakan pengembangan program hutan rakyat sejak tahun 2000 hingga 2007 dengan sumber dana APBD seluas 325 ha, dan untuk Kabupaten Tapin seluas 369 ha. Jenis tanaman utamanya adalah karet, mahoni, melina dan tanaman buah-buahan.

Sedangkan hasil pelaksanaan pengembangan Hutan Rakyat di Kalimantan Selatan dengan dana APBN/Gerhan-RHL s/d Tahun 2007 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi Pengembangan Hutan Rakyat dengan Dana APBN/Gerhan-RHL Di Kalimantan Selatan s/d Tahun 2007.

Kabupaten	s/d 2003	2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6
Tabalong	500	300	300	-	-
Balangan	-	750	100	50	-
HSU	625	250	-	-	-
HST	1.475	250	350	-	-
HSS	400	325	600	75	-
Tapin	750	1.250	950	125	-
Banjarnegara	500	1.250	400	100	75
Banjarnegara	30	50	50	-	-
Barito Kuala	250	375	-	100	-
Tanah Laut	-	500	600	75	25
Tanah Bumbu	-	150	550	-	-
Kotabaru	-	200	250	50	-
JUMLAH	4.530	5.650	4.150	575	100

(Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, 2007)

Dari tabel di atas, dapat dilihat untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan program hutan rakyat yang bersumber dari APBN hingga tahun 2007 seluas 1.400 ha, dan untuk Kabupaten Tapin seluas 3.075 ha. Tanaman utama adalah karet, Jati, Mahoni, sengon, gmelina, kayu luru dan tanaman buah-buahan.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kecamatan Padang Batung

Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan ibukotanya Kandangan, mempunyai luas wilayah 1.804,94 km². Berdasarkan data BPS (2008a), jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebanyak 208.571 orang, dengan rincian laki-laki 104.346 orang (50,03%), dan perempuan 104.225 orang (49,97%). Sex ratio penduduk 1,1 yang artinya setiap 100 jiwa perempuan terdapat 101 jiwa laki-laki. Rata-rata kepadatan penduduk sebesar 116 jiwa/km². Motto kabupaten adalah Rakat Mufakat.

Secara geologis daerah ini terdiri dari pegunungan yang memanjang dari arah timur ke selatan, namun dari arah barat ke utara merupakan dataran rendah alluvial yang kadang-kadang berawa-rawa. Kondisi topografi ini menyebabkan udara di wilayah ini terasa dingin agak lembab.

Dari arah utara melingkar ke arah barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dialiri oleh Sungai Amandit bermuara ke Sungai Negara (anak sungai Barito) yang berfungsi sebagai sarana prasarana perhubungan dalam kabupaten dan ke kabupaten lainnya. Berjarak 98,75 Km dari Banjarmasin bila ditarik garis lurus ke arah Barat Daya, tetapi bila berdasarkan jarak tempuh jalan darat adalah 136 Km.

Secara geologis Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari dataran tinggi (pegunungan) yang memanjang dari arah Timur ke Selatan, sedangkan dari arah Barat ke Utara merupakan dataran rendah alluvial yang terkadang berawa-rawa monoton. Kabupaten ini termasuk dalam iklim tropis dengan suhu terendah 220C dan tertinggi 320 C, dengan curah hujan berkisar antara 2.500 mm sampai 3.000 mm per tahun.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Utara di sebelah Utara; Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Kota Baru di sebelah Timur; Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin di sebelah Barat; dan Kabupaten Tapin di sebelah Selatan. Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terbagi atas 11 Kecamatan, 4 Kelurahan, dan 114 Desa, sesuai dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 38 Tahun 2000, tanggal 10 Maret 2000. Salah satu kecamatannya adalah Padang Batung. (Peta Lokasi Kabupaten dan Kecamatan pada Lampiran 3 dan 4).

Kecamatan Padang Batung mempunyai luas wilayah 203,93 km² atau 11,13% dari luas Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sesuai data BPS tahun 2008b, jumlah penduduk di kecamatan ini sebanyak 17.687 orang, laki-laki 8.678 orang dan perempuan 9.009 orang, dengan jumlah KK sebanyak 5.299. Jumlah rata-rata jiwa per rumah tangga adalah 3,33, atau dengan kepadatan 86,48/km².

Mata pencaharian masyarakat Kecamatan Padang Batung, berdasarkan data BPS Kecamatan Padang Batung dalam Angka Tahun 2007/2008, diketahui sebanyak 75% dalam bidang pertanian (petani penggarap, peladang, buruh tani, penyekap), 5% PNS/POLRI, dan 20% lain-lain (penambang, buruh bangunan, pedagang).

Penggunaan lahan, meliputi lahan sawah 2.445 Ha, lahan kebun/ladang seluas 4.290 Ha, dan lahan perkebunan 3.676 Ha. Jarak ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten, Kandangan sejauh 7 Km, dan ke ibukota provinsi, Banjarmasin sejauh 142 Km.

Kecamatan Padang Batung berbatasan :

- 1) Sebelah Utara dengan Kecamatan Angkinang dan Kecamatan Telaga Langsat
- 2) Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tapin

- 3) Sebelah Timur dengan Kecamatan Loksado
- 4) Sebelah Barat dengan Kecamatan Kandangan dan Kecamatan Sungai Raya

Kecamatan Padang Batung terletak pada ketinggian 7 hingga 250 meter dari permukaan laut (dpl), dengan curah hujan rata-rata 316 milimeter. Secara administratif, Kecamatan Padang Batung ini membawahi 17 desa dan 1 kelurahan, salah satu desanya adalah Desa Malilingin yang terletak di pinggiran pegunungan Meratus dan dibelah oleh sungai Amandit.

Kabupaten Tapin dan Kecamatan Binuang

Kabupaten Tapin (Tanah Pinang) dengan ibukotanya Rantau memiliki luas wilayah 2.700,82 km², dengan jumlah penduduk pada tahun 2008 sebanyak 150.587 orang, dengan rincian 76.284 laki-laki, dan 74.303 perempuan. Kepadatan penduduknya sekitar 69,24 jiwa/Km². Jarak dari Rantau ke ibukota provinsi yakni Banjarmasin adalah 113 Km. Motto daerah *Ruhui Rahayu*.

Kabupaten Tapin secara geografis terletak pada 21° 11' 40 LS dan 114° 4' 27 BT sampai dengan 115° 3' 20 BT, berbatasan dengan :

- 1) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) di sebelah Utara
- 2) Kabupaten Banjar di sebelah Selatan
- 3) Kabupaten Barito Kuala di sebelah Barat, dan
- 4) Kabupaten Banjar di sebelah Timur

Berdasarkan letak ketinggiannya dari permukaan laut diketahui bahwa kebanyakan luas daerah di Kabupaten Tapin berada pada kelas ketinggian 0-7 m dari permukaan laut, yakni sebesar 67,34% luas wilayah. Sedangkan luas wilayah dengan ketinggian lebih dari 500 m di atas permukaan laut hanya berkisar 1,21% luas wilayah. Jika dilihat dari kelas kemiringannya, Kabupaten Tapin merupakan daerah yang landai dengan kemiringan 0-2% yang meliputi 82,93% dari luas daerah. Sedangkan pada kelas kemiringan antara 2,1 - 8 % hanya meliputi 0,62% dari luas wilayahnya.

Daerah ini merupakan daerah agraris yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan antara lain di sektor perkebunan komoditi utama yang dihasilkan dari daerah ini berupa karet (10.078 ton), kelapa dalam (1.060 ton) dan kopi robusta (7 ton). Pada kegiatan pertanian, sebagian besar penduduk Tapin bermata pencaharian sebagai petani, hasil pertanian yang utama berupa bahan tanaman pangan meliputi padi, jagung, kacang tanah, tanaman hortikultura dan palawija.

Kabupaten Tapin secara administratif terbagi kedalam 12 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Binuang. Kecamatan Binuang dengan ibukotanya Binuang, mempunyai luas wilayah 342,08 km². Jumlah penduduk tahun 2008 sebanyak 31.225 jiwa (BPS, 2008c). Kecamatan Binuang yang terbelah oleh jalan trans Kalimantan, sering dijadikan tempat persinggahan perjalanan masyarakat sehingga perekonomian masyarakatnya cukup maju. Kecamatan Binuang juga merupakan salah satu lokasi pertambangan batu bara yang potensial dan luas. Selain itu, di kecamatan ini juga terdapat sirkuit yang berskala nasional, yang diberi nama Sirkuit Balipat. (Peta Lokasi Kecamatan pada Lampiran 4)

Kecamatan Binuang secara administratif berbatasan dengan :

- 1) Kecamatan Tapin Selatan di sebelah Utara
- 2) Kabupaten Banjar di sebelah Selatan
- 3) Kecamatan Tapin Tengah dan Kabupaten Banjar di sebelah Barat, dan
- 4) Kecamatan Hatungun di sebelah Timur.

Secara pembagian wilayah administratif, wilayah Kecamatan Binuang ini terbagi atas 7 buah desa dan 1 buah kelurahan. Dari 7 desa tersebut, salah satunya adalah Desa Pualam Sari.

B. Karakteristik Masyarakat Peladang

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di lapangan selama penelitian, keseharian masyarakat peladang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Antara jam 04-05: bangun tidur dan sholat subuh
- 2) Jam 05-05.30: sarapan pagi di warung (makan "ketupat" atau "wadai" dengan secangkir kopi atau teh hangat) yang ada di warung desa
- 3) Jam 05.30-06.30: berangkat ke kebun karet ("getah") untuk "mamantat" (mengambil getah atau lateks dari pohon karet).
- 4) Jam 06.30-09.00: menyadap karet
- 5) Jam 10.00-11.00: mengumpulkan getah yang dari pohon karet
- 6) Jam 11.00-12.00: pulang ke rumah membawa hasil sadapan "pantatan", bisa langsung di jual ke pengumpul desa atau pun dikumpulkan dulu di rumah
- 7) Jam 12.00-15.00: makan, sholat dan istirahat
- 8) Jam 15.00-17.00: berangkat ke kebun atau ke ladang untuk pemeliharaan tanaman karet muda, menanam kembali (permudaan), atau membersihkan ladang

- 9) Jam 17.00-20.00: sholat, makan malam dan kumpul keluarga
- 10) Jika ada kegiatan keagamaan, maka biasanya setelah jam 20.00 atau setelah sholat Isya.
- 11) Jam 22.00-04.00: istirahat malam.



Gambar 7. Subjek Zainal Abidin berangkat ke kebun karet

Menurut informan kunci (Bapak Haji Gazali Rahman) :

"Alhamdulillah, mun kahidupan kami di kampung nia cukup haja, napa mun baras kada manukar, iwak kawa ja ma unjun, kandaraan ruda dua ada haja, cumin sayuran banaran rancak nukar ka urang. Kahidupan kami mun bangun subuh ki kira jam empat an (04.00), basubuh dahulu hanyar minum kawarung wan makan wadai atawa katupat gasan mangganjal parut. Jam 5-6 biasanya kami ka kabun gatah mamantat sampai jam 10-11 siang. Imbah tu bulik ka rumah istirahat makan wan sambahyang zhuhur. Biasanya tu kami jam tiga an (15.00) ka pahumaan malihati banih atau kacang tanah, sambil ba barasih pahumaan. Jam lima an (17.00) sedang sudah bulik apa parak sanja kalu. Mun malam jam 8 an (20.00) kami bakumpulan kaluarga di rumah, kacuali ada acara di kampung, nang kaya bakajian atau ceramah agama di langgar, maka kami bisa sampai jam sabalasan atawa dua belasan (23.00-24.00) hanyar bulik ka rumah. Guring ai imbah itu. Mun hari Jumahat, kami perai tu pan ka kabun wan ka pahumaan, karena itu hari suci. Kami mambarasih rumah, mambarasih masigit (Mesjid) dan gawian gasan di kampung, atawa jua kami ka kuta manukar saraba nang kadada di kampung". (IK. ML)

(Alhamdulillah, kehidupan di desa kami berkecukupan, semua tersedia di sini seperti beras, ikan, kendaraan roda dua (sepeda motor), kecuali sayur-mayur yang beli. Dari sisi kehidupan harian, saya biasanya bangun jam 04 sebelum sholat Subuh, setelah sholat saya dan istri (juga anak-anak) minum dan makan makanan ringan di warung terdekat. Setelah itu, baru kami berangkat ke kebun karet untuk menyadap. Sekitar jam 10-11 siang, kami pulang ke rumah untuk istirahat dan sholat Zuhur. Jam 15.00 sore saya dan istri berangkat ke ladang padi untuk membersihkan rumput atau pemeliharaan dan pulang kerumah jam 17.00 petang karena sudah dekat sholat Magrib. Sekitar jam 20.00 kami biasanya ngumpul bareng dirumah saja, kecuali ada acara sosial keagamaan seperti membaca Yasinan ataupun mendengarkan ceramah agama, maka kami pulang jam 23-24. Setelah itu kami istirahat untuk persiapan besok pagi lagi. Kalau hari Jum'at biasanya kami tidak kekebun karet ataupun ke ladang, karena itu hari suci dan biasanya kami gunakan untuk membersihkan rumah, kerja bakti atau pergi ke kota membeli bahan keperluan yang tidak ada di desa).

Sejalan dengan penuturan informan kunci di atas, menurut subjek (Ibu Zakiah), kegiatan rumah tangga di Desa Malilingin sebagai berikut :

"Kebiasaan di sini tu, mun babinian sama ja gawiannya wan lalakian. Imbah sambahyang Shubuh, laki-binian tulak ka kabun gatah. Sabalumnya minum wan makan wadai dahulu pang di warung. Kakanakan nang sakulah biasanya di urus nang kaka, buhannya jua sabalum sakulah makan minum di warung jua. Kanakan bisa ja sorangan ma urus diri.

Jam sepuluh sabalas, bulikan dari mamantat gatah, nang uma babarasih rumah wan bamasak gasan siang. Nang abah biasanya santai sambil mahadangi sambahyang Zuhur. Habis ba-zuhur makan siang pas jua kanakan bulikan sakulah.

Sore jam 3 an tulakan pulang ka ladang mambarasih tanaman banih, jagung atawa kacang tanah. Jam 5 sore bulik karumah, sambil ba sisiap sambahyang Maghrib. Kebiasaan kami sambahyang di Masjid tu pas Maghrib wan Isya. Imbah tu makan malam, istirahat guring". (S6.A)

(Kebiasaan di desa ini, peran perempuan dan laki-laki sama saja. Setelah sholat Subuh, mereka langsung berangkat ke kebun karet, dan tentunya sarapan pagi dengan makan kue dan atau "ketupat" di warung. Mereka tidak mempersiapkan anak-anak pergi sekolah, peran ini biasanya dibebankan kepada kaka perempuan tertua yang juga masih sekolah. Anak-anak sebelum berangkat sekolah juga sarapannya di warung. Mereka dianggap sudah pandai mengurus diri-sendiri.

Sekitar jam sepuluh hingga sebelas siang, bapak dan ibu kembali ke rumah, sang istri memasak untuk makan siang, sedangkan sang bapak istirahat sambil menunggu Sholat Zuhur. Selesai Sholat Zuhur, mereka makan siang bersama, dan biasanya bertepatan dengan kepulangan anak-anak dari sekolah.

Jam 3 sore, para orang tua kembali bekerja, tapi berangkatnya ke ladang, untuk membersihkan tanaman padi, jagung ataupun kacang tanah dari gulma. Jam 5 sore pulang ke rumah untuk bersiap-siap Sholat Maghrib. Kebiasaannya, mereka Sholat Maghrib dan Isya berjamaah di Mesjid. Setelah sholat Isya, istirahat dan tidur.

Kegiatan harian mereka ini berulang setiap waktu, kecuali untuk hari Jum'at ataupun karena turun hujan. Bagi masyarakat desa Malilingin, hari Jum'at merupakan hari sakral untuk beribadah dan mensucikan diri. Sehingga pada hari tersebut mereka hanya tinggal dirumah untuk membersihkan rumah ataupun kegiatan sosial hingga sholat Jum'at tiba. Pada sore hari biasanya kegiatan membersihkan sarana umum seperti Mesjid atau pun jalan.

Beberapa kegiatan rutin yang dilakukan oleh masyarakat peladang antara lain :

- 1) Yasinan dan baca sholawat untuk Bapak-bapak tiap Kamis malam setelah sholat Isya
- 2) Yasinan dan baca Burdah untuk Ibu-ibu pada Jum'at sore

Selama penelitian berlangsung, belum pernah melihat adanya pertemuan masyarakat untuk membicarakan program hutan rakyat atau pun tentang kelompok tani. Mereka jarang berkumpul, kecuali ada acara hajatan atau pada sore Kamis, karena peladang akan turun ke kampung (desa) untuk ikut pengajian Yasinan dan besoknya shalat Jum'at di Mesjid.

Untuk dapat lebih mengetahui profil informan kunci dan subjek di Desa Malilingin, dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Bapak H. Gazali Rahman (Kode Informan kunci ML/Malilingin)
Bapak Haji Gazali Rahman, saat ini berumur 42 tahun, mempunyai anak 2 (dua) orang. Lahir dan besar di Desa Malilingin. Pernah merasakan sekolah Tsanawiyah (setingkat SMP) di Martapura hingga kelas 2, kemudian berhenti dan kembali ke desa. Mempunyai anak 2 (dua) orang, satu masih sekolah di SD, yang satu sekolah Tsanawiyah di Martapura. Sejak berumur 17 an sudah menjadi anggota kelompok dan terlibat program hutan rakyat. Pada tahun 2001, menjadi ketua kelompok tani hutan "Suka Jaya" dengan luas 100 Ha. Pernah mengikuti pelatihan Model Hutan Rakyat, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), dan kader UPSA. Sejak tahun 2001 di angkat sebagai Kepala Desa

Malilingin. Mempunyai kebun karet produktif sekitar 10 Ha, ladang padi seluas 3 Ha.

- 2) Bapak H. Kastani (Kode S1.A)

Bapak H. Kastani, saat ini berumur 59 tahun, pernah menjadi Kepala Desa Malilingin selama 3 periode, sejak terbentuknya Desa Malilingin tahun 1982 hingga tahun 2001. Lahir dan besar di Malilingin. Pernah mencicipi pendidikan tingkat SLTA hingga selesai, di Kandangan. Mempunyai anak 3 (tiga) orang, dua orang tamat SMA dan kawin dengan "orang luar desa", tinggal di daerah lain. Yang bungsu sekolah sampai SD saja, kawin dengan orang desa setempat, tinggal di Desa Malilingin. Aktif mendorong program hutan rakyat yang dilaksanakan di desanya. Pernah menjadi Kepala Desa Teladan di bidang Konservasi Hutan dan Lahan, diberikan oleh Departemen Kehutanan pada tahun 1997. Mempunyai kebun karet produktif 15 Ha, namun saat ini dikelola oleh keluarga.

- 3) Bapak H. Jam-jam (Kode S2.A)

Bapak H. Jam-jam, tokoh sentral masyarakat Desa Malilingin, berumur 73 tahun. Beliau adalah yang dianggap masyarakat setempat sebagai salah satu penduduk awal Desa Malilingin. Karena penduduk awal, beliau mempunyai lahan sangat luas, sekitar kurang-lebih 30 Ha. Sebagian ditanam karet, sebagian untuk kegiatan ladang. Pernah menjadi ketua LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa). Pernah menjadi ketua kelompok tani hutan "Wana Sejahtera" pada tahun 1990, dengan luas lahan program hutan rakyat 50 Ha.

- 4) Bapak H. Hamsani (Kode S3.A)

Bapak H. Hamsani, salah satu ketua kelompok tani hutan dengan nama kelompok tani hutan Rakat Mufakat. Mengelola program hutan rakyat seluas 70 Ha pada tahun 1995 dan tahun 1999. Berumur sekitar 57 tahun, lahir dan besar di Desa Malilingin. Pendidikan sempat tamat Tsanawiyah (setingkat SMP). Mempunyai anak (4) empat orang, hanya satu yang tamat SMP, selebihnya tidak melanjutkan sekolah. Mempunyai lahan hutan rakyat karet seluas 8 Ha, dan lahan untuk ladang 5 Ha.

- 5) Bapak Zainal Abidin (Kode S4.A)

Bapak Zainal Abidin, berumur 50 tahun, lahir dan besar di Desa Malilingin. Tidak tamat SD, pernah menjadi anggota kelompok tani hutan. Mempunyai anak 2 (dua) orang, tidak ada yang melanjutkan ke SMP. Mempunyai lahan karet produktif 5 Ha, dan ladang padi seluas 2 Ha.

- 6) Bapak Abdul Hamid (Kode S5.A)
 Bapak Abdul Hamid, berumur 30 tahun, lahir dan besar di Desa Malilingin. Sekolah tamat SD. Punya anak 3 (tiga) masih sekolah 2 (dua) orang, yang tertua tidak sekolah lagi. Menjadi ketua kelompok tani hutan "Suka Membangun", dalam program hutan rakyat terpadu, seluas 25 Ha. Mempunyai lahan karet produktif 3 Ha, lahan tanaman berkayu (Mahoni) seluas 1 Ha, dan lahan ladang 1 Ha.
- 7) Ibu Zakiah (Kode S6.A)
 Ibu Zakiah bekerja sebagai Bidan desa di Desa Malilingin sejak tahun 1999, dan bersuamikan orang asli Desa Malilingin. Ibu Zakiah berasal dari Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar. Kadang ikut membantu suami menyadap karet jika tidak ada tugas. Mempunyai lahan karet produktif 3 Ha.

C. Karakteristik Masyarakat Transmigran

Kegiatan sehari-hari masyarakat Desa Pualam Sari Ray-12 pada umumnya dimulai pada pukul 05.00 subuh dan tidur malam pada jam 20.00 malam. Secara detail roda kehidupan masyarakatnya adalah sebagai berikut :

- 1) Pukul 04.00-05.30 : bangun dan sholat shubuh
- 2) Pukul 05.30-06.00 : berangkat ke kebun karet
- 3) Pukul 06.00-11.00 : menyadap getah karet sambil sarapan di kebun
- 4) Pukul 11.00-15.00 : istirahat, makan siang
- 5) Pukul 15.00-17.00 : membersihkan kebun atau menanam tanaman baru untuk peremajaan
- 6) Pukul 17.00-20.00 : kumpul keluarga di rumah
- 7) Pukul 20.00-22.00 : kadang ada cara sosial ataupun kumpul-kumpul sambil membicarakan keadaan desa dan perkembangan di luar desa
- 8) Pukul 22.00-04.00 : tidur

Kegiatan harian di atas biasanya tidak berlaku untuk hari Jum'at ataupun jika ada acara hajatan di desa. Umumnya mereka pulang dari menyadap karet lebih awal sekitar jam 09.00-an dan sore harinya digunakan untuk kerja bakti ataupun membersihkan rumah sendiri. Untuk ibu-ibunya, pergi ke kebun ikut menyadap karet setelah mempersiapkan makanan pagi dan atau anak-anaknya berangkat sekolah. Umumnya mereka pergi sekitar jam 08.00 sekaligus membawakan bekal sarapan untuk bapak-bapaknya.

Subjek (Bapak Mujiano) menjelaskan kegiatan hariannya sebagai berikut :

"Saya bangun jam 3.30, sekarang jam 5.30 bangun pagi, keladang jam 6 pagi. Jam 10.30 pulang ke rumah, bersih2 rumah dan sekitarnya dan istirahat. Jam 2.30 sore berangkat lagi ke ladang tanaman muda untuk meremajakan dan merawat tanaman tersebut. Jam 5.30 petang pulang ke rumah. Malam kegiatan sosial, dan kadang2 teman2 ngumpul ngobrol hingga jam 12-01 subuh".(S4.B)

Subjek yang lainnya (Bapak Gunadi) memaparkan kegiatan hariannya sebagai berikut :

"Saya bangun pagi jam 4-5, noreh ke ladang mulai jam 6 sampai jam 11. Sore jam 3-5 kerja bersih-bersih ladang. Sore saya anggap sebagai menabung kerja, kalau yang pagi panen "ATM" (ambil getah). Kalau malam biasanya kami ngumpul2 di rumah Pa Wid. Biasa lah membicarakan hasil dan harga getah karet, keadaan desa dan lainnya". (S1.B)

Menurut penuturan para-ibu (Ibu Sri Widayati, dan Ibu-ibu peserta FGD) menjelaskan :

"Kebiasaan rutin kami di rumah tangga, sebelum berangkat ke ladang sekitar jam 7-8, kami harus memasak dan mempersiapkan anak-anak pergi ke sekolah, setelah itu baru berangkat ke ladang sambil membawa bekal, karena suami kami berangkat hanya minum air teh atau kopi, yang penting rokok ada. Jam 10 an setelah menyadap karet biasaya kami sarapan di ladang, setelah itu kami mengambil hasil sadapan sampai jam 11-an, setelah itu pulang ke rumah. Kami tidak bisa langsung istirahat seperti Bapak-bapaknya, karena setelah sampai di rumah, harus bersih-bersih rumah sambil mempersiapkan masakan siang. Tapi yang namanya kebiasaan tidak terasa berat".(S5.B)



Gambar 8. Ibu Muthmainah (istri Pa' Wijayat) di Kebun Karetinya

Acara keagamaan yang rutin dilaksanakan oleh masyarakat di lingkungan Ray-12 adalah:

- 1) Kegiatan Yasinan per RT dilaksanakan seminggu sekali pada hari Jum,at sore
- 2) Kegiatan membaca *Habsy* seminggu sekali pada hari Minggu pagi
- 3) Kegiatan Yasinan di Mesjid dilakukan sebulan sekali pada malam Sabtu minggu pertama.

Acara kemasyarakatan yang rutin dilakukan antara lain adalah:

- 1) Pertemuan atau rapat lingkungan per-blok per-RT sebulan sekali
- 2) Rapat desa sebulan sekali
- 3) Rapat ibu-ibu PKK sebulan sekali
- 4) Rapat Karang taruna sebulan sekali
- 5) Rapat kelompok tani sebulan sekali
- 6) Rapat Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) tiga bulan sekali

Dari acara rutin pertemuan atau rapat di atas, maka kita dapat mengerti mengapa mereka memiliki hubungan kekerabatan yang kuat antar penghuni di lingkungan Ray-12. Seperti halnya pertemuan lingkungan sebulan sekali, dalam pertemuan tersebut mereka membicarakan kondisi pemukiman, sarana umum dan kegiatan sosial yang akan dilakukan bersama, seperti persiapan acara perkawinan di salah satu anggotanya. Demikian pula halnya untuk pertemuan kelompok tani bulanan, mereka membicarakan tentang hasil produksi getah karet, harga jual dan peremajaan tanaman karet tua.

Lebih detail profil informan kunci dan subjek dari Desa Pualam Sari Ray-12, dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Bapak Wijayat (Kode Informan kunci PS/Pualam Sari)
Bapak Wijayat lahir di Nganjuk, Jawa Timur 54 tahun yang lalu. Menetap di Ray-12 sejak taun 1983. Pendidikan STM Bangunan, sehingga sempat bekerja menjadi konsultan bangunan di Banjarmasin. Menjadi ketua kelompok tani "Jati Jajar" sejak tahun 2001. Mempunyai anak 2 (dua) orang, yang lelaki kuliah di Fakultas Pertanian UNLAM, Banjarbaru, dan yang perempuan sekolah di SMA kelas 2, di Binuang. Mempunyai lahan PIR 6 Ha, dan lahan hutan rakyat seluas 3,5 Ha. Menjadi tokoh panutan di Ray-12 dan di desa sekitarnya, mempunyai kelebihan bisa membaca "alam gaib". Sangat santun dengan orang lain, dengan alam dan makhluk hidup lainnya. Suka menolong orang tanpa mengharap pamrih. Rumahnya menjadi "markas" bagi masyarakat Ray-12 untuk berdiskusi dan urung rembuk. Tidak jarang tokoh masyarakat luar datang untuk bersilaturahmi dengan beliau. Peneliti beruntung bisa "tinggal" beberapa hari di rumah beliau, sehingga secara tidak langsung dapat melihat dan merekam kegiatan informan kunci dan para subjek, serta masyarakat Desa Pualam Sari Ray-12 sesuai tujuan penelitian.
- 2) Bapak Gunadi (Kode S1.B)
Bapak Gunadi, pegiat hutan rakyat yang handal. Berasal dari Kediri, berumur 44 tahun. Menetap di Desa Pualam Sari ray-12 sejak tahun 1986. Pendidikan hanya tamat SMP. Menjadi anggota kelompok tani sejak tahun 2001. Mempunyai anak 2 (dua) orang, yang perempuan kuliah di Akademi Kebidanan Banjarmasin, dan yang laki-laki masih sekolah SMA di Binuang. Sebelum bergabung program hutan rakyat, bekerja sebagai buruh tani di PIR dan kadang buruh bangunan di Binuang dan Rantau, atau ikut Bapak Wijayat bekerja bangunan. Mempunyai lahan PIR karet seluas 3 Ha, dan lahan hutan Rakyat (karet, Jati, dan mahoni) seluas 7 Ha.
- 3) Bapak Hambali (Kode S2.B)
Bapak Hambali, berasal dari Blora Jawa Tengah, berumur 50 tahun. Menetap di Desa Pualam Sari Ray-12 sejak tahun 1986. Pendidikan tamat Tsanawiyah. Mempunyai anak 3 (tiga), dua orang sudah lulus SLTA dan satu orang masih sekolah di SMA, di Binuang. Terpilih menjadi Ketua Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Desa Pualam Sari. Bergabung dengan program hutan rakyat sejak tahun 2001. Sebelum ikut mengembangkan program hutan rakyat bekerja sebagai buruh di *Saw-Mill* di Banjarmasin. Saat ini mengelola lahan PIR karet seluas 6 Ha, lahan hutan

rakyat seluas 7,5 Ha. Selain itu, Bapak Hambali dan keluarga juga memelihara ternak kambing sekitar 10 ekor.

4) Bapak Bambang (Kode S3.B)

Bapak Bambang, berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur, berumur 47 tahun. Pendidikan SMEA tamat. Menetap di Desa Pualam Sari Ray-12 sejak tahun 1989. Merantau ke Kalimantan di ajak saudara (kaka kandung) yang sudah cukup berhasil di Binuang. Ikut bergabung dengan kelompok tani program hutan rakyat sejak tahun 2002. Dari semula pekerjaan sebagai pengumpul karet dengan modal dari kaka kandung. Usaha tersebut berkembang, sehingga sekarang Bapak Bambang dikenal sebagai pengusaha pengumpul karet di Desa Pualam Sari. Mempunyai anak 3 (tiga) orang, perempuan yang pertama sekarang sudah menjadi POLWAN di Polres Kabupaten Tapin, dan perempuan satunya mau kuliah di Banjarmasin, dan perempuan yang bungsu masih di SMA di Binuang. Mempunyai lahan PIR karet seluas 30 Ha dan lahan hutan rakyat seluas 5 Ha. Lahan karet dikelola melalui bagi hasil 50:50.

5) Bapak Mujiono (Kode S4.B)

Bapak Mujiono berasal dari Banyuwangi, berumur 44 tahun. Pendidikan sampai tamat SMP. Menetap di Desa Pualam Sari Ray-12 sejak tahun 2002. Bergabung dengan kelompok tani hutan rakyat sejak tahun 2003. Sebelum menetap di Desa Pualam Sari Ray-12, Bapak Mujiono menjadi peserta transmigrasi di lahan pasang surut, Kapuas, Kalimantan Tengah. Karena merasa gagal, lahan di jual dan membeli lahan di Desa Pualam Sari Ray-12. Pendidikan anak-anak sampai SLTA saja. Mempunyai lahan PIR karet seluas 3 Ha, dan lahan hutan rakyat seluas 2 Ha.

6) Ibu Sri Widayati (Kode S5.B)

Ibu Sri Widayati merupakan salah satu aktivis PKK di Desa Pualam Sari Ray-12. Ibu Sri Widayati merupakan istri dari Bapak Bambang (pengusaha pengumpul karet). Pendidikan SLTA. Meskipun hidup sudah berkecukupan, namun Ibu Sri Widayati sering membantu mengurus usaha suami, termasuk lahan karet, karena suaminya kadang harus keluar kota menjual hasil karet yang sudah dikumpulkan. Ibu Sri Widayati rajin memotivasi ibu-ibu lainnya untuk dapat berperan aktif dalam rumah tangga dan kemasyarakatan, seperti melaksanakan pelatihan kerajinan tangan, kecakapan masak-memasak, melaksanakan Posyandu, mendirikan Taman Kanak-Kanak dan Tempat Pendidikan Al-Qur'an (TPA).

BAB 6

MALILINGIN POTRET DESA PINGGIRAN HUTAN

A. Asal Terbentuknya Desa Malilingin

Desa Malilingin merupakan salah satu desa yang terletak di pinggiran Pegunungan Meratus dan dilalui oleh Sungai Amandit. Sungai Amandit merupakan sarana transportasi utama masyarakat desa Malilingin sebelum tahun 80-an, dan sekarang dimanfaatkan batu sungainya untuk pondasi bangunan. Sebagai desa pinggiran hutan, masyarakat Desa Malilingin hidupnya dari berladang berpindah yang berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya.

Pada awalnya Desa Malilingin yang dulunya disebut dusun atau perkampungan merupakan bagian dari Desa Tambak Pipi'i, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan adanya program pemerintah untuk melakukan pemekaran desa, maka pada tahun 1982 dusun Malilingin resmi berpisah dengan Desa Tambak Pipii menjadi sebuah desa pemekaran yang sekarang dikenal dengan nama Desa Malilingin. Pada saat itu jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 97 KK dengan luas wilayah 2.343 hektar.

Alasan dibentuknya desa Malilingin, dikarenakan jarak dusun Malilingin dengan kantor Desa Tambak Pipii sekitar 5 km yang hanya dapat ditempuh dengan jalan kaki atau lewat sungai Amandit, sehingga sangat menyulitkan masyarakat untuk melakukan komunikasi dan koordinasi kegiatan-kegiatan pembangunan. Jika hanya sebagai dusun, maka akan selalu tertinggal dalam bantuan pembangunan dengan wilayah atau desa lainnya. Padahal dusun Malilingin mempunyai sumberdaya alam yang luas dan sumberdaya manusia yang cukup (dari segi jumlah penduduk).

Masyarakat di dusun Malilingin saat itu tidak ingin tergantung dengan desa lainnya, sehingga mereka sangat bersemangat untuk memisahkan diri dengan desa induk. Dengan adanya pemerintahan desa sendiri, maka masyarakat dusun Malilingin dapat mengelola

sumberdaya alamnya lebih baik dan mudah dalam melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan. Dengan berdiri sendirinya Desa Malilingin, maka pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia menjadi lebih mudah dan terarah.



Gambar 9. Jalan Desa dan Perumahan di Desa Malilingin

Menurut penuturan subjek (Haji Kastani):

"Dahulu daerah kami ni hanya dusun haja, ngalih kami mun handak ba urusan administrasi pamarintahan nang kaya ma urus bakawinan atawa ma urus "katipi" (KTP), makanya kami ma usul pamisahan manjadi desa sorangan". (S1.A)

(Dulu wilayah kami hanyalah sebuah dusun, sehingga sulit kalau ada urusan administrasi seperti halnya untuk izin perkawinan atau membuat KTP, sehingga kami mengusulkan untuk dimekarkan menjadi sebuah desa yang mandiri)

Alasan mengapa masyarakat memilih tinggal di Desa Malilingin antara lain dijelaskan oleh Bapak H. Jam-jam (S2.A) adalah:

- 1) Tempat kelahiran dan tempat kuburan orang tua
- 2) Kondisi tanah atau lahan sangat sesuai dengan pola hidup mereka sebagai peladang berpindah, dan ketersediaan lahan yang masih luas
- 3) Sebagian besar ladang sudah menjadi kebun karet, namun keadaannya tidak terurus yang berasal dari warisan orang tua mereka
- 4) Tidak mempunyai keahlian selain sebagai peladang

Hal ini juga dapat kita pahami dari uraian penuturan subjek (Haji Hamsani) sebagai berikut:

"Kami ni lahir wan ganal di kampung ni pang, urang tuha jua bakubur di kampung ini, kami hampir sabaraan ini bakulawarga. Kami sanang hidup disini karena lahannya sasuai wan gawian sabagai peladang, luas pulang. Imbah itu, masih ada jua paninggalan salambar dua lambar kabun gatah dari nang tuha, makanya kami tatap tinggal di sini". (S3.A)

(Kami lahir dan besar di sini, orang tua juga dikubur di sini, serta hampir semua masyarakat punya hubungan keluarga. Kami senang hidup di sini karena lahannya cukup subur dan masih luas. Selain itu masih ada kebun karet peninggalan orang tua).

B. Letak Geografis

Desa Malilingin merupakan salah satu desa di pinggiran kawasan Hutan Lindung Meratus, termasuk di dalam Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HST) Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas wilayah 2.343 Ha. Letak Desa Malilingin dari Ibukota Kecamatan adalah berjarak 10 Km, dari Ibukota Kabupaten berjarak 17 Km, dan dari Ibukota Provinsi berjarak 152 Km yang bisa dilalui dengan kendaraan roda 2 dan roda 4. (Peta Lokasi Desa pada Lampiran 5).

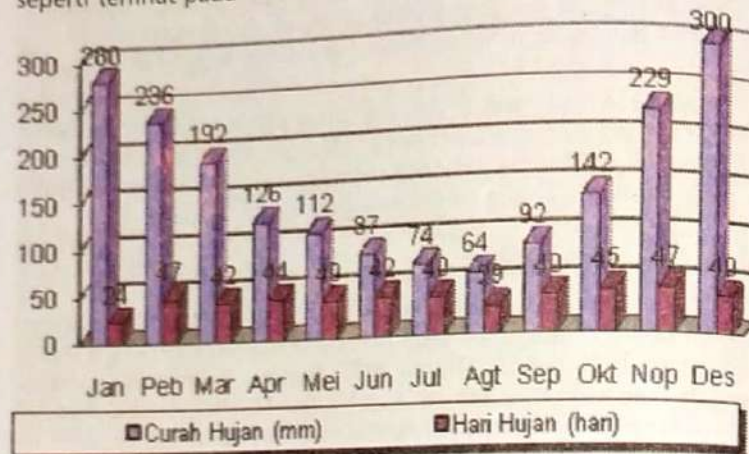
Secara geografis Desa Malilingin terletak antara 115018'10" sampai dengan 115022'58" BT dan 02050'47" sampai dengan 02055'13" LS, dan secara administratif Desa Malilingin mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batu Bini
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Loksado
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tapin
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batu Laki

Berdasarkan Peta Tanah Provinsi Kalimantan Selatan Skala 1:500.000 dan hasil survey lapangan, bahwa wilayah Desa Malilingin merupakan kawasan jenis tanah Podsolik Merah Kuning dengan tingkat kesuburan sedang.

Berdasarkan curah hujan bulanan selama 10 tahun terakhir yang diambil dari Stasiun Pengamat Hujan Sungai Raya di Hulu Sungai Selatan bahwa rata-rata bulan basah terjadi selama 8 kali dan rata-rata bulan kering terjadi selama 4 kali sehingga nilai Q atau perbandingan antara bulan kering dengan bulan basah adalah sebesar 1 : 2.

Dari tabel nilai Q yang telah dikembangkan oleh Scmidh dan Fergusson bahwa wilayah Desa Malilingin termasuk tipe iklim dengan klasifikasi B. Sedangkan besarnya curah hujan dan hari hujan yang terjadi pada Stasiun Pengamat Hujan Sungai Raya di Hulu Sungai Selatan yang berdekatan dengan wilayah Desa Malilingin adalah seperti terlihat pada Gambar 10.



Gambar 10. Grafik Curah Hujan dan Hari Hujan di Kec. Padang Batung: Berdasarkan Hasil Pengamatan Stasiun Cuaca di Sei. Raya - Hulu Sungai Selatan. (BPS, Kecamatan Padang Batung dalam Angka Tahun 2008b).

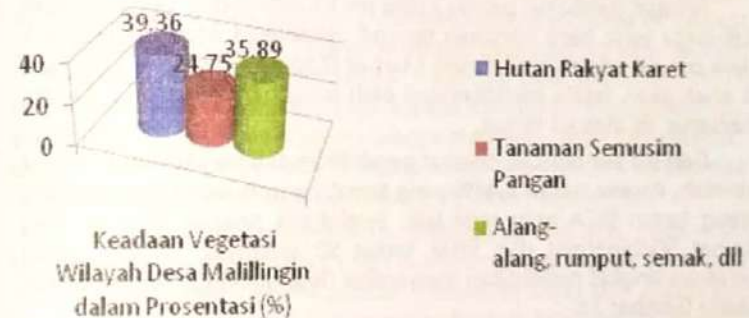
Desa Malilingin dengan luas wilayah 2.343 Ha sebagian wilayahnya berada dalam lahan hutan rakyat dan sebagian berada dalam kawasan hutan produksi. Berdasarkan Data Profil Desa/Kelurahan Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 bahwa penggunaan lahan di Desa Malilingin terbagi atas beberapa jenis di antaranya kebun karet, ladang dan pertambangan.

Penggunaan lahan secara spesifik adalah: lahan yang terluas adalah hutan rakyat atau kebun karet yaitu seluas 944 ha atau 40,29%, terluas selanjutnya adalah lahan untuk ladang 579 ha atau 24,72%, dan lahan peruntukan lainnya (pertambangan) seluas 482 ha atau 20,57%. Sedangkan untuk lahan pertanian tadah hujan atau lebak hanya 1 ha atau 0,04%. Dalam bentuk konfigurasi gambar dapat dilihat pada Gambar 11.



Gambar 11. Keadaan Penggunaan Lahan Wilayah Desa Malilingin (Sumber: BPS, Data Profil Desa/Kelurahan Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008b)

Untuk vegetasi penutupan lahan di wilayah Desa Malilingin terdiri dari tanaman hutan rakyat atau kebun karet seluas 922 ha atau 39,35%, tanaman semusim/pangan/ladang seluas 580 ha atau 24,75%, dan alang-alang/rumput/semak seluas 841 ha atau 35,89%.



Gambar 12. Vegetasi Penutupan Lahan di Desa Malilingin (Sumber: BPS, Data Profil Desa/Kelurahan Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tahun 2008b).

Berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Edisi I Tahun 1991 oleh Bakosurtanal Cibinong - Bogor, bahwa keadaan topografi wilayah Desa Malilingin adalah mulai dari datar hingga berbukit. Secara garis besar ketinggian tempat antara 65 hingga 541 meter dari permukaan laut.

Desa Malilingin dapat dicapai melalui jalan darat sejauh 10 Km ke ibukota Kecamatan Padang Batung, dan sejauh 17 Km dari Ibukota Kabupaten (Kandangan) dengan kendaraan roda dua maupun roda empat karena tersedia jalan aspal dengan waktu tempuh sekitar 1 jam dengan kondisi jalan cukup baik.

C. Gambaran Kehidupan Masyarakat

Berdasarkan data dari Kepala Desa Malilingin (2008), Desa Malilingin dihuni oleh sekitar sebanyak 677 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 340 jiwa dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 337 jiwa. Seks rasionya adalah sebesar 0,01. Luas wilayah desa adalah 2.343 Ha, maka kepadatan penduduk sebesar 28,89 yang berarti setiap jiwa akan menempati 0,03 Km². Dari jumlah penduduk 677 jiwa tersebut terbagi atas 175 Kepala Keluarga (KK). Jumlah anggota keluarga per Kepala Keluarga ini bersifat beragam mulai dari 2 jiwa per kepala keluarga hingga 4 jiwa per kepala keluarga.

Sebagai gambaran bahwa 2 jiwa per KK didominasi oleh pasangan keluarga yang baru berumah tangga, sedangkan yang berjumlah 5 jiwa per KK adalah terdiri dari 1 bapak (Kepala Keluarga), 1 Ibu dan 3 anak akan selalu mendominasi oleh pasangan keluarga rata-rata berumur di atas 45 tahun.

Dari sisi pendidikan, tingkat pendidikan di Desa Malilingin relatif rendah, karena hanya 0,44% yang tamat perguruan tinggi dan 3,4% yang tamat SLTA atau sederajat. Selebihnya sebesar 14,48% yang tamat SD/Sederajat dan tidak tamat SD sebanyak 12,11%. Lebih jelasnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Malilingin dapat dilihat pada Gambar 13.



Gambar 13. Keadaan Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Malilingin

(Sumber: BPS, Data Profil Desa/Kelurahan Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008b)

Pada saat penelitian diperoleh gambaran bahwa semakin tahun semakin sedikit masyarakat yang menyekolahkan anaknya ke tingkat SLTP atau sederajat dan SLTA atau sederajat. Selain belum ketersediaan SLTP yang cukup jauh, yaitu sekitar 5 km dari Desa Malilingin (SLTP terletak di Desa Batu Laki), juga karena kesibukan anak-anak usia sekolah dalam membantu orang tuanya menyadap atau "mamantat" karet di kebun. Kenyataan ini dapat berakibat semakin rendahnya tingkat pendidikan di Desa Malilingin di masa mendatang.

Umumnya anak yang berumur 10 tahun ke atas atau kelas 4 SD ke atas sudah ikut menyadap karet di kebun orang tuanya. Pada usia 11 tahun an mereka sudah pandai menyadap karet dan dipercaya untuk mengelola sebagian kebun orang tuanya. Hasil dari penjualan getah karet sepenuhnya diberikan kepada anak-anaknya, sehingga pada usia tersebut anak-anak sudah memiliki uang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Dari sudut pandang orang tua mereka, keterlibatan dalam menyadap karet merupakan latihan kemandirian untuk persiapan anak-anak mereka kemudian hari. Orang tua tidak perlu lagi memberi uang harian untuk kebutuhan anaknya, karena sudah dicukupi dari hasil penyadapan dari karet tersebut. Di sisi lain, keterbatasan jumlah tenaga kerja juga menjadi faktor pendorong untuk melibatkan anak-anak mereka ikut menyadap karet di kebun.

D. Mata Pencaharian

Pada umumnya mata pencaharian masyarakat Desa Malilingin adalah sebagai petani (peladang). Tanaman pertanian ladang antara lain adalah padi, jagung dan kacang tanah. Tanaman keras utamanya adalah karet dan kemiri. Kegiatan perladangan yang juga sekaligus berkebun karet merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Desa Malilingin. Meskipun mereka sebenarnya sudah cukup dengan penghasilan dari menyadap karet, namun mereka masih juga menanam padi di ladang. Hal ini disebabkan hasil padi ladang sebagai makanan utama mereka dianggap kebutuhan pokok, dan dalam kegiatan tersebut proses budaya tersalurkan.

Hal ini dituturkan oleh subjek sebagai berikut:

"Kami bahuma di ladang tu dasar gawian pukuk, biar cukup haja duit hasil mamantat gatah, tapi tatap haja bahuma kami gawi, napa bahuma tu gawian urang tuha turun-tamurun, manarusakan kabiasaan nang tuha. Mun baladang huma tu kita sama wan manyambung silaturahmi wan urang tuha bahari, wan alam tamasuk binatang. Mun batanam banih, burung umpat makan, warik umpat makan. Balum lagi hubungan kita wan makhluk alam kayangan, bisa tasambung malalui bahuma". (S2.A)

(Melakukan perladangan merupakan kerjaan pokok kami, walaupun kami mendapatkan duit cukup dari hasil menyadap karet, namun kami tetap saja melakukan penanaman padi di ladang. Bertani di ladang merupakan pekerjaan turun temurun, dilakukan sejak nenek-moyang, jadi kami harus meneruskannya. Kalau kita berladang, maka sama halnya kita menyambung silaturahmi dengan nenek-moyang, dengan alam semesta, termasuk binatang. Kalau kita menanam padi, burung bisa ikut makan, kera juga bisa nimbrung makan. Belum lagi hubungan kita dengan makhluk gaib yang terus tersambung melalui berladang padi atau huma)

Untuk lebih jelas mengenai mata pencaharian masyarakat Desa Malilingin dapat di lihat pada Gambar 14.



Gambar 14. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Malilingin

(Sumber: BPS, Data Profil Desa/Kelurahan Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008b)

Mata pencaharian utama sebagai peladang (pertanian) sebesar 76% ini dapat kita lihat dari pekerjaan dan sumber pendapatannya. Dari pengamatan keseharian dapat tergambar kegiatan mereka selalu berhubungan dengan pertanian, hutan dan hasil hutan. Selebihnya bekerja dibidang perdagangan dan pertukangan.

Ada hal yang menarik dari Desa Malilingin berkaitan dengan pengelolaan uang dalam rumah tangga. Menurut penuturan Subjek (Ibu Zakiah) sebagai berikut:

"Di kampung sini, kalau urusan, manjual gatah, biasanya babinian nang ma antar wan ma ambil duitnya, jadi nang ma atur duit disini tu ba binian". Lalakian tahu roko aja, selebihnya bininya nang ma atur pangaluaran rumah tangga" (S6.A)

(Di desa ini, untuk urusan menjual hasil sadapan akret, biasanya di urus oleh perempuan, baik menjual maupun mengambil uang hasil jualan sadapan karet. Untuk lelaki yang penting ada rokoknya, selebihnya perempuanlah yang mengatur keuangan dalam rumah tangganya).

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa peran perempuan dalam rumah tangga di Desa Malilingin cukup besar dan berpengaruh, karena mengatur keseimbangan keuangan dalam rumah tangganya, membantu menyadap, menjual dan mengurus rumah tangga. Dari sisi lain, besarnya peran perempuan dalam membantu keluarga mencari nafkah telah "mengorbankan" aspek pemeliharaan anak-anak mereka. Anak-anak sekolah secara mandiri, biasanya diurus oleh

kakak perempuan yang tertua. Berdasarkan hasil penelitian Aryadi dalam Supriyono dkk (2008), keterlibatan perempuan dalam penentuan waktu jual hasil pertanian dalam agroforestri sebesar 70%, dan ini berhubungan dengan kebutuhan keuangan dalam rumah tangga petani.

E. Sosial Kemasyarakatan Desa Peladang

Desa Malilingin ini merupakan representasi pedesaan sekitar hutan yang penduduknya tidak bisa terlepas dari hutan dan hasil dari hutan, termasuk berladang di hutan. Seluruh masyarakatnya beragama Islam, namun dalam kegiatan pertaniannya tidak bisa lepas dari pengaruh budaya pengalaman nenek moyangnya. Salah satu contoh kepercayaan dalam pemilihan lokasi ladang yang baru, mereka masih mempercayai tanda-tanda alam, yaitu apabila ada kayu yang jatuh melintang di antara 2 (dua) dahan pohon yang berbeda, maka mereka tidak akan memilih lokasi tersebut, karena dipercaya akan membawa sial atau tidak beruntung. Tanda alam lainnya adalah adanya tanaman rumput jepang (*Zoysia japonica*). Tanaman ini dipercaya jika tumbuh subur dan tingginya melebihi 2 meter, maka lahan yang akan dibuka subur, setidaknya untuk tanaman pertanian selama 2 tahun. Hal ini juga ternyata bisa ditemukan pada masyarakat Suku Dayak Kantu di Kalimantan Barat, mereka menyandarkan tanda-tanda alam melalui burung hutan. Jika dalam pemilihan tempat berladang si petani melihat sarang burung jenis "nenak" berada di puncak pohon, dan tidak di bagian tengah, maka tahun itu dia akan menolak tempat tersebut dijadikan ladang (Dove yang dikutip oleh Kartasubrata, 2003).

Subjek (Bapak Haji Jam-jam) menjelaskan tentang norma dan nilai yang berkaitan dengan tanda-tanda alam dan perladangan:

"Gasan mambuka ladang hanyar, bubuhan kami masih ma umpati urang bahari, napa kami yakin pasti ada maksud dan tujuannya. Misalnya haja mun handak mambuka lahan hanyar, bisa dilihat tinggi tanaman rumput jepang lebih dari tinggi awak kita, itu pasti tanahnya subur pulang, paling kada cagar dua tahun manggawi gasan bahuma. Jua mun ada kayu patah bahalang di antara dua puhun, itu cagaran mambawa sial, kami kada jadi mambuka lahan nang itu". (S2.A)

(Untuk membuka ladang baru, keluarga kami masih mengikuti petuah orang tua, karena kami masih menyakini pasti ada maksud dan tujuannya. Seperti, kalau mau membuka ladang, maka bila dihutan tersebut tumbuh tanaman semak rumput jepang (*Zoysia japonica*) yang tingginya melebihi tubuh kita,

maka itu tandanya tanah tersebut subur, setidaknya bisa dikelola untuk 2 tahun bertanam padi. Atau pula, kalau ada kayu yang patah dan tertahan di antara dua pohon, maka biasanya lahan tersebut bisa membawa sial, dan kami tidak jadi memilih lahan tersebut)

Budaya pertanian masyarakat Desa Malilingin yang masih melekat dalam kegiatan perladangan mereka antara lain adalah:

- 1) Pemilihan lahan baru untuk ladang dengan melihat tanda-tanda alam (tata letak tanaman, jenis tanaman)
- 2) Sebelum penanaman dilakukan "aruh" atau selamatan agar tanaman tumbuh subur dan mendatangkan hasil pertanian yang baik dan cukup
- 3) Setelah panen padi, dilaksanakan selamatan kampung sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rezeki hasil tanaman yang baik dan cukup, dan juga kepada makhluk lainnya yang ada disekitar kita.

Kehidupan berladang berpindah merupakan salah satu pola adaptasi dari masyarakat terhadap keadaan atau kondisi alam, khususnya kesuburan tanah. Dengan tingkat kesuburan tanah yang rendah, maka strategi perputaran pemanfaatan lahan menjadi pilihan yang sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan mereka. Umumnya pemanfaatan lahan untuk pertanian selama 2-3 tahun, kemudian lahan tersebut diberakan atau dibiarkan selama 3-5 tahun agar menjadi subur kembali atau pemulihan kesuburan tanah. Menurut Dove (1983) yang dikutip Benyamine (2004), masyarakat Banjar memberakan lahannya selama 3 tahun. Jika dilihat dari proses pembakaran (*burning*), maka sebenarnya hal ini merupakan bagian dari strategi masyarakat agar lahan lebih cepat bersih, dan menurut mereka lahan menjadi lebih subur. Selain itu untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja dalam pembersihan lahan.

Subjek (Bapak Haji Hamsani) menjelaskan mengenai pembakaran lahan sebagai berikut:

"Sasuai kabiasaan kami di kampung, imbah ditabang puhun nang sadang ganalnya, maka bila waktu pina panas, kami salukut agar lakas barasih dari rumput tagah wan kayu. Imbah di salakut, kami barasih pulang, lahan sudah siap gasan dihumai. Kami manyalukut karena lahan lakas barasih, murah biayanya, wan abu kayu bisa jadi pupuk jua. Kami manyalukut biasanya di atas jam 2 sore sampai jam 5 an. Biasanya kami bahabaran wan sabalah-manyabalah bila handak manyalukut ladang". (S3.A)

(Berdasarkan kebiasaan di desa kami, setelah pohon kecil di tebang, maka ketika hari panas, kami segera melakukan

pembakaran ladang, agar ladang cepat bersih dari semak-belukar dan kayu-kayu kecil. Setelah dibakar, kami bersihkan lagi ladang tersebut hingga siap untuk ditanam. Kami membakar ladang karena cepat bersihnya, mudah biayanya, dan abu hasil pembakaran dapat menyuburkan tanah. Kami biasanya membakar lahan di atas jam 2 sore hingga jam 5 sore. Kami selalu memberikan kabar kepada pemilik di sekitar ladang apabila akan melakukan pembakaran ladang).

Pernyataan subjek di atas tentang tujuan pembakaran lahan, ternyata hampir sama dengan tujuan pembakaran lahan oleh masyarakat Hanuno'o, hasil penelitian Conklin yang dikutip oleh Kartasubrata (2003), tujuan dari pembakaran pada garis besarnya adalah:

- 1) Menghilangkan vegetasi yang tidak dikehendaki, sehingga lahan menjadi bersih
- 2) Membunuh hewan-hewan pengganggu
- 3) Mempersiapkan tanah untuk penugalan
- 4) Memberikan pupuk berupa abu secara merata.

Pada sisi lain, seiring dengan harga getah karet yang semakin membaik, telah mengakibatkan menurunnya keinginan dalam meningkatkan pendidikan anak-anak usia sekolah pada masyarakat Desa Malilingin, sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu. Kenyataan ini mengakibatkan menurunnya kualitas sumberdaya manusia dan dapat menghambat inovasi yang datang.

Demikian pula dalam kehidupan berumah tangga masyarakatnya. Pada usia 14-15 tahun bagi perempuan dan 17-18 tahun bagi laki-laki pada umumnya mereka sudah menikah. Bagi mereka menikah itu wajib bagi yang sudah mampu, dalam hal ini mampu dalam keuangan rumah tangga. Umumnya laki-laki berusia 17-18 tahun sudah mempunyai ladang karet yang dikelola sendiri untuk menghidupi rumah tangganya. Umumnya mereka mempunyai 1 Ha kebun karet produktif yang sebulan minimal dapat menghasilkan sekitar Rp 2.000.000,- per bulan (harga getah Rp. 8.000,-/ kg x 25 kg x 10 hari). Untuk beras, mereka ikut orang tuanya "bahuma" yang biasanya cukup untuk dikonsumsi selama 1 hingga 2 tahun.

Rumah tempat tinggal bagi pasangan baru biasanya tidak jauh dari rumah orang tuanya, atau masih dalam satu area lahan yang sama. Mereka umumnya mencari pasangan dari desa sendiri atau paling jauh desa tetangga, sangat jarang kawin dengan orang "luar". Alasannya sederhana agar mereka tetap ngumpul dalam satu kampung yang saling berdekatan agar mudah saling mengunjungi (*maelangi*), dan sebagai tempat mata pencaharian. Juga mereka memahami bahwa menikah itu wajib hukumnya kalau sudah mampu.

Subjek (Bapak Haji Kastani) menguraikan tentang kehidupan rumah tangga pasangan baru sebagai berikut:

"Di kampung kami ni, kananakan anum an sudah kami kawinakan, yah mun binian tu 14-15 tahun wan lakian 17 tahun an, agar buhannya tapalihara dari perbuatan kada baik, kabun gatah sudah ada, baras cukup aja, ramuan wan tanahnya gasan rumah ada jua, jadi langkap aja, kada bataha kalaparan wan kahujan. Jar Nabi kan mun sudah mampu napa lagi dihadang, badusa nang tuha mun kada lakas mangawinakan. Buhannya kawin sasama urang kampung ni jua, atawa paling jauh kampung sabalah, mun jauh ngalih maelangi, wan jua kabun gatah di kampung ni, ngalih mamantat mun kawin wan urang jauh, cuali hakun badiam di kampung ini".(S1.A)

(Di desa kami, anak yang berinjak dewasa, umur 14-15 tahun untuk wanita dan 17 tahun an untuk pria sudah di kawinkan. Hal ini dilakukan agar mereka terjaga dari perbuatan yang tidak baik. Kami sudah sediakan kebun karet, beras dan bahan bangunan untuk rumah. Kata Nabi, berdosa kalau tidak segera mengawinkan jika sudah cukup. Anak-anak biasanya mencari pasangan dari kampung ini juga, atau kampung terdekat saja. Kalau mencari pasangan jauh, nanti sulit untuk saling kunjung-mengunjungi, juga kebun karet adanya di desa ini. Kecuali kalau orang "jauh" mau menetap di kampung ini, kami tidak keberatan).

Uraian di atas sejalan dengan penjelasan dari Ibu Zakiah yang mengatakan sebagai berikut:

"Di kampung sini, kanakannya lakas kawin. Umur 14-16 tahun babiniannya, wan 16-17 lakiannya sudah pada kawin. Jarang banar lakiannya sampai 20 tahun, biasanya mun 20 tahun sudah ba anak dua. Buhannya kawin lakas karena sudah ada pendapatan. Buan kanakannya balum tamat is di (SD) aja sudah umpat mamantat gatah, jadi sudah tabiasa mancaru surang. Kalu di kuta, umur 20 tahun masih mananai ka kuitan, jadi cucuk haja kawinnya lambat".(S6.A)

(Di desa ini, anak-anak cepat kawinnya. Rata-rata umur 14-16 tahun bagi perempuan dan 16-17 tahun untuk laki-laki, mereka sudah pada kawin. Jarang sekali laki-laki di atas 20 tahun baru kawin, dan biasanya umur tersebut sudah punya anak 2 (dua). Mereka cepat kawin karena sudah ada pendapatan (uang). Mereka belum tamat SD saja sudah ikut menyadap karet, jadi sudah terbiasa mencari uang sendiri. Kalau di perkotaan, umur 20 tahun masih minta uang dengan orang tua, sehingga mereka lambat kawinnya).

F. Perladangan Berpindah Menjadi Hutan Rakyat

Sebagai salah satu desa pinggiran hutan yang kehidupan masyarakatnya kental dengan alam dan lingkungan, maka tentulah tidak bisa kita pisahkan dengan praktik pertaniannya. Pertanian di lahan kering atau sering dikenal dengan istilah berladang merupakan bagian dari jalan hidup masyarakat di Desa Malilingin. Hutan rakyat di Desa Malilingin tumbuh dan berakar secara turun menurun. Hal ini disebabkan secara sejarah penduduk desa ini merupakan petani peladang yang hidup dan kehidupannya tergantung dari hasil ladang dan hutan, sebagaimana kebanyakan masyarakat pedesaan hutan yang tinggal di sisi Pegunungan Meratus.

Kegiatan perladangan berpindah merupakan jalan hidup yang turun temurun mereka jalani. Secara tahapan, kegiatan perladangan berpindah antara lain adalah: pemilihan lahan, penebangan pohon, pembersihan lahan, pembagian lahan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. Semua tahapan kegiatan dilakukan secara berkelompok yang umumnya masih mempunyai ikatan darah. Setiap kelompok biasanya terdiri dari 5-10 KK. Menurut penuturan subjek (Haji Kastani):

"Buhan kami ni asal-muasalnya peladang berpindah-pindah. Imbah du-dua tahun mambuka huma, kami tinggalkan pindah mambuka lahan hanyar pulang. Tarus aja tu baputar, sampai anam tujuh tahun tabulik pulang ka ladang asal. Kami hanya kawa bahuma dua tahun haja, imbah tu hasilnya manurun, kayanya tanahnya kada subur lagi. Mun imbah anam tujuh tahun dibuliki, biasanya subur pulang tu ladangnya".(S1.A)

(Keluarga kami memang keturunan peladang berpindah. Setelah dua tahun membuka ladang, kami tinggalkan untuk mencari lahan yang baru lagi. Kegiatan ini terus berotasi, hingga sampai 6-7 tahun kami akan kembali ke lahan asal. Kami hanya bisa berladang selama 2 tahun karena setelah itu hasil padinya menurun, sepetinya tanahnya tidak subur lagi. Setelah 6-7 tahun ditinggalkan, lahan akan kembali subur lagi seperti sedia kala).



Gambar 15. Ladang "huma" yang ditanami Padi, Jagung dan Kacang Tanah, dengan Tanaman Pokok Karet

Periodisasi kehidupan yang selalu berulang sepanjang hidup masyarakat peladang yang menjadi warisan turun menurun adalah kegiatan perladangan. Kebiasaan yang turun-menurun itu dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Bulan Agustus-September: kegiatan pemilihan dan penebangan dilahan baru, yaitu menebang pohon yang besar (tapi bukan pohon yang dilindungi).
- 2) Bulan Oktober-November: kegiatan membakar dan pembersihan lahan baru dari semak dan belukar, atau pembersihan lahan lama untuk ditanam kembali
- 3) Bulan Desember hingga awal Januari: penanaman tanaman pertanian seperti padi, jagung atau kacang tanah
- 4) Bulan Maret-April: pemeliharaan tanaman padi, jagung atau kacang tanah sekaligus menanam tanaman keras, seperti karet dan kemiri di antara tanaman pertanian tersebut
- 5) Bulan Mei-Juni: pemanenan tanaman pertanian dan pemeliharaan tanaman keras.
- 6) Bulan Juli-Agustus: kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti perbaikan sarana umum (mesjid, jalan desa) dan biasanya juga musim kawin.

Pola perladangan di atas hampir sama dengan yang ada di daerah lainnya. Lahajir (2001) yang dikutip oleh Benyamine (2004), tata cara perladangan berpindah dari masyarakat Dayak Tunjung Kalimantan Timur ditemukan sebagai berikut:

- 1) Pemilihan lokasi hutan-tanah perladangan
- 2) Penebasan lokasi perladangan
- 3) Penebangan pohon
- 4) Pembakaran
- 5) Pembersihan sisa pembakaran
- 6) Penanaman
- 7) Penyiangan dan pemeliharaan
- 8) Pemanenan

Berdasarkan yang peneliti lihat selama penelitian dilakukan, proses perubahan dari ladang menjadi kebun karet (*kabun gatah*) dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pada tahun pertama:
 - a) Pembersihan lahan siap untuk ditanam
 - b) Penanaman tanaman pertanian seperti padi, jagung atau kacang tanah
 - c) Pada akhir musim hujan, di antara tanaman padi, jagung atau kacang tanah di tanam anakan karet dengan jarak umumnya 3 x 5 m. Jika belum tersedia bibit karet, maka untuk sementara ditanam anakan pisang. Anakan pisang berfungsi sebagai peneduh dan penggembur tanah.
- 2) Pada tahun kedua:
 - a) Pembersihan lahan dan penanaman padi, jagung atau kacang tanah di antara tanaman anakan karet
 - b) Pemeliharaan anakan karet
- 3) Pada tahun ketiga:
 - a) Pemeliharaan anakan karet
 - b) Pindah mencari lahan baru untuk tanaman padi, jagung atau kacang tanah.

Dari uraian proses terbentuknya kebun karet rakyat, maka dapat dikatakan bahwa kebun karet rakyat di Desa Malilingin berbasiskan ladang. Dan hal ini merupakan proses turun temurun kehidupan masyarakat peladang Desa Malilingin. Perbedaan perladangan dahulu (di bawah tahun 1980 an), sebelum diperkenalkan Demonstrasi Plot (demplot) Hutan Rakyat dengan setelahnya adalah pada jarak tanam karet, jenis karet unggul dan penggunaan sarana produksi pertanian (saprota).



Gambar 16. Tanaman Karet umur 10 tahun Program Hutan RakyatSubsidi di Desa Malilingin

Sebelum diperkenalkan program hutan rakyat, masyarakat peladang hanya menanam ladangnya dengan tanaman pertanian seperti padi, jagung dan kacang tanah, tanpa ada tanaman keras seperti karet. Mereka umumnya menanam tanaman keras seperti kemiri, pinang, kelapa, dan tanaman buah-buahan hanya untuk penanda kepemilikan. Jarak tanam tanaman keraspun tidak ada. Sehingga bisa kita katakan bahwa adanya program hutan rakyat telah merubah cara pandang, teknik berladang dan produktifitas lahan masyarakat Desa Malilingin.

Menurut Subjek (Bapak Haji Jam-jam) tentang perubahan ladang menjadi kebun karet sebagai berikut:

"Ladang tu sama wan rumah kadua kami, kami rancak guring di ladang apalagi pas musim banih mulai ba buah. Kabiasaan kami mun batanam banih atawa jagung atawa kacang, di sasalnya ditanam wan tanaman ganal, nangkaya pohon kuminting, nyiur, durian, jua mun ada anakan gatah. Tapi bahari tu batanam kada ba ukuran, asal tanam haja. Tanaman pohon gasan pananda bahwa tanahnya sudah suah digawi. Jadi mananam pohon tagantung katarsediaan bibit, kada bapikir gasan hasilnya. Kabiasaan mananam pohon di sasala banih ternyata ma untungakan, napalagi gatah. Mun tuha gatahnya kawa di pantat, kayunya kawa dipakai ramuan". Ada sebahagian warga nang rajin menanam gatah, wahini hidupnya tanyaman". (S2.A)

(Berladang merupakan rumah kedua kami, karena kami sering tidur di ladang, khususnya menjelang panen padi. Kebiasaan kami selain menanam padi adalah menanam tanaman keras seperti Kemiri, Kelapa, Durian dan Karet. Tanaman keras di tanam sebagai penanda bahwa lahan tersebut sudah pernah di buka. Jenis tanaman yang ditanam sangat tergantung ketersediaan bibitnya, tidak memikirkan hasilnya. Ternyata menanam di sela-sela tanaman padi dengan tanaman karet lebih menguntungkan. Selain getahnya bisa disadap, kayunya juga bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah. Ada segelintir warga yang rajin menanam karet, saat ini hidupnya lebih sejahtera).

G. Hutan Rakyat Berbuah Penghargaan

Program hutan rakyat di Desa Malilingin dimulai pada tahun 1986 dengan nama Program Demplot Usaha Pertanian Menetap (UPM) di bawah program Penghijauan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Luas areal demplot adalah 20 Ha dengan jenis tanaman karet, rambutan dan tanaman semusim (padi dan kacang). Pada tahun 1988, dilaksanakan pembuatan Hutan Rakyat yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui proyek Penghijauan dengan luas areal 50 Ha dengan jenis tanaman Karet dan Rambutan.

Kegiatan hutan rakyat dilanjutkan pada tahun 1992 dengan pembuatan demplot UPM seluas 20 Ha dengan jenis tanaman karet, rambutan dan jenis tanaman semusim. Kegiatan demplot UPM ini merupakan lanjutan demplot UPM tahun 1988. Pada tahun 1993, kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Hulu Sungai Selatan melanjutkan proyek Penghijauan dalam bentuk pembuatan hutan rakyat dengan luas 100 ha. Jenis tanamannya adalah karet dan rambutan. Kemudian pada tahun 1995, kembali kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan pembuatan demplot Usaha Pelestarian Sumberdaya Alam (UPSA) seluas 10 Ha dengan jenis tanaman karet, rambutan dan tanaman semusim.

Melihat tingkat keberhasilan program hutan rakyat di desa Malilingin, pada tahun 1998 kantor Sub-Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (BRLKT) Riam Kanan, Banjarbaru ikut pula berpartisipasi melaksanakan program pembuatan Hutan Rakyat Model dengan luas 50 Ha. Jenis tanaman juga mengikuti program lainnya yaitu Karet dan Rambutan. Pada tahun 2001, Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan pembuatan hutan rakyat program padat karya dengan jenis tanaman karet dan rambutan meliputi luasan 100 Ha.

Pola tanam hutan rakyat di Desa Malilingin adalah campuran tanaman pokok dan tanaman semusim. Jenis tanaman pokok adalah Karet (80%) dan tanaman MPTs (*Multi Purposes Tree species*) seperti Rambutan, Sungkai dan Gmelina (20%). Jarak tanam bibit karet adalah 4 x 5 m, dan rambutan 8 x 8 m, sedangkan sungkai dan gmelina untuk tanaman pembatas lahan. Tanaman semusim adalah padi, jagung dan kacang tanah, yang tumbuh diantara tanaman pokoknya (karet).

Dalam program hutan rakyat tersebut, sebelum pelaksanaan di lapangan, dilakukan survey pendahuluan terhadap lokasi yang diusulkan oleh masyarakat, jika tidak ada pemasalahan, maka lahan tersebut di ukur dan kemudian dibagi sesuai dengan luasan yang direncanakan kepada masing-masing anggota. Khusus bagi pengurus kelompok tani dan perwakilan anggota, biasanya diberikan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pinlak atau Pimpro, bisa di Kandang atau kadang di Banjarbaru.

Secara rinci kegiatan-kegiatan hutan rakyat yang telah dilaksanakan di Desa Malilingin dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Perjalanan Program Hutan Rakyat di Desa Malilingin

No	Tahun	Nama Kegiatan	Pelaksana	Sumber dana	Luas (Ha)	Jenis Tanaman
1.	1986	Demplot UPM	Dishut Prop Kalsel	Inpres Penghijauan	20	Karet, rambutan, tan.semusim
2.	1988	Pembuatan Hutan Rakyat	Dishut Kab HSS	Inpres Penghijauan	50	Karet, rambutan
3.	1992	Demplot UPM	Dishut Prop Kalsel	Inpres Penghijauan	20	Karet, rambutan, tan.semusim
4.	1993	Pembuatan Hutan Rakyat	Dishut Kab HSS	Inpres Penghijauan	100	Karet, rambutan
5.	1995	Demplot UPSA	Dishut Prop Kalsel	Inpres Penghijauan	10	Karet, rambutan, tan.semusim
6.	1998	Pembuatan Hutan Rakyat	Sub-BRLKT (BPDAS)	Padat Karya	50	Karet, rambutan
7.	2001	Pembuatan HR Program Padat Karya	Dishut Kab HSS	Padat Karya	100	Karet, rambutan

(Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2008)

Berdasarkan hasil observasi lapang dan data dari Penyuluh, maka diperkirakan hingga tahun 2008 luasan hutan rakyat di desa Malilingin sekitar 950 Ha yang berasal dari program pemerintah (350 Ha) dan sisanya swadaya masyarakat (600 Ha) dengan penambahan jenis tanaman sungkai, sengon dan mahoni. Sebelum penelitian, data tahun 2004 swadaya masyarakat sekitar 500 Ha, jadi selama 4 tahun (2008) ada penambahan seluas 100 Ha.

Keberhasilan yang dicapai oleh masyarakat desa Malilingin dalam program Hutan Rakyat telah terbukti dengan beragam kunjungan dan penghargaan yang mereka peroleh seperti:

- 1) Tahun 1987 : mendapat kunjungan Bapak Menteri Kehutanan RI (Bapak Ir. Hasrul Harahap) dalam kegiatan pembuatan Demplot UPM
- 2) Tahun 1987 : Penghargaan Juara Harapan I Tingkat Nasional
- 3) Tahun 2000 : Predikat Kepala Desa Terbaik dalam Pelaksanaan Program Penghijauan tingkat Nasional
- 4) Tahun 1988-2001 : selalu meraih Juara untuk Program Penghijauan (Hutan Rakyat), baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi.

Keberhasilan ini dirangkum dari pendapat informan pendukung Bapak Sugito (Penyuluh Kehutanan Lapang) yang menguraikan sebagai berikut:

"Desa Malilingin memang agak beda dengan desa di sekitarnya, masyarakatnya tekun berladang dan cukup baik menerima saran dari pihak luar. Hal ini dimungkinkan karena program penghijauan dalam bentuk hutan rakyat sesuai dengan kebiasaan masyarakatnya yaitu berladang dan menanam pohon, meski awalnya pohon hanya sebagai penanda. Ketika diperkenalkan program hutan rakyat melalui demplot UPM seluas 20 Ha dengan jenis tanaman Karet unggul, mereka sangat antusias. Di samping karena karet yang ada hanya karet lokal, juga telah berumur tua, serta tumbuhnya tidak beraturan, demplot ini juga memberikan pembelajaran cara-cara penanaman dengan jarak tanam yang tertentu, sehingga memudahkan pemeliharaan dan pemanenan jika saatnya tiba".

Tokoh kunci keberhasilan program hutan rakyat di Desa Malilingin adalah Bapak Kepala Desanya saat itu yaitu Bapak Kastani (Subjek 1.A), dan juga tokoh masyarakatnya Bapak H. Jam-jam (Subjek 2.A). Bapak H. Jam-jam, selain sebagai ketua kelompok tani dalam program demplot UPM, beliau juga menanam sendiri di lahan-lahan

yang kosong secara swadaya. Keberhasilan beliau menjadi contoh bagi masyarakat lainnya untuk ikut menanam dilahannya masing-masing.

Kunjungan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan beragam penghargaan yang diterima oleh masyarakat Desa Malilingin merupakan bukti keberhasilan program hutan rakyat yang awalnya dari peladang berpindah menjadi peladang menetap dengan kebun karet yang produktif.

BAB 7

PUALAM SARI POTRET
DESA TRANSMIGRAN**A. Proses Terbentuknya Ray-12 di Desa Pualam Sari**

Ray-12 Desa Pualam Sari merupakan salah satu lokasi pemukiman Trans-AD pada tahun 1980an yang berada di Desa Pualam Sari. Sebagian besar penghuninya adalah para pensiunan Angkatan Darat yang ada di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Ray-12 lahir sebagai bagian dari Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang dikembangkan oleh PTP XII Danau Salak pada tahun 1983/1984. Pengembangan PIR dilakukan dengan sistem kredit sebesar 10-15 juta per KK dengan luasan 3 hektar. Pembayaran kredit dilakukan setelah karet berproduksi atau disadap.

Berdasarkan perkembangannya, kebanyakan petani trans-AD yang berasal dari pensiunan AD kebanyakan tidak mampu mengelola lahan mereka, sedangkan kredit untuk PIR sudah diambil, sehingga sebagian besar mereka menjual rumah beserta lahannya kepada orang yang berminat. Pada saat pengembangan PIR, banyak tenaga kerja dari luar trans-AD yang terlibat dalam pengolahan lahan sebagai pekerja, seperti membersihkan lahan, menanam, dan pemeliharaan. Pada awalnya para pekerja ini hanya mampu membeli rumah termasuk lahan pekarangan seluas 0,2 Ha dan lahan 1 seluas 0,8 Ha. Namun sedikit demi sedikit mereka juga mampu membeli lahan PIR karet yang seluas 3 Ha dengan cara mencicil kepada pemilik asal (biasanya besarnya sesuai bunga cicilan yang mesti dibayarkan pemilik asal).

Pada saat itulah terjadi perubahan dari Trans-Ad menjadi transmigran "spontan". Spontan karena pada awalnya hanya petani penggarap bekerja untuk PTP IX dan pendatang luar yang umumnya dari Jawa, dan akhirnya menetap dengan memiliki lahan trans-AD yang sudah banyak ditinggalkan oleh pemiliknya. Sejak itulah Ray-12 berkembang menjadi perkampungan transmigran spontan yang berasal dari petani penggarap dan pendatang menjadi petani pemilik. Meskipun mereka memiliki lahan pekarangan dan lahan 1 serta lahan

PIR 3 Ha, namun keterbatasan tenaga dan waktu mengakibatkan lahan pekarangan dan lahan 1 seluas 0,8 Ha terbengkalai yang akhirnya menjadi lahan kosong tanpa tanaman.



Gambar 17. Rumah Asal/Asli Transmigran di Ray-12

Sejak tahun 2000, ketika seorang yang bernama Wijayat berhenti bekerja sebagai tenaga konsultan (arsitek) dan mulai menetap di rumahnya, maka Ray-12 yang dulunya kosong sudah mulai dimanfaatkan. Lahan pekarangan seluas 0,2 ha ditanam dengan tanaman Jati dan Mahoni, sedangkan lahan 1 seluas 0,8 ha ditanam dengan tanaman karet. Berselang hanya satu tahun, maka sebanyak 50 orang mengikuti langkah Bapak Wijayat memanfaatkan lahan kosong menjadi lahan berguna. Mereka yang dulunya bekerja di luar kampung menjadi ikut tertarik untuk berkebudan dan menetap di desa. Hal ini didorong pula dengan harga getah karet yang semakin membaik, saat itu 2001, sekitar Rp. 3.500 - Rp. 5.000/ kg.

Maka sejak tahun 2000 hingga sekarang Desa Pualam Sari Ray-12 menjadi lebih hidup dan rindang, penuh kedamaian dan kekeluargaan. Desa Pualam Sari Ray-12 dari lahan kosong menjadi rindang dengan kegiatan atau program hutan rakyat yang secara sinergi dilaksanakan, baik secara swadaya maupun dengan bantuan pemerintah (bibit dan tenaga penyuluh). Perkembangan terakhir, pada tahun 2008, masyarakat Ray-12 telah mengusulkan pemekaran desa dari Desa Pualam Sari untuk menjadi desa tersendiri.

Beberapa alasan yang melatar-belakangi ingin dimekarkan menjadi desa tersendiri dari hasil FGD antara lain adalah:

- 1) Mempercepat pembangunan di Ray-12
- 2) Agar menjadi lebih mandiri dan bisa mengatur serta melengkapi sendiri pembangunan yang diperlukan
- 3) Memudahkan urusan pemerintahan

Untuk sejarah Ray-12, subjek (Bapak Hambali) menjelaskan sebagai berikut:

"Saya kebetulan hanya mengetahui asal mula untuk masyarakat di Ray-12, yaitu para pendatang yang bekerja sebagai buruh PIR yang kemudian membeli rumah dan lahan pekarangan dari trans-AD. Sekitar tahun 2000 an, lahan kosong mulai ditanam dengan jenis tanaman Jati, kemudian mahoni dan karet. Kegiatan penanaman ini dimulai oleh Pa Wid yang kemudian diikuti oleh masyarakat lainnya. Saat ini Ray-12 menjadi pusat perhatian orang, karena masyarakatnya mempunyai penghasilan yang lumayan dari hasil menyadap karet. Kekeluargaannya juga tinggi karena hampir tiap minggu diadakan pertemuan antar warganya.(S2.B)

Hal ini dikuatkan oleh informan pendukung (Kepala Desa Pualam Sari) sebagai berikut:

"Saya sebagai kepala Desa Pualam Sari menyadari bahwa perkembangan di areal Ray-12 bekas trans-Ad sangat pesat dan masyarakatnya kompak dalam bekerja. Ada tokoh disana yang menjadi panutan mereka yaitu Bapak Wijayat. Juga ada anggota DPRD yaitu Bapak Bachtiar yang juga rajin mendorong masyarakat di Ray-12 untuk maju. Kami tidak keberatan jika mereka ingin memekarkan menjadi desa baru. Jika persyaratan sudah dipenuhi saya akan membantu dalam proses pemekarannya".

Pada dasarnya, keinginan masyarakat Ray-12 untuk dimekarkan menjadi desa sendiri disebabkan sifat kemandirian mereka yang dapat membangun fasilitas umum, seperti gedung pertemuan, gedung TK dan perbaikan jalan. Selain itu pula, perkembangan jumlah penduduk yang semakin meningkat, memungkinkan Ray-12 untuk menjadi sebuah desa.

B. Letak Geografis dan Demografis

Desa Pualam Sari secara administrasi di bawah Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin. Luas desa sekitar 1.434 Ha. Terletak berbatasan dengan:

- 1) Desa Padang Sari di sebelah Utara
- 2) Desa A. YaniPura di sebelah Selatan
- 3) Desa Pulau Pinang di sebelah Barat, dan
- 4) Desa Gunung Batu di sebelah Timur.

Jarak desa ke ibukota Kecamatan Binuang sejauh 5 km, ke ibukota Kabupaten Tapin, Rantau sejauh 27 km, dan ke ibukota provinsi Banjarmasin sejauh 85 km. Sarana jalan menuju desa beraspal, sedangkan jalan desa sudah ada pengerasan batu. Demikian pula jalan menuju ladang sudah pengerasan batu.



Gambar 18. Jalan Desa Pualam Sari Ray-12

Jumlah penduduk tahun 2008 sebanyak 2.039 orang, terdiri dari laki-laki 1038 dan perempuan 1001, dengan jumlah KK sebanyak 587. Menurut data dari Kepala Desa Pualam Sari (2008), persentasi jenis pekerjaan berdasarkan kepala keluarga (KK) adalah: 42% petani karet; 19% buruh karet, pengumpul (pembeli) karet 1,19%; tambang 1,02%; buruh tambang 9,71%; PNS/ABRI 16,18%; Lain-lain 28,41%. Berdasarkan tingkat umur, persentasinya: umur 0-15thn: 43,94%; 16-25 thn: 17,85%; 26-55 thn: 32,95%; 56 up: 5,24%. Persentasi agama: Islam 95%, Kristen protestan 5%.

Fasilitas atau sarana umum yang tersedia di Desa Pualam Sari antara lain adalah:

- 1) Pendidikan: TK 2 buah; TK Alquran 2 buah; SD 3 buah, SMP Islam 1 Buah, SMP dan SMA Negeri di ibukota Kecamatan Binuang.

- 2) Kesehatan: Puskesmas Pembantu (pustu) ada 2 buah, tenaga medis 2 orang, dan posyandu 2 buah
- 3) Peribadatan: mesjid 3 buah, musholla 8 buah dan gereja 1 buah
- 4) Olah raga: sepakbola 4 buah, volley 5 buah, badminton 1 buah.
- 5) Pasar desa setiap sore hingga malam pada hari Rabu
- 6) Warung atau kios sebanyak 40 buah.

Kelembagaan desa yang ada hingga saat ini antara lain:

- 1) Pemerintahan desa
- 2) Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)
- 3) Kelompok Tani sebanyak 7 kelompok, salah satunya Kelompok Tani Hutan "Jati Jajar".
- 4) Kelompok PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga)
- 5) Kelompok Karang taruna

Di Desa Pualam Sari, secara realita terlihat bahwa ada 2 (dua) perbedaan yang menyolok dalam kehidupan masyarakatnya, yaitu masyarakat asli dan masyarakat pendatang. Masyarakat pendatang kebanyakan berasal dari Jawa yang menghuni di Ray-12, merupakan kelompok transmigrasi. Dua kelompok masyarakat ini hidup berdampingan dengan damai, karena masing-masing mempunyai mata-pencaharian yang berbeda. Kelompok asli, khususnya suku Banjar bekerja di pertambangan dan perdagangan, dan kelompok pendatang umumnya suku Jawa bekerja di bidang pertanian, khususnya perkebunan karet, baik di Perkebunan Inti Rakyat (PIR) maupun di Hutan Rakyat (HR).

C. Gambaran Kehidupan Masyarakat Transmigran Spontan

Sebagaimana sebuah desa transmigrasi, Desa Pualam Sari Ray-12 kehidupan penduduknya sebagian besar masyarakatnya hidup dari pertanian. Posisi rumah yang tersusun rapi dengan luasan lahan pekarangan 0,2 hektar, hampir setiap rumahnya dikelilingi oleh tanaman keras, seperti Jati, Mahoni dan juga Karet. Di sepanjang jalan masuk halaman rumah, tumbuh tanaman bunga-bunga dan tanaman buah-buahan. Batas antar rumah biasanya ditanam tanaman keras yang tumbuh agak rapat seperti Gamal.

Jika kita berkeliling desa, maka sebagian besar rumah "asli" transmigrasi, yakni berbentuk kotak, berjendela papan dan berkapur putih sudah tidak banyak tampak lagi. Mereka umumnya sudah memugar rumah asli tersebut sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, dengan bentuk teras dan pintu yang indah dan jendela dari kaca. Hampir setiap rumah mempunyai kendaraan roda dua, TV dan handphone.

Menurut Subjek (Bapak Bambang):

"Kami saat ini hidup terasa aman dan damai. Masing-masing penduduk mempunyai pekerjaan dan kesibukan sendiri-sendiri yang mendatangkan uang. Tanaman tumbuh hampir merata di setiap lahan pekarangan, baik tanaman kayu maupun tanaman buah-buahan. Rumah kami tidak berjendela kayu lagi dan di dalamnya ada TV dan handphone. Kami tidak susah lagi kalau mau pergi kemana-mana, karena hampir tiap rumah memiliki kendaraan roda dua".(S3.8)

Pemukiman masyarakat yang teratur dan nyaman memang berbanding lurus dengan sikap masyarakatnya yang ramah dan terbuka. Selama penelitian dilakukan, tidak pernah terdengar ada pertengkaran dan kekerasan ataupun pencurian yang terjadi di desa ini. Malah jika pagi hari kita bangun, maka burung-burung terdengar merdu berkicau, disiang hari angin sepoi yang bertiup di antara dedaunan pohon-pohonan, sore hari bunyi "keririang" keras menyanyi dan di malam hari suara binatang malam terdengar sendu melantunkan pujian kepada alam dan Penciptanya.

Salah satu subjek (Bapak Mujiono) menjelaskan:

"Sejak lahan pekarangan 0,2 ha dan lahan 1 seluas 0,8 Ha kami tanam dengan tanaman produktif dan tanaman buah-buahan seperti jati, mahoni karet, dan rambutan, desa kami rasanya semakin sejuk dan nyaman. Tiap pagi kami gratis mendengarkan bunyi kicauan burung sambil bekerja menyadap karet. Hidup kami tenang karena tidak ada masyarakat yang tidak punya kerjaan".(S4.8)

D. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Desa Pualam Sari Ray-12 pada umumnya adalah petani, khususnya penyadap karet. Mata pencaharian lainnya adalah sebagai buruh karet, pengumpul getah karet, tambang, buruh tambang, PNS/ABRI dan lain-lain (buruh bangunan, pedagang). Sebagai mata pencaharian utama, pekerjaan penyadap karet memberikan pendapatan yang cukup tinggi, yaitu rata-rata 3-5 juta rupiah perbulan untuk karet produktif 1-2 ha (1 ha = 50 kg x 10 hr x Rp. 8.000 = Rp. 4.000.000,-).

Bagi yang mempunyai karet produktif lebih 3 ha, maka pendapatan minimal mereka tentu di atas 7 juta rupiah perbulan. Pendapatan bisa turun jika harga getahnya turun, musim hujan dan tanaman karet sudah berumur tua. Tingginya pendapatan dari hasil penjualan getah karet sangat memicu masyarakat lainnya sekitar Ray-12 untuk ikut menanam karet di lahan yang mereka miliki.



Gambar 19. Tanaman Jati (kiri) dan Karet (kanan) Hutan Rakyat Subsidi di Desa Pualam Sari Ray-12

Berdasarkan persentasi mata pencaharian, menurut data yang dimiliki Bapak Wijayat (2008), maka 90% masyarakat penghuni Ray-12 menyadap karet, hanya 10% mata pencahariannya sebagai PNS/ABRI, buruh tambang dan lainnya. Hal ini memang berbeda dengan kelompok masyarakat di luar Ray-12 meskipun masih dalam satu desa yang sama. Umumnya yang tinggal di luar Ray-12 adalah orang setempat, yakni mayoritas suku Banjar. Kelompok ini umumnya bekerja di lahan pertambangan.

Menurut penuturan informan pendukung (H. Yanuar Hadi, Kepala Desa Pualam Sari, orang Banjar) tentang keadaan masyarakatnya, khususnya di Ray-12 sebagai berikut:

"Masyarakat Desa Pualam Sari awalnya memang suku Banjar, kemudian pada tahun 1980 an, sebagian lahan desa dijadikan lokasi transmigrasi, khususnya untuk pensiunan TNI atau dulu angkatan darat (Trans-AD, dibaca "transad"). Setelah itu dikembangkan Pola PIR oleh PTP XII Danau Salak, khususnya di lokasi Ray-12. Karena sebagian sudah uzur, dan juga keturunan mereka tidak mau mengurus rumah dan lahan, maka sebagian besar diperjual-belikan dengan para pendatang yang kebanyakan dari Jawa juga. Makanya, masyarakat penghuni Ray-12 itu berbeda dengan wilayah lainnya, meskipun dalam desa yang sama. Mereka itu rajin mengelola lahan untuk perkebunan karet dan tanaman keras lainnya. Kalau orang Banjar kebanyakan bekerja di pertambangan, karena uangnya cepat dapat dan besar, meskipun tidak menjamin masa depan".

E. Sosial Kemasyarakatan Transmigran Spontan

Masyarakat di Ray-12 hampir 90% berasal dari suku Jawa. Meskipun demikian, mereka dalam kehidupan sehari-hari sangat menghormati norma-norma yang berlaku pada suku Banjar. Dalam keseharian mereka, sebagai petani karet mereka hidup sederhana dan bersahaja. Hubungan antar sesama warga terjalin baik dan komunikasi berjalan lancar.

Secara umum, dalam kehidupan sosial seperti perkawinan, mereka tetap menjalankan adat Jawa yang melaksanakan hajatnya berlangsung selama sehari-hari. Namun ketika berkaitan dengan keagamaan, maka mereka sepenuhnya mengadopsi tata cara adat Banjar, seperti kalau ada acara *Haulan*, membaca *Habsy* ataupun Maulud Nabi. Kemampuan beradaptasi masyarakat pendatang Ray-12 terhadap tata cara keagamaan menunjukkan bahwa mereka pandai menempatkan diri terhadap wilayah baru.

Berkaitan dengan hutan rakyat, nilai budaya yang nampak adalah kerjasama dan rasa kekeluargaan yang tinggi. Salah satu contohnya adalah dalam pembelian lahan untuk kebun karet. Apabila salah satu orang tidak mempunyai modal, maka teman di kelompoknya meminjamkan sertifikat tanahnya untuk jadi agunan dalam meminjam uang di bank. Kemudian dana pinjaman tersebut dibelikan untuk modal lahan kebun karet dan bibitnya. Untuk pembayaran angsuran, maka peminjam sertifikat ikut menyadap karet kepada yang meminjamkan sertifikat. Semua dilandasi kepercayaan dan rasa kebersamaan yang tinggi sesama pendatang.

Menurut Subjek (Bapak Gunadi) tentang perluasan hutan rakyat karet di Desa Pualam Sari Ray12 sebagai berikut:

"Rasa kebersamaan dan kekeluargaan di desa ini sangat tinggi, mungkin karena sesama pendatang yang ingin sama-sama berhasil. Kami biasanya membantu teman-teman yang belum memiliki kebun karet dengan meminjamkan mereka sertifikat untuk diagunkan di Bank. Untuk pembayaran angsuran mereka bekerja di kebun kami, sebagian juga untuk kehidupan sehari-hari. Sore hari mereka menanam bibit karet di kebun yang baru di beli, dan ini berlangsung 5 hingga 6 tahun baru lunas. Semua ini atas dasar kepercayaan dan tidak ada unsur meminta imbalan. Demikian seterusnya hingga saat ini kami sudah berjumlah sekitar 97 orang dengan luas lahan sekitar 77,6 Ha dari lahan 1, sedangkan lahan 2 seluas 194 Ha".(S1.B)

Dalam hal kepemimpinan, mereka mempunyai seorang figur pemimpin informal yang dijadikan panutan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berkebun. Tokoh sentral di Ray-12 adalah Bapak Wijayat, biasa dipanggil dengan sebutan Pa Wid (karena anak

perempuannya bernama Widya). Pa Wid sangat bersahaja dan rendah hati, suka menolong tanpa pamrih dan pekerja keras. Beliau juga mempunyai kelebihan dalam membaca hal-hal gaib, sehingga sering dimanfaatkan masyarakatnya jika ada hal-hal yang berhubungan dengan alam gaib. Keteladanan dan kepedulian beliau menjadikan panutan bagi masyarakat Ray-12, sehingga sesama mereka menjadi semakin erat. Hampir setiap malam, di antara mereka berkumpul di rumah Pa Wid untuk berdiskusi dan meminta pendapat beliau.

Salah satu subjek (Bapak Hambali) menjelaskan:

"Kami sangat bersyukur di Ray-12 ini ada Pa Wid, karena beliau dapat memberikan nasehat dan jalan keluar jika di antara kami ada masalah. Beliau juga yang memulai memperkenalkan tanaman Jati untuk ditanam di lahan kosong. Saya ingat nasehat beliau bahwa lahan kalau dibiarkan kosong sama artinya kita tidak pandai bersyukur, dulu di Jawa kesulitan lahan, sekarang disediakan kok malah dibiarkan. Jika ada permasalahan pengobatan beliau juga berkenan membantu penduduk tanpa pamrih. Beliau juga pandai membuat "pagar" kebun karet agar aman dari pencuri. Beliau kami anggap seorang tokoh yang patut diteladani, terutama dalam bekerja keras dan menghargai makhluk alam semesta ini".(S2.B)

Dari sisi pendidikan, di Ray-12 ini hampir anak-anak usia sekolah di sekolahkan oleh orang tuanya. Sebagian mereka ada yang menyekolahkan hingga ke jenjang perguruan tinggi di Banjarbaru dan Banjarmasin. Sebagai contoh, subjek (Bapak Gunadi), meskipun beliau hanya tamat SMP, namun anak-anaknya di sekolahkan di Banjarmasin yakni kuliah di Akademi Kebidanan Muhammadiyah (swasta). Demikian pula yang lainnya, mereka bangga bisa menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka menganggap pendidikan merupakan tabungan bagi anak-anaknya untuk masa depan.

Menurut penuturan subjek (Bapak Gunadi):

"Kalau saya Pa' cari uang itu untuk keluarga, khususnya anak-anak saya. Walaupun saya hanya lulusan SMP, tapi kalau anak-anak bisa sekolah lebih tinggi tentu bangga sekali. Saya dan istri kerja di kebun ber-hari-hari untuk mencari dana sekolah anak-anak. Bapak lihat sendiri, saya belum sempat memperbaiki rumah, meskipun bahan-bahan sudah lengkap, karena uangnya saya gunakan dulu untuk biaya sekolah anak saya yang di AKBID Banjarmasin. Apapun kebutuhan kuliahnya saya akan kirim uang, meskipun saya tidak mengerti sama sekali apa yang anak saya sebutkan

dalam permintaannya *Wes poko ke kirim meneh, gitu Pa. Saya berharap anak saya nantinya bisa hidup senang dengan keahliannya, kalau jadi bidan kan amalnya banyak, iyakan Pa!*" (S1.8)

Pendapat dari subjek di atas menggambarkan bahwa masyarakat transmigran sangat bangga dengan keberhasilan dalam pendidikan anak-anaknya. Ini diduga bahwa kepergian mereka merantau ke luar Jawa memang ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan pendidikan yang lebih tinggi bagi anak-anaknya, sehingga segala upaya didedikasikan untuk mengangkat derajat keluarganya.

F. Lahan Kosong Menjadi Hutan Rakyat

Masyarakat Desa Pualam Sari Ray-12 yang merupakan penduduk pendatang sebagai transmigran "spontan", pada awalnya hanya mengelola lahan sekitar rumah tinggal seluas 0,2 Ha. Keterbatasan waktu dan tenaga sebagai tenaga buruh di PTP XII atau buruh bangunan di kota mengakibatkan lahan 1 seluas 0,8 Ha tidak terurus dan menjadi lahan kosong yang tidak produktif.

Pada tahun 2000 an, salah satu subjek yang bekerja sebagai tenaga ahli menggambar bangunan di berbagai konsultan di Banjarmasin merasa jemu dengan pekerjaannya yang harus meninggalkan keluarga berbulan-bulan dan berkeinginan kuat untuk tinggal dan menetap di desa dengan menggiatkan pekerjaan pertanian. Perasaan terpanggil untuk membangun desa dengan memanfaatkan tanah kosong yang luas menyebabkan subjek perlu membuat persemaian benih sebagai salah satu usaha untuk pengadaan bibit secara masal.

Pada mulanya dibuatlah persemaian benih Jati yang diperoleh subjek dari keluarganya yang tinggal di Jawa. Pada awalnya benih yang disemai hanya tumbuh sekitar 50% saja dan ini dianggap gagal. Subjek berusaha menanyakan kepada keluarga di Jawa bagaimana sebaiknya menyemai benih Jati. Pada persemaian kedua, benih berhasil tumbuh di atas 80%, sehingga tersedia bibit Jati yang cukup banyak.

Sembari menanam bibit Jati dilahan sendiri seluas 0,8 ha, subjek juga mengajak masyarakat lainnya untuk ikut menanam bibit Jati yang disediakan gratis oleh subjek di lahan masing-masing. Pada awalnya yang berminat sekitar 15 orang, setelah setahun kemudian berkembang menjadi sekitar 50 orang. Itulah merupakan awal mula masyarakat Desa Pualam Sari Ray-12 melaksanakan hutan rakyat dengan menanam bibit Jati di lahan kosong. Sehingga dapat dikatakan bahwa hutan rakyat di Desa Pualam Sari Ray-12 dimulai oleh seorang *early adopter* yang tergerak hati dan raganya untuk memanfaatkan lahan kosong ditanam tanaman yang produktif.

Informan kunci, sang *early adopter* (Bapak Wijayat) menuturkan sebagai berikut:

"Saya pa' inggeh, sebenarnya memulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar pekarangan karena merasa pekerjaan saya sebagai tenaga ahli menggambar tidak bermanfaat untuk keluarga, karena harus meninggalkan mereka dirumah, meskipun pendapatannya lumayan banyak. Saya merasa tidak puas. Saya berpikir, kalau di Jawa lahan selalu dimanfaatkan secara maksimal, kok disini dibiarkan kosong begitu saja. Pada kondisi lain, saya merasa desa ini kok panas dan kurang harmonis antara masyarakatnya dengan alam. Lalu saya mulai menyemai benih Jati untuk dijadikan bibit yang bisa di tanam di lahan kosong. Selain berfungsi untuk memberikan kesejukan, juga pohon Jati jika besar akan berharga cukup mahal. Sehingga saya mulai mengembangkan tanaman Jati di desa ini. Saya ajak beberapa orang untuk ikut menanam di lahan kosong yang mereka miliki, bibit Jatinya gratis saya bagikan. Alhamdulillah, banyak yang mau ikut dan akhirnya berkembang seperti saat ini, tidak ada lagi lahan yang kosong. Saya sangat senang, sekarang desa menjadi rindang dan teduh, masyarakat semuanya bekerja di desa saja, tidak perlu jauh-jauh cari uangnya". (IK. P5) (Penuturan)

Hal di atas diakui oleh informan pendukung (Bapak Ikhsan, Penyuluh Kehutanan Lapang) yang menjelaskan:

"Desa ini sangat beruntung mempunyai seorang Pa' Wijayat, karena beliaulah yang memulai penanaman lahan kosong dengan bibit Jati. Bibitnya disemai sendiri oleh beliau dan kemudian dibagikan gratis kepada tetangga yang berminat. Hanya setahun, beliau mampu mengajak sekitar 50 orang untuk ikut menanam bibit Jati di lahan kosong yang ada di sekitar pemukiman mereka. Selain itu, masyarakat di Ray-12 ini juga sangat terbantu dengan adanya Pa Wid, karena beliau serba bisa, seperti membuat proposal kegiatan kelompok tani dan sekaligus menghitung secara ekonominya, karena beliau udah biasa hitung bahan bangunan".

Inilah awal terbangunnya hutan rakyat swadaya di Desa Pualam Sari Ray-12 yang dimulai oleh seorang *early adopter* yang bernama Wijayat. Kegiatan penanaman lahan kosong berkembang pesat karena banyaknya masyarakat yang mau terlibat dan menanam lahan kosongnya dengan tanaman Jati. Realita positif ini ditangkap oleh Penyuluh Kehutanan (Bapak Ikhsan) yang bertugas di Kecamatan Binuang. Pada saat pertemuan kelompok masyarakat di tahun 2001, Penyuluh Kehutanan tersebut menawarkan bantuan bibit dan obat-

obatan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tapin yang hanya dapat diperoleh melalui kelompok tani. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, subjek dan anggota masyarakatnya bersepakat membentuk sebuah kelompok tani yang mereka beri nama Kelompok Tani Hutan "Jati Jajar". Kelompok ini awalnya hanya beranggotakan 25 orang.

Sejalan dengan adanya bantuan pemerintah berupa bibit karet, mahoni dan tanaman buah-buahan (rambutan, durian), maka perkembangan program hutan rakyat semakin cepat dan menyebar keseluruh masyarakatnya. Sebagian masyarakat memanfaatkan bibit karet untuk menggantikan karet tua yang berasal dari PIR, sebagian lagi untuk menanam di lahan yang masih kosong.

Subjek (Bapak Gunadi) menjelaskan tentang awal dari program hutan rakyat di Desa Pualam Sari Ray-12 sebagai berikut:

"Awal mula hutan rakyat di Desa Pualam Sari Ray-12 pada tahun 2000, ketika Pa Wid memperkenalkan tanaman Jati untuk di tanam di lahan pekarangan seluas 0,2 ha ataupun di lahan 1 seluas 0,8 Ha. Sejak itu, banyak anggota masyarakat yang tertarik untuk menanam lahannya yang kosong dengan tanaman Jati, karena bibitnya gratis dari Pa Wid. Pada tahun 2001, Penyuluh Kehutanan memberikan peluang untuk menerima bantuan bibit karet dan mahoni melalui kelompok tani. Saat itu dibentuklah Kelompok Tani Hutan "Jati Jajar" dengan jumlah anggota awalnya sekitar 25 orang. Sejak itulah, hutan rakyat menjadi bagian hidup masyarakat kami, terutama di tanam dengan tanaman karet".(S1.B)

G. Hutan Rakyat Sumber Penghidupan

Berkembangnya hutan rakyat di Ray-12 Desa Pualam Sari tidak lepas dari peran Bapak Wijayat sebagai pelopornya. Sejak tahun 2000, yang dimulai dengan penanaman bibit Jati di lahan pekarangan (0,2 ha) dan karet di lahan 1 seluas 0,8 ha, telah membawa perubahan yang berarti dalam kehidupan masyarakat di Ray-12. Pemanfaatan lahan pekarangan menjadikan sekitar rumah menjadi rimbun dan "tabungan" berdiri yang sewaktu-waktu bisa diambil.

Setelah mendapat bantuan dari pemerintah melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Tapin berupa bibit karet unggul dan mahoni serta tanaman buah-buahan di tahun 2001/2002, maka partisipasi masyarakat dalam program hutan rakyat menjadi semakin meningkat. Mereka secara swadaya membeli bibit karet sendiri untuk menambah kekurangan dari bantuan bibit yang didapatkan secara gratis dari pemerintah.

Menurut penuturan subjek (Bapak Hambali):

"Sejak berkembangnya program hutan rakyat di Ray-12 ini, kami merasakan kehidupan yang lebih baik, kesempatan kerja menjadi semakin luas, malah kami dapat mengundang keluarga kami yang di Jawa untuk ikut membantu mengelola kebun karet kami. Hampir semua masyarakat di Ray-12 ini memiliki pekerjaan, sehingga desa menjadi aman dan tentram". (S2.B)

Secara kronologis beberapa program hutan rakyat yang telah dikembangkan di Ray-12 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Data Rekapitulasi Pelaksanaan Program Hutan Rakyat di Desa Pualam Sari Ray-12.

No.	Tahun	Kegiatan	Luas	Pelaksana
1.	2001/2002	Penanaman Jati	29 ha	Dishutkab Tapin
2.	2002/2003	Unit Percontohan (Bantuan bibit Karet)	25 ha	Dishutprov Kalsel
	2006/2007	Peremajaan karet	15 ha, 11.000 bibit	Dishutkab Tapin

(Sumber: Diolah dari berbagai sumber oleh peneliti, 2008)

Berdasarkan luasannya, maka sejak dilaksanakan program hutan rakyat, yang berasal dari pemerintah seluas 59 Ha, dan yang dikelola secara swadaya seluas 165,6 Ha (0,8 x 207 KK). Jenis tanaman semakin beragam, selain Jati, karet dan mahoni, juga ditanam jenis tanaman bawah seperti nilam dan tanaman obat-obatan. Hingga penelitian selesai, lahan di Ray-12 sudah penuh tertanam oleh masyarakatnya, sehingga tidak ada lagi tanah kosong yang tersedia. Masyarakat di Ray-12 tinggal memelihara tanaman yang ada, ataupun melaksanakan permudaan tanaman karet tua yang berasal dari PIR tahun 1983 an.

Sejak berkembangnya hutan rakyat, secara ekonomi masyarakat di Ray-12 semakin mapan, tidak ada lagi pengangguran, rumah dan isinya semakin bermutu. Dari aspek sosial sarana umum semakin banyak dan baik, masyarakatnya rukun dan kebersamaan semakin tinggi, tingkat pendidikan anak semakin baik. Dari aspek lingkungan, suasana desa nyaman dan rindang, burung-burung semakin banyak dan kebakaran hutan tidak terjadi lagi.

Beberapa penghargaan yang diperoleh masyarakat Ray-12 antara lain adalah:

- 1) Sertifikat dan Undangan mengikuti Upacara 17 Agustus di Istana Negara, Jakarta untuk Bapak Wijayat dan Bapak Hambali sebagai Petani Hutan Rakyat (Penhijauan) Teladan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2007
- 2) Sertifikat dan Undangan mengikuti Upacara 17 Agustus di Istana Negara, Jakarta untuk Bapak Wijayat dan Bapak Sukidin sebagai Petani Teladan untuk KUP (Kelompok Usaha Produktif) tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, Th 2008.

Menurut informan ahli (Bapak Supiani), keberhasilan program hutan rakyat di dua desa tersebut antara lain dipengaruhi oleh:

- 1) Adanya seorang atau beberapa tokoh panutan yang memberikan contoh penanaman pohon di lahan milik yang dimulai dengan swadaya
- 2) Masyarakatnya memang secara turun-menurun mengerjakan pertanian atau berkebun
- 3) Adanya dorongan dari pemerintah berupa bantuan bibit, bimbingan teknis dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi

BAB 8

ADAPTASI BUDAYA MASYARAKAT PEDESAAN HUTAN TERHADAP PROGRAM HUTAN RAKYAT

A. Interpretasi terhadap Program Hutan Rakyat

1. Interpretasi Masyarakat Peladang

Program Hutan Rakyat ini diperkenalkan di Desa Malilingin sekitar tahun 1983, dimulai dengan program plot atau demplot. Awalnya masyarakat hanya sekedar mencoba mengikuti, di samping itu adanya faktor penarik seperti insentif dari pembuatan lubang, pemasangan ajir dan penanaman serta beberapa bantuan pupuk dan obat-obatan lainnya. Dari beberapa tokoh masyarakat yang mengikuti Program Hutan Rakyat inilah yang kemudian menjadi penggerak bagi warga Desa Malilingin lainnya. Seiring berjalannya Program Hutan Rakyat masyarakat juga mendapatkan penyuluhan dari dinas terkait seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan ataupun dari BP DAS Barito. Hal ini tergambar dari uraian subjek di bawah ini :

"Program hutan rakyat kawa manambah panghasilan patani, maambil upah mananam wan mamalihara, luas lahan gatah batambah jadi manambah gawian gasan patani, maatur jarak tanam kabun jadi banyak tanaman gatahnya, wan jua hasilnya dari gatah kawa gasan naik haji". (S3.A)

(Program hutan rakyat dapat menambah penghasilan petani dengan jalan mengambil upah pada kegiatan Hutan Rakyat, luasnya lahan sadapan karet sehingga mata pencaharian penduduk tidak mengalami kesulitan, pengaturan jarak tanam membuat lahan menjadi optimal, dapat menunaikan ibadah haji)

Penyuluhan ini kemudian mampu menambah pengetahuan dan wawasan mengenai sistem bercocok tanam yang baik dan benar, seperti jarak tanam antar pohon karet serta usia produktif, sistem tumpang sari dan penanganan hama tanaman. Dari proses inilah kemudian terbukti mampu meningkatkan hasil produksi dan taraf

hidup masyarakat. Inilah yang kemudian yang mendorong warga lain untuk ikut menjalankan Program Hutan Rakyat.

"Wahini kami kada tapi jauh lagi maninggalakan kampung, imbah banyak gatah kami manatap ja lagi, paling mun handak tu mambuka ladang bakas tadahulu, kada mambuka nang hanyar lagi. Jadi wahini tanyaman kada batatulakan lawas lagi maninggalakan kampung". (S1.A)

(Kami sekarang sudah tidak lagi meninggalkan desa, setelah hasil dari karet semakin banyak, sehingga kami sudah menetap. Kami hanya membuka ladang lama saja, jadi tidak perlu lama lagi meninggalkan desa)

Uraian subjek di atas memberikan pemahaman bahwa mereka merasakan adanya dampak positif dari program hutan rakyat oleh masyarakat Desa Malilingin. Kemudian terjadilah perubahan pola bercocok tanam, warga yang dulu memakai sistem lahan berpindah kemudian menggunakan sistem pertanian lahan menetap. Lahan kosong yang banyak berada di sekitar desa kemudian dibagi-bagi oleh warga desa, dan kemudian ditanami karet yang bernilai ekonomis tinggi karena dapat dipanen tiap hari, dengan harga Rp 9.000,00 tiap kilogramnya.

"Kami dalam mengatur lahan sifatnya basama-sama, istilah kami sistem ba-arian atau sistem arisan gawian. Sistem ba-arian dilaksanakan ketika pembukaan lahan dan penanaman. Adanya penanaman secara basamaan, maka hama nangkaya babi, warik dan tupai bisa berkurang. Gasan membuka lahan biasanya kami sabubuhan haja, jadi nyaman papadaan manggawi wan babagi hasilnya". (S1.A)

(Kami dalam mengelola lahan bersifat kerjasama, istilahnya "ba-arian", yaitu sistem arisan kerja. Sistem arisan kerja ini dilaksanakan pada saat pembukaan lahan dan penanaman. Adanya penanaman secara serempak dapat mengurangi serangan hama babi, kera dan tupai. Untuk membuka lahan, kami biasanya sakaluargaan, sehingga mudah dalam pekerjaan pembagian lahan dan hasilnya)

Program hutan rakyat juga telah mempererat kerjasama antar masyarakat, seperti di uraikan di atas. Sistem yang sudah ada yaitu "ba-arian" menjadi semakin terasa manfaatnya oleh anggota kelompok tani. Sistem "bubuhan" merupakan sistem bekerjasama dalam hubungan keluarga yang sedarah ataupun sedarah dalam membuka lahan dan mengelolanya. Sistem bubuhan sangat memudahkan anggota masyarakat dalam membagi lahan, mengelola dan menikmati hasilnya.

Sebagaimana kita ketahui, memang tanaman karet tidak dapat langsung panen dan setidaknya memerlukan waktu lima tahun untuk bisa dipanen, beberapa warga yang baru memulai mengikuti Program Hutan Rakyat kemudian bekerja sebagai buruh tani di lahan warga yang sudah terlebih dahulu menanam karet atau karet dari turunan, ataupun bekerja di ladang "bahuma" saja. Pada tahun 1980 an, lahan kosong masih luas, sehingga adanya kebebasan masyarakat untuk mengelola lahan kosong, maka tiap-tiap warga memiliki lahan yang luas berkisar antara 3-10 hektare dan tiap hektare ditanami sekitar 300-400 pohon karet, sehingga tidak mungkin dikelola sendiri atau setidaknya memaksimalkan tenaga kerja internal atau keluarga.

"Hasil mamantat gatah sebelum program hutan rakyat hanya 10-15 kg/hari, namun setelah dilaksanakan program hutan rakyat hasil mamantat gatah sekitar 25-30 kg/hari. Kami wahini manjaga kebersihan kabun dari tagah wan balukaran". (S4.A)

(Hasil dari menyadap karet sebelum program hutan rakyat hanya berkisar 10-15 kg/hari, namun setelah ada program hutan rakyat, hasilnya menjadi 25-30 kg/hari. Kami sekarang menjadi lebih rajin menjaga kebersihan kebun karet dari semak dan belukar).

Program hutan rakyat juga telah meningkatkan etos kerja masyarakat Desa Malilingin. Mengelola lahan secara berkelompok besar telah mendorong mereka untuk semakin aktif bekerja. Hasil kerja mereka ini berdampak pada meningkatnya hasil perolehan sadapan dari tanaman karet. Selain itu, lahan sekitar tanaman karet menjadi semakin bersih dari semak dan gulma pengganggu. Hal ini sesuai dengan anjuran pelaksana program (penyuluh dan pinlak/pimpinan pelaksana) yang menginginkan lahan tanaman karet selalu bersih dari semak dan tanaman pengganggu.

"Wahini lahan sudah ditanami gatah barataan, paling tinggal padang gasan bahuma aja lagi. Padahal disini mun jar urang KB dasar ba hasil, paling banyak di sini ba-anakan 3 (tiga) haja, jadi urangnya kada banyak. Mun sudah mamantat, paksa ai kakanakan umpat manggani i, mun buhan nang banyak gatahnya, paksa mangiaiu kaluarga di desa sabalah gasan ma abil upah, 70%:30% pang kabiasaan disini, 70% gasan nang bagawi dan 30% gasan nang ba isian kabun". (S1.A)

(Sekarang ini hampir semua lahan sudah ditanami karet, walaupun ada hanya untuk ladang bertanam padi. Di sini sebenarnya program KB sudah berhasil, karena satu keluarga paling banyak punya anak 3 (tiga) orang, sehingga penambahan penduduk sedikit. Hal ini memaksa anak-anak yang sudah mulai besar ikut

membantu menyadap karet. Kalau ada yang punya lahan karet luas, mereka biasanya memanggil keluarga dari desa terdekat untuk membantu menyadap dengan sistem bagi hasil 70%:30%. 70% untuk pengambil upah dan 30% untuk yang punya lahan karet)

Nilai ekonomis dari tanaman karet saat ini telah membuat perubahan perilaku dalam keluarga di Desa Malilingin, setiap anggota keluarga kemudian terlibat langsung dalam usaha pertanian ini. Mulai dari suami, istri serta anak-anak mereka kemudian saling bekerja sama untuk bekerja di ladang, ketika masih ada sisa lahan yang tidak bisa dikerjakan maka mereka baru memperkerjakan buruh tani, biasanya berasal dari keluarga sendiri di desa terdekat. Warga yang mau bekerja sebagai buruh tani di Desa Malilingin mendapatkan upah melalui sistem pembagian hasil pertanian yang berupa 70% dari hasil produksi pertanian, sedangkan 30% adalah untuk pemilik lahan. Buruh tani di sini bertanggung jawab atas perawatan tanaman, peremajaan tanaman dan panen hasil serta penjualan hasil produksi pertanian terutama karet. Sedangkan untuk pemilik lahan hanya menerima hasil dari panen tanpa ikut serta dalam proses produksi. Tingginya persentasi (70%) yang diterima oleh buruh atas kerjanya dapat diduga karena terbatasnya tenaga kerja yang tersedia di Desa Malilingin.

"Nang kaya apa yu, kami ni kaluarga kada banyak, anak dua haja, jadi mun pina kawa manggani i mamantat buhan kanakan tu dibawai. Umanya mintu jua, manggani i ka ladang, jadi ba isukan kada ta urus kanakan sakulah". (S5.A)

(Bagaimana ya, kami kan keluarga kecil hanya punya anak dua saja, jadi jika mereka sudah mulai besar dan bisa bekerja, maka mereka kami ajak ikut menyadap karet. Begitu juga dengan ibunya, karena ikut ke ladang dengan suami, sehingga anak-anak tidak terurus sekolahnya)

Hasil penjualan karet yang dapat mencapai Rp. 5.000.000,00 per bulan dan dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga inilah yang kemudian membuat pendidikan untuk anak-anak mereka terabaikan atau telah terjadi suatu budaya baru dimana anak-anak lebih memilih untuk bekerja di kebun daripada melanjutkan sekolah. Di sinilah kemudian ditemukan dampak negatif dari kesuksesan Program Hutan Rakyat, mayoritas penduduk desa dengan usia sekitar 15 tahun sudah melangsungkan pernikahan dan tidak melanjutkan sekolahnya karena merasa sudah bisa untuk mencari penghasilan sendiri. Rata-rata mereka hanya lulus SD dan memilih untuk bekerja di kebun bersama orang tua mereka atau menjadi buruh tani.

"Kami maurus kabun gatah ni sakaluargaan, bini wan anak umpat jua mamantat gatah wan mambarasihi ladang. Mun sudah mulai musim banih ba-buah atau kacang tanah pina ba-umbi, kabiasaan tu kami kada bulik ka kampung, tapi guring di lampau sambil manjaga i ladang. Makanya kampung lingai mun sudah musim banih, paling ta tinggal nang tuha-tuha atawa kakanakan nang sakulah". (S4.A)

(Kami mengurus kebun karet ini sekeluarga, istri dan anak ikut terlibat menyadap karet dan mengurus ladang. Kalau musim padi mulai berbuah, kacang tanah mulai ber-umbi, kami biasanya tidak pulang ke desa, tapi menginap di "lampau" atau rumah kecil sambil memelihara ladang dari gangguan hama. Sehingga desa menjadi sunyi jika musim berbuah, yang tinggal di desa hanyalah orang tua dan anak-anak yang masih sekolah)

Ditemukan pula adanya pembagian kerja antara laki-laki, perempuan, dan anak-anak di Desa Malilingin. Para laki-laki biasanya bekerja menyadap karet mulai pagi sampai siang karena pada waktu inilah getah karet terkumpul dari pohon. Sedangkan pihak perempuan biasanya membantu tugas ini tetapi siang harinya perempuan jugalah yang menjual hasil karet ini kepada pengumpul getah karet di desa (tengkulak) yang ada di Desa Malilingin. Bagi keluarga yang memiliki anak pada usia sekolah biasanya orang tua memberikan uang saku berlebih, agar sepulang dari sekolah dapat dipergunakan untuk makan siang di warung jika mereka tidak pulang, karena aktivitas pertanian ini sangat menyita waktu dan tenaga sehingga rata-rata keluarga di Desa Malilingin kemudian jarang memasak dan mereka makan di warung waktu pagi dan sore. Baru pada malam harinya mereka dapat menikmati makan malam bersama. Hal ini terjadi terutama pada saat padi, jagung atau kacang tanah di ladang sudah mulai berbuah, sehingga masyarakat lebih banyak tinggal di ladang dibandingkan di desa.

"Kami kabiasaan imbah manabas lahan, lalu dibakar gasan mambarasihi balukuran, imbah ada penyuluhan dari program hutan rakyat, kami mambakar harus ba-izin ka kapala kampung". (S5.A)

(Kami biasanya setelah menebang pohon, kemudian dibakar agar lahan cepat bersih dari semak belukar, setelah ada penyuluhan dari program hutan rakyat, kami membakar lahan harus minta izin dulu kepada Kepala Desa)

Terdapat pula adanya perubahan-perubahan perilaku masyarakat Desa Malilingin mengenai pandangan hidup terhadap hutan, sebelum Program Hutan Rakyat ini diperkenalkan masyarakat Desa Malilingin

menggunakan sistem ladang berpindah dan membersihkan lahan dengan membakarnya, sekarang setelah adanya Program Hutan Rakyat masyarakat kemudian membuka lahan dengan ijin tertulis dari desa, untuk dijadikan lahan menetap. Masyarakat Desa Malilingin tidak bisa lagi berpindah-pindah lahan pertanian dan membakarnya karena lahan-lahan yang ada telah di bagi-bagi sehingga jika membakar lahan dapat merusak lahan milik orang lain, dan jika membakar lahan itupun dilakukan dengan cara bergotong-royong antar warga desa agar api tidak menjalar dan dapat dikendalikan.

"Wayah jaman nang tuha dahulu, batanam gatah babarang aja, asal ada bibit di tanam langsung, kada ba aturan dan kada jalas asalnya. Imbah ada program hutan rakyat, kami mananam gatah baaturan sasuai arahan pemerintah, bisa 3 x 3 x 4 m atawa 4 x 5 m, tagantung keadaan bibit wan lahan". (S1.A)

(Dahulu para tetuha desa, menanam karet sembarang saja, asal tersedia bibit diambil dan ditanam tanpa aturan, juga asal bibitnya tidak jelas. Sekarang, dengan adanya program hutan rakyat, kami menanam karet sesuai anjuran pemerintah, seperti 3 x 3 m atau 4 x 5 m, tergantung ketersediaan bibit dan kondisi lahannya)

Masyarakat Desa Malilingin kemudian menginterpretasikan Program Hutan Rakyat ini sebagai aktifitas baru yang merupakan penyempurnaan dari sistem bercocok tradisional yang diwariskan turun temurun. Jika dulunya menanam karet dengan jarak yang tidak teratur, peremajaan tanaman yang dilakukan dengan membuka lahan baru tanpa menebang tanaman lama. Sekarang seiring penyuluhan yang terus dilakukan oleh dinas terkait maka permasalahan ini sudah dapat diselesaikan.

"Adanya program hutan rakyat nang mambari bibit gatah unggul, samakin mambuat warga kampung betah tinggal di kampung, kada parlu mencari gawian ka lain-lain, apa lagi ka kuta. Selain sudah nyaman, jua kami kada ba isian kabisaan lain selain bakabun gatah wan batani" (S3.A)

(Keberadaan program hutan rakyat yang menyediakan bibit karet unggul, semakin membuat masyarakat desa menjadi betah tinggal di desa, tidak perlu lagi mencari kerja ke lain tempat, apalagi ke kota. Selain sudah mencukupi, kami juga tidak punya keahlian lain selain berkebun karet dan bertani)

Memang dalam Program Hutan Rakyat ini memerlukan dan membutuhkan tenaga kerja yang banyak karena selama ini terbukti mampu menyerap tenaga kerja terutama dari pemuda desa yang sebelumnya menganggur kini dapat bekerja di lahan hutan rakyat,

dan besar harapan bagi masyarakat desa untuk terus melanjutkan Program Hutan Rakyat ini. Masyarakat Desa Malilingin dapat hidup mandiri dari hasil kebun karet dan pertanian mereka, dan telah timbul sebuah kesadaran bahwa lebih baik bekerja di kebun karet mereka daripada pergi merantau ke kota atau bersaing dalam bidang pekerjaan yang lain.

"Imbah program hutan rakyat ba hasil, napa bilang wani mencari wan manukar bibit unggul gatah saurang, semenjak tahun 2000an, kada pernah lagi kabakaran hutan. Mun pas musim panas, kami asing-asingnya manjaga kabun gatah, mambakar ladang jin kami wahini harus malapur ka pambakal". (S3.A)

(Setelah adanya program hutan rakyat yang kami anggap berhasil, karena sekarang masyarakat sudah membeli sendiri (swadaya) menanam kebunnya dengan karet bibit unggul. Sejak tahun 2000an, di desa ini tidak pernah lagi terjadi kebakaran hutan, sebab kami memelihara dan menjaga kebun karet. Membakar ladang untuk padi pun kami sekarang harus melapor kepada kepala desa)

Pengakuan di atas menggambarkan bahwa dengan adanya program hutan rakyat yang berhasil (ditandai dengan swadaya setelah dibantu pemerintah-) maka kebakaran hutan yang menjadi momok pemerintah kita setiap musim kemarau bisa diatasi dengan baik oleh masyarakat. Adanya rasa memiliki yang tinggi, karena hasil karet yang baik, telah membangun kesadaran bersama masyarakat untuk saling menjaga dan memelihara kebun dan ladang. Hal ini senada dengan penjelasan informan pendukung (Dapak Sugito), bahwa sekarang tidak pernah lagi terjadi kebakaran hutan dan lahan di Desa Malilingin dan sekitarnya. Jika ada kebakaran di desa sebelahnya, maka hampir semua masyarakat turun untuk membantu mengatasinya.

Dari ungkapan-ungkapan informan kunci dan subjek di Desa Malilingin dan pengamatan observasi partisipatif langsung di kebun dan di ladang (huma), maka interpretasi mereka terhadap program hutan rakyat adalah sebagai berikut:

- 1) Menambah penghasilan
- 2) Memperluas lapangan kerja
- 3) Mengoptimalkan pemanfaatan lahan
- 4) Meningkatkan produksi atau hasil sadapan
- 5) Mengurangi ancaman dan serangan hama
- 6) Meningkatkan kerjasama
- 7) Meningkatkan etos kerja masyarakat
- 8) Mengetahui bibit unggul, pengaturan jarak tanam, dan cara pembakaran ladang dengan izin

- 9) Merubah peladang berpindah menjadi menetap
- 10) Mencegah kebakaran hutan dan lahan

2. Interpretasi Masyarakat Transmigran Spontan

Masyarakat di Desa Pualam Sari mulai aktif mengikuti Program Hutan Rakyat sejak tahun 2000, pada awalnya mereka mencoba sistem tumpang sari seperti padi dan kacang ditanam bersebelahan dengan tanaman jati dan mahoni. Ternyata sistem ini tidak terlalu menguntungkan karena tanaman keras jenis jati dan mahoni membutuhkan waktu lama untuk bisa dipanen sedangkan ketika tanaman ini sudah besar maka sudah tidak dapat lagi ditumpang sari. Sedangkan setiap hari kebutuhan hidup harus dipenuhi. Maka beralihlah petani-petani Desa Pualam Sari untuk menanam tanaman karet alasan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dimana tanaman karet dapat menghasilkan getah karet yang dapat dipanen tiap hari dengan harga Rp 9.000,00 tiap kilogramnya. Selain itu kayu dari tanaman karet dapat dijual jika tanaman karet sudah tua dan produksi getahnya menurun. Sekarang di Desa Pualam Sari 200 hektare lahan yang ada sudah tertanami semua. Dan tiap kali sadap petani dapat memanen minimal 30 kilogram karet per-tiga hari.

Melihat potensi ekonomi yang besar dari hasil karet maka petani di Desa Pualam Sari Ray-12 mulai beralih dari sistem tanam tumpang sari ke tanaman karet penuh dimana lahan hanya difokuskan pada tanaman karet. Kemudian terjadi perubahan tanam petani di Desa Pualam Sari Ray 12 tidak menanam sayur mayur lagi, mereka memilih membeli sayur mayur karena setelah dihitung-hitung luas lahan yang ditanami sayur apabila diganti dengan karet ternyata lebih menguntungkan jika ditanami dengan tanaman karet.

Masyarakat Desa Pualam Sari ini selain sukses dalam menjalankan Program Hutan Rakyat mereka juga bisa menjadi contoh bagi desa-desa di sekitarnya untuk mencontoh pola tanam mereka yang fokus hanya pada tanaman tertentu sehingga dapat menghasilkan ragam produk tanaman dengan jumlah yang lebih banyak, seperti tanaman karet (getah dan kayunya), jati dan mahoni (kayunya).

Masyarakat Desa Pualam Sari Ray-12 yang tergabung dalam kelompok tani "Jati Jajar" juga memiliki lahan untuk kelompok dimana lahan itu seluas tiga hektar dan ditanami karet. Hasil dari tanaman karet yang ditanam di tanah milik kelompok inilah kemudian yang dijadikan sebagai pengisi kas kelompok. Dalam pengelolaan lahan hutan rakyat milik kelompok inilah yang kemudian sering timbul permasalahan karena tiap-tiap orang memiliki jadwal untuk melakukan perawatan dan pemanenan terhadap lahan kelompok akan

tetapi terkadang ada anggota yang tidak mengerjakan kewajibannya dan menghambat kegiatan pertanian kelompok

Dalam hal urusan kelompok tani masyarakat Desa Pualam Sari Ray-12 tidak memiliki kesulitan dengan adanya perubahan sistem distribusi pupuk mereka dapat dengan cepat beradaptasi dengan sistem yang ada sehingga suplai pupuk untuk tanaman mereka dapat terjaga. Kesadaran untuk membentuk kelompok tani memang sudah ada sejak awal dimana masyarakat yang berlatar belakang berbeda-beda selalu berkumpul dan membahas kesulitan-kesulitan yang dialami selama proses bertani. Hal ini dimungkinkan karena sebagai bagian besar dari masyarakat Desa Pualam Sari memiliki pengalaman bekerja di luar desa atau bekerja di industri. Sehingga kebiasaan-kebiasaan seperti rapat dan musyawarah untuk mengatasi kesulitan ikut terbawa.

"Hutan rakyat yang saya ketahui, adanya hutan rakyat ini Pa masalahnya prospek kedepannya, kanyanya membawa dan memberi harapan untuk keluarga saya. Saya pikir tertarik hutan rakyat dulu saya mengembara kemana-mana, kalau hutan rakyat bisa menetap dan menciptakan lapangan kerja sendiri". (S1.B)

Dari apa yang telah dikemukakan subjek di atas menyiratkan bahwa subjek memandang hutan rakyat dari fungsi ekonomis atau keuntungannya. Subjek yang merupakan seorang transmigran asal pulau Jawa, tentunya memutuskan untuk bermigran ke Kalimantan dengan harapan peningkatan kualitas hidup. Mata pencaharian sebagai petani karet di lahan hutan rakyat dianggap subjek sebagai upaya peningkatan mutu kehidupan dan sarana untuk menggantungkan hidup keluarga. Hal ini menyimpulkan bahwa interpretasi subjek terhadap hutan rakyat adalah yang bersifat ekonomis.

"Dulunya saya bekerja di luar desa. Kalau terus keluar tidak akan mengalami kemajuan. Kalau ikut orang jadi buruh kita tetap jadi buruh saja. Jadi saya ikut hutan rakyat untuk menciptakan lapangan kerja sendiri". (S1.B)

"Kerja di hutan rakyat bisa menampung tenaga kerja, bisa menolong orang lain. Dulu disuruh orang, sekarang tergantung maunya sendiri". (S4.B)

Hutan rakyat diinterpretasikan subjek sebagai jalan untuk memperbaiki hidup. Subjek menganggap keharusan perubahan pada nasib dan subjek memilih menjalankan program hutan rakyat. Hutan rakyat juga dianggap subjek sebagai upaya membuka lapangan pekerjaan, yang mana usaha ini berarti meningkatkan ekonomi warga masyarakat sekitar.

"Program pemerintah yang dilakukan oleh masyarakat, yang bertujuan untuk lahan tidur menjadi bermanfaat. Hutan rakyat sangat membantu masyarakat, misalnya sekarang kayu sudah tersedia, padahal dihutan alam kayu sudah mulai berkurang. Hutan rakyat membantu gundul jadi hijau, ditahun mendatang kayu masih tersedia bagi anak cucu kami". (S2.B)

"Secara pribadi, satu untuk tabungan karena kayu terus tumbuh besar, alam sejuk tidak panas. Kalau bekas batu bara lahan menjadi kritis". (S1.B)

Selain aspek ekonomi, subjek juga menginterpretasikan hutan rakyat dari segi ekologis. Hutan rakyat diinterpretasikan subjek sebagai salah satu cara melakukan bentuk penyelamatan lingkungan yaitu penghijauan. Subjek menyadari bahwa lahan di sekitarnya sudah mulai kritis terlihat dari produksi kayu berkurang dan banyaknya lahan hutan yang gundul.

Keadaan alam yang mengawatirkan membuat subjek khawatir terhadap apa yang akan diterima anak cucunya kedepan. Subjek meyakini bahwa program hutan rakyat selain menguntungkan bagi dia dan keluarga saat ini, juga menguntungkan bagi anak cucu atau keturunannya ke depan. Program hutan rakyat adalah program yang diikuti subjek salah satunya dikarenakan keinginan subjek memberi kepastian masa depan bagi keturunannya kelak. Program hutan rakyat adalah program yang mampu memberi kepastian masa depan dikarenakan program ini mampu meningkatkan pendapatan dan juga mampu menjaga lingkungan atau menjaga keseimbangan ekologis.

"Memberikan dampak positif kepada masyarakat, terutama yg ada di desa kami, pertama menghijaukan lahan yg asalnya padang alang2 dan belukar, program hutan rakyat lahan menjadi hijau. Dapat memanfaatkan lahan kritis. Mempunyai dampak positif terhadap masyarakat, karena kalau pohon bisa dijual akan menguntungkan kami". (S3.B)

Subjek tersebut pun mengungkapkan hal yang sama terkait penginterpretasian program hutan rakyat. Subjek menyadari akan adanya dampak positif dari hutan rakyat, yaitu selain sebagai pekerjaan yang menghasilkan penghasilan lumayan, program hutan rakyat dirasa mampu mereboisasi hutan-hutan yang sudah mulai kritis. Program hutan rakyat selain mensejahterakan rakyat dianggap juga sebagai upaya penghijauan.

"Masalahnya di sini kepedulian lingkungan tentang penghijauan ada antusiasnya, termasuk gotong royong warga. Makanya pemerintah cenderung ke sini menyalurkan program". (S1.B)

Desa Pualam Sari dipilih menjadi lokasi berlangsungnya program hutan rakyat, selain dikarenakan potensi geografis yaitu memiliki hutan, namun juga dikarenakan antusiasme masyarakat terhadap program tersebut. Program hutan rakyat merupakan program pemerintah yang keberhasilan atau kegagalannya salah satunya tergantung pada bagaimana sikap masyarakat terhadap program tersebut. Di Desa Pualam Sari program ini berhasil, salah satu alasan keberhasilan ini seperti yang diungkapkan oleh subjek yaitu adanya antusiasme warga.

"Kalau penilaian pribadi, sangat membantu kehidupan, karena udah bisa menyekolahkan anak hingga kuliah. Sekarang udah bisa punya sepeda motor". (S3.B)

"Satu, dalam rumah tangga mengalami peningkatan, anak kuliah, aset bisa nambah seperti perluasan lahan, dulu 3 hektar sekarang 10 hektar, bisa memperbaiki rumah". (S1.B)

Kedua pendapat subjek di atas mengungkapkan bahwa sisi positif dari hutan rakyat yaitu program hutan rakyat mampu menaikkan kualitas hidup secara ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup dari segi pencapaian pendidikan. Masyarakat yang dulunya susah mencari penghasilan, dengan adanya program hutan rakyat menjadikan mereka mandiri. Mandiri dalam arti kata masyarakat sekarang memiliki penghasilan bahkan mampu menabung lewat tabungan aset, baik itu aset berupa tanah, harta benda maupun rumah.

"Sebab semua senang aja karena penghasilan tetap terjaga meskipun turun naik menurut harga pasar, tapi selalu ada penghasilan. Desa juga semakin tenang dan tidak ada gangguan. Alam semakin dingin dan rimbun". (S4.B)

Ungkapan subjek di atas seolah menjadi kesimpulan dari banyaknya pandangan subjek-subjek lain berkenaan dengan penginterpretasian program hutan rakyat. Penghasilan terjamin, kemandirian timbul yaitu masyarakat sudah bisa menspekulasi turun naik harga pasar secara individu maupun kelompok tani. Kemudian yang menarik lainnya yaitu aspek ekonomi kalau selama ini dipandangan sebagai aspek penghancur lingkungan dalam bentuk eksploitasi alam, disini justru sebaliknya. Aspek ekonomi membuat alam menjadi lestari dan terjaga keseimbangannya. Inilah sebuah bentuk simbiosis mutualisme antara alam dan manusia, manusia mengambil manfaat dari alam dan alam pun mendapat untung dikarenakan keberadaannya dijamin dan dilindungi.

"Yang jelas desa kita menjadi hijau, seperti dekat bendungan sangat sejuk dan nyaman. Masa depan anak cucu kita bagus atau terjamin. Sarana desa bertambah banyak, misalnya

membangun gedung sendiri, mesjid bisa diperbaiki, tempat olah raga bisa diciptakan seperti main bola, volly. Bisa menyediakan air minum untuk masyarakat. Dulu musim kemarau bingung, sekarang air tersedia terus menerus". (S1.B)

Subjek di atas memiliki pandangan serupa, ia tidak hanya melihat program hutan rakyat dari segi ekonomi atau peningkatan penghasilan, tabungan bagi anak cucu dan upaya pelestarian lingkungan. Namun, program hutan rakyat dirasanya mampu mengatasi permasalahan kemarau yang selama ini selalu melanda kawasan tersebut, dan juga telah mampu mencegah kebakaran hutan. Program hutan rakyat selain mensejahterakan para pengikut program tersebut secara individu, namun juga mampu memberi fasilitas atau sarana pembangunan pada desa tersebut.

"Saya kan sering pas terang bulan jalan-jalan keliling kampung, tanaman itu kayaknya bisa diajak bicara, kayanya sujud juga kepada yang menciptakannya. Akhirnya saya tertarik oleh kondisi tanaman itu sendiri. Baik tanaman bermanfaat kepada manusia atau tidak, tapi kalau kita hidup berdampingan dengan baik maka akan memberikan kesejukan dan kedamaian. Tertarik karena pengalaman spritual melihat rimbunya tanaman, saya tertarik karena di sana tersimpan suatu keindahan dan sangat luar biasa, sehingga saya tertarik untuk menanam pohon. Di bumi bukan manusia saja yang menghuni, ada binatang dan tumbuhan yang perlu hidup, dari tanaman belukar yang kecil hingga tanaman pohon yang besar semua menginginkan hidup. Dari semut sampai yang binatang besar memerlukan tempat hidup yang nyaman". (IK. P5)

Pendapat di atas adalah bukti ternyata bukan hanya memandangi program hutan rakyat sebagai program yang menguntungkan dari segi ekonomi semata. Namun program hutan rakyat dilihat dari segi perlindungan dan penyelamatan lingkungan. Subjek melihat alam (hutan) lewat kacamata spiritualnya. Yaitu tumbuhan bisa bicara, bicara di sini bukan disangkut pautkan dengan hal-hal yang bersifat *magic*. Namun subjek melihat tumbuhan sama seperti manusia, sebagai makhluk hidup yang memiliki nilai atas nama dirinya. Adanya keseimbangan (*equilibrium*) dalam alam, yaitu hidup berdampingannya dengan harmonis manusia, tumbuhan, hewan, dan bagian kehidupan lainnya dalam sebuah jaringan keterikatan yang satu. Kesadaran lingkungan (*ecological awarness*) yang dimiliki tersebut yang mendorong untuk aktif terlibat dalam program hutan rakyat.

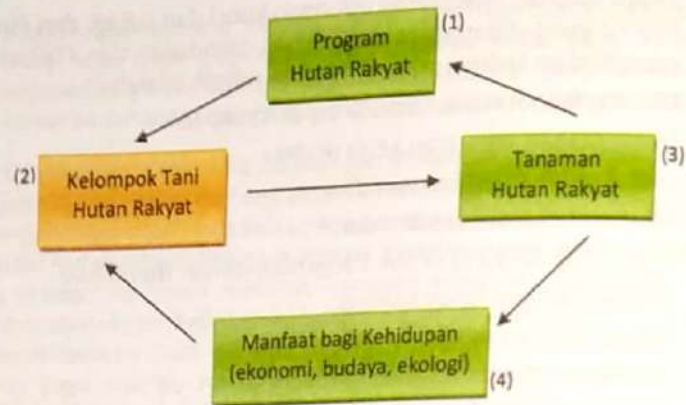
Secara spesifik, interpretasi informan kunci dan subjek dari Pualam Sari Ray-12 yang didapatkan dari diskusi mendalam dan FGD antara lain menyatakan bahwa program hutan rakyat adalah:

- 1) Memberikan harapan atau prospek kedepan
- 2) Menciptakan lapangan kerja di desa
- 3) Membuat masyarakat mandiri
- 4) Masyarakat menetap di desa
- 5) Menyediakan kayu untuk bangunan rumah dan dijual
- 6) Memanfaatkan lahan kosong
- 7) Menghijaukan desa
- 8) Memperkuat sifat ke-gotong-royongan
- 9) Meningkatkan derajat keluarga (dapat memperbaiki rumah dan menyekolahkan anak)
- 10) Membuat desa dan masyarakat tentram
- 11) Menyediakan air yang cukup meskipun kemarau
- 12) Memberi ruang kehidupan bagi makhluk tuhan lainnya.

Dari interpretasi informan kunci dan subjek di dua desa penelitian, maka dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) aspek, meliputi :

- 1) Aspek sosial ekonomi, antara lain: menambah penghasilan, memperluas lapangan kerja, meningkatkan produksi atau hasil sadapan, memberikan harapan atau prospek kedepan, menciptakan lapangan kerja di desa, menyediakan kayu untuk bangunan rumah dan dijual
- 2) Aspek sosial budaya, antara lain: meningkatkan kerjasama, meningkatkan etos kerja masyarakat, mengenal bibit unggul, pengaturan jarak tanam, dan pembakaran lahan dengan izin, merubah peladang berpindah menjadi menetap, masyarakat mandiri, masyarakat menetap di desa, memperkuat sifat kegotong-royongan, meningkatkan derajat keluarga, membuat desa dan masyarakat tentram
- 3) Aspek ekologi, antara lain: mengurangi ancaman dan serangan hama, mencegah kebakaran hutan dan lahan, memanfaatkan lahan kosong, menghijaukan desa, menyediakan air yang cukup meskipun kemarau, memberi ruang kehidupan bagi makhluk tuhan lainnya).

Hubungan interpretasi masyarakat terhadap program hutan rakyat yang telah dilaksanakan di desa penelitian dapat dilihat pada Gambar 20.



Gambar 20. Hubungan antara Program Hutan Rakyat, Kelompok Tani Hutan Rakyat, Tanaman Hutan Rakyat dan Manfaat bagi Kehidupan

Keterangan: (1) = Nomor urut proses
→ = Mempengaruhi

Pada gambar di atas terlihat bahwa program rakyat yang dilaksanakan oleh kelompok tani hutan rakyat dengan menanam tanaman hutan rakyat telah memberikan manfaat bagi kehidupan mereka yang sesuai dengan interpretasi mereka terhadap program tersebut, yaitu dari aspek sosial ekonomi, sosial budaya dan ekologi. Keberadaan tanaman hutan rakyat oleh kelompok tani melalui subsidi ternyata juga telah mempengaruhi program hutan rakyat secara luas ke masyarakat lainnya yang akhirnya juga ikut menanam pohon melalui swadaya.

B. Adaptasi Budaya dalam Konteks Perubahan Sosial

Masuknya sesuatu yang baru dalam sebuah komunitas masyarakat tentunya akan mendapat reaksi. Reaksi tersebut bisa menerima ataupun menolak. Sesuatu yang baru akan diterima jika dianggap tidak merugikan bahkan kalau bisa menguntungkan dan juga jika sesuatu yang baru tersebut tidak membuat perubahan yang drastis pada apa yang selama ini dianggap mapan atau nyaman oleh komunitas tersebut.

Program hutan rakyat adalah sebuah program yang tentunya saat pertama kali masuk ke lokasi yaitu Desa Malilingin dan Desa Pualam Sari Ray-12 mendapat reaksi. Namun dikarenakan interaksi dan interpretasi masyarakat bahwa program hutan rakyat adalah

program yang menguntungkan, sehingga akhirnya program ini diikuti. Program hutan rakyat pun akhirnya membawa perubahan, perubahan yang terjadi baik itu dari segi sosial budaya maupun ekonomi.

Dua definisi perubahan sosial yang peneliti anggap relevan dalam mengkaji masalah perubahan sosial akibat dari adanya program hutan rakyat adalah definisi dari Gillin dan Gillin dan Max Iver. Gillin dan Gillin yang dikutip oleh Basrowi dan Soenyono (2004a) menyebutkan bahwa perubahan-perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, yang disebabkan baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena difusi atau penemuan-penemuan. Sedangkan Max Iver menekankan bahwa perubahan sosial adalah perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (*social relationship*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial.

Ada sebuah fenomena di Desa Malilingin ketika program hutan rakyat dilaksanakan dan menuai kesuksesan. Masyarakat memiliki sebuah mata pencaharian dengan lahan luas dan peningkatan penghasilan dengan drastis. Di samping perubahan-perubahan perilaku sosial dan budaya mengenai pandangan hidup terhadap hutan, masyarakat Desa Malilingin kemudian menginterpretasikan program hutan rakyat ini sebagai aktifitas baru yang memerlukan dan membutuhkan tenaga kerja yang banyak.

Kebutuhan akan tenaga kerja yang banyak ini membawa pemikiran bahwa jika dengan pembagian hasil produksi 70% untuk penggarap dan 30% untuk pemilik lahan, akan lebih menguntungkan lagi jika menggarap sendiri lahan tersebut. Petani banyak mengerjakan sendiri lahan yang dimilikinya, meski luas lahannya berkisar antara 3-10 hektare. Sedangkan untuk menyadap karet maksimal seorang bisa menyadap 300 pohon atau sekitar satu hektar. Sehingga akhirnya anggota keluarga yang lain kemudian ikut serta dalam proses penyadapan karet ini.

Hasil penjualan karet yang dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga inilah yang kemudian membuat pendidikan untuk anak-anak mereka terabaikan atau anak-anak mereka lebih memilih untuk bekerja di kebun daripada melanjutkan sekolah. Di sinilah kemudian ditemukan fenomena bahwa penduduk desa dengan usia sekitar 15 tahun sudah melangsungkan pernikahan dan tidak melanjutkan sekolahnya. Rata-rata penduduk adalah lulusan dari Sekolah Dasar dan memilih untuk bekerja di kebun bersama orang tua mereka atau menjadi buruh tani.

Fenomena yang ditemukan di Desa Pualam Sari Ray-12 dengan adanya program hutan rakyat adalah semakin eratnya hubungan antar masyarakat. Adanya program hutan rakyat telah mendorong masyarakat di desa ini untuk semakin menjalin kerjasama dan komunikasi. Mereka menjadi semakin sering bertemu dan berdiskusi dalam acara rutin pertemuan kelompok tani, maupun pertemuan antar kelompok tani. Hal ini sangat dirasakan para subjek, karena sebelumnya mereka jarang sekali bertemu, karena pekerjaan umumnya di luar desa dan jarang pulang ke desa.

Realita lainnya yang dapat ditemukan di Desa Pualam Sari Ray-12 adalah semakin damainya kehidupan di desa. Mereka jarang sekali menemui kejahatan seperti pencurian dan perkelahian. Adanya hasil dari hutan rakyat mendorong masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya kejenjang yang lebih tinggi, membangun sarana umum secara swadaya dan memberikan contoh yang baik bagi masyarakat di desa sekitarnya.

Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka keadaan di masyarakat Desa Pualam Sari Ray-12 sangatlah bertolak belakang dengan masyarakat Desa Malilingin yang tidak terlalu memperhatikan pendidikan bagi anak-anaknya, padahal dari sisi keuangan mereka sama. Hal ini diduga adanya perbedaan penginterpretasian terhadap "uang". Bagi masyarakat Desa Pualam Sari Ray-12, keberadaan uang dapat digunakan untuk meningkatkan derajat keluarga dengan menyekolahkan anak-anak kejenjang yang lebih tinggi. Sedangkan bagi masyarakat Desa Malilingin, uang dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan dalam berkeluarga. Bagi masyarakat Desa Malilingin, kalau "orang kota" sekolah juga untuk mencari pekerjaan (baca: uang), mengapa harus tinggi sekolahnya kalau sekolah secukupnya saja juga dapat cari uang.

Program hutan rakyat, menyebabkan perubahan kebiasaan dari masyarakat pendatang, maupun masyarakat lokal. Perubahan terlihat dari kebiasaan anak-anak "transmigrasi lokal" mengaji malam hari setelah sholat Magrib mengikuti kebiasaan masyarakat setempat. Lebih khusus dapat diuraikan beberapa perubahan yang diungkapkan oleh informan kunci (Bapak Wijayat) antara lain sebagai berikut :

- 1) Kalau kematian, tata cara mengikuti masyarakat lokal (Banjar)
- 2) Kalau perkawinan, orang lokal mengikuti tata cara orang Jawa, termasuk waktunya
- 3) Acara keagamaan seperti *yasinan*, *Maulud Habsy* mengikuti kebiasaan masyarakat lokal
- 4) Kerjasama berkebun, orang lokal mengikuti kebiasaan orang Jawa

Hal lain yang terungkap selama penelitian berlangsung adalah perubahan jam atau waktu keseharian. Dengan kesibukan menyadap karet di kebun, maka acara sosial seperti perkawinan selalu dimulai di atas jam 11, pertemuan warga menjadi teratur sebulan sekali, dan dulu desa sunyi karena penghuninya keluar desa, namun sekarang sunyi karena penghuninya semua pergi kekebun karet.

1. Perubahan Sosial Budaya Dikarenakan Program Hutan Rakyat

Konsep utama yang ingin diangkat dalam tulisan ini adalah bahwa masyarakat merupakan sebuah proses yang selalu bergerak dan tidak pernah diam (statis). Program hutan rakyat merupakan salah satu aspek yang bisa merubah masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang terlibat langsung dalam program tersebut, meskipun pada akhirnya dialektika berlangsung dan akan mempengaruhi ke semua komponen masyarakat desa dan masyarakat desa sekitarnya.

Kebudayaan dapat dipandang sebagai suatu cara beradaptasi terhadap lingkungan (Sukadana, 1983), karena kebudayaan sekecil apapun merupakan hasil dari proses pemikiran. Pemikiran tentang hubungan antara kebudayaan dan lingkungan ini, lebih jauh dibahas dalam teori ekologi budaya yang masuk kedalam kerangka pendekatan evolusi multilinear.

Hutan rakyat bukan hanya telah mengubah pendapat masyarakatnya, namun ada dimensi perubahan lain yang terjadi setelah pelaksanaan program hutan rakyat. Bagian ini mencoba untuk menelusuri perubahan sosial budaya sebagai dampak dari penerapan program hutan rakyat.

"Bagi kami warga kampung ini, perubahan yang dirasa akan imbah adanya program hutan rakyat yang kaya: kawa marasa akan bakandaraan ka ladang, manyamprut semak wan ubat, paham arti diskusi kalumpuk dalam kalumpuk tani. Hanya yang pina kada pas tu, kakanakan kada tapi mau sakulah lagi imbah pina bisa mancari duit. Ngalih ai Pa ai, mun sakulah tinggi kawin awan urang luar, wan balum tantu jua dapat gawian". (IK.ML)

(Untuk kami warga desa, perubahan yang dirasakan setelah adanya program hutan rakyat adalah: bisa beli kendaraan roda dan memakainya untuk ke ladang, bisa menggunakan herbisida untuk membasmi, paham arti berdiskusi dan tukar pendapat dalam kelompok tani. Namun di lain pihak, kami tidak bisa memaksakan anak-anak untuk sekolah lebih tinggi, sebab mereka kalau sudah mampu mencari uang sendiri malas untuk melanjutkan sekolahnya.

Memang serba sulit, kalau sekolah tinggi biasanya kawin dengan orang luar, dan juga belum tentu mendapatkan kerjaan yang sesuai)

Pernyataan di atas, menggambarkan bahwa program hutan rakyat telah merubah mereka dari hanya berjalan kaki menuju ladang, sekarang mereka bisa naik kendaraan roda dua. Mereka juga mampu mempercepat pembersihan semak dan belukar dengan menggunakan herbisida yang informasi dan pengalaman penggunaannya berasal dari pelaksana program hutan rakyat. Mereka juga merasa mampu untuk berdialog dengan pihak luar, karena sudah terbiasa dengan diskusi di dalam kelompok tani.

Dari sisi lainnya, mereka merasakan dampak hasil karet yang cukup tinggi telah mengakibatkan anak-anaknya malas untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Beberapa pengalaman warganya, seperti anak dari Bapak H. Kastani yang bersekolah di SMA, ternyata kawin dengan "orang luar", dan sekarang tidak tinggal di desa lagi. Juga mereka melihat dan mendengar bahwa di kota pekerjaan itu sulit, meskipun dengan pendidikan yang tinggi. Jadi, bagi mereka berkumpul di desa bersama sanak-keluarga, dengan hidup sederhana dan pendidikan secukupnya (tamat SD) sudah suatu keberkahan yang luar biasa.

"Pertemuan antar masyarakat semakin sering, masyarakat semakin terbuka karena permasalahan dibicarakan bersama. Sisi keamanan, kondusif karena pendapatan mereka cukup. Rapat rutin dan Yasinan sangat mendukung keamanan dimasyarakat". (IK.PS)

Adanya rasa keterbukaan dan saling komunikasi intensif dalam suatu kelompok masyarakat membuat kehidupan masyarakatnya semakin nyaman. Kalau dulunya mereka masing-masing mencari kerja ke luar desa, sekarang mereka sudah kumpul di desa. Kebiasaan untuk terbuka dari masyarakat akan memudahkan bagi pihak luar dalam menyampaikan sesuatu hal yang baru, termasuk penggunaan teknologi dalam pengelolaan lahan dan penyadapan karet, seperti penggunaan zat kimia untuk mengentalkan hasil sadapan dan lainnya.

Program hutan rakyat di lokasi penelitian, bukanlah sebuah program yang diikuti satu atau dua orang saja. Namun program ini diikuti oleh banyak kalangan masyarakat. Orang-orang yang mengikuti program hutan rakyat ini masing-masing menjadi terbiasa untuk bertukar pikiran terkait dengan apa yang terjadi pada program yang sedang mereka jalani. Oleh karena itu, hal ini membuktikan bahwa penerapan program hutan rakyat telah membuat masyarakat menjadi masyarakat yang terbuka, bukan hanya terbuka dalam menerima

perubahan tetapi juga terbuka satu sama lain. Sehingga ini mampu meningkatkan serta merekatkan ikatan sosial antar anggota masyarakat peserta program hutan rakyat.

Pertemuan yang sering dilakukan masyarakat peserta program hutan rakyat, bukan hanya pertemuan yang sifatnya musyawarah dan bercerita satu sama lain tentang program hutan rakyat yang sedang dijalani. Tetapi bentuk pertemuannya ada yang bersifat rapat rutin antar anggota kelompok tani dan juga pertemuan dalam lingkup Yasinan. Pertemuan ini menurut subjek telah membuat desa menjadi aman. Dikarenakan ikatan antar masyarakatnya kuat dan pendapatan masyarakat juga baik, sehingga angka kriminalitas pun berkurang.

Kemandirian masyarakat dari hanya mengharap dan menerima bantuan dari pihak luar, semakin berubah dengan semakin membaiknya perekonomian mereka. Mereka secara swadaya membangun fasilitas umum untuk pendidikan seperti TK dan TPA, dan gedung pertemuan untuk kelompok tani. Kemandirian inilah sebenarnya menjadi tujuan utama dari pembangunan. Masyarakat diberdayakan pada awalnya, kemudian mereka mandiri dan selanjutnya dapat membantu pemerintah dalam melengkapi kebutuhan mereka sendiri.

Program hutan rakyat telah menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat Desa Pualam Sari Ray-12. Kalau dulunya mereka harus mencari pekerjaan hingga keluar desa dan luar daerah, sekarang pekerjaan di desa sudah tersedia. Dengan bekerja di desa, maka masyarakat menjadi mempunyai lebih banyak waktu untuk berkumpul keluarga dan tentunya dengan tetangga sekitar rumah. Sekarang mereka mengatur sendiri waktu kerjanya, apakah mau berangkat pagi atau agak siang, apakah sebentar atau lama di kebun. Demikian pula penghasilan yang didapat, semakin rajin memelihara kebun karet, maka hasil getahnya semakin banyak dan baik. Rasa percaya diri dan kemandirian dalam pengaturan waktu sangat mempengaruhi kehidupan bermasyarakatnya. Mereka menjadi lebih sosial, toleransi dan saling menghormati.

"Terutama karet jelas menghidupi masyarakat, pengangguran tidak ada karena semua punya pekerjaan masing-masing di ladang atau kebun karet. Dalam harga rendah (Rp. 5000/kg) seperti minimal 1 KK mendapatkan 50 ribu untuk 1 hektar. Lapangan kerja tersedia. Keuntungan lain, masyarakat diajak membangun sarana sosial (langgar, mesjid, gedung) menjadi mudah karena masyarakat punya penghasilan. Pembangunan sekolah TK dan gedung serbaguna dibangun secara mandiri. Membangun langgar dan gapura per RT bisa dibangun secara mandiri. Keamanan dari kriminal tidak ada, Keamanan hampir tidak ada, kebakaran dulu sering terjadi, dengan adanya

hutan rakyat kebakaran hutan tidak terjadi lagi, jika pun ada masyarakat. Masyarakat cepat-cepat memadamkan jika terjadi kebakaran karena lahan karet merupakan sumber penghasilan. Masyarakat semakin rajin melaksanakan ritual keagamaan". (S2.B)

Dengan perekonomian yang meningkat membuat lingkungan terjaga dan hutan tetap asri. Hal ini dikarenakan pendapatan meningkat membuat tidak ada lagi masyarakat yang membakar hutan untuk mendapatkan kayu, yang kemudian dijualnya dan menghasilkan uang. Program hutan rakyat membuat masyarakat sadar akan pentingnya hutan, sehingga masyarakat menjadi tanggap dan sigap terhadap apa yang terjadi di hutan. Kesigapan dan kecepat-tanggapan masyarakat ini menurut subjek terlihat saat terjadi kebakaran hutan (karena faktor alam ataupun kelalaian manusia), masyarakat langsung cepat-cepat berusaha memadamkannya. Kesigapan dan kecepat-tanggapan masyarakat ini karena mereka sadar bahwa hutanlah yang menjadi tempatnya menggantungkan hidup. Hutan adalah sumber penghasilan dan sumber kehidupan bagi peserta program hutan rakyat.

"Perilaku masyarakat berubah, dulu sektor kehutanan tidak begitu peduli mungkin hanya beberapa orang, sekarang hampir semua masyarakat paham tentang kehutanan. Dari sisi fisik, dulu alang-alang sekarang jadi hijau dan tanaman ada dimana-mana. Ada yang namanya dampaknya, dulunya hanya kelompok Pa Wijayat, sekarang meluas sampai ke desa lainnya. Ekonomi, mereka yang panen tanaman kayu, seperti sengon dan mahoni ada perubahan pendapatan. Mereka tidak asing lagi dengan tanaman kehutanan berkayu". (Informan Pendukung)

Di atas adalah pendapat dari informan pendukung yaitu penyuluh kehutanan yang menangani program hutan rakyat di lokasi penelitian. Penyuluh menyadari bahwa sejak diberlakukannya program hutan rakyat pandangan masyarakat tentang hutan berubah. Masyarakat menjadi mengerti masalah hutan karena mereka telah memahami hutan yang menjadi gantungan kehidupan mereka. Lingkungan terjaga, yaitu keberadaan dan kehijauan hutan terjamin, secara langsung disadari masyarakat berarti juga menjamin kehidupan mereka dan keluarga.

"Kami di kampung ni mananam banih wan gatah, mamalihara wan mamanen tu gawi sabumi aja laki bini. Kakanakan mun pina ganal umpat jua manggani i". (S3.A)

(Kami di desa ini dalam mengelola lahan, baik menanam padi dan karet, memelihara tanaman dan mengambil hasilnya dikerjakan bersama-sama suami istri. Anak-anak yang sudah agak besar juga ikut membantu keluarga).

"Kami para istri Pa' ikut membantu menyadap karet, menyediakan sarapan bapak-bapaknya dan mengurus anak. Kami memang tidak ikut menanam di kebun karena tenaga kelompok tani cukup tersedia" (S5.B)

Program hutan rakyat juga menyebabkan adanya pembagian kerja secara seksual pada masyarakat setempat. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yaitu, laki-laki lah yang mengambil hasil produksi dan perempuan ikut membantu mengambil hasil getahnya dan kemudian menjual hasil produksi getah yang diperoleh. Walau ada kalanya laki-laki dan perempuan bersama ke kebun untuk mengerjakan atau mengambil hasil produksi, namun kebanyakannya yang menjual hasil karet tetaplah dari pihak perempuan. Kebersamaan antara laki-laki dan perempuan dalam mengelola ladang dan kebun karet menggambarkan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan, mereka saling melengkapi.

Namun ada sisi yang patut disayangkan dari penerapan program hutan rakyat di Desa Malilingin. Pembagian hasil 70:30, yaitu 30 untuk pemilik tanah dan 70 untuk orang yang mengerjakan tanah tersebut, membuat sebagian masyarakat di Desa Malilingin mengambil tenaga kerja dari keluarga sendiri. Tenaga kerja yang diambil yaitu anak-anak mereka sendiri. Ini dilakukan agar keuntungan yang didapat bisa maksimal dan anak memiliki mata pencaharian. Ikutnya anak yang merupakan usia sekolah dalam perkebunan karet ini membuat mereka (anak-anak) tersebut mengenal yang namanya uang (mencari uang). Sehingga hal ini membuat mereka malas untuk bersekolah. Informan kunci menjelaskan perihal keterlibatan anak-anak dalam penyadapan karet sebagai berikut :

"Kami baladang dan bakabun gatah gawi sabumi ja sarumahan. Kakanakan mun pina sudah ganal, biasanya kami bawa mamantat gatah. Kakadang kada turun ka sakulah karena umpat mamantat ka kabun gatah. Kami mambawa kakanakan sambil malajari mencari duit, jua karena tanaga kami pas-pasan. Handap maupahakan pina kadada nang maunya, napa sama pada baisi kabun gatah. Sakulah panting pang, cuma mambantu mencari duit panting jua. Jadi mun lulus isdi (SD) cukup haja, kacuali kakanakannya pina handak manarusakan, baik jua pang sakulah tarus". (IK.ML)

(Kegiatan berladang dan berkebun karet dikerjakan bersama-sama satu keluarga. Anak-anak yang beranjak besar diajak ikut menyadap karet. Kadang mereka tidak masuk sekolah karena ikut menyadap karet. Kami mengajak anak-anak sebagai pembelajaran untuk cari uang, juga karena tenaga kerja yang tersedia terbatas. Kami bisa aja mengambil tenaga diluar keluarga, tapi untuk desa ini masing-

masing keluarga mempunyai kebun karet. Sekolah memang penting, namun membantu mencari uang bagi keluarga juga penting. Jadi, kalau bisa lulus SD sudah cukup, kecuali kalau anak-anaknya mau melanjutkan sekolah lebih tinggi, kami juga mendukung).

Problem muncul dari sisi peningkatan sumberdaya manusia yang semakin menurun akibat tidak melanjutkan sekolahnya (ke SMP), yang disebabkan oleh aktifitasnya mereka bekerja sebagai penyadap karet junior. Kondisi ini telah mengakibatkan menurunnya ketersediaan SDM yang berpendidikan di Desa Malilingin. SDM yang tentu akan berimbas kepada penerimaan inovasi baru yang akan semakin sulit. Mereka sudah merasa mapan dengan pengalaman turun temurun dan memang hasil menyadap karet telah mencukupi kehidupan dasar dan sebagian sekunder mereka. Namun, dari sisi program pemerintah yang ingin memberikan pendidikan yang setinggi-tingginya kepada masyarakat menjadi kontra produktif.

Mengutip pendapat Kepala Sekolah SDN Malilingin (Bapak Suprianto, S.Pd) berkaitan dengan pendidikan di desa tersebut adalah :

"Kami tidak bisa menyalahkan masyarakat kalau anaknya tidak meneruskan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi, karena pendapatan dari mamantat karet telah mencukupi kebutuhan hidup mereka, juga karena dari ketersediaan tenaga kerja yang terbatas, sehingga mereka sekeluarga harus terlibat dalam kegiatan perladangan dan berkebun karet tersebut".

Dilain pihak, pendapat subjek tentang pendidikan di desa mereka :

"Kami ni handak ai manyakulahakan kananakan ka is im pi (SMP), tapi kanakannya nang kada mau lagi malanjutakan sakulah, inya sudah marasa nyaman wan gawian mamantat gatah wan bahuma. Jua mun kananakan sakulah barata an, nang kaya apa kami mau urusi pahumaan wan kabun gatah nang ada ni? Mungkin haja kaina mun urangnya banyak wan gatah ba sadikit mungkin ai kananakan sakulah lagi"(S5.A)

(Kami sebenarnya ingin menyekolahkan anak-anak kami ke SMP, namun anak-anak tidak mau lagi melanjutkan, sepertinya mereka sudah senang dengan kerjaan mamantat karet dan berladang. Jikalau anak-anak kami sekolah semua, siapa yang membantu kami mengelola ladang dan kebun karet kami ini? Mungkin nanti kalau luas lahan berkurang dan penduduk bertambah anak-anak akan sekolah lebih tinggi)

Dari kedua ungkapan di atas, setidaknya ada kesamaan pendapat bahwa anak-anak merupakan salah satu sumber tenaga kerja bagi keluarga. Selain itu, dari sisi pendapatan, mereka merasa bahwa

hingga saat ini kebun karet dan ladang pertanian sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Inilah fenomena paradoks antara masyarakat peserta program hutan rakyat di Desa Malilingin dan di Desa Pualam Sari Ray-12. Desa Malilingin yang dihuni oleh penduduk asli suku Banjar, sedangkan desa Pualam Sari Ray-12 adalah desa yang dihuni para transmigran. Perbedaan ini membawa pada perbedaan penginterpretasian tentang pendidikan. Bagi masyarakat Malilingin peserta program hutan rakyat, keberhasilan dalam program hutan rakyat dengan bertambahnya lahan sadapan menyebabkan kurangnya tenaga yang tersedia. Jika pun ada, maka persentasi pembagian yang 70:30 membuat mereka berpikir ulang untuk memperkerjakan tenaga dari luar keluarga. Walau sebenarnya mereka juga ingin anaknya bersekolah, namun anak yang telah mengenal bekerja dan menghasilkan uang, lebih memiliki ikut bekerja agar memiliki penghasilan sendiri untuk dapat mencukupi kebutuhan mereka. Sedangkan untuk masyarakat peserta program hutan rakyat dari desa Pualam Sari Ray-12, berpikir bahwa pendidikan untuk anak itu penting, dan pendidikan merupakan jaminan masa depan anaknya. Mereka memprioritaskan pendapatan hasil program hutan rakyat untuk biaya sekolah anak, sampai anak mereka sarjana.

2. Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Peserta Program Hutan Rakyat

Perubahan ekonomi masyarakat peserta program hutan rakyat dapat diamati dari perlengkapan rumah tangga yang ada, bentuk rumah, sarana umum dan hasil penjualan dari karet itu sendiri. Selain itu tentunya berasal dari pengakuan dan penuturan informan kunci dan para subjek yang ditemui saat penelitian berlangsung.

"Adanya program hutan rakyat pendapatan kami batambah, karena bibitnya unggul wan nyaman manyadapnya karena ba aturan tumbuhnya. Kami kawa nukar kandaraan wan mambaiki rumah. Mangawinakan anak kada ngalih lagi, duit cukup aja. Banyak jua nang kawa naik haji, biasa dikiau haji gatah".(S3.A)

(Keberadaan program hutan rakyat dapat menambah pendapat keluarga, karena bibit yang digunakan unggul dan mudah di sadap karena ditanam beraturan. Kami bisa membeli kendaraan roda dua dan memperbaiki rumah. Kami mudah mengawinkan anak-anak karena uang cukup tersedia. Malah ada yang naik haji dari hasil penjualan getah karet, biasanya kami panggil "Haji Gatah")

Program hutan rakyat bagi sebagian subjek merupakan sarana menambah pendapatan, sebab bibit yang ditanam unggul dan mudah pula disadapnya karena penanaman yang teratur dengan jarak tanam 3 x 5 meter. Dengan hasil penjualan getah karet mereka mampu membeli kendaraan roda dua, mengawinkan anak-anaknya. Juga mampu untuk membiayai perjalanan haji ke Mekkah, yang merupakan dambaan setiap umat muslim.

"Lahan kosong menjadi tanaman produktif sehingga ada perubahan pendapatan. Taraf ekonomi masyarakat, dulu rumahnya standar transmigrasi sekarang sudah diperbaiki, misalnya model spanyolan". (S1.B)

Subjek merupakan seorang transmigran dari pulau Jawa, melakukan transmigrasi tentunya dengan niatan untuk memperbaiki taraf hidup diri pribadi dan keluarga. Transmigran di lokasi penelitian memiliki rumah yang standar mirip semua, sebut tipe rumah sederhana. Namun subjek mengikuti program hutan rakyat membuatnya menjadi mampu memperbaiki rumah. Rumah mereka pun sekarang menjadi lebih baik dan nyaman setelah diperbaiki menggunakan penghasilan sebagai petani hutan rakyat.

Lahan kosong yang dibiarkan tanpa tanaman merupakan gambaran bahwa tidak produktifnya masyarakat tersebut. Tumbuhnya tanaman potensial seperti Jati dan Mahoni di lahan pekarangan dan lahan 1 adalah hal positif yang terlihat dari program hutan rakyat. Bertambahnya tanaman karet produktif yang dapat disadap oleh masyarakat akan berdampak pada peningkatan pendapatnya, sehingga mereka bisa, melengkapi perabotan rumah tangga, termasuk membeli kendaraan roda dua, tidak kredit alias *cash* lagi. Hal ini menggambarkan salah satu perubahan perekonomian rumah tangga anggota kelompok tani program hutan rakyat.

"Kalau saya hitungannya, tani menjadi bisnis pengumpul. Dulunya sebagai petani biasa, sekarang semakin sibuk. Dulu tidak ada bibit sekarang ada bibit kita tinggal mengerjakan saja dan memelihara. Dulu memelihara kambing juga, sekarang tidak mampu lagi karena mengurus pengumpulan karet". (S3.B)

Perubahan pekerjaan yang dulunya hanya sekedar petani biasa menjadi pebisnis pengumpul getah karet juga salah satu indikator perubahan ekonomi yang terjadi. Adanya peluang jadi pengumpul getah karet dari masyarakat desa tentunya akan menambah peredaran uang di desa tersebut. Peredaran uang yang tinggi dapat dilihat dari jumlah karet yang dikumpulkan setiap harinya. Menurut Bapak Bambang (S3.B), setidaknya setiap hari mengumpulkan getah karet sebanyak 5

ton, kalau hujan sekitar 4 ton saja, namun jika hari panas dan tanggal merah, bias mencapai 6-7 ton.

"Kalau penilaian pribadi, sangat membantu kehidupan, karena udah bisa menyekolahkan anak hingga kuliah. Sekarang udah bisa punya sepeda motor". (S1.A)

Bagi sebagian subjek hasil dari penyadapan karet yang dikembangkan oleh program hutan rakyat ternyata telah mampu membiayai anak-anaknya sekolah, hingga jenjang perguruan tinggi, mereka juga mampu membeli kendaraan roda dua untuk mendukung kegiatan anak-anaknya ke SMA. Pendidikan yang tinggi dari anak-anak dapat menggambarkan kemampuan ekonomi yang memadai pula.

Subjek menyadari bahwa sejak ia mengikuti program hutan rakyat ada banyak perubahan yang terjadi dalam hidupnya dan keluarga. Sebagai seorang transmigran, subjek jelas memiliki tujuan, yaitu berusaha sebisa mungkin memperbaiki kualitas hidup dirinya pribadi beserta keluarganya. Subjek menyadari bahwa dengan hanya mengumpulkan uang semata bukanlah sebuah jaminan masa depan dan hari tuanya kelak. Sehingga penghasilannya dari program hutan rakyat tidak hanya dipakai untuk membeli alat transportasi, memperbaiki rumah dan membeli perabotan serta kebutuhan lainnya. Namun subjek menyadari akan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Oleh karena itu sebagian dari penghasilannya dipakai untuk menyekolahkan anak-anaknya agar kelak bisa menjadi sarjana. Inilah yang dipikirkan subjek untuk masa depan anak-anaknya dan hari tuanya kelak.

Tipe seorang transmigran adalah tipe orang yang kuat, yaitu kuat dalam pengalaman hidup dan kuat dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan, terutama dalam hal ini yaitu perubahan geografis dan sosial dikarenakan perpindahan daerah tempat tinggal. Subjek menyadari dengan benar bahwa perubahan akan terus terjadi. Ia juga menyadari bahwa jika ingin bertahan dalam arus perubahan yang ada maka harus siap dengan perubahan itu. Kesiapan subjek dengan perubahan terbukti dengan perkataan subjek seperti diatas. Pola pikir subjek yang terbuka akan perubahan membuatnya ingin maju dan ingin memiliki kemampuan bersaing.

Penuturan subjek yang mengatakan lahannya sekarang bertambah luas dari sebelumnya dapat diartikan bahwa mereka mampu membeli lahan baru untuk ditanam tanaman yang produktif. Juga kemampuan untuk merehab atau memperbaiki rumah asal menjadi rumah yang mempunyai model atau mengikuti perkembangan bangunan dapat pula menggambarkan kemampuan ekonomi keluarga tersebut.

"Desa juga semakin tentram dan tidak ada gangguan. Alam semakin dingin dan rimbun". (S4.B)

Perubahan perasaan tenang masyarakat karena tercukupinya bahan kebutuhan pokok dan sekundernya juga membuktikan mereka secara ekonomi cukup memadai atau malah lebih bila dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya yang berusaha di bidang lainnya. Masyarakat tenang akan menimbulkan gairah kerja yang semakin tinggi dan ini sebagai dasar dalam membangun motivasi untuk pembangunan selanjutnya.

"Yang hilang tidak ada. Yang nambah ada, dulunya jalan untuk ke lahan HR tidak ada dengan gotong royong bisa membangun jalan dan jembatan secara swadaya. Yasinan semakin rutin karena masyarakatnya bertempat tinggal di desa tiap malam Jumat. sebulan sekali ada pertemuan warga perblok per RT". (S3.B)

Membangun desa secara swadaya atau mandiri dapat diartikan bahwa kelompok masyarakatnya mampu dalam perekonomian. Mereka tidak saja dapat mencukupi diri sendiri, untuk kepentingan bersama pun mereka mampu berbuat dengan mengeluarkan dana bersama. Meskipun membangun jalan dan jembatan semestinya bagian dari pemerintah, namun karena mereka mampu untuk mengerjakan dan membiayai sendiri, maka mereka melaksanakannya secara swadaya.

"Dulu sebagai buruh tidak tetap atau merantau menjadi buruh bangunan di luar desa, hampir 80% lalakinya keluar desa cari uang. Pendapatan tidak pasti. Sekarang hasil getah karet bisa di panen setiap hari dengan sistem giliran lahan, yaitu 1 hari sadap 2 hari istirahat. Kalau kita punya 3 hektar yang hasil, maka panennya jadi tiap hari". (S4.B)

Terbukanya peluang kerja dan berusaha melalui program hutan rakyat telah merubah perekonomian masyarakatnya. Dengan adanya kepastian hasil dari penyadapan getah karet akan membuat mereka mudah untuk merencanakan kehidupan keluarganya ke depan. Suatu rumah tangga yang mampu merencanakan kehidupan keluarganya juga menggambarkan bahwa perekonomian rumah tangganya telah memadai. Jika sewaktu-waktu diperlukan, mereka mudah untuk mendapatkan kredit di bank bila diperlukan hanya dengan menggadaikan sertifikat lahan karetnya.

C. Hambatan Struktural dalam Proses Adaptasi Budaya

Hambatan struktural yang biasanya dihadapi masyarakat umumnya berasal dari kebijakan pemerintah. Beberapa kebijakan pemerintah yang bersifat umum kadang menjadi pendorong bagi masyarakat, namun juga bisa menjadi penghambat bagi kelompok masyarakat lainnya. Hambatan struktural yang dihadapi oleh masyarakat Desa Malilingin berbeda dengan masyarakat Desa Pualam Sari Ray-12. Hambatan tersebut dirasakan sebagai suatu kenyataan yang mau tidak

mau harus dipecahkan oleh masing-masing kelompok masyarakat sesuai dengan kondisi dan kemampuan mereka.

Adapun hambatan struktural selama Program Hutan Rakyat ini dijalankan di Desa Malilingin adalah ketika adanya kebijakan baru dari pemerintah mengenai alur distribusi pupuk. Alur distribusi pupuk yang dahulunya dijual bebas sekarang tidak lagi. Petani harus membentuk kelompok tani dan menyerahkan daftar jumlah permintaan pupuk dalam kurun waktu tertentu, baru pupuk dapat didistribusikan. Sebelum adanya program hutan rakyat, mereka jarang menggunakan pupuk, hanya sedikit orang yang tahu dan mampu untuk membeli pupuk. Pupuk biasanya digunakan untuk tanaman pertanian seperti jagung dan kacang tanah, sedangkan padi mereka jarang menggunakan pupuk kimia.

Hal tersebut kemudian yang mendorong masyarakat desa membentuk kelompok tani, meskipun ada juga faktor-faktor lain seperti dapat membangun jaringan dengan kelompok tani di daerah lain untuk saling bertukar pendapat dan mengetahui perkembangan harga dari hasil-hasil pertanian. Dengan terbentuknya kelompok tani warga juga dapat dengan mudah mengajukan permintaan bantuan ke luar, seperti permintaan bantuan bibit, insektisida dan penyuluhan.

Di Desa Pualam Baru Ray-12 dengan adanya Program Hutan Rakyat ini, masyarakat kemudian memiliki pandangan-pandangan positif mengenai usaha tani mereka, karena yang terjadi selama ini mereka dapat bertahan dari goncangan ekonomi seperti gulung tikarnya perusahaan-perusahaan kayu. Serta ancaman dari aktivitas pertambangan yang mulai mendekati. Masyarakat Desa Pualam Sari sadar betul dengan adanya potensi tambang batubara yang luar biasa di lahan-lahan perkebunan mereka. Jika tanah warga yang ada disini dapat diakuisisi oleh pengusaha pertambangan maka usaha pertanian masyarakat Desa Pualam Sari akan mencapai titik akhir, karena tanah pertambangan tidak akan bisa dipakai lagi untuk pertanian.

Ancaman ini sangat disadari betul oleh masyarakat Desa Pualam Sari. Hal inilah yang kemudian menjadi konflik laten antara masyarakat Desa Pualam Sari Ray-12 adalah keberadaan tambang batubara. Sampai akhirnya masyarakat Desa Pualam Sari mengajukan pemekaran wilayah desa mereka. Selama ini PIR dari PTP XII ada 18 Ray, Desa Pualam Sari termasuk dalam Ray 12 dan yang dijadikan fokus penelitian adalah masyarakat Desa Pualam Sari Ray 12. Masyarakat dari Ray 12 inilah kemudian yang berusaha untuk diadakannya pemekaran wilayah. Dengan pemekaran wilayah maka masyarakat Desa Pualam Sari Ray 12 akan lebih memiliki daya tawar (*bargain power*) untuk berhadapan dengan pengusaha tambang batubara.

Konflik laten inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong motivasi masyarakat Desa Pualam Sari dalam mengembangkan usaha tani mereka, sehingga nanti diharapkan akan dijadikan bahan pertimbangan pemerintah jika akan menggusur lahan pertanian masyarakat Desa Pualam Sari Ray-12 dan menggantikannya dengan industri tambang. Masyarakat Desa Pualam Sari yang tergabung dalam kelompok tani "Jati Jajar" kemudian mulai bergerak untuk mengembangkan usaha mereka mulai dari pertanian dan peternakan. Kelompok ini mulai menimbang-nimbang untuk membuka usaha peternakan yang dikelola secara berkelompok. Dana yang digunakan adalah dana yang berasal dari kas kelompok mereka sendiri. Di sini jelas terlihat bahwa konflik yang dihadapi dan "musuh bersama" yang dalam hal ini adalah pengusaha tambang batubara telah berhasil mempererat kelompok tani itu sendiri.

BAB 9

PERAN DAN MEKANISME LEMBAGA PENDUKUNG PROGRAM HUTAN RAKYAT

A. Peran dan Mekanisme Hubungan Kerja Lembaga Pendukung

Menurut Cohen (1992), peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu. Peran lebih menunjuk pada fungsi, artinya seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran. Dikaitkan dengan peran kelembagaan dalam penelitian ini, maka dapat diartikan sebagai peranan suatu lembaga atau para-pihak dalam program hutan rakyat, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Peranan para-pihak dalam program hutan rakyat, selama ini lebih banyak ditentukan secara normatif oleh Pemerintah, sedangkan masyarakat hanya menerima peran atau kondisi tersebut atau sebagai sesuatu yang "given" dari atas.

Menurut Levinson yang dikutip oleh Syarbaini (2009), peranan mencakup tiga hal, yaitu :

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003), mekanisme merupakan cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya), atau hal saling bekerja seperti mesin (yang satu bergerak yang lain turut bergerak). Dengan demikian maka yang dimaksud dengan mekanisme hubungan kerja lembaga pendukung program hutan rakyat adalah cara kerja yang saling berhubungan antar lembaga terkait, baik langsung maupun tidak langsung untuk mencapai tujuan bersama.

Dari sisi kelembagaan, berdasarkan pengertiannya, kelembagaan adalah aturan main etika, sikap, tingkah laku seseorang atau organisasi atau suatu sistem, sedangkan organisasi merupakan wadah dari kelembagaan tersebut. Kelembagaan sendiri bisa mempunyai beragam arti sesuai dengan bidang ilmu yang diikutinya, seperti: Sosiologi: antropologi berarti sebagai norma, tingkah laku, adat-istiadat; Politik: aturan main; Psikologi: tingkah laku manusia; Hukum: instrumen; ekonomi: biaya transaksi.

Untuk kehutanan/ekologi maka kelembagaan dapat diartikan sebagai suatu analisis sistem lingkungan, struktur dan fungsi produksi untuk produktifitas, stabilitas, sustainabilitas, ataupun pemerataan. Kelembagaan merupakan landasan untuk membangun tingkah laku sosial masyarakat, menghasilkan interaksi, untuk mencapai tujuan bersama, yang didasari aturan dan penegakan hukum, berbentuk organisasi. Secara singkat lahirnya kelembagaan adalah untuk integrasi dan stabilisasi.

Dalam pengembangan Hutan Rakyat, kelembagaan merupakan aturan main yang mengatur hubungan kerja antar para pihak (*stakeholders*) yang terlibat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hasil hutan dengan segala fungsinya dengan menekankan pada partisipasi masyarakat. Di Indonesia, umumnya kelembagaan dibuat oleh pemerintah, sehingga ketika dilakukan pelaksanaan di lapangan banyak yang tidak bersesuaian dengan kelembagaan lokal yang pada masing-masing daerah berbeda-beda. Untuk itu, pengembangan kelembagaan sebaiknya dilakukan dengan pendekatan atau strategi dari atas-ke bawah dan dari bawah-ke atas (*top-down and bottom-up strategies*).

Melalui mekanisme tersebut dapat terjadi tawar-menawar, permufakatan atau kompromi antara masyarakat dengan pemerintah. Selain itu juga akan terjadi komunikasi timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga masyarakat dan pemerintah diharapkan memperoleh informasi yang tepat mengenai berbagai hal sehingga dapat diambil tindakan yang tepat dimana perlu.

Untuk mendapatkan kekuatan (*power*) bagi masyarakat tidak ada jalan lain kecuali melalui organisasi lokal yang telah mereka kenal dan sepakati bersama. Penguatan kelembagaan di masyarakat sangat penting melalui pembinaan secara terencana dan terus-menerus hingga masyarakat mandiri. Masyarakat harus punya posisi tawar yang kuat agar bisa menjadi subjek kegiatan yang kuat, khususnya pengembangan Hutan Rakyat.

Dalam pengembangan kelembagaan Hutan Rakyat yang berkaitan dengan masyarakat, maka langkah yang perlu kita perhatikan antara lain adalah: a) melakukan sosialisasi terhadap orang kunci (*key-person*) seperti tokoh adat, tokoh agama, kepala desa, kepala padang dan

lain-lain, karena umumnya informasi perkembangan masyarakat dapat kita peroleh dari mereka; b) sosialisasi petugas bersama-sama orang kunci kepada kelompok masyarakat yang akan terlibat dalam kegiatan Hutan Rakyat; c) sosialisasi melalui *leaflet*; d) kajian atau identifikasi aspek sosial budaya, khususnya norma dan nilai yang masih dianut oleh masyarakat tersebut; e) analisa sosiologis untuk menangkap pemahaman, aspirasi dan interpretasi yang tersirat berkaitan dengan rencana pengembangan Hutan Rakyat di desa mereka.

Melalui langkah-langkah di atas, maka kita akan dapat membantu atau memfasilitasi kelompok masyarakat dalam menyusun organisasi beserta tugas dan fungsi masing-masing orang dalam sebuah kelompok, misalnya kelompok tani Hutan Rakyat. Kelembagaan yang kita ambil dari masyarakat merupakan metode *bottom-up* yang harus kita lakukan dalam program Hutan Rakyat ini. *Out put* dari kegiatan ini adalah tersusunnya norma dan nilai yang mendukung kegiatan Hutan Rakyat, termasuk organisasinya sebagai wadah dari kelembagaan tersebut.

Tindak lanjut dari hasil identifikasi kelembagaan suatu kelompok masyarakat adalah sebuah produk kebijakan yang disesuaikan dengan peraturan-perundangan yang berkaitan dengan kegiatan Hutan Rakyat (*top-down*). Seperti kita ketahui, kebijakan adalah suatu kepandaian, kemahiran, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Atau bisa diartikan sebagai cara bertindak atau suatu garis haluan untuk mencapai suatu tujuan. Sehingga dapat kita ambil garis merah bahwa kebijakan yang baik akan dihasilkan dari identifikasi kelembagaan masyarakat yang kemudian disesuaikan dengan garis rencana pemerintah, baik pusat maupun daerah. Atau mengutip pendapat Islamy (2009), langkah pertama yang harus dilakukan oleh setiap pembuat kebijaksanaan adalah mengidentifikasi problem yang akan dipecahkan kemudian membuat perumusan yang sejelas-jelasnya terhadap problem tersebut. Keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh proses awal dari pembuatan kebijaksanaan tersebut.

B. Lembaga yang Terkait Program Hutan Rakyat di Desa Malilingin

Identifikasi lembaga atau para-pihak yang terkait langsung dalam pengembangan program hutan rakyat yang dilaksanakan di Desa Malilingin, berdasarkan pengalaman informan kunci dan para-subjek selama ini antara lain adalah: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Pemimpin Pelaksana), Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Tokoh Masyarakat (Aparat desa, Ketua BPD), Penyuluh Kehutanan Lapang (PKL), dan Kelompok Tani Hutan.

Dari kenyataan yang ada, terbentuknya kelompok tani hutan rakyat di Desa Malilingin merupakan inisiatif dan dorongan dari pelaksana program (Pemerintah). Keberadaan kelompok tani merupakan hal penting bagi pelaksana program dalam hal administrasi dan kemudahan dalam penguatan kelembagaan dan sumberdaya manusianya. Karena keberadaan kelompok tani dibutuhkan oleh pelaksana program, sehingga apabila pelaksana program atau proyek berbeda, maka sangat mungkin akan dibentuk lagi kelompok tani yang baru, meskipun kepengurusan dan anggotanya sama saja. Hal ini terekam dari pernyataan informan kunci, sebagai berikut :

"Kalompok tani nang ada di kampung kami ni banyak, tagantung palaksana paruyek, makanya paling kada ada 5 kalompok tani nang ada. Nang mambidikan hanya katua kalompok haja, mun anggutanya hampir sama ai. Kami bagawi program hutan rakyat tu bakalompok, ada 20 urang, ada 25 urang ada jua nang 50 urang. Biasanya tu sabalum manggawi proyek, kami dibari palatihan, khususnya pangurus kalompok. Saingat ulun lah, materinya tu bahari bakaitan wan cara mangatahui bibit gatah unggul, jarak tanam nang baik, cara balingai lahan wan ubat-ubatan, pangaturan kalompok tani wan lainnya". (IK.ML)

(Kelompok tani yang terbentuk di desa ini banyak, tergantung pembawa proyek yang datang, sehingga setidaknya ada 5 kelompok tani yang ada di desa ini. Yang membedakan dari kelompok tersebut hanyalah ketua kelompoknya, sedangkan anggotanya hampir sama saja. Kami dalam melaksanakan program rakyat dalam bentuk kelompok-kelompok, ada yang anggotanya 20 orang, 25 orang ataupun 50 orang. Kebiasaannya sebelum turun ke lapangan, khusus pengurus kelompok tani diberikan pelatihan. Seingat saya, materi yang dulu diberikan antara lain adalah: cara pemilihan bibit karet unggul, jarak tanam yang baik, cara pembersihan lahan dengan herbisida, pengaturan administrasi kelompok dan lainnya).

Keberadaan kelompok tani yang dibentuk oleh pelaksana program ternyata manfaatnya tidak hanya untuk pelaksana program saja, masyarakat pun juga merasakan manfaat dari adanya kelompok tani dalam melaksanakan suatu kegiatan. Menurut penuturan subjek (H. Hamsani) sebagai berikut :

"Kami senang wan pruyek ini yang mambawa gatah unggul gasan di tanam di lahan kami, pas imbah kami bagawi bakalompok di hutan rakyat ni, kami makin rajin batanam gatah, hama babi jua jadi bakurang, mungkin karana luas lahan nang ta buka, wan rami urangnya, jadi babi gair jua ba parak ka lokasi tanaman paruyik". (S3.A)

(Kami senang dengan program ini karena membawakan bibit karet unggul yang di tanam di lahan masyarakat. Setelah kami kerja dalam kelompok di program hutan rakyat, kami semakin rajin menanam karet, hama babi juga menjadi semakin berkurang, mungkin karena lahan yang dibuka cukup luas dan orang yang bekerja dalam waktu bersamaan banyak, sehingga babi takut mendekati lokasi proyek)

Peran lembaga yang disebutkan oleh informan kunci dan subjek tersebut antara lain adalah :

- 1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Pemimpin Pelaksana), berperan untuk mempersiapkan program untuk diusulkan kepada pihak terkait seperti Bupati HSS dan Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan, memimpin pelaksanaan di lapangan dan mengevaluasi kegiatan, sumber dana dari APBD.
- 2) Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan, berperan memproses usulan kegiatan hutan rakyat, mengawasi dan mengevaluasi
- 3) Balai Pengelolaan (BP) Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito merupakan institusi yang langsung di bawah Departemen Kehutanan RI, melaksanakan program hutan rakyat (bagian dari penghijauan) di lahan kritis dengan sumber dana APBN
- 4) Tokoh masyarakat berperan untuk memberikan saran dan masukan dalam penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan dan ikut melakukan pengawasan internal.
- 5) Penyuluh Kehutanan Lapang (PKL) berperan untuk membantu/membina kelompok tani baik administrasi kelompok maupun teknis budidaya, membantu kelompok dalam menyusun RDK dan RDKK dan memotivasi petani untuk lebih baik melakukan usaha taninya.
- 6) Kelompok Tani Hutan Rakyat berperan sebagai pelaksana kegiatan termasuk menyusun rencana dan kegiatan lapangan.

Menurut penuturan para subjek dalam FGD dijelaskan sebagai berikut :

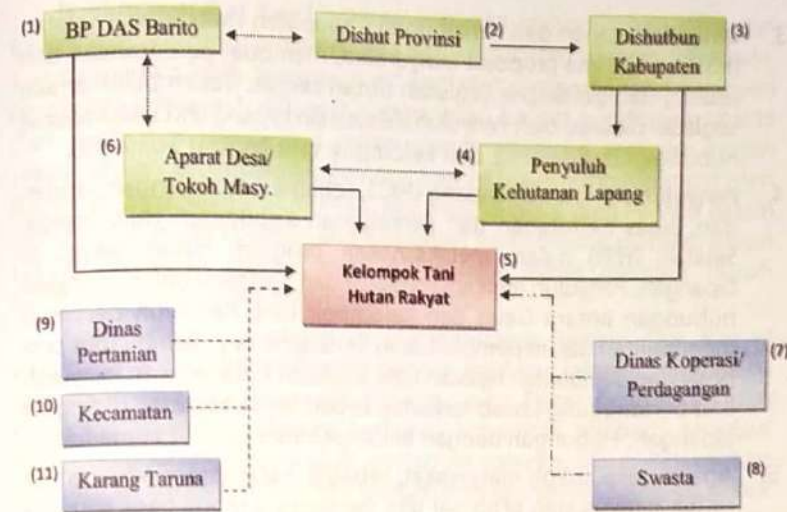
"Beberapa pihak yang terkait langsung antara lain adalah Penyuluh Kehutanan Lapang (PKL) yang berperan memberikan motivasi kepada petanilanggota kelompok tani agar aktif dalam kegiatan di lapangan, membantu menyiapkan proposal yang diperlukan; Pimpinan Pelaksana (Pinlak) berperan membantu dalam bimbingan teknis dan administrasi keuangan; Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten berperan menyiapkan program, pelaksana kegiatan dan penyedia tenaga

penyuluh; Dinas Kehutanan Provinsi berperan menyiapkan program dan melakukan monitoring; Aparat Desa berperan mendorong kelompok tani dalam beraktivitas termasuk administrasi kelompok dan pembuatan proposal; kelompok tani hutan berperan sebagai pelaksana kegiatan".

Ada beberapa pihak yang disebutkan oleh para subjek berkaitan dengan lembaga atau para-pihak yang terkait secara tidak langsung dalam kegiatan hutan rakyat di Desa Malilingin, antara lain adalah: Dinas Pertanian (Penyuluh Pertanian Lapangan), Pemerintahan Kecamatan dan Karang Taruna. Peran Dinas Pertanian adalah menurunkan bantuan teknis tanaman semusim (padi, jagung, kacang tanah) melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Pemerintahan Kecamatan berperan dalam administrasi kelompok, memberikan informasi dan lainnya. Sedangkan karang taruna mendorong para pemuda desa untuk bergiat dalam kegiatan hutan rakyat.

Selain lembaga yang terlibat langsung maupun tidak langsung, maka ada beberapa pihak lainnya yang dirasa perlu dilibatkan untuk mendorong pengoptimalan program hutan rakyat di Desa Malilingin. Para-pihak yang perlu dilibatkan tersebut menurut para responden antara lain adalah: Dinas Perdagangan dan Koperasi, Perbankan dan pihak swasta. Dinas Perdagangan dan Koperasi diharapkan dapat berperan dalam mendorong berdirinya Koperasi di Desa untuk membantu penyediaan sarana produksi pertanian dan penjualan hasil pertanian dan karet. Perbankan membantu dalam penyediaan modal untuk pengembangan lahan. Pihak swasta seperti pengusaha untuk mendirikan pabrik pengolahan karet agar harganya bisa lebih baik.

Dari hasil FGD terungkap bahwa mereka sangat mengharapkan peran para pihak yang sudah terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung agar lebih meningkatkan perannya dalam pembinaan dan koordinasi sehingga keberhasilan program Hutan Rakyat lebih baik lagi yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani. Peran yang telah dimainkan akan sangat dipengaruhi oleh mekanisme hubungan kerja antar lembaga, sehingga peran yang diemban masing-masing lembaga bisa berjalan secara optimal. Mekanisme hubungan antar lembaga dapat dilihat pada Gambar 21.



Gambar 21. Mekanisme Hubungan Antar Lembaga Desa Malilingin

- Keterangan:
- (1) = Nomor urut proses
 - = Garis komando Para-pihak Terkait Langsung
 - - -> = Para-pihak Terkait Tidak Langsung
 - - -> = Para-pihak yang Perlu Dilibatkan
 - ↔ = Garis koordinasi antar Para-pihak Terkait Langsung

Gambar mekanisme hubungan antar lembaga atau para-pihak di atas dapat diuraikan sebagai berikut ini :

1. BP DAS Barito merupakan perpanjangan tangan dari Departemen Kehutanan RI melaksanakan pengembangan program hutan rakyat, dapat secara langsung bekerjasama dengan Kelompok Tani Hutan, juga melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan berkaitan dengan penentuan wilayah yang dipilih sebagai lokasi Demonstrasi Plot (Demplot). Hubungan bersifat koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, dan bersifat komando dengan kelompok tani.
2. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, dikarenakan instansi teknis pusat (BP DAS) sudah melaksanakan program hutan rakyat, maka hanya dilakukan koordinasi untuk wilayah yang bisa dijadikan lokasi hutan rakyat. Hubungan dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) bersifat komando untuk pengawasan, evaluasi dan pembinaan kegiatan yang dilaksanakan.

3. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), menerima proposal masyarakat, membuat perencanaan dan usulan, dan pelaksana kegiatan hutan rakyat. Dalam pelaksanaan kegiatan dibantu oleh Penyuluh Kehutanan Lapang (PKL). Mekanisme hubungan dengan PKL dan kelompok tani bersifat komando.
4. Penyuluh Kehutanan Lapang (PKL), sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dalam melaksanakan program hutan rakyat di lapangan. Penyuluh menjadi mediator dan fasilitator dalam menjalin hubungan antara Dinas dan kelompok tani. Penyuluh berperan memfasilitasi dalam pembentukan kelompok tani, pembuatan proposal dan pembuatan laporan hasil kegiatan hutan rakyat. Penyuluh ikut bertanggung-jawab terhadap keberhasilan kegiatan di tingkat lapangan. Hubungan dengan kelompok tani bersifat komando.
5. Aparat desa/ tokoh masyarakat, sebagai syarat secara administrasi untuk penyusunan proposal dan pendorong moral bagi anggota kelompok tani dalam kegiatan di lapangan, mempunyai hubungan koordinasi dengan kelompok tani.

C. Lembaga yang Terkait Program Hutan Rakyat di Desa Pualam Sari

Menggali interpretasi masyarakat terhadap keberadaan lembaga atau para-pihak terkait dalam pengembangan program hutan rakyat di Desa Pualam Sari Ray-12, dilakukan dengan pendekatan FGD yang menyimpulkan beberapa hal, antara lain :

- 1) Kelompok Tani Hutan "Jati Jajar", sebagai kelompok tani yang terbentuk atas kebutuhan administrasi pemerintahan. Berperan melaksanakan program hutan rakyat di lapangan
- 2) Penyuluh, sebagai bagian dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin. Berperan memfasilitasi pembuatan proposal kegiatan, memberikan bimbingan teknis dan arahan administrasi kelompok
- 3) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin, sebagai *leading sector* di bidang kehutanan tingkat kabupaten. Berperan sebagai penyusun program, pembina dan sekaligus pengawas kegiatan di lapangan
- 4) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai bagian dari pemerintah pusat, melaksanakan pengembangan hutan rakyat melalui sumber dana APBN. Berperan menyusun rencana program hutan rakyat ditingkat provinsi, pelaksana kegiatan melalui Pimpinan Proyek (Pimpro), dan mengevaluasi program hutan rakyat.

Bagi masyarakat Ray-12, peran lembaga pemerintahan desa dan kecamatan, khususnya aparat desa dan kecamatan hampir tidak ada, karena mereka lebih "mengayomi" kegiatan pertambangan daripada pertanian. Lebih jauh dalam FGD tersingkap bahwa pendorong utama dari partisipasi masyarakat dalam pengembangan program hutan rakyat adalah keberadaan kelompok tani Jati Jajar yang dipimpin oleh Bapak Wijayat. Menurut mereka, jika tidak dimulai oleh Pa Wid dalam penanaman lahan kosong yang kemudian berkembang menjadi hutan rakyat, mungkin sampai hari ini mereka masih menjadi buruh bangunan yang selalu meninggalkan desa.

Ada beberapa harapan masyarakat Desa Pualam Sari Ray-12 kedepannya yang berhubungan dengan lembaga lainnya, yang perlu dilibatkan pada kegiatan mendatang, yaitu Dinas Peternakan dan Dinas Perindustrian. Mereka berharap kehadiran lembaga tersebut dapat mendorong diversifikasi pertanian mereka. Dinas Peternakan diharapkan dapat memfasilitasi pengembangan ternak kambing untuk memanfaatkan lahan pekarangan dan makanan ternak yang melimpah. Dinas Perindustrian diharapkan dapat mendorong tersedianya industri kecil untuk kayu pertukangan, agar kayu dari hutan rakyat seperti Jati, Mahoni dan Karet tua dapat dimanfaatkan secara maksimal (tidak dijual batangan).

Dari sisi lain, masyarakat mengharapkan adanya mekanisme penjualan kayu hasil dari lahan hutan rakyat yang mudah, mudah dan cepat. Hal ini berkaitan dengan lembaga Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin maupun Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan untuk memfasilitasi dan menginisiasi kebijakannya, atau malah pemerintah pusat (Departemen Kehutanan) membuat kebijakan yang pro-hutan rakyat.

Mekanisme hubungan kerja lembaga atau para-pihak terkait pengembangan program hutan rakyat di Desa Pualam Sari Ray-12 menurut peserta FGD dapat digambarkan seperti Gambar 22.



Gambar 22. Mekanisme Hubungan Antar Lembaga di Desa Pualam Sari Ray-12

- Keterangan:
- (1) = Nomor urut proses
 - = Garis Komando Para-pihak Terkait Langsung
 - - -> = Para-pihak yang Perlu Terlibat
 - ↔ = Garis Koordinasi Para-pihak Terkait Langsung

Dari gambar di atas, mekanisme hubungan antar lembaga atau para-pihak terkait langsung di Desa Pualam Sari Ray-12 dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Pimpinan Proyek (Pimpro), menerima usulan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin, dan usulan langsung dari kelompok tani untuk pelaksanaan kegiatan hutan rakyat di daerahnya. Usulan selanjutnya diproses dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran untuk kemudian dibuat perencanaan dan dilaksanakan. Hubungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan melalui Pimpro kepada kelompok tani bersifat komando, sedangkan dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin bersifat koordinasi.
- 2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin melalui Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL) menerima usulan dari kelompok tani, merencanakan dan melaksanakan kegiatan

program hutan rakyat di lapangan. Hubungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin melalui penyuluh dengan kelompok tani bersifat komando.

- 3) Dinas Perindustrian dan Dinas Peternakan hubungannya bersifat koordinasi dengan kelompok tani Jati Jajar. Hal ini dalam rangka mengantisipasi produk kayu dari hutan rakyat dan diversifikasi usaha melalui pengembangan peternakan, khususnya ternak kambing.

Mekanisme hubungan para-pihak terkait di atas, selayaknya dipertimbangkan dalam pengembangan hutan rakyat ke depan. Realita yang didapat dari hasil penelitian ini menggambarkan bahwa kelembagaan masyarakat berupa kelompok tani yang kuat dapat mendorong keberhasilan suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Demikian pula dengan lembaga pemerintah (Dinas Kehutanan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD yang terkait) harus secara serius melaksanakan fungsi dan perannya sesuai dengan mekanisme yang ada sehingga berperan dan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu program.

BAB 10

PENAFSIRAN DAN REFLEKSI
TEORITIS

A. Penafsiran Adaptasi Budaya Masyarakat

1. Pola dan Bentuk Hutan Rakyat

Berdasarkan kebijakan yang ada, pola yang dapat dikembangkan pada kegiatan hutan rakyat adalah: 1) pola swadaya, yaitu hutan rakyat yang dibangun oleh kelompok atau perorangan dengan kemampuan modal dan tenaga dari kelompok atau perorangan itu sendiri; 2) pola subsidi, yaitu hutan rakyat yang dibangun melalui subsidi atau bantuan sebagian atau keseluruhan biaya pembangunannya; 3) pola kemitraan, yaitu hutan rakyat yang dibangun atas kerjasama masyarakat dan perusahaan swasta/ koperasi dengan insentif permodalan bunga ringan

Program hutan rakyat yang telah dikembangkan dan dilaksanakan di dua desa penelitian berpola perpaduan antara swadaya dan subsidi. Untuk Desa Malilingin, pada tahap awal program hutan rakyat diinisiasi oleh pemerintah sehingga dapat dikategorikan berpola subsidi. Namun dalam perkembangannya, setelah kegiatan tersebut terlihat manfaatnya, maka masyarakat mengembangkan sendiri kegiatan hutan rakyatnya dengan menyediakan dan membeli bibit dan menanamnya sendiri, sehingga pola ini dapat kita sebut dengan pola swadaya. Sehingga untuk masyarakat Desa Malilingin pola yang hutan rakyat yang berkembang adalah subsidi-swadaya (S2).

Bagi masyarakat Desa Pualam Sari Ray-12, sebelum hadirnya program hutan rakyat di desa mereka, pada tahap awal diinisiasi oleh salah satu anggota masyarakatnya yang menanam tanaman Jati di lahan pekarangan. Bibit Jati diberikan gratis kepada anggota masyarakatnya yang mau memanfaatkan lahan kosong pekarangan masing-masing. Realita ini dapat kita kategorikan pola swadaya. Untuk mendorong gerak lajunya hutan rakyat di desa ini, pemerintah melalui penyuluh kehutanan lapang menawarkan kerjasama bantuan

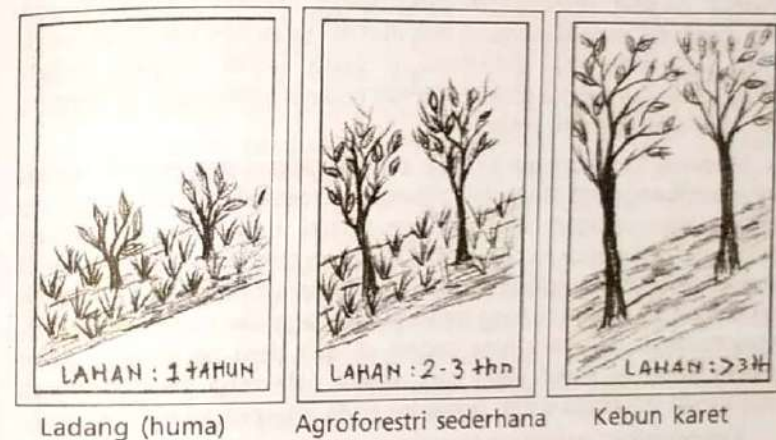
bibit, pupuk dan obat-obatan. Sesuai dengan kesepakatan kelompok, maka jenis bibit yang diminta adalah karet. Adanya bantuan dari pemerintah tentunya suatu keuntungan bagi masyarakat yang baru saja memanfaatkan lahan kosongnya hanya dengan tanaman Jati. Pola bantuan pemerintah yang memberikan bibit karet, pupuk dan obat-obatan ini kemudian kita sebut dengan pola subsidi.

Kegiatan hutan rakyat tidak hanya berkembang karena adanya bantuan dari pemerintah saja, masyarakat Desa Pualam sari Ray-12 terus saja mengembangkan lahannya secara swadaya. Sehingga untuk Desa Pualam Sari Ray-12, pola hutan rakyat yang berkembang adalah swadaya-subsidi-swadaya (S3). Fenomena ini sejalan dengan pendapat Awang (2003), bahwa ada banyak bukti hutan rakyat terbentuk tanpa melalui program pemerintah, namun juga tidak dipungkiri adanya program penghijauan dalam bentuk hutan rakyat semakin memacu munculnya hutan rakyat di desa-desa.

Berdasarkan bentuknya, hutan rakyat dapat berbentuk, antara lain: a) hutan tanaman murni, yaitu hutan yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan, yang seluruhnya ditanami satu jenis kayu-kayuan, dengan menerapkan silvikultur intensif; b) hutan tanaman campuran, yaitu hutan yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan, yang seluruhnya ditanami berbagai jenis kayu-kayuan, dengan menerapkan silvikultur intensif; dan c) agroforestri yaitu manajemen pemanfaatan hutan secara optimal dan lestari, dengan cara mengkombinasikan kegiatan kehutanan dan pertanian pada unit pengelolaan lahan yang sama, dengan memperhatikan kondisi lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sehingga masyarakat dapat berperan serta.

Dari hasil perjalannya, di Desa Malilingin bentuk hutan rakyatnya dapat disebut sebagai bentuk agroforestri sederhana menuju hutan tanaman murni. Hal ini tergambar dari proses terbentuknya hutan rakyat yang berasal dari ladang. Kebiasaan masyarakat berladang yang menanam padi dan tanaman buah-buahan (sebagai cara menandai ada kepemilikan) merupakan salah satu bentuk agroforestri sederhana. Fenomena ini sejalan dengan hasil penelitian Suharjito dkk (2000) yang mengatakan bahwa pola struktur dan komposisi hutan lebih banyak berbentuk *agroforest* atau beragam lapisan tajuk dan jenis produk. Masyarakat pedesaan lebih cenderung memilih aman (*safety first*), baik dari dimensi waktu maupun besaran resiko. Mereka dapat memperoleh produk untuk konsumsi sendiri, untuk kepentingan sosial, untuk pendapatan tunai, untuk tabungan atau pendapatan jangka panjang. Sistem pengelolaan hutan oleh masyarakat bukan hanya mewujudkan orientasi keuntungan individu pengelola, melainkan juga memperhatikan masyarakatnya.

Kemudian dengan adanya program hutan rakyat kebiasaan ini tetap diteruskan oleh pemerintah (melalui pelaksana proyek - pimpinan proyek - penyuluh) menjadi menanam padi, jagung dan kacang tanah, dan tanaman karet (sebagai pengganti tanaman buah-buahan), dan ini tetap berbentuk agroforestri sederhana hingga tanaman karet berumur sekitar 2-3 tahun. Setelah karet berumur dua hingga tiga tahun, maka bentuknya berubah menjadi hutan tanaman murni, yaitu kebun karet. Terbentuknya hutan murni karet di Desa Malilingin disebabkan masyarakatnya memang hanya terbiasa dengan tanaman karet, sedangkan jenis tanaman kayu lainnya seperti jati dan mahoni mereka kurang menyukai, sehingga walaupun telah disediakan bibitnya oleh pemerintah tapi tidak ditanam oleh mereka. Masyarakat hanya mau menanam karet, sedangkan jenis tanaman buah-buahan untuk sekedar untuk tanaman di batas lahan. Sketsa perubahan dari tanaman ladang agroforestri sederhana menjadi hutan tanaman karet dapat di lihat pada Gambar 23 berikut.



Ladang (huma) Agroforestri sederhana Kebun karet

Gambar 23. Proses Perubahan Ladang menjadi Kebun Karet

Pada Desa Pualam Sari Ray-12, bentuk hutan rakyatnya dapat disebut berbentuk hutan tanaman campuran. Hal ini disebabkan jenis tanaman yang ditanam masyarakat pada lahan hutan rakyat tidak hanya satu jenis saja tetapi beberapa jenis tanaman. Jenis tanaman yang terbanyak adalah karet, kemudian jati, mahoni dan buah-buahan. Adanya beberapa jenis tanaman ini disebabkan keinginan masyarakat sendiri, karena mereka berpikir tidak hanya getah karet saja yang dapat mendatangkan uang, tetapi kayu jati dan mahoni pada saatnya akan mendatangkan uang yang besar pula. Kebutuhan akan kayu tentu akan semakin tinggi seiring pertumbuhan penduduk, dan tentu harga jual juga akan semakin tinggi. Mereka juga berpikir

bahwa ke depan anak-anaknya perlu membangun rumah, dan bahannya akan dapat dipenuhi dari hasil hutan rakyatnya sendiri.

Pelaksanaan program hutan rakyat di dua desa penelitian, ternyata memang telah berhasil dengan baik, sesuai dengan penilaian dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2004, terutama dari sisi luas yang ditanam dan pertumbuhan tanamannya. Tanaman dari hutan rakyat, khususnya jenis tanaman karet, selama observasi dilaksanakan, memang terlihat tertanam teratur dan pertumbuhannya baik. Dari sisi luasan lahan yang ditanam, program hutan rakyat oleh bertambah luas dengan adanya tanaman swadaya hutan rakyat oleh masyarakatnya. Hal ini dapat diartikan bahwa terjadi proses dialektika yang positif, yang dibuktikan dengan adanya anggota masyarakat secara massal mengikuti praktek hutan rakyat ini dengan mandiri.

Dari sisi lain yang terlihat adalah perubahan sosial-budaya dan sosial-ekonomi pada masyarakat di dua desa penelitian. Perubahan seperti pola kerjasama, pengaturan jarak tanam, pemilihan jenis tanaman unggul, pendapatan yang cukup, fasilitas rumah tangga yang memadai, anak-anak yang bisa mandiri sejak dini dan anak-anak yang bisa mencapai pendidikan yang lebih tinggi, telah menggambarkan bahwa proses adaptasi budaya telah berjalan dengan baik, meskipun belum sempurna.

Menurut Tjondronegoro (1984), campur tangan pemerintah dalam usaha pembangunan sangatlah diharapkan melalui pendekatan yang diasosiasikan dengan usaha memperbaiki nasib rakyat. Setiap pendekatan memerlukan pengertian terhadap pola-pola interaksi sosial yang ada dan berlangsung secara nyata antara kelompok-kelompok masyarakat yang mendukung berbagai lembaga dan organisasi sosial. Pernyataan ini ternyata juga terjadi di dua desa penelitian, yaitu adanya interaksi sosial yang baik antara pelaksana dengan tokoh masyarakat sehingga dapat berlanjut pada interpretasi yang positif.

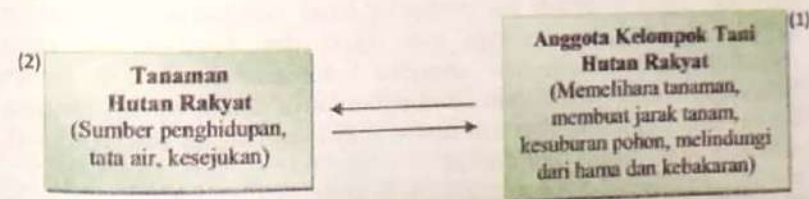
Keberhasilan pelaksanaan program hutan rakyat di dua desa penelitian ini setidaknya telah memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Adanya pelaksana program yang memahami kondisi sosial-budaya dan kebutuhan masyarakat sasaran
- 2) Adanya kesesuaian antara tujuan program dengan kebutuhan masyarakat sasaran
- 3) Adanya tokoh masyarakat yang berpikiran maju untuk pembangunan desanya
- 4) Adanya latar sosial budaya masyarakat yang bersesuaian dengan metode pelaksanaan program di lapangan
- 5) Adanya kesesuaian peraturan perundangan yang terkait dengan keinginan masyarakat sasaran, khususnya penentuan jenis tanaman

- 6) Adanya nilai-nilai kerjasama dan solidaritas yang berkembang melembaga secara informal yang sesuai dengan lembaga bentukan pemerintah
- 7) Adanya dukungan dan kerjasama lembaga terkait untuk mendorong keberhasilan program hutan rakyat yang dilaksanakan
- 8) Adanya apresiasi positif dari pemerintah terhadap keberhasilan yang telah dicapai oleh kelompok masyarakat terhadap program hutan rakyat.

2. Adaptasi Budaya Masyarakat

Memulai pemaparan tentang adaptasi yang terjadi pada masyarakat di dua desa penelitian, maka tidak bisa dimulai tanpa membicarakan hubungan antara makhluk hidup (antara lain manusia) dan lingkungan fisik (antara lain hutan) dalam sebuah ekosistem. Menurut Tucker yang dikutip oleh Hidir (2004) ekosistem adalah suatu ruang lingkungan dimana semua interaksi dan hubungan timbal-balik berlaku di antara segala makhluk hidup dan lingkungan fisik. Pernyataan ini ternyata sesuai dengan realita kehidupan masyarakat yang ikut dalam program hutan rakyat. Masyarakat desa penelitian sebagai makhluk hidup sangat memerlukan keberadaan tanaman hutan rakyat (lingkungan fisik), baik itu sebagai sumber penghidupan (mata pencaharian, lapangan pekerjaan) maupun sebagai perlindungan (pengatur tata air, serangan hama, kebakaran hutan). Di sisi lain, tanaman juga memerlukan manusia yang dapat mengatur pertumbuhannya (melalui jarak tanam, pemberian pupuk) dan memeliharanya (melalui pembersihan sekitar pohon, perlindungan terhadap hama dan kebakaran). Hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antara manusia (anggota kelompok tani hutan rakyat) dan alam (tanaman hutan rakyat) sangat terlihat dalam pelaksanaan program hutan rakyat ini. Hubungan ketergantungan ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 24. Hubungan Ketergantungan Antara Tanaman HutanRakyat dengan Kelompok Tani Hutan Rakyat

Keterangan: (1) = Nomor urut proses
 ↔ = Saling ketergantungan dan memberi manfaat

Gambar di atas juga sejalan dengan pendapat dari Awang dkk (2002) yang menjelaskan bahwa manusia dan alam menjadi bagian yang tidak terpisahkan, manusia memanfaatkan alam sekaligus menjaganya. Alam yang potensinya terjaga dan terpelihara akan memberikan manfaat bagi hidup dan kehidupan masyarakatnya. Pendapat ini ternyata terbukti dalam penelitian ini. Manusia (masyarakat desa penelitian) yang telah menanam ladangnya dengan padi dan karet, ataupun lahan kosong yang ditanami jati dan karet, kemudian memelihara tanaman (alam) tersebut hingga besar dan terlindung dari serangan hama dan kebakaran hutan, telah mendapatkan kehidupan yang cukup dan tenang dari alam yang telah dipeliharanya tersebut. Kehidupan yang cukup dan tenang tersebut dihasilkan oleh alam (sebagian dari tanaman karet), dengan mendapatkan uang yang memadai telah dapat mencukupi kebutuhan primer dan sekundernya, dan malah tertierinya, mendapatkan sumber air yang lebih dari cukup, dan desa menjadi rindang dengan hijauan daun tanaman. Hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa program hutan rakyat yang menjembatani terjadinya hubungan manusia dengan alam tidaklah bisa dipisahkan. Tanpa alam (tanaman hutan rakyat), manusia (anggota kelompok tani) tidak akan mendapatkan apa-apa, dan sebaliknya alam tanpa manusia tidak dapat berkembang dengan baik dan teratur.

Berdasarkan pendekatan perubahan sosial berjenjang yang dibuat oleh Sudharto dalam Karim (1985), maka proses adaptasi budaya masyarakat terhadap program hutan rakyat yang terjadi di dua desa penelitian terlihat berproses secara berjenjang juga sejalan dengan perubahan sosial yang terjadi. Pada tahap awal, terjadi interaksi antara sumber daya alam (lahan tidur dan lahan kosong), sumber daya manusia (anggota kelompok tani hutan rakyat), dan teknologi (program hutan rakyat, yang memperkenalkan bibit unggul, pengaturan jarak tanam, penggunaan herbisida, manajemen kelompok, dan lainnya). Hasil interaksi ini mengakibatkan perubahan sub sistem tingkat pendapatan (adanya hasil karet dan kayu-kayuan yang meningkatkan pendapatan anggota kelompok tani), sub sistem hubungan kerja (perubahan pembagian kerja dalam rumah tangga, sistem pengupahan), dan sub sistem hubungan sosial (keterbukaan, semakin erat, rukun dan damai).

Interaksi ini terus berlanjut hingga jenjang ke-tiga, yaitu terjadinya perubahan sub sistem ekonomi (pemanfaatan lembaga perkreditan, pola pemanfaatan keuangan keluarga), perubahan sub sistem sosial (terlihat pada peningkatan kerjasama dan rasa kekeluargaan, komunikasi antara anggota yang semakin baik, keswadayaan dalam membangun fasilitas bersama/umum, munculnya pranata-pranata baru), dan

perubahan pada sub sistem budaya (untuk Desa Maliling, peladang berpindah menjadi berladang menetap, dari menana karet lokal menjadi karet unggul, dari menanam tanpa aturan n beraturan (jarak tanam); untuk Desa Pualam Sari Ray-12, dari kebiasaan menanam sayuran menjadi hanya menanam tanaman tahunan (karet, jati dan mahoni). Terjadinya perubahan sub sistem ekonomi, sosial, dan budaya yang disebabkan adanya teknologi (program hutan rakyat) ternyata telah menumbuhkan suburkan nilai-nilai yang telah ada yaitu kerjasama (*ba-arian* dan *gugur gunung*) dan rasa kekeluargaan (*bubuhan*), dan juga telah menumbuhkan nilai-nilai baru yaitu keterbukaan antar anggota kelompok tani (transparan). Perubahan-perubahan sosial dalam setiap jenjang di atas telah menggambarkan pula proses adaptasi budaya yang terjadi dalam masyarakat di dua desa penelitian terhadap program hutan rakyat.

Penekanan penelitian ini adalah untuk menggali dan memaknai konsep dari adaptasi budaya yang telah ada, untuk kemudian membandingkan dengan temuan empiris lapangan sehingga dapat menemukan kesamaan ataupun perbedaan konsep yang telah ada dengan hasil temuan penelitian. Mencuplik batasan konsep yang disusun dalam penelitian ini, yaitu konsep adaptasi budaya adalah proses bagaimana suatu individu atau kelompok masyarakat (aktor) berinteraksi dan berinterpretasi, dan kemudian melakukan tindakan terhadap tahapan kegiatan program hutan rakyat yang dilaksanakan oleh pemerintah (subsidi) hingga berkembang menjadi hutan rakyat swadaya. Konsep ini berbasis pendapat Steiner (2002) tentang adaptasi, yakni merupakan sesuatu yang dilakukan melalui kemampuan organisme (manusia) untuk mengatasi keadaan yang ada pada lingkungannya dan memanfaatkan sumberdaya tersebut sekaligus memeliharanya. Kemampuan untuk mengatasi tersebut dapat dicapai melalui pengaturan dari persyaratan-persyaratan dan toleransi terhadap elemen-elemen yang terdapat dilingkungan hidupnya. Bentuk adaptasi budaya masyarakat desa antara lain adalah cara pengelolaan lahan, pembagian kerja, jual-beli, kerjasama dan lainnya.

Hasil temuan penelitian membuktikan bahwa adanya program hutan rakyat yang dikembangkan oleh pemerintah telah membuat masyarakat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah. Program hutan rakyat yang disampaikan pesan-pesannya melalui penyuluh lapangan, pimpinan pelaksana (pinlak), ataupun pimpinan proyek (pimpro), antara lain pengenalan dan pemilihan bibit unggul, cara pembuatan lubang tanaman, pengaturan jarak tanam, pemeliharaan tanaman dan teknik penyadapan telah membuat perubahan pemikiran dan kebiasaan dalam hal penanaman, pemeliharaan dan pemanenan (penyadapan) bagi masyarakat sasaran.

Hal lain yang berubah dari hidup sendiri-sendiri atau hanya dalam kelompok kecil menjadi hidup berkelompok yang lebih besar (25-50 KK). Hal ini terlihat dari interpretasi dan tindakan masyarakat yang sudah menanam bibit karet unggul, mengatur jarak tanam karetnya menjadi 3 x 5 meter, membersihkan tanaman dari gulma, menyadap pohon karet sesuai dengan keadaan batang tanamannya. Mereka juga menyadari dan merasakan dengan berkelompok etos kerja menjadi meningkat, serangan hama menjadi berkurang dan dapat menyikapi pendapat yang berbeda dalam kelompok dengan bijaksana. Uraian ini membuktikan bahwa telah terjadi adaptasi atau penyesuaian diri dari masyarakat terhadap program hutan rakyat yang dikembangkan di desa mereka.

Pasca program hutan rakyat, yakni keberhasilan yang telah masyarakat capai dengan semakin banyaknya tanaman karet yang tertanam dan semakin banyaknya karet yang telah berproduktif di desa mereka, juga telah membuktikan terjadinya perubahan masyarakat terhadap lingkungannya yang berubah. Perubahan sosial budaya terhadap lingkungan yang telah berubah tersebut antara lain adalah: penggunaan tenaga kerja, mereka menjadi lebih efektif dengan melibatkan seluruh anggota keluarganya; penggunaan teknologi dalam meningkatkan hasil produksi; komunikasi antar masyarakat menjadi lebih intensif; terlaksananya peribadatan yang lebih baik; dan terciptanya keharmonisan hubungan antar warga dalam desa; serta masyarakat menjadi semakin mandiri. Perubahan yang terjadi sebagian besar sejalan pula dengan pendapat Haviland (1981) yang mengatakan bahwa aspek perubahan meliputi distribusi lahan-lahan pertanian, pola migrasi dan pola hubungan antara individu (keluarga) dengan tetangga atau masyarakat lainnya.

Menurut prosesnya, Hidir (2004) mengatakan bahwa adaptasi budaya berdasarkan kelakuan baik secara individual maupun kelompok. Adaptasi kelakuan berproses dalam suatu sistem lingkungan dan pada akhirnya melahirkan adaptasi budaya (kultural). Jika kita lihat dari hasil temuan penelitian, maka adaptasi yang terjadi dimasyarakat desa penelitian memang berproses dalam suatu sistem lingkungan dan menghasilkan adaptasi budaya. Bukti empiris dapat kita lihat pada Desa Malilingin bahwa pada awalnya program hutan rakyat diperkenalkan oleh pemerintah melalui pelaksana proyek dan penyuluh, kemudian diikuti oleh tokoh masyarakat dan sebagian warga masyarakat yang terlibat dalam kelompok tani. Setelah program dilaksanakan, ada manfaat yang dirasakan oleh mereka, kemudian diikuti oleh anggota masyarakat lainnya. Fenomena di Desa Pualam Sari Ray-12, proses dimulai dari seorang tokoh (bisa disebut *early adopter*) yang memberikan bibit tanaman secara cuma-cuma kepada

anggota masyarakat sekitarnya untuk di tanam dilahan kosong pekarangan. Kemudian diorganisir melalui penyuluh untuk dikembangkan lebih luas, dan berkembang kepada anggota masyarakat lainnya. Pada kedua desa di atas tentunya melalui proses, pengenalan, pengetahuan, pemahaman, pelaksanaan dan menikmati hasil. Proses ini telah melahirkan adaptasi budaya seperti pola penanaman, etos kerja, cara berinteraksi dalam kelompok, dan kerjasama.

Menurut Steiner (2002), hal yang berkaitan dengan adaptasi dalam ekologi manusia antara lain adalah :

"Adaptation is displayed by "the adequacy of an organism to cope with the conditions of its natural environment and to utilize its resources so as to maintain its ecological position. It is achieved through an adjustment of its requirements and tolerance to the elements of the habitats".

(Adaptasi merupakan sesuatu yang dilakukan melalui kemampuan organisme (manusia) untuk mengatasi keadaan yang ada pada lingkungannya dan memanfaatkan sumberdaya tersebut sekaligus memeliharanya. Kemampuan untuk mengatasi tersebut dapat dicapai melalui pengaturan dari persyaratan-persyaratan dan toleransi terhadap elemen-elemen yang terdapat di lingkungan hidupnya)

Berdasarkan konsep Steiner di atas, maka adaptasi masyarakat di dua desa penelitian yang mampu mengikuti tahapan-tahapan dalam program hutan rakyat subsidi dari pemerintah sekaligus mempertahankannya dengan mengembangkan secara swadaya dapat terbukti secara nyata di dalam penelitian ini. Masyarakat mampu memanfaatkan sumberdaya alam yakni lahan tidur (Desa Malilingin) dan lahan kosong (Desa Pualam Sari Ray-12) melalui program hutan rakyat menjadi lahan yang produktif dan bermanfaat, baik dari sisi ekonomi maupun ekologi. Masyarakat juga telah bertoleransi dengan perubahan lingkungan yang terjadi akibat program hutan rakyat, yaitu dalam pembagian kerja dalam rumah tangga dan kerjasama dalam kelompok.

Menyimak konsep adaptasi yang diringkaskan oleh Hidir (2004), terdapat tiga jenis adaptasi, yaitu :

- 1) Adaptasi fisiologis, berdasarkan kemampuan tubuh (fisik atau fisiologinya) untuk menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan;
- 2) Adaptasi morfologi, berdasarkan atas bentuk tubuh terhadap lingkungan; dan
- 3) Adaptasi kultural, berdasarkan kelakuan baik secara individual maupun kelompok.

Dari ketiga jenis adaptasi di atas, maka baik masyarakat Desa Malilingin maupun Desa Pualam Sari Ray-12 termasuk dalam jenis adaptasi kultural. Adaptasi kultural dapat kita buktikan dari perubahan pengetahuan dan aktivitas masyarakat dalam melakukan kegiatan penanaman, pemeliharaan, dan penikmatan hasilnya. Kemudian perubahan dalam hal hubungan antar warga dalam kelompok dan hubungan dengan pihak luar. Perubahan yang terjadi ini merupakan proses penyesuaian kultural mereka terhadap pelaksanaan program hutan rakyat dan penikmatan hasil program hutan rakyat.

Khusus untuk masyarakat Desa Malilingin, perubahan yang sangat penting untuk disampaikan adalah kebiasaan bertani ladang berpindah menjadi peladang menetap. Dan yang penting kedua menjadi perhatian pula, adalah berkaitan adaptasi penggunaan tenaga kerja internal yang optimal dalam keluarga, yang telah menyebabkan perubahan dalam menyikapi pendidikan anak-anak, sehingga meskipun dana semakin mencukupi, tetapi tingkat pendidikan belum tentu meningkat pula. Hal ini memang sangat berkaitan erat dengan interpretasi atau pemaknaan masyarakatnya terhadap pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan untuk masyarakat Desa Pualam Sari Ray-12, adalah perubahan dari mata pencaharian di luar desa dan tidak pasti menjadi menetap di desa dan hasil yang pasti. Kedua perubahan penting ini tentunya melalui proses adaptasi budaya yang cukup panjang dari masyarakat terhadap program hutan rakyat dan hasil yang dicapai dari program tersebut.

Mengutip pernyataan Weber; Thomson dan Jeremy (1971) yang dikutip oleh Mulyana (2004) bahwa individu bersifat aktif reflektif dan kreatif dan terus berubah sehingga masyarakat pun berubah melalui interaksi. Jadi interaksilah yang dianggap variabel penting yang menentukan perilaku manusia, bukan struktur masyarakat. Pernyataan ini ternyata masih relevan dengan fenomena adaptasi budaya masyarakat lokal dan transmigrasi terhadap program hutan rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan, meskipun juga ternyata struktur masyarakat ikut pula menentukan pengambilan keputusan oleh anggota masyarakat dalam berperilaku. Berdasarkan hasil penelitian, proses adaptasi yang terjadi sangat dipengaruhi oleh interaksi yang terjadi, pun juga oleh struktur sosial yang ada pada masyarakat tersebut.

Jika kita berbicara interaksi, maka interaksi antara penyuluh dengan tokoh masyarakat (seperti Bapak H. Kastani dan Bapak Wijayat) pada tahap awal (sosialisasi program dan kegiatan hutan rakyat) akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program pada tahap selanjutnya. Interaksi yang positif dari tokoh masyarakat akan membawa pengaruh yang positif pula terhadap interpretasi dari anggota masyarakatnya untuk kemudian bertindak atau mengambil keputusan bagi anggota

masyarakatnya. Ketika tokoh dan anggota masyarakat menginterpretasikan positif, maka program yang ditawarkan akan disikapi dan dilaksanakan dengan baik. Pada kondisi ini, maka variabel interaksilah yang berperan penting dalam menumbuhkan interpretasi dan tindakan positif, dan dari situlah mulainya proses adaptasi masyarakat terhadap program hutan rakyat.

Ditinjau dari variabel struktur masyarakat (sosial), ketika pelaksana program (termasuk penyuluh) akan melaksanakan sosialisasi atau memulai kegiatan, tentu mereka akan mempertimbangkan melakukan pendekatan terhadap tokoh yang mempunyai peran dan status (unsur struktur sosial) yang dihargai kelompok masyarakatnya (tinggi) dengan harapan dapat memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan anggota masyarakatnya. Dalam kasus Desa Malilingin pengambilan keputusan pelaksana program dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memilih Kepala Desa yang secara struktur masyarakatnya berada pada level yang tinggi, sebagai *entry point program* ternyata sangat mempengaruhi pengambilan keputusan anggota masyarakat Desa Malilingin lainnya. Hal ini bisa jadi akan berbeda hasilnya jika pelaksana program memilih "orang lain" yang tidak mempunyai peran dan status sebagai pembuka jalan dalam mendorong suksesnya program hutan rakyat di desa tersebut.

Pada Desa Pualam Sari Ray-12, pengambilan keputusan pelaksana program dari Kabupaten Tapin memilih tokoh masyarakat yang telah menjadi *early adopter* di desanya untuk dijadikan *entry point* juga sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan anggota masyarakat lainnya untuk mengikuti program yang ditawarkan pemerintah. Seorang *early adopter* yang berpikiran positif dan ke depan dalam struktur sosial kelompoknya, paling tidak berada pada posisi stratifikasi menengah keatas. Jadi dalam hal ini, pemilihan orang-orang yang berada pada struktur sosial (-peran-status-stratifikasi-) yang tinggi pada kelompok masyarakatnya sebagai pintu masuk akan sangat mempengaruhi pengambilan keputusan anggota masyarakatnya untuk mengikuti atau tidak terhadap suatu inovasi atau program baru. Dengan memilih mengikuti program hutan rakyat dan mengerjakannya dengan aktif, maka dimulailah proses adaptasi budaya tersebut.

Fenomena yang dapat dijelaskan dari realita ini yaitu meskipun latar belakang budaya yang berbeda antara kelompok masyarakat lokal (Suku Banjar Hulu) dengan kelompok masyarakat transmigran spontan (Suku Jawa), namun karena pada masing-masing desa terdapat "seseorang" yang dalam hal ini dapat kita sebut sebagai *early adopter*, maka proses adaptasi budaya masyarakat terhadap program hutan rakyat dapat berjalan dengan baik.

Menurut Moran (1983), *"adaptation is never perfect because environments are always changing, and populations must constantly read just to the new environmental conditions"* (adaptasi tidak akan pernah sempurna, karena lingkungan selalu berubah-ubah, dan manusia harus selalu tetap untuk mengikutinya menuju kepada kondisi perubahan lingkungan yang barunya). Dari pendapat Moran ini, dapat kita pahami bahwa adaptasi akan selalu terjadi sejalan dengan perubahan lingkungan, sehingga adaptasi yang terjadi tidak pernah sempurna dan tidak pernah berhenti. Hal ini juga telah terjadi pada kedua masyarakat di desa penelitian, yaitu adaptasi yang terjadi secara bertahap sejalan dengan tahapan program hutan rakyat yang telah dilaksanakan. Tahapan-tahapan itu meliputi sosialisasi kegiatan, penguatan kelompok tani, penanaman, pemeliharaan, dan hasil yang dinikmati.

Melihat dari sisi teori tindakan Max Weber, kita dapat memulainya dengan membelah teori tindakan rasional Weber, ada baiknya mengutip pemikiran Jones (2003) yang dialih bahasakan oleh Saifuddin (2009), bahwa :

...karena sosiolog juga manusia, mengapresiasi lingkungan sosial di mana mereka berada, memperhatikan tujuan-tujuan warga masyarakat yang bersangkutan dan oleh sebab itu berupaya memahami tindakan mereka. Inilah yang membedakan ilmu sosial dari ilmu alamiah. Bunga anggrek tidak memilih untuk membuka daun-daunnya, apel tidak memutuskan jatuh dari pohon. Ilmuwan alamiah tentu tidak memperlakukan seperti anggrek atau apel untuk menjelaskan perilaku manusia.

Pemikiran di atas memberikan pencerahan untuk mendalami teori tindakan rasional Weber menjadi lebih baik. Pendapat Weber (Jones, 2003; Saifuddin, 2009), kita harus bisa membandingkan struktur beberapa masyarakat dengan memahami alasan-alasan mengapa warga tersebut bertindak, kejadian-kejadian historis secara beruntun yang mempengaruhi karakter mereka, dan memahami tindakan pada pelakunya yang hidup pada masa kini, akan tetapi tidak mungkin menggeneralisasi semua masyarakat atau semua struktur sosial. Sehingga sosiologi seharusnya menggunakan rentang konsep seluas mungkin.

Kemudian, masih menurut Weber, kita harus menguraikan dan menjelaskan realita dengan mengungkapkan dan menekankan sisi pandang kita sebatas tertentu yang menggambarkan dunia yang nyata dengan mengkonstruksi tipe ideal dari realitas. Untuk memahami suatu aspek kehidupan sosial, kita perlu mereduksi kehidupan sosial itu ke dalam apa yang menurut kita esensial, dan dengan

mengungkapkan hal ini orang lain akan tahu persis posisi kita - sudut pandang kita. Alasan di atas, memotivasi penulis untuk menggunakan teori tindakan rasional Weber sebagai pisau analisis dalam menggali proses adaptasi budaya masyarakat terhadap program hutan rakyat, dengan mengetahui dan mengkaji alasan-alasan masyarakat bertindak terhadap pilihan program hutan rakyat yang ditawarkan dan dilaksanakan di desa mereka.

Menyingkap kembali tujuan dari penelitian ini, menggali interpretasi dan proses adaptasi budaya masyarakat yang telah berhasil melaksanakan program hutan rakyat, maka pembahasan teori tindakan rasional Weber ini akan dimulai dengan tipe-tipe tindakan berdasarkan motif para pelakunya. Ada empat tipe tindakan menurut Weber (Jones, 2003; Saifuddin, 2009), yaitu :

- 1) Tindakan tradisional: "saya melakukan ini karena saya selalu melakukannya".
- 2) Tindakan afektif: "apa boleh buat saya lakukan"
- 3) Tindakan berorientasi nilai atau penggunaan rasionalitas nilai: "yang saya tahu hanya melakukan ini"
- 4) Tindakan berorientasi tujuan atau penggunaan rasionalitas instrumental: "tindakan ini paling efisien untuk mencapai tujuan ini, dan inilah cara terbaik untuk mencapainya".

Dari paparan hasil yang telah disampaikan pada bab 8 sub-bab interpretasi subjek terhadap program hutan rakyat, maka interpretasi masyarakat terhadap program hutan rakyat antara lain adalah:

- 1) Aspek ekonomi (menambah penghasilan, memperluas lapangan kerja, meningkatkan produksi atau hasil sadapan, memberikan harapan atau prospek ke depan, menciptakan lapangan kerja di desa, menyediakan kayu untuk bangunan rumah dan dijual)
- 2) Aspek sosial budaya (meningkatkan kerjasama, meningkatkan etos kerja masyarakat, mengenal bibit unggul, pengaturan jarak tanam, dan pembakaran lahan dengan izin, merubah peladang berpindah menjadi menetap, masyarakat mandiri, masyarakat menetap di desa, menguatkan sifat kegotong-royongan, meningkatkan derajat keluarga, membuat desa dan masyarakat tentram)
- 3) Aspek ekologi (mengurangi ancaman dan serangan hama, mencegah kebakaran hutan dan lahan, memanfaatkan lahan kosong, menghijaukan desa, menyediakan air yang cukup meskipun kemarau, memberi ruang kehidupan bagi makhluk tuhan lainnya).

Dikaitkan dengan teori tindakan Weber, maka keterlibatan masyarakat dalam program hutan rakyat berdasarkan tindakan rasional berorientasi nilai dan juga tindakan rasional berorientasi tujuan (rasionalitas instrumental), karena ternyata tindakan mereka mempunyai tujuan-tujuan yang tergabung dalam 3 (aspek), yaitu tujuan ekonomi, tujuan sosial budaya dan tujuan ekologi, pun juga terdapat nilai-nilai yang melatar belakangi tindakannya. Tujuan-tujuan yang berasal dari interpretasi anggota masyarakat terhadap program hutan rakyat telah mendorong mereka untuk bertindak, sehingga program hutan rakyat tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan pemerintah, yaitu masyarakat berperan aktif dalam memanfaatkan lahan tidur dan lahan kosong untuk meningkatkan pendapatan mereka, menyediakan bahan baku kayu dan mengatur tata air, dan tentunya sesuai pula dengan interpretasi mereka terhadap tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial-budaya dan ekologi dengan cara yang efisien dan terbaik.

Khusus untuk hasil penelitian di Desa Malilingin berkaitan dengan kondisi pendidikan anak-anak mereka, maka jika kita mencoba melihat permasalahan ini dari perspektif fakta sosial (teori struktural konsensus), maka berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pencapaian dalam pendidikan sangat kuat kaitannya dengan keanggotaan kelas sosial, gender, dan asal-usul etnik, maka untuk fenomena di Desa Malilingin kesimpulan ini belum dapat diterima, karena hanya dengan menggunakan teori struktural konsensus yang menekankan pada sosialisasi norma dan nilai yang ideal bagi pencapaian pendidikan tidak akan dapat terjawab: *kenapa dengan bertambahnya pendapatan (-kelas sosial menjadi lebih tinggi -) tidak menjadi bertambah tinggi jenjang pendidikan anak-anaknya?* Di sinilah menurut penulis salah satu bukti kelemahan teori struktural konsensus yang tidak mampu menganalisis lebih dalam mengapa pendidikan anak-anak menjadi semakin menurun, padahal dari sisi ketersediaan dana sangatlah memadai. Dengan menggunakan perspektif definisi sosial (teori tindakan rasional instrumental), maka dari makna tindakan masyarakat dapat kita pahami ternyata pendidikan itu menurut mereka sebenarnya hanya untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, jika pekerjaan sudah tersedia dan mencukupi, untuk apa menempuh pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Sehingga tindakan mereka, pendidikan cukup sampai jenjang SD saja, yang penting setelah itu mereka mampu membiayai hidupnya dan untuk berkeluarga.

Dilihat dari teori Interaksi Simbolik (IS), menurut Mead (Meltzer, 1978 yang dikutip oleh Mulyana, 2004), aktivitas tersembunyi (*covert activity*) manusialah yang membedakannya dengan hewan, atau tindakan sosial (*social act*) harus mempertimbangkan aspek tersembunyi

perilaku manusia. Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Menurut Jones (2003; Saifuddin, 2009), para ahli teori interaksi simbolik berpendapat bahwa kehidupan sosial secara harfiah adalah "interaksi manusia melalui penggunaan simbol-simbol". Interaksi simbolik tertarik pada :

- 1) Cara manusia menggunakan simbol untuk mengungkapkan apa yang mereka maksud, dan untuk berkomunikasi satu sama lain (suatu minat interpretif yang ortodoks)
- 2) Akibat interpretasi atas simbol-simbol terhadap kelakuan pihak-pihak yang terlibat selama interaksi sosial.

Dari pendapat ini, pemilihan teknik analisis pembahasan menggunakan pendekatan teori interaksi simbolik Mead dalam membedah dan mengkaji proses adaptasi budaya masyarakat pedesaan hutan terhadap program hutan rakyat dianggap sangat tepat.

Memulai dari pokok pikiran Mead dalam tulisannya *Mind, Self and Society*, maka dalam hasil penelitian dapat dibuktikan keberadaan dari *Mind* (akal budi), *Self* (diri – tervisual dalam tubuh), dan *Society* (masyarakat - tervisual dalam struktur) tersebut. Berdasarkan proses pengembangan hutan rakyat di kedua desa penelitian, pada tahap awal dilaksanakan pendekatan informal (*informal approach*) terhadap tokoh masyarakat yang ada di desa tersebut oleh pelaksana program. Pendekatan informal tersebut sudah memulai terjadinya interaksi antara pelaksana program dengan tokoh masyarakat. Menurut Schutz yang sejalan dengan pemikiran Mead (1964) yang dikutip oleh Mulyana (2004), dalam interaksi tatap-muka makna rangsangan yang dicari dan ditafsirkan oleh sang aktor secara khas merujuk kepada motif aktor lainnya. Motif terbagi dua yaitu "motif untuk" (*in-order-to motives*) dan "motif karena" (*because motives*). Selama proses interaksi, terdapat pertukaran motif antara para aktor yang terlibat. Motif yang tersirat dari masyarakat terhadap pelaksana program dan program hutan rakyat, antara lain: motif untuk, meliputi mendapatkan kehidupan yang stabil dan kehidupan yang lebih baik; dan motif karena, meliputi sebagai bagian dari menjalankan kehidupan leluhur (turun-temurun) dan memelihara tanaman merupakan ibadah kepada Sang Pencipta.

Interaksi dengan pelaksana program tersebut menimbulkan interpretasi dalam diri tokoh masyarakat. Interpretasi ini hanya dapat terjadi melalui akal budi (*mind*). Melalui proses interpretasi, maka tokoh memulai menimbang dan mengukur sisi baik dan buruknya program tersebut jika ia menerima atau menolak. Untuk menerima ataupun menolak, tokoh masyarakat tersebut, selain mempertimbangkan dengan akal budi, juga ternyata menggunakan

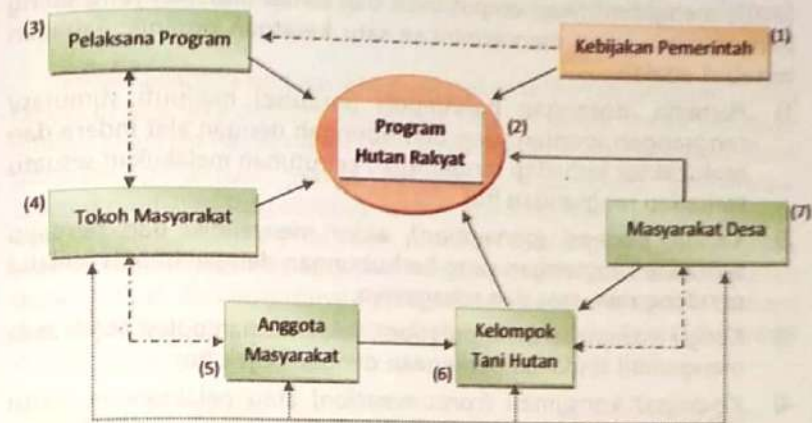
nilai-nilai yang diyakini, seperti mengikuti jejak leluhur, berbuat baik untuk alam, bagian dari ibadah atau beramal untuk akhirat dan lainnya. Di sini muncul yang disebut dengan *Q* (*qalbu* – hati nurani). Perpaduan kekuatan antara *Mind* (akal budi) dan *Q* (*qalbu*) inilah yang dapat menghasilkan pendapat dan tindakan yang tepat, efisien dan dapat terhadap suatu keadaan. Dan ini tidak dapat kita temukan dari pendekatan fakta sosial, yang hanya menekankan pada kekuatan "eksternal", antara lain sistem sosial masyarakatnya.

Pada proses selanjutnya, ketika tokoh masyarakat yang telah melalui proses interpretatif menerima positif program hutan rakyat. Penerimaan itu diwejawantahkan oleh *Self* (tubuh/diri), berupa simbol-simbol dari bahasa tubuh maupun bahasa verbal. Pada saat terbentuknya kesepakatan untuk melaksanakan program hutan rakyat di desa tersebut dengan pelaksana program, maka tokoh masyarakat tersebut melakukan hal yang sama seperti pelaksana program, mendekati dan berbicara tentang program hutan rakyat yang ditawarkan dengan beberapa anggota masyarakatnya yang dianggap mampu untuk diajak mengikuti program yang ditawarkan. Dalam posisi ini, maka anggota masyarakat yang terlibat berada pada *mind* (akal budi). Merekapun melakukan interpretasi melalui pemikiran-pemikiran terhadap program yang telah disampaikan oleh tokoh masyarakat tersebut, juga ada sebagian anggota masyarakat yang mempergunakan nilai-nilai yang diyakini sebagai bahan pertimbangan, yang kita sebut sebagai *Q* (*qalbu*). Proses berjalan antara *mind* dan *Q*, yang kemudian akan menghasilkan tindakan yang terlihat pada *self* (diri) anggota masyarakat yang divisualkan dengan mengambil pendapat dan bertindak untuk ikut bergabung dalam program hutan rakyat yang ditawarkan pemerintah.

Saat terjadi kesamaan interpretasi dan pendapat antara pelaksana program dengan tokoh masyarakat, tokoh masyarakat dengan anggota masyarakat untuk melaksanakan program hutan rakyat, maka saat itu terjadilah *society* (masyarakat) sebagai satu kesatuan, baik wilayah maupun perasaan. Adanya *society* dibuktikan dengan dibentuknya kelompok tani hutan yang melaksanakan program hutan rakyat. Proses antara *Q* and *Mind*, *self*, dan *society* berlangsung terus menerus dalam masyarakat selama program berlangsung, dan inilah yang disebut proses dialektika dalam perspektif definisi sosial. Proses dialektika tersebut terus terjadi di dalam masyarakatnya hingga datang program baru lagi.

Proses adaptasi budaya yang dikaji melalui pendekatan interaksi simbolik yang dilihat dari aktor yang melibatkan pelaksana program dengan tokoh masyarakat, anggota masyarakat, anggota kelompok tani dan anggota masyarakat desa, hingga terjadi interpretasi dan

pengambilan keputusan untuk bertindak serta dialektikanya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 25. Proses Aktor dalam Interaksi, Interpretasi, Tindakan, dan Dialektikanya

- Keterangan: (1) = Nomor urut proses
 - - - -> = Proses interaksi-interpretasi
 ———> = Proses tindakan
 <-----> = Proses dialektika
 <- - -> = Saling berinteraksi-interpretasi

Hasil penelitian membuktikan bahwa pemilihan analisis dengan teori interaksi simbolik Mead dalam mengkaji adaptasi budaya masyarakat merupakan hal yang tepat, dan semakin memperkuat asumsi bahwa untuk sosiologi, penggunaan pendekatan perspektif definisi sosial (*interpretatif*) dapat menggali lebih dalam pemahaman kita terhadap tindakan orang atau masyarakat terhadap sesuatu yang baru. Hal ini juga telah membuktikan kepada peneliti bahwa ternyata benar selama program hutan rakyat berlangsung hingga sekarang telah terjadi tindakan rasional aktor yang tergambarkan melalui interaksi dan interpretasi serta tindakan mereka terhadap kegiatan tersebut. Karena, interaksi, interpretasi dan tindakan selang dalam rentang waktu 3-5 tahun telah menjadi kenyataan atau realitas, dengan keberhasilan program hutan rakyat yang telah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka, maka proses adaptasi budaya dapat dikatakan telah berjalan dengan baik.

Lebih dalam berkaitan dengan tindakan, berdasarkan analisis tindakan, Mead (1939); Schmitt dan Schmitt (1996); Ritzer-Douglas (2003) mengidentifikasi empat basis dan tahap tindakan yang saling berhubungan yang mencerminkan satu kesatuan organik. Tahapan tersebut adalah :

- 1) *Pertama*, dorongan hati/*impuls (impulse)* meliputi stimulasi/rangsangan spontan yang berhubungan dengan alat indera dan reaksi aktor terhadap rangsangan, kebutuhan melakukan sesuatu terhadap rangsangan itu;
- 2) *Kedua*, persepsi (*perception*), aktor menyelidiki dan bereaksi terhadap rangsangan yang berhubungan dengan impuls melalui pendengaran, rasa dan sebagainya;
- 3) *Ketiga* manipulasi (*manipulation*), yakni memanipulasi objek atau mengambil tindakan berkenaan dengan objek itu;
- 4) *Ke-empat* konsumsi (*consummation*) atau pelaksanaan, yaitu mengambil tindakan yang memuaskan dorongan hati yang sebenarnya.

Dari fenomena yang ditemukan, bahwa pada diri masing-masing subjek telah terjadi 4 (empat) tahapan tindakan, baik masih berupa pikiran, perbandingan, maupun tindakan secara fisik. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Tokoh masyarakat yang menerima informasi dan data dari pelaksana program hutan rakyat, mencoba menginterpretasikan program tersebut di dalam akal pikirannya. Pikiran awal ini diproses bersama pengalaman dan informasi lainnya yang berkaitan dengan program pembinaan oleh pemerintah, sehingga menjadi sebuah persepsi. Kebetulan persepsi yang terbentuk dalam pikiran tokoh masyarakat tersebut menyatakan bahwa program hutan rakyat tersebut baik dan mempunyai harapan untuk membawa kebaikan kepada anggota masyarakatnya.
- 2) Persepsi yang telah "jadi" dalam akal pikiran tokoh masyarakat tersebut kemudian ditelusuri kebenarannya secara realita, apakah mungkin menjadi kenyataan atau hanya sebuah wacana saja.
- 3) Persepsi dan kemungkinan "benar" dari beberapa pilihan kemudian direduksi dan dimanipulasi untuk mendapatkan keputusan yang "masih menurut akal" hal tersebut dapat diterima dan dilaksanakan. Manipulasi terjadi terhadap kemungkinan-kemungkinan kegagalan dalam pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan tanaman. Hal ini kemudian direduksi dengan keberhasilan yang bisa tercapai sehingga kehidupan bisa menjadi lebih baik.

- 4) Dari hasil reduksi dan manipulasi yang "matang" dalam pikiran, direalisasikan menjadi tindakan yang nyata, berupa ikut terlibat dan mengerjakan program hutan rakyat bersama dengan kelompoknya.

Proses adaptasi budaya dari masyarakat terhadap program hutan rakyat di atas, jika diasumsikan dalam sebuah sistem, maka inputnya adalah program hutan rakyat, prosesnya meliputi interaksi (sosialisasi program, pertemuan warga, pertemuan kelompok), interpretasi (pemaknaan masing-masing aktor berdasarkan pengetahuan, pengalaman, interaksi), tahapan tindakan (dorongan hati, persepsi, manipulasi, menentukan tindakan), untuk memilih ikut dalam kegiatan hutan rakyat, dan *outputnya* terjadi sebuah perubahan sosial budaya dan sosial ekonomi dalam kerangka adaptasi budaya. Proses ini dapat dilihat pada Gambar 26.

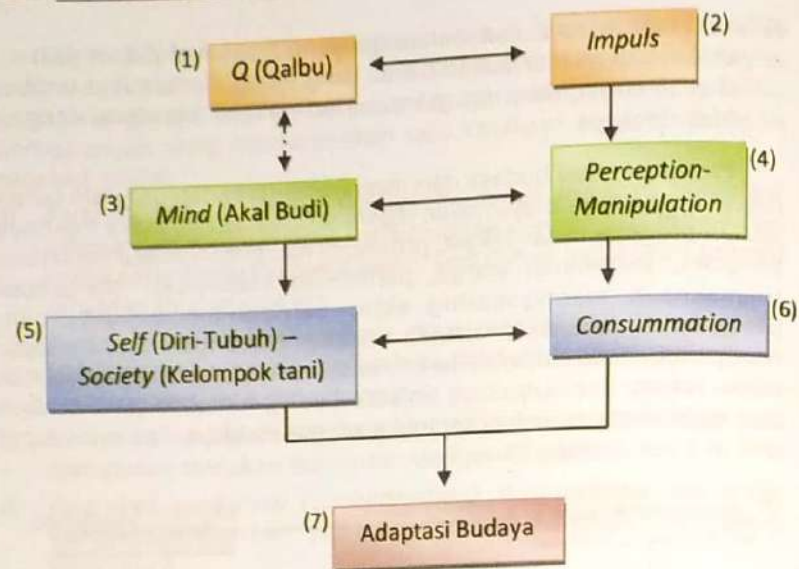


Gambar 26. Adaptasi Budaya dari Pendekatan Sistem (input-proses-output)

Keterangan: (1) = Nomor urut proses

→ = Berproses dan mempengaruhi

Hasil pembahasan antara pemikiran Mead tentang *Mind, self and Society*, yang kemudian ditambahkan oleh peneliti tentang keberadaan Q (*qalbu-nurani*), dikaitkan dengan empat tahapan tindakan Mead, maka ternyata ada hubungan yang saling keterkaitan dalam prosesnya. Hal ini dapat terlihat dalam hubungan antara keberadaan Q, *Mind, Self and Society* pada proses interaksi-interpretasi dengan proses tindakan yang bertahap pada Gambar 27.



Gambar 27. Hubungan Interaksi-Interpretasi dengan Tahapan Tindakan

Keterangan: (1) = Nomor urut proses
 ←...→ = Saling mempengaruhi
 ↔ = Saling berkaitan
 → = Mempengaruhi

Gambar di atas menjelaskan bahwa pada tahap pertama, saat aktor (*early adopter* dan anggota masyarakat) berinteraksi dengan pelaksana program, maka terjadi proses dorongan hati (*impuls*) dalam *qalbu* (Q). Tahap kedua terjadinya dorongan hati (*impuls*) yang mempengaruhi pada akal budi (*mind*), sehingga terjadi pembentukan persepsi dan manipulasi (*perception and manipulation*). Kemudian pada tahap ketiga terjadi pengambilan keputusan, dimana *self* dan *society* bertindak untuk terlibat dan mengikuti program hutan rakyat yang dilaksanakan di desa mereka. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemikiran Mead antara proses interaksi-interpretasi dengan tahapan tindakannya tidaklah terpisah, hanya saja Mead tidak memperkenalkan keberadaan Q (*qalbu*) dalam proses tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata telah terbukti keberadaan Q (*qalbu*) berperan mempengaruhi tahapan tindakan, khususnya tahapan dorongan hati (*impuls*), sehingga unsur Q (*qalbu*) perlu ditambahkan untuk menyempurnakan pemikiran Mead tentang *Mind, Self and Society* dihubungkan dengan tahapan tindakan.

3. Kelembagaan Lokal: Nilai-nilai Kearifan Lokal yang Hidup

Sebagaimana diketahui, bahwa kelembagaan pada intinya adalah untuk keteraturan dan kestabilan, yang berisi norma dan nilai yang disepakati dan dipatuhi. Untuk itu, dalam pembentukan kelembagaan hutan rakyat, perlu diperhatikan norma dan nilai yang berlaku pada masyarakat yang dilibatkan dalam program hutan rakyat. Kata "kelembagaan" menurut Koentjaraningrat, yang dikutip oleh Sahyuti (2007), menunjuk kepada sesuatu yang bersifat mantap (*established*) yang hidup (*constituted*) di dalam masyarakat. Suatu kelembagaan adalah suatu pemantapan perilaku (*ways*) yang hidup pada suatu kelompok orang. Ia merupakan sesuatu yang stabil, mantap, dan berpola; berfungsi untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat; ditemukan dalam sistem sosial tradisional dan modern, atau bisa berbentuk tradisional dan modern; dan berfungsi untuk mengefisienkan kehidupan sosial.

Tiap kelembagaan memiliki tujuan tertentu, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki pola perilaku tertentu serta nilai-nilai dan norma yang sudah disepakati yang sifatnya khas. Kelembagaan adalah kelompok-kelompok sosial yang menjalankan masyarakat. Tiap kelembagaan dibangun untuk satu fungsi tertentu. Karena itu kita mengenal kelembagaan pendidikan, kelembagaan-kelembagaan di bidang ekonomi, agama, dan lain-lain. Dunia selalu berisi kelembagaan-kelembagaan, dan semua manusia pasti masuk dalam satu atau lebih kelembagaan. Dalam bidang pembangunan pedesaan dan pertanian, kelembagaan umumnya dipersempit terutama hanya menjadi kelembagaan kelompok tani, koperasi, subak, kelompok petani peserta program, dan kelompok pengrajin.

Menurut Garna (1996), nilai bukanlah suatu objek, karena itu tak memiliki sifat yang objektif. Nilai atau nilai-nilai merupakan suatu konsep, yaitu pembentukan mentalita yang dirumuskan dari tingkah laku manusia sehingga menjadi sejumlah anggapan yang hakiki, baik, dan perlu dihargai sebagaimana mestinya. Dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada dalam suatu kelembagaan, sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, maka menurut Islamy (2009), pembuatan kebijaksanaan tidak hanya berfungsi menciptakan adanya keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan yang berbeda, tetapi ia juga harus berfungsi sebagai penilai (*valuer*). Setiap pembuatan kebijaksanaan negara untuk tidak bersikap tanpa nilai (*value free*) terhadap masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat, tetapi harus peka dan aktif (*value laden*) berupa mengatasi problem-problem tersebut guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, peran dan

mekanisme hubungan antar lembaga dalam program hutan rakyat perlu diperbaharui sesuai dengan kondisi, norma dan nilai dari kelembagaan lokal yang ada.

Hasil penelitian ditemukan fenomena bahwa kehadiran lembaga kelompok tani hutan di Desa Malilingin lebih disebabkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, dan Balai Pengelolaan (BP) Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito). Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kelompok tani yang terbentuk dengan hanya berbeda ketua kelompok saja, sedangkan anggota kelompok hampir semuanya sama.

Meskipun pembentukan kelompok tani dari atas (*top-down*), namun karena program yang dibawa sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, yaitu penanaman bibit karet unggul di lahan masyarakat, maka kelompok tani bentukan pemerintah tersebut tetap hidup. Dengan berkelompok, ternyata mereka juga merasakan hal yang lebih baik, karena ternyata hama (babi) bisa mereka atasi secara bersama-sama.

Dalam pelaksanaan kegiatan program hutan rakyat, masyarakat Desa Malilingin sangat dipengaruhi oleh arahan penyuluh kehutanan lapang, dan pimpinan pelaksana proyek (*pinlak*) kalau sumber dana dari APBD, serta pimpinan proyek (*pimpro*) kalau sumber dana dari APBN. Kehadiran mereka ini tentunya dalam rangka untuk mendorong suksesnya program yang mereka pegang. Hal ini tentunya memberikan hal-hal baru bagi masyarakat Desa Malilingin, seperti penanaman bibit unggul yang berkualitas, menanam dengan jarak tanam yang teratur, pembersihan lahan dengan menggunakan herbisida, administrasi kelompok, dan lainnya. Hal-hal baru ini menjadi pengayaan tersendiri bagi anggota kelompok tani yang terlibat dalam program hutan rakyat.

Keberadaan kelompok tani di Desa Malilingin sangat tergantung keberadaan proyek itu sendiri. Ketika proyek sudah selesai, maka biasanya kelompok tani tersebut juga bubar. Namun, aturan dan nilai yang sudah terbangun selama kelompok tani tersebut aktif terus hidup dalam kegiatan keseharian masyarakatnya. Setidaknya mereka bisa merasakan manfaat dari, misalnya administrasi kelompok, adanya keterbukaan dan pertemuan-pertemuan yang rutin, dari teknis penanaman dengan pengaturan jarak tanamnya dan lain sebagainya.

Bila kita kaitkan dengan keberadaan kelompok masyarakat dalam pembukaan lahan baru, mereka juga mengerjakan pemilihan lahan, pembukaan lahan dan penanaman secara berkelompok kecil, antara 5-10 KK, yang biasanya diikat oleh pertalian darah atau kekerabatan.

Dalam kelompok yang lebih besar, gabungan dari beberapa keluarga kecil, misalnya untuk acara penanaman padi di ladang, ataupun acara perkawinan, mereka mengerjakan kegiatan tersebut dengan sistem "Ba-arian", yaitu sistem membantu secara bergantian, dan secara moral mereka akan sangat malu kalau tidak ikut, atau suatu saat nanti ketika "seseorang" tidak ikut *ba-arian*, kelak tidak banyak orang membantunya. Selain itu, mereka juga mengenal dengan sebutan "bubuhan", yaitu rasa persaudaraan yang erat yang didasari garis keturunan dan atau teritorial. Menurut Radam (2001), istilah *bubuhan* merupakan petunjuk adanya ikatan berkelompok, rasa kekeluargaan yang erat.

Hal di atas merupakan salah satu tanda bahwa nilai-nilai dalam berkelompok dan kebersamaan dalam bermasyarakat di Desa Malilingin masih ada dan bertahan hingga saat ini. Sehingga ketika pemerintah melalui penyuluh dan pimpinan pelaksana membentuk kelompok tani, mereka menyambut baik dan mengikutinya. Sistem *ba-arian* dan *bubuhan* yang sudah turun menurun mereka lakukan merupakan nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) yang hidup dan tumbuh sejalan dengan kelembagaan formal bentukan pemerintah yang diterapkan dalam bekerja berkelompok dalam wadah kelompok tani yang mengikat mereka untuk saling bekerjasama dan menghormati.

Dapat kita pahami bahwa untuk masyarakat Desa Malilingin, nilai-nilai kearifan lokal yang telah ada yang kemudian berkembang dengan adanya program hutan rakyat, juga ada nilai-nilai baru yang dibawa oleh program hutan rakyat melalui penyuluh dan pelaksana program. Keserasian nilai-nilai lokal yang ada dengan "syarat-syarat normatif" dari pemerintah perlu selalu dipahami oleh kita dalam rangka mendorong keberhasilan suatu program, khususnya yang berhubungan dengan peningkatan partisipasi masyarakat. Adanya keselarasan nilai-nilai kearifan lokal dengan nilai-nilai baru yang dibawa dalam program hutan rakyat telah mempermudah jalannya proses adaptasi budaya yang terjadi.

Hal berbeda ditemukan di Desa Pualam Sari Ray-12, secara informal masyarakat di Ray-12 sudah membentuk kelompoknya, namun untuk tujuan lain, seperti kelompok budaya. Kehadiran kelompok tani hutan di Desa Pualam Sari Ray-12 lebih dikarenakan persyaratan dari pemerintah dalam penyaluran suatu bantuan yang harus dipenuhi oleh kelompok masyarakat. Sejak Bapak Wijayat membagikan bibit Jati secara gratis kepada masyarakat sekitarnya untuk ditanam di lahan pekarangan, maka sebenarnya sejak itulah terbentuk kelompok masyarakat secara informal yang tertarik untuk menanam lahan kosongnya dengan tanaman yang bermanfaat. Jadi, ada atau tidak kelompok tani di Desa Pualam Sari Ray-12 bukanlah suatu yang

penting bagi masyarakat. Namun dikarenakan pemerintah membutuhkan lembaga tersebut untuk pemenuhan syarat administrasi, maka dibentuklah kelompok tani tersebut.

Namun ada satu nilai yang menarik yang patut dijadikan tauladan dan pembelajaran bagi lembaga bentukan pemerintah (seperti kelompok tani), yaitu sistem bantu-membantu untuk mendapatkan lahan dengan meminjamkan sertifikat lahan untuk dijadikan agunan di bank. Di dalam kelompok tani Jati Jajar, ada kesepakatan tidak tertulis untuk membantu anggota kelompok yang belum punya lahan untuk dapat membelinya. Bagi yang sudah ada lahan, maka mereka meminjamkan sertifikatnya kepada anggota lainnya untuk diagunkan di bank atas dasar kepercayaan dan kebersamaan. Uang yang didapat dari bank digunakan untuk membeli lahan ataupun membeli bibit karet unggul, sedangkan pembayaran cicilan melalui upah menyadap di lahan yang meminjamkan sertifikatnya. Biasanya 5 (lima) tahun sudah lunas, dan peminjam sertifikat sudah dapat menyadap di lahan sendiri dan sertifikat sudah dapat dikembalikan ke pemiliknya. Nilai-nilai kepercayaan dan kebersamaan ini ditanamkan oleh informan kunci (Bapak Wijayat) kepada anggotanya dan hingga kini masih terus diikuti. Sistem ini diistilahkan oleh Bapak Wijayat sebagai sistem "Gugur Gunung".

Menurut Koentjaraningrat (2004), nilai-nilai merupakan bagian dari kebudayaan yang berfungsi sebagai pengarah dan pendorong kelakuan manusia. Keluaran dari nilai yang diyakini masyarakat pada akhirnya dapat menjadi sebuah sikap atau tindakan. Konsep sikap bukan merupakan bagian dari kebudayaan, tetapi merupakan suatu hal kepunyaan para individu warga masyarakat. Suatu sikap adalah potensi pendorong yang ada dalam jiwa individu untuk bereaksi terhadap lingkungannya, beserta segala hal yang ada di dalam lingkungannya itu. Sikap individu biasanya ditentukan oleh 3 (tiga) unsur, yakni keadaan fisik dari individu, keadaan jiwanya, dan norma-norma serta konsep-konsep nilai budaya yang dianutnya. Demikian pula yang terjadi di masyarakat desa penelitian, mereka mempunyai nilai-nilai yang diyakini, berlatar belakang pekerja keras, dan mempunyai kebiasaan memelihara alam, maka tindakan mereka terhadap program hutan rakyat menjadi sangat positif dan menghasilkan kebaikan, untuk mereka sendiri dan untuk alam sekitarnya.

Kekuatan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah seperti kelompok tani, selama kegiatan yang dilaksanakan berbasis kebutuhan sasaran atau masyarakat akan dapat bertahan dan berkembang, apalagi jika nilai-nilai lokal sejalan dengan nilai atau syarat yang diatur oleh pemerintah. Menurut pendapat Korten (1982) yang dikutip Widodo

dan Suradi (2008) mengatakan bahwa pembangunan akan mampu mengembangkan keswadayaan masyarakat apabila pembangunan tersebut berorientasi kepada kebutuhan masyarakat (*people centered development*). Pembangunan yang berpusat kepada masyarakat itu dapat direalisasikan apabila memanfaatkan organisasi dan nilai lokal yang ada di masyarakat. Secara spesifik Islamy (2009) merumuskan bahwa bagi pembuat kebijaksanaan negara tidak ada alternatif lain kecuali menjadikan sistem nilai masyarakatnya sebagai pedoman atau landasan dalam setiap proses perumusan kebijaksanaan negara. Hal ini tentu termasuk dalam membangun suatu lembaga di pedesaan yang diperankan untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Hasil penelitian ini dalam hal kelembagaan lokal yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal, setidaknya telah ditemukan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di kedua desa penelitian. Desa Malilingin yang bersifat tradisional memiliki nilai-nilai kebersamaan dan rasa kekeluargaan yang mereka kenal dengan istilah "ba-arian" dan "bubuhan". Sedangkan Desa Pualam Sari Ray-12 yang agak maju, mengenal nilai-nilai kepercayaan dan kebersamaan yang disebut dengan "gugur gunung". Kedua nilai-nilai yang melekat dalam kelompok tani telah mendorong kebersamaan dan persaudaraan, serta etos kerja dan keswadayaan masyarakat dalam membangun desanya, yang tergambarkan dengan keberhasilan melaksanakan program hutan rakyat di desanya masing-masing.

B. Refleksi Teoritis

Merefleksikan kembali teori dan hasil temuan dalam penelitian ini yang telah dipaparkan dalam pembahasan, maka tidak dapat dipisahkan dari teori tindakan Weber dan interaksi simboliknya Mead. Budaya masyarakat di lokasi penelitian yang berbasis pertanian/peladang dan kerja keras telah membuahkan keberhasilan dalam melaksanakan program hutan rakyat di desanya masing-masing.

Masyarakat Desa Malilingin yang merupakan masyarakat peladang dan hidup dari hasil pertanian ladang (*bahuma*) dan berkebun karet, tidaklah diragukan lagi kepandaian dan pengetahuan mereka dalam bidang pertanian dan perkebunan, sehingga ketika ada tawaran program hutan rakyat untuk dikembangkan di desa mereka, tidak terjadi resistensi atau penolakan dari tokoh masyarakatnya. Program hutan rakyat yang telah dikembangkan oleh pemerintah menumbuhkan kesadaran masyarakat akan manfaatnya, sehingga mendorong masyarakat untuk mengembangkan program hutan rakyat tersebut secara swadaya.

Lebih dari itu, setelah program hutan rakyat berjalan di Desa Malilingin, kegiatan perladangan mereka berubah dari sistem berpindah menjadi menetap, sehingga mereka menjadi lebih banyak waktu untuk kebersamaan di desa; penanaman tanaman keras (karet) yang tidak teratur menjadi teratur sehingga tanaman karet menjadi lebih produktif (getah karet semakin banyak); dan bekerja dalam kelompok tani yang jumlah orangnya lebih banyak telah membiasakan mereka untuk saling terbuka dan meningkatkan etos kerja.

Pada kegiatan hutan rakyat juga tidak meninggalkan kebiasaan menanam tanaman semusim seperti padi, kacang tanah dan jagung pada tahun pertama dan kedua di sela-sela tanaman karet. Dari realita ini, maka dapat kita katakan bahwa latar belakang budaya bertani dan berkebun yang sudah ada, menjadi semakin tumbuh dan berkembang dengan adanya program hutan rakyat. Kesesuaian budaya bertani dan berladang masyarakat Desa Malilingin dengan program hutan rakyat telah mendorong proses adaptasi budaya berjalan dengan baik.

Masyarakat Desa Pualam Sari Ray-12 yang merupakan kelompok masyarakat pendatang sebagai transmigran spontan, mempunyai kebiasaan bekerja keras karena persaingan hidup yang tinggi di daerah asalnya (Jawa). Kebiasaan bekerja keras ini menjadi hal yang baik ketika mereka diberi kesempatan untuk mengembangkannya. Melalui kegiatan program hutan rakyat yang dimulai secara swadaya dan kemudian dibantu oleh pemerintah untuk dikembangkan secara meluas, mendorong budaya kerja keras masyarakat untuk mencapai keberhasilan dan mendapatkan hasil yang memadai, sehingga telah mampu memperbaiki tingkat kehidupan mereka. Budaya kerja keras masyarakat transmigran merupakan salah satu faktor penting dalam beradaptasi terhadap program hutan rakyat yang pada akhirnya dapat mencapai peningkatan pendapatan masyarakat.

Program hutan rakyat telah memberikan ruang bagi masyarakat Desa Pualam Sari Ray-12 untuk melanjutkan kebiasaan kerja keras mereka dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Kerja keras yang telah mereka lakukan ternyata membuahkan hasil yang luar biasa, yang dapat meningkatkan pendapatan mereka, sehingga mereka dapat memperbaiki rumah, melengkapi perabotan rumah tangga, menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi, dan membangun sarana umum secara swadaya. Perpaduan antara kerja keras dan hasil yang memadai (aspek ekonomi) telah mendorong masyarakat desa transmigran spontan tersebut untuk mengembangkan hutan rakyat swadaya, dan ini berlangsung secara berkesinambungan dan memberikan dampak yang lebih luas kepada kelompok masyarakat lainnya di luar desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disusun proposisi sebagai berikut :

1) Latar belakang budaya masyarakat merupakan salah satu faktor penting bagi terjadinya proses adaptasi budaya.

Latar belakang budaya saja sebenarnya tidak cukup untuk mendukung proses adaptasi budaya berjalan baik. Sejalan dengan hasil temuan di lapangan, maka proses adaptasi budaya dimulai dari interaksi antara pelaksana program (pemerintah) dengan tokoh masyarakat (bisa disebut *early adopter*) terjadi dengan baik. Keberadaan *early adopter* atau tokoh masyarakat pada desa penelitian telah mempengaruhi dan mendorong anggota masyarakatnya mau terlibat aktif dalam program hutan rakyat.

Proses interaksi (komunikasi-diinterpretasikan-tindakan) antara *early adopter* dengan pelaksana program yang baik untuk menerima program hutan rakyat dikembangkan di desa penelitian sangat menentukan keikut-sertaan anggota masyarakat desa lainnya. Hal ini bisa terjadi ketika pelaksana program tepat dalam menentukan tokoh masyarakat yang didekatinya. Tokoh masyarakat yang dipilih mestinya orang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman hidup luas, dan dimata masyarakatnya sangat dihargai.

Pada tahapan selanjutnya adaptasi budaya terhadap program hutan rakyat berlangsung dengan baik, seiring dengan penerimaan dari anggota masyarakat desa lainnya berdasarkan tindakan dari *early adopter*. Salah satu tindakan *early adopter* adalah menerima dan mau melaksanakan program hutan rakyat yang ditawarkan oleh pemerintah. Dalam proses selanjutnya adalah pembentukan kelompok tani agar pemerintah mudah dalam memberikan fasilitas dan layanan administrasi.

Dari sisi lain, kesesuaian program hutan rakyat dengan kebutuhan masyarakat, seperti pemilihan jenis tanaman karet yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Malilingin dan pemberian jenis tanaman karet, jati dan mahoni yang diminati oleh masyarakat Desa Pualam Sari Ray-12 telah mendorong diterimanya program tersebut untuk dilaksanakan di desa mereka. Juga, kerjasama dalam kelompok tani telah mendorong kebersamaan antara anggota kelompok tani dan antar kelompok tani. Nilai-nilai kearifan lokal yang sudah ada dalam masyarakat seperti "ba-arian" dan "bubuhan" serta "gugur gunung" semakin tumbuh dan berkembang dalam kelompok tani, yang merupakan hasil bentukan pemerintah. Keberadaan kelompok tani telah mendatangkan banyak hal positif bagi anggotanya dan bagi masyarakat desa secara umum, sehingga mendorong keberhasilan pelaksanaan program hutan rakyat.

Keberadaan *early adopter*, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai yang dipatuhi masyarakat, merupakan hal yang penting dan saling mempengaruhi satu sama lainnya dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan program hutan rakyat di kedua desa penelitian. Ketiga hal ini dapat dikatakan sebagai faktor penentu dalam proses adaptasi budaya yang terjadi. Dengan demikian, maka proposisi kedua yang dapat disusun adalah:

2) Adaptasi budaya masyarakat terhadap program hutan rakyat dipengaruhi oleh adanya *early adopter*, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, dan nilai-nilai lokal yang dipatuhi.

Pada kenyataannya, di balik keberadaan *early adopter*, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai lokal yang dipatuhi, yang telah mendorong proses adaptasi budaya masyarakat terhadap program hutan rakyat berjalan secara adaptif, maka peneliti melihat secara mendalam bahwa ternyata semua itu sangat dipengaruhi oleh keberadaan atau "berfungsinya" *Self, Mind dan Q (qalbu)* para aktor (*early adopter* dan anggota kelompok tani). Dalam proses penerimaan program hutan rakyat, telah terjadi proses interaksi, interpretasi dan tindakan yang berjenjang. Tindakan sendiri berawal dari adanya dorongan hati (*impuls*) yang berasal dari keberadaan *Q (qalbu)*, kemudian diolah dalam *mind* (akal budi) menjadi sebuah persepsi (*perception*). Kombinasi dorongan hati dan akal budi menghasilkan sebuah manipulasi (*manipulation*) dalam diri aktor, yang kemudian direalisasikan (*consummation*) sebagai sebuah tindakan yang penuh makna oleh *Self* (diri-tubuh).

Adanya kesamaan interpretasi dan tindakan para aktor tersebut dapat terlihat dengan terbentuknya sebuah kelompok tani, yang dapat kita sebut kelompok masyarakat (*society*), mempunyai tujuan yang sama untuk ikut terlibat aktif dalam program hutan rakyat, sehingga telah mencapai keberhasilan yang nyata.

Fenomena ini telah menghasilkan proposisi sebagai penyempurnaan dari pemikiran Mead tentang *Mind, Self and Society*, yakni dengan menambahkan unsur *Q (qalbu)*, sehingga dapat disusun proposisi sebagai berikut :

3) Kemampuan aktor dalam mengolah *Mind dan Q (qalbu)* untuk menjadi sebuah tindakan bermakna yang diwujudkan oleh *Self dan Society*, telah mampu menerima dan menjalankan program hutan rakyat hingga mencapai keberhasilan dan berkesinambungan

Dari ketiga proposisi yang telah dihasilkan di atas, maka dapat terlihat hubungan yang erat satu sama lainnya. Hubungan erat antar proposisi tersebut saling mempengaruhi sehingga telah mendorong proses adaptasi budaya masyarakat terhadap keberhasilan program hutan rakyat yang dilaksanakan di kedua desa penelitian. Secara detail hubungan antar proposisi-proposisi diatas dapat digambarkan pada Gambar 28.



Gambar 28. Hubungan antar Proposisi dalam Adaptasi Budaya Masyarakat terhadap Program Hutan Rakyat

Keterangan: (1) = Nomor urut proses

→ = Mempengaruhi

BAB 11

IMPLIKASI TEORITIS DAN PRAKTIS

A. Implikasi Teoritis

Penelitian yang dilaksanakan ini telah mendapatkan beberapa implikasi teoritis, sebagai berikut :

- 1) Telah memperkuat konsep adaptasi yang diringkas oleh Hidir (2004), terdapat tiga jenis adaptasi, yaitu: a) Adaptasi fisiologis, berdasarkan kemampuan tubuh (fisik atau fisiologinya) untuk menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan; b) Adaptasi morfologi, berdasarkan atas bentuk tubuh terhadap lingkungan; dan; c) Adaptasi kultural, berdasarkan kelakuan baik secara individual maupun kelompok. Hasil penelitian menemukan bentuk adaptasi budaya masyarakat terhadap program hutan rakyat hanya dalam bentuk adaptasi kultural.
- 2) Telah memperkuat dan menambahkan tesis Weber; Thomson dan Jeremy (1971) yang dikutip oleh Mulyana (2004) bahwa individu bersifat aktif reflektif dan kreatif dan terus berubah sehingga masyarakat pun berubah melalui interaksi. Jadi interaksilah yang dianggap variabel penting yang menentukan perilaku manusia, bukan struktur masyarakat. Hasil penelitian ternyata ditemukan bahwa :
 - a) Dalam proses adaptasi budaya, interaksi dan struktur sosial mempunyai peran yang sama penting, saling mempengaruhi dan saling terkait satu sama lainnya
 - b) Suatu program akan dapat diterima jika terjadi proses interaksi yang positif antara pelaksana dengan tokoh masyarakatnya
 - c) Suatu program akan menjadi adaptif bagi anggota masyarakatnya jika pelaksana tepat memilih tokoh masyarakat yang mempunyai peran dan status yang tinggi

- 3) Telah memperkuat tesis Moran (1983), "*adaptation is never perfect because environments are always changing, and populations must constantly read just to the new environmental conditions*" (adaptasi tidak akan pernah sempurna, karena lingkungan selalu berubah-ubah, dan manusia harus selalu tetap untuk mengikutinya menuju kepada kondisi perubahan lingkungan yang barunya). Hasil penelitian mendapatkan gambaran bahwa adaptasi budaya terhadap suatu program akan selalu terjadi hingga datang program baru menggantikannya, melalui interaksi dan struktur sosial yang baru pula.
- 4) Telah memperkuat tesis Weber (Jones, 2003; Saifuddin, 2009), tentang tipe tindakan, yaitu ada 4 (empat) tipe tindakan, meliputi: a) Tindakan tradisional; b) Tindakan afektif; c) Tindakan berorientasi nilai atau penggunaan rasionalitas nilai; d) Tindakan berorientasi tujuan atau penggunaan rasionalitas instrumental. Hasil penelitian menemukan bahwa memang ternyata benar ada tipe tindakan yang berorientasi nilai dan ada pula tindakan yang berorientasi tujuan, yang terlihat dari hasil interpretasi mereka terhadap program hutan rakyat.
- 5) Telah mempertanyakan kebenaran hasil pernyataan kajian tentang ketidak-setaraan pendidikan, dengan menggunakan analisis teori struktural (fakta sosial), yang secara eksplisit menyimpulkan bahwa pencapaian dalam pendidikan sangat kuat kaitannya dengan keanggotaan kelas sosial, gender, dan asal-usul etnik. Fenomena di Desa Malilingin kesimpulan ini belum dapat diterima, karena hanya dengan menggunakan teori struktural konsensus yang menekankan pada sosialisasi norma dan nilai yang ideal bagi pencapaian pendidikan belum dapat menjawab: kenapa dengan bertambahnya pendapatan (—kelas sosial menjadi lebih tinggi—) tidak menjadi bertambah tinggi jenjang pendidikan anak-anaknya? Dengan pisau analisis teori tindakan Weber (definisi sosial), hal ini dapat terjawab, yakni dari makna tindakan masyarakat bahwa ternyata pendidikan itu menurut mereka sebenarnya hanya untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, jika pekerjaan sudah tersedia dan mencukupi di desa mereka, untuk apa menempuh pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Sehingga secara eksplisit didapatkan kesimpulan bahwa kecukupan dana tidak mempengaruhi masyarakat Desa Malilingin untuk menyekolahkan anak-anak mereka kejenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- 6) Telah memperkuat dan menambahkan pokok pikiran Mead dalam tulisannya tentang *Mind, Self and Society*. Hasil penelitian ini dapat dibuktikan keberadaan dari *Mind* (akal budi) yang menginterpretasikan program hutan rakyat dari pelaksana

- program, *Self* (diri - tervisual dalam tubuh) yang mengikuti dengan aktif kegiatan yang dilaksanakan dalam program hutan rakyat, dan *Society* (masyarakat), yang tervisualisasikan dalam kelompok tani hutan rakyat. Hal ini telah terjadi pada tokoh masyarakat, anggota kelompok tani dan anggota masyarakat desa. Selain itu, ternyata telah dibuktikan keberadaan *Q (qalbu)* yang telah berperan mempengaruhi tahapan tindakan, khususnya tahapan dorongan hati (*impuls*), sehingga unsur *Q (qalbu)* perlu ditambahkan untuk menyempurnakan pemikiran Mead tentang *Mind, Self and Society* dihubungkan dengan tahapan tindakan.
- 7) Telah menghasilkan konsep tentang "aktor sempurna" berdasarkan pendekatan tindakan Weber: "Jika aktor bertindak berdasarkan tindakan tradisional, tindakan afektif, dan atau tindakan berorientasi nilai, maka aktor tersebut berada di bawah pengaruh budaya. Namun jika aktor bertindak berdasarkan tindakan berorientasi tujuan (tindakan instrumental), maka aktor tersebut menjadi dirinya sendiri. Aktor menjadi diri sendiri yang sempurna jika memadukan tindakan berorientasi nilai dengan tindakan berorientasi tujuan.
 - 8) Telah menolak kelemahan dan kritik sebagian pakar bahwa teori interaksi simbolik adalah teori yang terlalu agung (*grand*), konsep-konsepnya longgar, samar dan membingungkan, sehingga tidak dapat memberikan basis bagi teori dan penelitian. Hasil penelitian membuktikan bahwa pemilihan analisis dengan teori interaksi simbolik Mead dalam mengkaji adaptasi budaya masyarakat merupakan hal yang tepat, dan telah memperkuat asumsi bahwa untuk sosiologi, penggunaan pendekatan perspektif definisi sosial (interpretif) dapat menggali lebih dalam pemahaman kita terhadap tindakan orang atau kelompok masyarakat terhadap sesuatu yang baru.

B. Implikasi Praktis

Beberapa hasil kajian tentang pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan, seperti Program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) yang dilaksanakan oleh pemegang HPH di luar Jawa, Program Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) yang dilaksanakan oleh HPH bekerjasama dengan masyarakat, ataupun program Hutan Rakyat telah lama dikembangkan, namun belum ada bukti empiris mereka berhasil, jikapun dinilai berhasil, hanya dalam jangka pendek saja. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh bukti bahwa ternyata program hutan rakyat yang dikembangkan oleh pemerintah di dua desa penelitian telah berhasil, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Beberapa implikasi praktis yang telah dihasilkan dari penelitian ini untuk pengembangan program hutan rakyat kedepan, sebagai bahan pertimbangan bagi para pegiat hutan rakyat, dan umumnya untuk pegiat pembangunan masyarakat pedesaan hutan, dapat disampaikan sebagai berikut :

- 1) Adaptasi budaya masyarakat sangat tergantung pada kesesuaian pola budaya masyarakat dengan prinsip program hutan rakyat.
- 2) Latar belakang budaya masyarakat merupakan salah satu modal dasar bagi masyarakat untuk melakukan adaptasi budaya.
- 3) Adaptasi budaya didorong oleh adanya *early adopter*, kelembagaan negara, dan lembaga pendukung program hutan rakyat.
- 4) Pola kerjasama *baarian*, *bubuhan* dan *gugur gunung* mampu meningkatkan solidaritas negara dalam pengelolaan hutan rakyat, karena dasar budaya agama Islam dan budaya Jawa yang mengajarkan sistem nilai budaya kerukunan dan kebersamaan.
- 5) Adaptasi budaya yang tumbuh dalam masyarakat lokal kurang bisa berkembang jika berhadapan dengan hambatan struktural yang berasal dari luar ekosistem mereka.
- 6) Peran lembaga pendukung dan tokoh masyarakat akan mampu mengurangi hambatan struktural, sehingga akan meningkatkan adaptasi budaya masyarakat.

Salah satu usaha untuk mempercepat dan mendorong pengembangan program hutan rakyat, sudah saatnya pemerintah pusat (Departemen Kehutanan) menginisiasi kegiatan hutan rakyat menjadi sebuah "gerakan". Gerakan Hutan Rakyat (GHR) yang membumi merupakan satu keharusan bagi negara Indonesia. Beberapa alasan mengapa hal ini harus segera dilakukan adalah:

- 1) Kebutuhan kayu pertukangan semakin meningkat, sementara dari hutan alam sudah tidak memadai lagi (menurut Winarno, 2006, secara normatif kebutuhan kayu pertukangan 21,79 juta m³/tahun, sedangkan supply kayu dari hutan alam hanya 10,73 juta m³/tahun).
- 2) Hutan rakyat akan memberikan peluang usaha dan pekerjaan bagi masyarakat pedesaan
- 3) Hutan rakyat dapat menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pembangunan di daerah
- 4) Masih banyaknya lahan negara yang tidak terurus, maka melalui Gerakan Hutan Rakyat (GHR), dengan pola kerjasama "hak kelola lahan" dengan "kelompok masyarakat" di lahan negara akan mempercepat penghijauan lahan dan hutan, dan hasilnya akan mendukung pengurangan emisi dunia.

C. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu, beberapa kesimpulan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Interpretasi masyarakat terhadap program hutan rakyat, dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) aspek, meliputi :
 - a) Aspek sosial ekonomi, antara lain: menambah penghasilan, memperluas lapangan kerja, meningkatkan produksi atau hasil sadapan, memberikan harapan atau prospek ke depan, menciptakan lapangan kerja di desa, menyediakan kayu untuk bangunan rumah dan dijual.
 - b) Aspek sosial budaya, antara lain: meningkatkan kerjasama, meningkatkan etos kerja masyarakat, mengenal bibit unggul, pengaturan jarak tanam, dan pembakaran lahan dengan izin, merubah peladang berpindah menjadi menetap, masyarakat mandiri, masyarakat menetap di desa, menguatkan sifat kegotong-royongan, meningkatkan derajat keluarga, membuat desa dan masyarakat tentram .
 - c) Aspek ekologi, antara lain: mengurangi ancaman dan serangan hama, mencegah kebakaran hutan dan lahan, memanfaatkan lahan kosong, menghijaukan desa, menyediakan air yang cukup meskipun kemarau, memberi ruang kehidupan bagi makhluk tuhan lainnya.
- 2) Adaptasi budaya selama program hutan rakyat mulai dilaksanakan hingga sekarang telah berjalan dengan baik (*adaptive*), yang dapat dilihat dari perubahan sosial-budaya dan sosial-ekonomi ke arah yang positif. Perubahan penting yang terjadi di Desa Malilingin adalah kebiasaan pertanian dari bertani berladang berpindah menjadi bertani berladang dan menetap, mengenal bibit unggul karet, memahami dan melaksanakan pengaturan jarak tanam karet, dan memahami prinsip-prinsip kebersamaan dan berkelompok. Perubahan penting yang terjadi di Desa Pualam Sari Ray-12 adalah menetap di desa dengan pekerjaan dan hasil yang memadai, masyarakat menjadi mandiri, kekompakan dan ketentraman antar warga semakin tinggi. Bentuk adaptasi yang terjadi adalah adaptasi kultural.
- 3) Hambatan struktural yang dihadapi selama program hutan rakyat secara internal tidak ada. Namun setelah program berakhir, hambatan yang dihadapi muncul, untuk masyarakat Desa Malilingin adalah hambatan pengadaan pupuk yang tidak tersedia lagi secara bebas dan harus dalam kebutuhan kelompok yang terukur. Masyarakat Desa Pualam Sari Ray-12 hambatan yang

dihadapi adalah program pemerintah daerah yang memberikan izin penambangan batu bara di sekitar desa, dan ini menjadi ancaman serius terhadap masyarakat dan lingkungan jika tidak dihadapi dengan bijaksana.

- 4) Kelembagaan lokal (informal) telah mempunyai nilai-nilai kearifan lokal yang sudah ada dan tumbuh bersama dengan nilai-nilai yang ada dikelompok formal, yaitu kelompok tani hutan rakyat. Di Desa Malilingin yang bersifat tradisional memiliki nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang mereka kenal dengan istilah "ba-arian" dan "bubuhan". Sedangkan Desa Pualam Sari Ray-12 yang agak maju, mengenal nilai-nilai kepercayaan dan kebersamaan yang disebut dengan "gugur gunung". Kedua nilai-nilai yang melekat dalam kelompok tani telah mendorong kebersamaan, kekeluargaan, etos kerja dan keswadayaan masyarakat dalam membangun desanya.
- 5) Menyusun proposisi adaptasi budaya masyarakat terhadap program hutan rakyat, yaitu :
 - a) Latar belakang budaya masyarakat merupakan salah satu faktor penting bagi terjadinya proses adaptasi budaya
 - b) Adaptasi budaya masyarakat terhadap program hutan rakyat dipengaruhi oleh adanya *early adopter*, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, dan nilai-nilai lokal yang dipatuhi.
 - c) Kemampuan aktor dalam mengolah *Mind* dan *Q (qalbu)* untuk menjadi sebuah tindakan bermakna yang dijelmakan oleh *Self* dan *Society*, telah mampu menerima dan menjalankan program hutan rakyat hingga mencapai keberhasilan dan berkesinambungan.

D. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi dari hasil penelitian ini yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan oleh para-pihak terkait antara lain :

- 1) Pemerintah Pusat (khususnya Kementerian Kehutanan), kebijakan yang diperlukan :
 - a) Menjadikan program hutan rakyat menjadi sebuah Gerakan Nasional, dengan sistem pendanaan *multi-years* dari perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan tahun ke-2 (minimal 3 tahun)
 - b) Memasukkan aspek sosial budaya dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, penyusunan perencanaan kegiatan dan penilaian (evaluasi) hasil pekerjaan pelaksana kegiatan lapangan.

- c) Pemberian pengakuan terhadap lahan hak adat dan *hak ulayat* yang telah mengembangkan hutan rakyat secara berkesinambungan
 - d) Memberikan kesempatan kepada daerah untuk menentukan jenis tanaman yang dapat dipilih dalam program hutan rakyat sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasaran dan manfaat ekologi
- 2) Pemerintah Kabupaten/ Kota, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan, kebijakan yang diperlukan :
 - a) Membuat Perbup/ Perwali atau Perda tentang pemasaran hasil dari hutan rakyat berupa kayu yang menguntungkan petani
 - b) Membuat Perbup/ Perwali atau Perda tentang pemanfaatan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk mengembangkan hutan rakyat disekitar perusahaan yang bersangkutan
- 3) Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program hutan rakyat dalam skala kelompok masyarakat, maka harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut :
 - a) Pelaksana program harus kritis dan tepat dalam memilih tokoh masyarakat (*key-person*) sebagai *early adopter* (penerima awal) dalam proses sosialisasi awal dalam suatu kelompok masyarakat
 - b) Kegiatan yang ditawarkan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kemudahan dalam mengerjakannya (teknologi yang tepat)
 - c) Untuk penguatan kelompok masyarakat, maka perlu menggali dan memperhatikan nilai-nilai lokal yang telah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, M. Francis. 1982. *Modern Sociological Theory: An Introduction*. Oxford University Press, New Delhi.
- Apriyantono, Anton. 2006. *The Expectation of Agroforestry Education to Prepare Human Resources to the Success of The Revitalization of Agriculture*. Minister of Agriculture the Republik of Indonesia, in *International Seminar and Workshop: The Role of Agroforestry Education in the Revitalization of Agriculture, Fishery and Forestry Program and Third General Meeting of INAFE*, 7-8 February 2006, Committee: UGM, Yogyakarta.
- Aryadi, Mahrus. 2000. *Petunjuk Kerja Teknik Pengembangan Hutan Rakyat*. Kerjasama BRLKT Riam Kanan dan Yayasan BASTARI, Banjarbaru.
- Asfihani, 2007. Potret Kerusakan Lingkungan Kalsel. *Opini*, Banjarmasin Post, halaman 8, tanggal 6 Agustus 2007. Banjarmasin.
- Awang, San Afri; Heri Santoso; Wahyu Tri Widayanti; Yuli Nugroho; Kustomo dan Sapardiono, 2001. *Gurat Hutan Rakyat di Kapur Selatan*. Penerbit Debut Press, Yogyakarta.
- _____, Dhonawan Sepsiaji, Bariatul Himmah, 2002. *Etnoekologi: Manusia di Hutan Rakyat*. Penerbit SINERGI Press, Jogjakarta.
- _____, 2003. *Politik Kehutanan Masyarakat*. Penerbit Center for Critical Social Studies (CCSS) dan Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- _____, 2004. *Dekonstruksi Sosial Forestri: Reposisi Masyarakat dan Keadilan Lingkungan*, Penerbit BIGRAF Publishing, Yogyakarta.
- _____, 2005. *Negara, Masyarakat dan Deforestasi (Konstruksi Sosial atas Pengetahuan dan Perlawanan Petani Terhadap Kebijakan Pemerintah)*. *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- _____, (Editor), 2005a. *Kelangkaan Air: Mitos Sosial, Kiat dan Ekonomi Rakyat. Seri Bunga Rampai Hutan Rakyat*. Penerbit Debut Press, Yogyakarta.
- _____, (Editor), 2005b. *Petani, Ekonomi dan Konservasi: Aspek Penelitian dan Gagasan. Seri Bunga Rampai Hutan Rakyat*. Penerbit Debut Press, Yogyakarta
- _____, dan Nurhadi, 2005. *Konservasi Sumber air Tambakromo: Ketersediaan dan Kelangkaan Air, dalam Awang, San Afri (Editor), 2005: Kelangkaan Air: Mitos Sosial, Kiat dan Ekonomi Rakyat. Seri Bunga Rampai Hutan Rakyat*. Penerbit Debut Press, Yogyakarta.
- _____, 2006. *Sosiologi Pengetahuan Deforestasi: Konstruksi Sosial dan Perlawanan*. Penerbit Debut Press. Jogjakarta.
- Bachtiar, Wardi, 2006. *Sosiologi Klasik: Dari Comte hingga Parsons*. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Basrowi, Muhammad dan Soenyono. 2004a. *Memahami Sosiologi*. Lutfansyah Mediatama, Surabaya
- _____, dan Soenyono, 2004b. *Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Penerbit Yayasan Kampusiana, Surabaya.
- Benyamine, Hamdan Eko (2004). *Pengetahuan dan Teknologi Lokal dalam Pertanian Berladang di Desa Belimbing Lama Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*. Thesis. Unpublished. Pascasarjana UNLAM, PS Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL), Banjarbaru
- Berry, David, 1981. *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Disunting Paulus Wirutomo, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta.
- BP DAS Riam Kanan, 2004. *Data Spasial Lahan Kritis Wilayah Kerja BP DAS Riam Kanan, Kalimantan Selatan, Banjarbaru*.
- BPS, 2008a. *Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Angka*. Kandungan
- _____, 2008b. *Kecamatan Padang Batung dalam Angka*, Kandungan
- _____, 2008c. *Kecamatan Binuang dalam Angka*, Tapin
- Bryman, Alan, 2004. *Social Research Method*. Second Edition. Oxford University Press, Oxford New York.
- Budi, Setia; Darni Subari; Mahrus Aryadi. 2005. *Pelaksanaan Penghijauan di Waduk Riam Kanan Kalimantan Selatan. Laporan Hasil Penelitian untuk FAO*, Kerjasama Fakultas Kehutanan- Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Banjarbaru.
- Cohen, Bruce, 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

- Colfer, Carol J. Pierce, Resosudarmo, Ida Aju Pradnja, 1997. *Peladang Bepindah di Indonesia: Perusak atau Pengelola Hutan? Produksi Padi dan Pemanfaatan Hutan Uma Jalan di Kalimantan Timur*. Penerbit GTZ-SFMP, Samarinda.
- COMMITTEES, 2005. *Community of Interest to Empower Environmental Services for Sustainable Development and Better Quality of Life (Leaflet)*, RUPES Program, Bogor. Internet: rupes@cgjar.org.
- Creswell, J. W., 1994. *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*. Sage Publications. Thousand Oaks - London - New Delhi.
- Departemen Kehutanan, 1999. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Jakarta.
- _____, 2002. *Buku Panduan Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial*. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Departemen Kehutanan, Jakarta.
- _____, 2004a. *Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.04/Menhut-VI/2004, tertanggal 2 Agustus 2004, tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Sumber Dana DAK-DR*. Departemen Kehutanan, Jakarta.
- _____, 2004b. *Data Potensi Hutan Rakyat (Updating Data Hutan Rakyat)*. Dirjen RLPs, Direktorat Bina Usaha Perhutanan Rakyat. Desember 2004, Jakarta.
- _____, 2005a. *Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2005*, Jakarta.
- _____, 2005b. *Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.26/Menhut-III/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak*, Jakarta
- _____, 2006a. *Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (Renstra-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009 (Penyempurnaan)*. Jakarta.
- _____, 2006b. *Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.421/Menhut-II/2006, tentang Fokus-fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan*, Jakarta.
- _____, 2007. *PP No 6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan*. Jakarta.
- Dewi, Indra S. (2009). *Kelestarian Hutan Rakyat untuk Kurangi Dampak Perubahan Iklim*. Internet: lei@indo.net.
- Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, 2004. *Sekilas Pembangunan Hutan Rakyat di Kalimantan Selatan*. Sub Dinas Bina Hutan, Banjarbaru.

- _____. 2007. Laporan Kegiatan Pengembangan Program Hutan Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru.
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2008. Pembangunan Hutan Rakyat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kandangan.
- Djajapertjunda, Sadikin, 2003. *Mengembangkan Hutan Milik di Jawa*. Penerbit Alqaprint, Jatinangor, Jawa Barat.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho, 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Penerbit PT. Elex Media Komputindo, Cetakan Kedua, Jakarta.
- Dwiprabowo, Harivatno dan Hendro Prahasto, 2005. Alokasi Penggunaan Lahan di Daerah Aliran Sungai dan Prospek Hutan Rakyat dalam Awang, San Afri (Editor), 2005. *Petani. Ekonomi dan Konservasi: Aspek Penelitian dan Gagasan. Seri Bunga Rampai Hutan Rakyat*. Penerbit DebutPress, Yogyakarta.
- Garna, Judistira, K., 1996. *Ilmu-ilmu Sosial: Dasar-Konsep-Posisi*. Diterbitkan Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung.
- Ginting, Eliezer, 1994. Transformasi Sosial Petani Peternak Usaha Sapi Perah: Kasus Masyarakat Petani di Kecamatan Jabung. Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. *Proposal Penelitian Disertasi*, Tidak Dipublikasikan.
- Gunawan, Budhi, 2001. Kenaikan Muka Air Laut dan Adaptasi Masyarakat. *Makalah disampaikan dalam seminar " Dampak Timbal Balik Antar pembangunan Kota dan Perumahan di Indonesia dan Lingkungan global, dampak Kenaikan Muka air laut pada kota-kota Pantai di Indonesia"*, yang diselenggarakan Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemukiman Indonesia dan Building Research Centre Institute Jepang, Bandung tanggal 19-20 Maret 2001.
- Haviland, William A., 1981. *Cultural Anthropology*. Holt, Rinehart and Winston, Toronto.
- Hawley, Amos H., 1950. *Human Ecology: A Theory of Community Structure*. The Ronald Press Company, New York.
- Hidir, Achmad, 2004. *Ekologi Manusia dan Perubahan Sosial*. Laporan Penelitian Studi Pustaka. Universitas Brawijaya, Malang. Belum dipublikasikan.
- Hubeis, Aida Vitalaya, 2004. *Pemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan*. Makalah pada acara Sarasehan dan Kongres Lei menuju CBO, Hotel Bumi Karsa, Jakarta, 19-22 Oktober 2004. *Internet: http://www.lei.or.id/indonesia/files/kongres/Aida.pdf*

- Iskandar, Untung. 2001. *Kehutanan Menapak Otonomi Daerah*. Penerbit Debut Press, Yogyakarta.
- Islamy, Irfan (2009). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Jauhari, Kalam (2007). Hutan Rakyat dan Keuntungan Ganda. *Internet: http://lpmekspresi.wordpress.com/2007/04/07/hutan-rakyat-dan-keuntungan-ganda/*
- Jones, PIP, 2003, alih bahasa oleh Saifuddin, Achmad Fedyani, 2009. *Pengantar Teori-teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-Modernisme (Introducing Social Theory)*. Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Kaban, MS, 2006. *The Expectation of Agroforestry Education to Prepare Human Resources to the Success of The Revitalization of Forestry. Minister of Forestry the Republik of Indonesia, in International Seminar and Worlshop: The Role of Agroforestry Education in the Revitalization of Agriculture, Fishery and Forestry Program and Third General Meeting of INAFE, 7-8 February 2006, Committee: UGM, Yogyakarta.*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pusaka, 2003:728, Jakarta
- Kaplan, David and Albert A. Manners, 1999. *Teori Budaya*. Diterjemahkan oleh Landung Simatupang. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Karim, Muhammad Rusli. 1985. (Editor). *Seluk Beluk Perubahan Sosial*. Penerbit Usaha Nasional, Surabaya.
- Karjono, 2007. Diskusi tentang Program Hutan Rakyat di Indonesia. Diskusi dilakukan di Ruang Kerja Kantor Bagian Hutan Rakyat. Dirjen RLPS, Departemen Kehutanan, November 2007, Jakarta.
- Kartasubrata, Junus. 2003, *Social Forestry dan Agroforestry di Asia*. Buku I. Penerbit Lab. Politik Ekonomi dan Sosial Kehutanan, Fakultas Kehutanan, IPB, Bogor.
- Kartodihardjo, Hariadi. 1999. *Masalah Kebijakan Pengelolaan Hutan Alam Produksi*. Penerbit Pustaka Latin. Bogor.
- Kepala Desa Malilingin. 2008. Data Penduduk berdasarkan Catatan Kepala Desa. Kandangan.
- Kepala Desa Pualam Sari. 2008. Data Penduduk berdasarkan Catatan Kepala Desa. Rantau.
- Koentjaraningrat, 1987. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Penerbit PT. Gramedia, Jakarta.

- _____. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Cetakan Kedelapan. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- _____. 1993. *Metode Penelitian Masyarakat*. Edisi Ketiga, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- _____. 2004. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Cetakan Kedua Puluh. Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Lindayati, Rita, 2003. Gagasan dan Kelembagaan dalam Kebijakan Perhutanan Sosial. Hal 43-69. dalam Carol J.P.C dan Ida Ayu Pradnja Resosudarmo, *Ke Mana Harus Melangkah? Masyarakat, Hutan, dan Perumusan Kebijakan di Indonesia*. Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Marfai, Muh Aris, 2005. *Moralitas Lingkungan: Refleksi Kritis atas Krisis Lingkungan Berkelanjutan*. Penerbit Wahana Hijau, Yogyakarta.
- Maunati, Yekti, 2004. *Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. Penerbit LKiS, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moran, Emilio F., 1983. *Human Adaptability: An Introduction to Ecological Anthropology*. Duxbury, Press. North Scituate, Massachusetts
- Moustakas, Clark, 1994. *Phenomenological Research Methods*. Sage Publication, California.
- Mulyana, Deddy, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Penerbit PT. Remaja Rosdaakarya, Bandung.
- Munggoro, Dani Wahyu, 2001. *Hutan Kemasyarakatan: Prinsip, Kriteria dan Indikator*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Nandika, Dodi, 2005. *Hutan bagi Ketahanan Nasional*. Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Nurjaya, I Nyoman. 1998. Kebudayaan dan Adaptasi Manusia terhadap Lingkungan Hidupnya. *Makalah* disampaikan untuk Diklat Instruktur mata Pelajaran Antropologi Tingkat SMU tanggal 13 September s/d 3 Oktober 1998 di PPPG IPS dan PMP IKIP Malang, Malang
- _____. 2001. Magersari: Studi Kasus Pola Hubungan Keija Penduduk Setempat dalam Pengusahaan Hutan. *Disertasi*. Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta. Tidak dipublikasikan.
- _____. 2005. *Magersari: Dinamika Komunitas Petani-Pekerja Hutan dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Penerbit Universitas Negeri Malang, Malang.

- _____. 2006. *Pengelolaan Sumberdaya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Penerbit Universitas Negeri Malang, Malang.
- _____. 2007. Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Antropologi Hukum. *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar* dalam Bidang Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 10 September 2007, Malang.
- Nurrochmat, Dodik Ridho, 2005. *Strategi Pengelolaan Hutan: Upaya Menyelamatkan Rimba yang Tersisa*. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter and Wester, 1990. *The Procedure of Qualitative Research*. Nijemen University, Netherland.
- Poerwanto, Hari. 2000. *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Priyono, F. Dwi Joko, 2001. Manfaat Ekonomi, Pengembangan Teknologi dan Peningkatan Moral: Tiga Pilar Penyangga Kelestarian Hutan (Tinjauan Aspek Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis). *Internet: jh-puhtailcsa a hlas_a_rum*. Dikutip tanggal 17 Januari 2006, Malang.
- Radam, Noerid Haloei, 2001. *Religi Orang Bukit: Suatu Lukisan Struktur dan Fungsi dalam Kehidupan Sosial-Ekonomi*. Penerbit Yayasan Semesta, Yogyakarta.
- Raden, Bestari dan Abdon Nababan, 2003. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat: Antara konsep dan Realitas. *Internet: E:\Pengelolaan_Hutan_Berbasis.html*. Dikutip tanggal 19 Januari 2006, Malang.
- Raho, Bernard, SVD, 2002. *Teori Sosiologi Modern Jilid II*. Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere.
- _____. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Penerbit Prestasi Pustaka, Jakarta
- Rambo, A. Terry, 1981. *Conceptual Approach to Human Ecology: A Sourcebook on Alternative Paradigms for The Study of Human Interactions with the Environment*. EAPI Workshop on Human Ecology Research for Social Scientists, 4 May - 12 June 1981.Hawai.
- Ritzer, George. 1996. *Sociological Theory*. Fourth Edition. The McGraw-Hill Companies, Inc. New york.
- Ritzer, George. 2003. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Saduran oleh Alimandan. Cetakan keempat. Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- Ritzer, George - Douglas J. Goodman, 2003. *Teori Sosiologi Modern*. Edisi Keenam, disadur oleh Alimandan. Cetakan Ketiga 2005, Penerbit Prenada Media, Jakarta.
- Riyanto, Budi. 2004. *Selayang Pandang Pengelolaan Kawasan Hutan di Indonesia*, Penerbit Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor.
- Rosa, Herman; Susan Kandel and Leopoldo Dimas, 2003. *Compensation for Ecosystem Services and Rural Communities: Lessons From the Americas*. PRISMA (Programa Salvadoreno de Investigacion Sobre Desarrollo Y Medio Ambiente. El Salvador, C.A. Internet: prisma@prisma.org.sv.
- Resosudarmo; Ida Aju. 2003. Tinjauan atas Kebijakan Sektor Perakayuan dan Kebijakan Terkait Lainnya: dalam Resosudarmo, Ida Aju Pradnja dan Carol J.Pierce Colfer. 2003. *Ke Mana Harus Melangkah? Masyarakat, Hutan, dan Perumusan Kebijakan di Indonesia*. Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Sahyuti. 2007. Kelembagaan dan Lembaga dalam Pengembangan Agribisnis Pedesaan. Internet: <http://websyahyuti.blogspot.com/2007>
- Salim, Emil. 2003. Hutan dan Masyarakat Indonesia dalam Era Perubahan. Hal 481-49L dalam Carol J.P.C dan Ida Ayu Pradnja Resosudarmo, *Ke Mana Harus Melangkah? Masyarakat, Hutan, dan Perumusan Kebijakan di Indonesia*. Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Sardjono, Mustofa Agung. 2004. *Mosaik Sosiologis Kehutanan: Masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian Sumberdaya*, Penerbit DEBUT Press, Jogjakarta.
- Sarwoko, Adi. 2006. Acara SARAPAN (Saran dan Harapan), *TVRI Nasional*, tanggal 02 Pebruari 2006, jam 06.00-07.00 Wib. Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum (PU), Jakarta.
- Silverman, D. 1993. *Interpreting Qualitative Data. Method for Analysing Talk, Txt and Interaction*. First Pub. SAGE Publications, London
- Soemarwoto, Otto. 1997. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Penerbit Djembatan, Jakarta.
- _____, 2003. Kata Pengantar untuk buku: *Kemana Harus Melangkah? Masyarakat, Hutan, dan Perumusan Kebijakan di Indonesia*. Penyunting Resosudarmo dan Carol. Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Soewardi, Herman. 1976. *Respon Masyarakat Desa terhadap Modernisasi Produksi Pertanian, Terutama Padi: Suatu Kasus yang Terjadi di Jawa Barat*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

- Steiner, Frederick. 2002. *Human Ecology: Following Nature's Lead*. Penerbit Island Press, Washington DC.
- Suhardono, 2003. *Pengelolaan Hutan Rakyat di Wonosobo*. *Jurnal Hutan Rakyat*, Volume V. 1 Tahun 2003, 1-8. Yogyakarta.
- Suharjito, Didik; Nurheni; Dudung Darusman. 2000. *Karakteristik Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*. Pustaka Kehutanan Masyarakat, Bogor.
- Suharto, Edi, 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung.
- Suhendang, Endang. 2004. *Kemelut dalam Pengurusan Hutan: Sejarah Panjang Kesenjangan antara Konsepsi Pemikiran dan Kenyataan*. Penerbit Fakultas Kehutanan IPB, Bogor.
- Sukadana, A. Adi. 1983. *Antropo-ekologi*. Penerbit Airlangga University Press, Surabaya.
- Sumadiya, Broto Hadi. 2005. *Kerusakan Hutan di Indonesia*. Internet: AgroIndonesia.com.
- Supiani. 2006. *Personal Diskusi: Perkembangan Hutan Rakyat di Kalimantan Selatan*. Tanggal 25 Maret 2006 di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru.
- Supriyono, Djoko Purnomo dan Parjanto, 2008. Pendidikan Agroforestri Sebagai Strategi Menghadapi Pemanasan Global. Prosiding Seminar: The Indonesian Network for Agroforestry Education (INAFE), Surakarta, 4 Maret 2008. Diterbitkan oleh Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Susilo, Edi; Darsono Wisadirana; Rachmad Syafa'at; Muhammad Musa; Pudji Purwanti., 2004. Peningkatan Daya Adaptasi Manusia pada Lingkungan yang Sedang Berubah Cepat dan Multidimensional (Kasus pada Masyarakat Nelayan Tradisional). *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial UB Malang*. Ed.Pebruari 2004.
- Suyadnya, I Wayan. 2005. Strategi dan Pola Adaptasi Budaya Masyarakat Bali Aga dalam Menghadapi Pembangunan Pariwisata Berbasis Komunitas (*Community-based Tourism Development*): Studi Kasus pada Masyarakat Bali Aga di desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kabupaten Karangasem, Bali. Universitas Brawijaya, Malang. *Thesis*, tidak dipublikasikan.
- Syarbaini, Syahril. 2009. *Dasar-dasar Sosiologi*. Penerbit Graha Ilmu, Jakarta.
- Sztompka, Piotr, 2004. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Penerbit Prenada, Jakarta.

- Tjokrowinoto, Moeljarto. 2004. *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*. Pustaka Pelajar. Cetakan V, Yogyakarta.
- Tjondronegoro, Sediono. 1984. Gejala Organisasi dan Pembangunan Berencana dalam Masyarakat Pedesaan di Jawa; dalam Koentjaraningrat, 1984, *Masalah-masalah Pembangunan: Bunga Rampai Antropologi Terapan*. Penerbit LP3ES, Jakarta.
- Uluk, Asung; Made Sudana dan Eva Wollenberg. 2001. *Ketergantungan Masyarakat Dayak Terhadap Hutan di Sekitar Taman Nasional Kayan Mentarang*. Penerbit Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor.
- Widayati, Wahyu Tri; Slamet Riyanto dan Bariatul Himmah. 2005. Kajian Potensi Hutan Rakyat dan Analisis Interaksi Masyarakat dengan Sumberdaya Alam di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Hutan Rakyat*. Volume VII No. 2 Tahun 2005. ISSN: 1411-1861. Pustaka Hutan Rakyat, Yogyakarta.
- Widodo, Nurdin dan Suradi, 2008. Penelitian Profil dan Peranan Organisasi Lokal dalam Pembangunan Masyarakat. *Internet: www.depsos.go.id/modules.php*
- Wikipedia. 2009. Hutan Rakyat. *Internet: http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan_rakyat*
- Winarno, Djoko. 2006. *Pengembangan Hutan rakyat dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Mendukung Bahan Baku Industri*. Dirjen RLPS, Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Jakarta.
- Wrangham, Rachel, 2003. Diskursus Kebijakan yang Berubah dan Masyarakat Adat, 1960-1999. hal 24-42. *dalam Carol J.P.C dan Ida Ayu Pradnja Resosudarmo, Ke Mana Harus Melangkah Masyarakat, Hutan, dan Perumusan Kebijakan di Indonesia?* Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Glosarium

- Ba-arian** : Sistem kerjasama dalam mengelola ladang, yaitu dalam hal pembukaan lahan, pembersihan lahan, penanaman, dan pemanenan
- Bahuma** : Berladang atau bertani lahan kering
- BP DAS** : Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
- Bubuhan** : Sistem kekeluargaan dan persaudaraan yang didasari garis keturunan (sedarah) dan atau territorial (sedaerah)
- Degradasi** : Hilangnya fungsi hutan akibat penggundulan hutan sehingga menimbulkan dampak erosi, longsor, banjir dan hilangnya keanekaragaman fauna dan flora.
- Durian** : Jenis tanaman buah-buahan, nama latinnya *Durio zibentinus*
- Early adopter** : Penerima awal, yakni tokoh masyarakat yang memulai ikut terlibat dalam program hutan rakyat.
- Gamal** : Jenis tanaman kayu-kayuan, nama latinnya *Gliricidia maculata*
- Getah** : Hasil lateks dari pohon karet
- Gmelina** : Jenis tanaman kayu-kayuan, nama latinnya *Gmelina arborea*, biasa juga dengan kenal dengan nama Jati Putih

- Gugur gunung** : Sistem kerjasama dalam kelompok tani untuk mendapatkan lahan, yaitu dengan meminjamkan sertifikat kepada anggota kelompok tani sebagai agunan di bank, uangnya dibelikan lahan karet, cicilan dibayar oleh peminjam hingga batas waktu tertentu. Setelah lunas sertifikat dikembalikan kepada pemiliknya tanpa pamrih (penuturan informan kunci).
- Haji Getah** : Istilah yang digunakan masyarakat lokal terhadap seseorang yang menunaikan Ibadah Haji dengan biaya dari penghasilan getah karet.
- Huma** : Ladang atau tempat bercocok tanam padi lahan kering
- Jagung** : Jenis tanaman semusim, nama latinnya *Zea mays*
- Jati** : Jenis tanaman kayu-kayuan, nama latinnya *Tectona grandis*
- Kabun getah** : Kebun karet
- Kacang Tanah** : Jenis tanaman semusim, nama latinnya *Arachis hypogeal* L
- Karet** : Jenis tanaman kayu-kayuan yang menghasilkan getah (*latex*), nama latinnya *Hevea brasiliensis*
- Lahan kosong** : Lahan yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya karena keterbatasan tenaga kerja ataupun biaya.
- Lahan kritis** : Lahan yang keadaan fisiknya sedemikian rupa sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air
- Lahan tidur** : Lahan dalam kawasan hutan yang tidak dikelola secara baik dan dibiarkan tanpa tanaman. Biasanya lahan bekas HPH yang ditinggalkan.
- Lampau** : Rumah kecil sederhana yang dibangun sementara di ladang pada saat penanaman tanaman semusim, seperti padi, kacang tanah dan jagung.
- Mahoni** : Jenis tanaman kayu-kayuan, nama latinnya *Sweitenia mahagoni*
- Mamantat** : Istilah dalam bahasa Banjar Hulu yang berarti menyadap karet
- Nilam** : Jenis tanaman semak, penghasil minyak atsiri, nama latinnya *Pogostemon cablin* Benth

- Padi** : Jenis tanaman semusim, nama latinnya *Oriza sativa*
- Puhun getah** : Pohon karet
- Rambutan** : Jenis tanaman buah-buahan, nama latinnya *Nephelium lappaceum*
- Rumput Jepang** : Jenis tanaman rumput, sebagai penanda kesuburan tanah bagi peladang, nama latinnya *Zoysia japonica*
- Sungkai** : Jenis tanaman kayu-kayuan, jenis tanaman lokal, dengan nama latinnya *Peronema canescens* Jack. Dikenal juga dengan sebutan Kayu Lurus

INDEKS

A

Adaptasi, 37, 38, 40, 41, 42
 Adat, 18, 19, 26
 Agraris, 84
 Air, 3, 175, 176, 183
 Alternatif, 59, 61, 70
 Aman, 21
 Analisis, 82
 Analisis, 9, 185, 187
 Ancaman, 2, 183
 Antropologi, 40,41

B

Banjir, 1, 2, 5
 Beradaptasi, 75
 Berkeadilan, 5
 Berkelanjutan, 16, 18, 19
 Berpindah, 16
 Botani, 7
 Bumi, 37
 Buruh tani, 83

D

Dampak, 2, 196, 132
 Deforestasi, 2
 Degradasi, 2, 58
 Demplot, 6, 131
 Dependabilitas, 72, 73
 Desentralisasi, 20
 Diskusi, 64, 66, 70
 Distribusi, 4, 178

E

Ekologi, 2, 179
 Ekonomi, 3, 4, 7
 Ekosistem, 4, 5
 Eksistensi, 59
 Eksploitasi, 15
 Ekspor, 1, 13, 14
 Erosi, 2, 13, 24
 Esensi, 75, 185

F

Fauna, 13, 14
 Fenomena, 9, 10, 11
 Fenomenologi, 72, 88
 Flora, 13, 14
 Fungsi, 4, 191, 139

G

Gas, 13, 14
 Generalisasi, 66
 Geografi, 5
 Geografis, 84, 119
 Geologi, 80
 Global, 2, 17

H

Habitat, 13
 Hayati, 2, 5, 13
 Hutan, 1, 2, 3, 4, 5

I

Identitas, 91, 76
 Iklim, 32, 33, 82
 Implementasi, 4
 Informan, 86
 Infrastruktur, 1, 14
 Integral, 36, 38
 Interaksi, 7
 Interpretasi, 11

K

Karbohidrat, 13
 Kawasan, 1, 5, 12
 Kayu, 5, 172, 173, 183
 Kearifan, 7, 191
 Kebakaran, 5, 175

Keberadaan, 1, 175, 185
 Keberhasilan, 40, 45
 Kebijakan, 3
 Kebudayaan, 3, 38
 Kehidupan, 7
 Kehutanan, 2, 3, 5, 36
 Kelembagaan, 28
 Kelestarian, 2, 35
 Kelompok, 6, 7, 10
 Kemakmuran, 2, 15
 Kemiringan, 25, 84
 Kepentingan, 32, 191
 Kerusakan, 2, 58
 Kesehatan, 2, 121
 Keseimbangan, 2, 191
 Keteralihan, 73
 Kewenangan, 3, 4
 Komunikasi, 2, 6
 Konformabilitas, 72, 73
 Konservasi, 5, 8
 Koneksi, 58
 Konsisten, 15, 37
 Kontribusi, 8, 14,
 Konvensional, 2
 Koordinasi, 66
 Kreatif, 39, 42
 Kredibilitas, 72, 73
 Krisis, 5, 58
 Kualitas, 7, 172
 Kualitatif, 10, 60

L

Lahan, 5, 75
 Landasan, 57
 Lestari, 5
 Lindung, 27, 28

Lingkungan, 2
 Lokal, 15, 16, 17, 19, 20, 25

M

Manfaat, 5, 27, 28
 Manifest, 4
 Masyarakat, 57, 75, 76
 Memakmurkan, 1,
 Memicu, 2
 Memotivasi, 94
 Menafsirkan, 3
 Menanam, 59
 Meningkatkan, 1
 Menyadap, 85
 Mineral, 7
 Minyak, 34
 Mitigasi, 5

N

Naliditas, 85
 Nasional, 24, 25, 28
 Normatif, 8

O

Observasi, 64
 Orbit, 35,
 Organisme, 60, 75
 Otonomi, 3

P

Paradigma, 4
 Partisipasi, 59, 68
 Partisipatif, 6
 Pedesaan, 58, 76
 Pegunungan, 97, 98, 99

Peladang, 16
 Pelatihan, 95
 Pelayanan, 27
 Pemanasan, 24
 Pemasaran, 2
 Pembangunan, 4, 5
 Pemikiran, 2
 Pendekatan, 22
 Pendukung, 11
 Penelitian, 10, 11, 12
 Pengaruh, 2
 Pengaturan, 13
 Pengelolaan, 1, 2, 3, 4
 Pengembangan, 6, 7
 Pengendalian, 5
 Penghijauan, 22, 23, 24
 Penjelajahan, 25
 Penyangga, 6
 Penyerapan, 1
 Peran, 24, 32
 Perikanan, 2
 Perladangan, 16
 Permasalahan, 3
 Persoalan, 73
 Perspektif, 9, 10, 57
 Pertanian, 2
 Pertumbuhan, 1
 Pikiran, 43, 45, 46
 Pohon, 21, 24
 Politik, 1
 Potensial, 5
 Produktivitas, 5, 6
 Professional, 7
 Program, 75
 Psikologi, 41

R

Rakyat, 5, 6, 7, 80
 Realitas, 11, 63, 65
 Reboisasi, 5
 Reduksi, 4, 65
 Rehabilitasi, 5, 6
 Religi, 17
 Resiko, 20
 Revitalisasi, 5
 Rimbawan, 7, 58
 Rusak, 30

S

Sektor, 5, 13
 Silvikultur, 57
 Sosiologi, 40, 41, 45
 Spesifik, 6
 Subyektif, 45
 Sumber daya, 1, 2, 3, 4

T

Tanah, 3
 Tanaman, 1, 5, 6, 80
 Tani, 22, 25
 Teknologi, 3, 7
 Terasing, 16
 Tradisional, 3
 Transferabilitas, 72
 Transmigran, 90

U

Unggul, 34
 Upaya, 23, 29

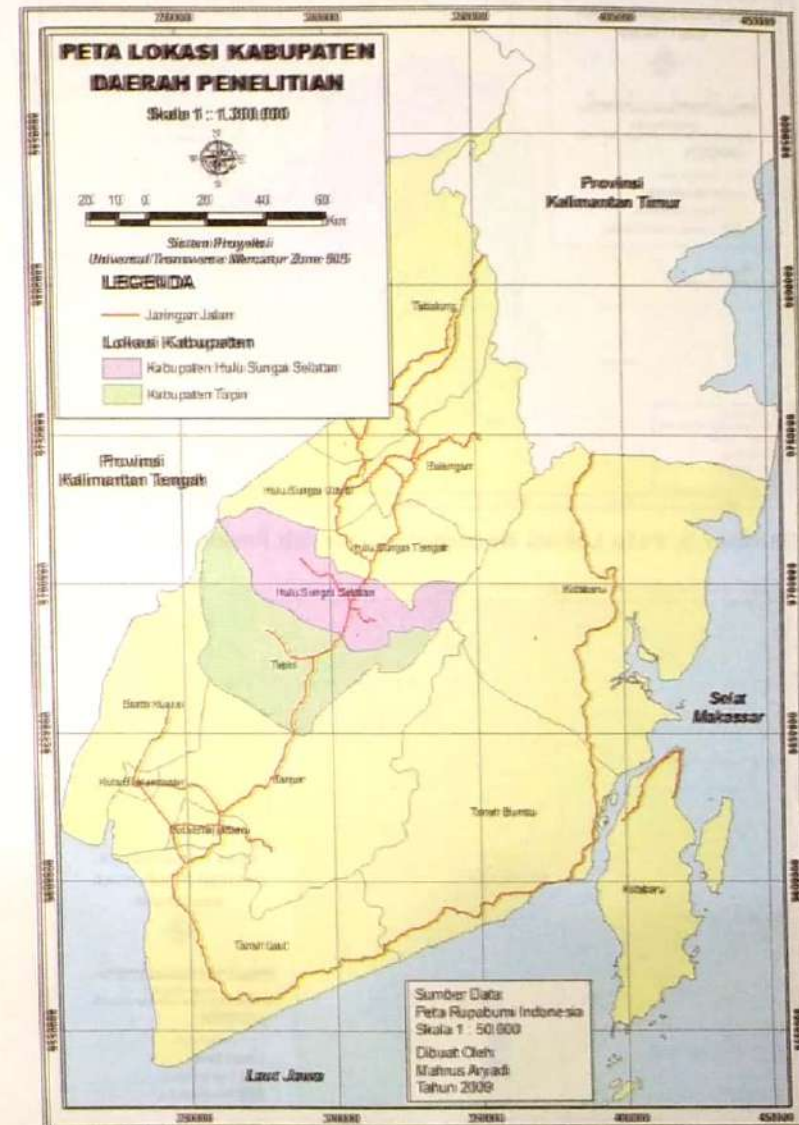
V

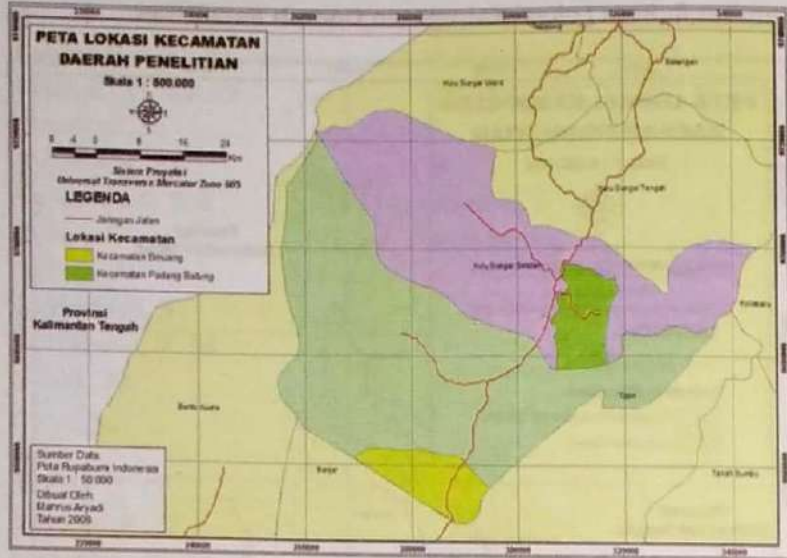
Validitas, 72
 Vegetasi, 117

W

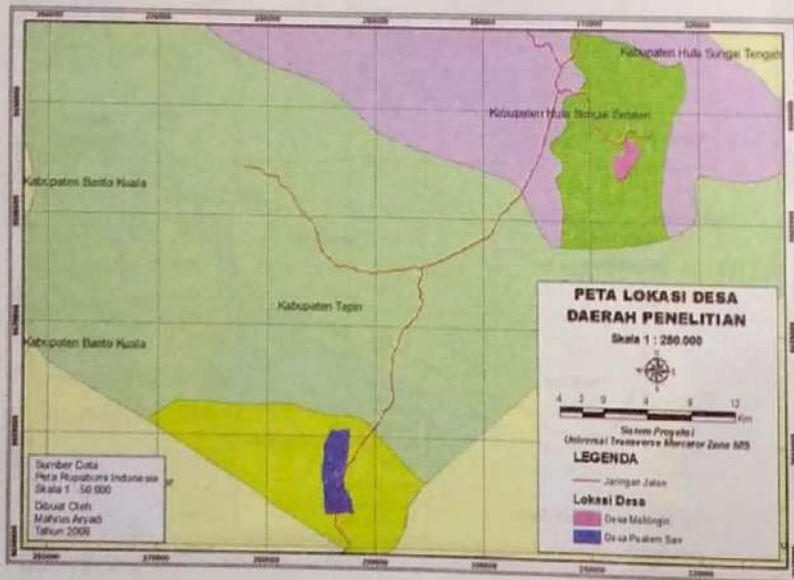
Wacana, 7
 Wawancara, 78

Gambar 4. Peta Lokasi Kabupaten Daerah Penelitian





Gambar 5. Peta Lokasi Kecamatan Daerah Penelitian



Gambar 6. Peta Lokasi Desa Penelitian